

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Pembangunan / Rehabilitasi gedung dan pengadaan sarana dan prasarana sekola menengah pertama (DAK Reguler 2020)	Terlaksananya pembangunan/ rehabilitas gedung dan pengadaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK regular 2020)	%	100	100	11.357.486.000	11.201.581.375
				Bantuan Operasional Sekolah tingkat sekolah dasar (SD)	Tersedianya Operasional sekolah tingkat sekolah dasar (SD)	tri	4	4	55.451.038.645	22.418.552.902
				Bantuan operasional sekolah tingkat sekolah menengah pertama (SMP)	Tersedianya operasional sekolah tingkat sekolah menengah pertama (SMP)	tri	4	4	25.724.558.463	9.080.189.831
				Pendidikan Non Formal					1.051.409.300	1.030.137.300
				Pelaksanaan Ujian UNBK Paket C	Terselenggaranya Ujian UNBK Paket C	%	100	100	36.005.000	19.698.550
				Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	Terlaksananya Penyelenggaraan Paket C	org	240	240	212.675.300	211.840.550
				Pembangunan/rehabilitasi gedung dan pengadaan sarana prasarana Sanggar Kegiatan Belajar (DAK Reguler 2020)	Tersedianya sarana/prasarana SKB (DAK Reguler)	%	100	100	802.729.000	798.598.200
				Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan		%	65		11.371.556.650	11.333.789.250
				Peningkatan Kemampuan guru mengajar		keg	1	1	113.486.650	113.486.650
				Penyediaan Jasa Tenaga Pendidik Non PNS	Terlaksananya Jasa Tenaga Kerja Non PNS	bulan	12	12	11.156.887.900	11.119.254.100
				Penilaian Angka Kredit Tenaga Pendidik	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Tenaga Pendidik	bulan	12	12	101.182.100	101.048.500
				Manajemen Pelayanan Pendidikan					149.549.800	144.573.652
				Penyelenggaraan Akademi Komunitas	Menyelenggarakan Akademi Komunitas	bln	12	12	149.549.800	144.573.652



- **Sasaran Strategis PK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Akses Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	- APK PAUD	45,50	62,30	136,92
		Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	- APK SD	124,22	124,01	99,83
			- APK SMP	102,70	102,39	99,70
			- APM SD	99,11	99,53	100,42
			- APM SMP	90,03	91,38	101,50
		Program Pendidikan Non Formal	- Angka Putus Sekolah	0,08	0,01	12,5
2	Meningkatkan Mutu Pendidikan	Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rata-rata Nilai UN	65,00	-	-
3	Terwujudnya penguatan dan pelestarian adat serta nilai-nilai tradisional		Persentase seni budaya yang dilestarikan	50,00	80,00	160,00
4	Meningkatnya Benda Cagar Yang Dilestarikan		Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	55,00	55,14	100,25



- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.**

1. Meningkatkan Akses Pendidikan, dengan indikator kinerja yaitu:

a) APK PAUD (Target Kinerja : 45,5%) (Realisasi Kinerja : 62,30 %)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi gedung dan pengadaan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Reguler 2020), dengan output kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana di satuan PAUD.
 - (2) Kegiatan Biaya Operasional TK Negeri se- Kabupaten Pesisir Selatan (DAK Non Fisik) dengan output terbantunya penyediaan biaya operasional nonpersonalia bagi peserta didik yang diberikan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara TK Negeri.

b) APK SD (Target Kinerja : 124,22%) (Realisasi Kinerja : 124,01%)

APK SMP (Target Kinerja : 102,70%) (Realisasi Kinerja : 102,39%)

APM SD (Target Kinerja : 99,11%) (Realisasi Kinerja : 99,53%)

APM SMP (Target Kinerja : 90,03%) (Realisasi Kinerja : 91,38%)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Wajib Belajar Sembilan Tahun, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah, dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya Pembangunan Ruang Belajar SMP.



- (2) Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, dengan output Terlaksananya Pembangunan Ruang kelas Sekolah Dasar.
- (3) Kegiatan Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Kompetensi Guru (UKG), dengan output Tersedianya fasilitas komputer untuk UNBK di sekolah
- (4) Kegiatan Penyelenggara Pendidikan Sekolah Dasar, dengan output Terlaksananya Lomba Kompetisis Nasional
- (5) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan output Terlaksananya Ujian PRA UN untuk Kelas IX Tahun 2020
- (6) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, dengan output Terlaksananya Rehailitasi Sedang/Berat Ruang kelas Sekolah Dasar
- (7) Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK Reguler 2020), dengan output Terlaksananya pembangunan/ rehabilitas gedung dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah dasar (DAK regular 2020)
- (8) Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK Afirmasi 2020), dengan output Terlaksannanya pembangunan / Rehabilitas Rumah Dinas Guru sekolah dasar (DAK Afirmasi 2020)
- (9) Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi gedung dan pengadaan sarana dan prasarana sekola menengah pertama (DAK Reguler 2020), dengan output Terlaksananya pembangunan/ rehabilitas gedung dan pengadaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK regular 2020)
- (10)Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah tingkat sekolah dasar (SD), dengan output Tersedianya Operasional sekolah tingkat sekolah dasar (SD)
- (11)Kegiatan Bantuan operasional sekolah tingkat sekolah menengah pertama (SMP), dengan output Tersedianya operasional sekolah tingkat sekolah menengah pertama (SMP)

c) **Angka Putus Sekolah (Target Kinerja : 0,08) (Realisasi Kinerja : 0,01)**

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :



- Program Pendidikan Non Formal, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Pelaksanaan Ujian UNBK Paket C, dengan output kegiatan ini adalah terselenggaranya Ujian UNBK Paket C.
 - (2) Kegiatan Penyelenggaraan Paket C Setara SMA, dengan output terlaksananya Penyelenggaraan Paket C.
 - (3) Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi gedung dan pengadaan sarana prasarana Sanggar Kegiatan Belajar (DAK Reguler 2020) dengan output tersedianya sarana/prasarana SKB (DAK Reguler).
- 2. **Meningkatkan Mutu Pendidikan, dengan indikator kinerja yaitu:**
 - a) **Rata-rata Nilai UN (Target Kinerja : 65%) (Realisasi Kinerja : -)**
 yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
 - Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Peningkatan Kemampuan guru mengajar..
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendidik Non PNS, dengan output tersedianya Jasa Tenaga Kerja Non PNS.
 - Kegiatan Penilaian Angka Kredit Tenaga Pendidik, dengan output Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Tenaga Pendidik.
 - 3. **Terwujudnya penguatan dan pelestarian adat serta nilai-nilai tradisional, dengan indikator kinerja yaitu:**
 - a) **Persentase seni budaya yang dilestarikan (Target Kinerja : 50%) (Realisasi Kinerja : 80%)**
 - b) **Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan (Target Kinerja : 55%) (Realisasi Kinerja : 55,14%)**

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan.

Nb. Permasalahan : -
 Solusi : -
 Tindak lanjut : -
 Rekomendasi :
 DPRD



2. URUSAN : KESEHATAN
PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jumlah Belanja langsung untuk Urusan kesehatan pada tahun 2020 untuk Kegiatan Urusan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 178.623.069.055,00** dengan realisasi **Rp. 161.270.611.277,00** dengan tingkat realisasi mencapai angka **86.75%** dengan rincian sebagai berikut :

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN SATUAN	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kesehatan	Dinas Kesehatan	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;	Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	92/ 100.000 KH	98/ 100.000 KH	1.092.371.250	931.169.221
				Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2. Angka Kematian Bayi (AKB)	21/ 1000 KH	6.9/ 1000 KH	5.032.178.170	4.706.125.051
			2. Peraturan Bupati Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumatera Barat Tahun 2020;	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				24.547.859.012	20.386.173.322
				Program Pengawasan Obat dan Makanan				216.221.500	31.937.550
				Program Perbaikan Gizi Masyarakat				58.737.980	54.710.200
				Program Pengembangan Lingkungan Sehat				395.623.453	392.252.728
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				6.340.180.587	4.208.163.934
				Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya				28.646.528.245	26.607.746.076
				Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah				1.591.296.087	1.538.297.101



				Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit mata					
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular				122.525.730	102.384.650
				Program Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit				5.015.001.000	4.849.701.380
				Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD				26.498.777.612	22.820.653.197
				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Kepuasan Masyarakat	70%	72.14%	1.613.575.196	424.917.250
				Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan				10.314.940.628	9.544.415.638
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia				7.593.000	2.727.700
				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Nagari ber-PHBS	80%	70,0%	84.825.000	84.825.000
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	A		2.301.098.061	2.167.309.444
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				76.100.000	74.667.000
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				8.767.650	8.767.650
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				48.853.000	46.737.950
								114.013.053.161	98.983.682.042



- **Sasaran Strategis PK Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2020**

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	CAPAIAN (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menurunkan Angka Kematian Usia Rentan	Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	92/ 100.000 KH	98/ 100.000 KH	93%	
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2. Angka Kematian Bayi (AKB)	21/ 1000 KH	6.9/ 1000 KH	167%	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat					
		Program Pengawasan Obat dan Makanan					
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat					
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat					
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular					
		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya					



		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit mata					
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular					
		Program Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit					
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD					
3	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Kepuasan Masyarakat	70%	72.14%	103%	
		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan					
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia					
4	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk hidup sehat	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Nagari ber-PHBS	60%	58,7%	98%	
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	A	A*		Belum ada nilai
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					



		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					

- **Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

a. Menurunkan angka kematian usia rentan, dengan indicator kinerja yaitu

1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Peningkatan keselamatan Ibu dan anak, dengan kegiatan sebagai berikut :

(1) Usaha Kesehatan Ibu dan Anak, dengan indicator Persentase K1 dan K4.

(2) Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah dan Usia Sekolah (Prasek dan Usek) dengan indicator Persentase Usia Pendidikan Dasar yang diberikan pelayanan Kesehatan.

(3) Usaha Kesehatan Ibu dan Anak (Jaminan Persalinan) DAK Non Fisik dengan indicator Persentase Usia Pendidikan Dasar yang diberikan pelayanan Kesehatan

- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

(1) Pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK), dengan indicator Jumlah Paket obat dan Perbekalan Kesehatan yang diadakan

(2) Peningkatan Pemerataan obat dan perbekalan Kesehatan, dengan indicator Persentase obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas

(3) Pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK dan Pendamping), dengan indicator Persentase obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas

- Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :



- (1) Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan, dengan indicator Persentase keluarga Kelompok Resiko tinggi (Resti) yang terlayani di Puskesmas dan jaringannya termasuk pada daerah terpencil
 - (2) Peningkatan Kesehatan Masyarakat, dengan indicator Jumlah fasyankes dan jaringannya yang melayani kesehatan masyarakat perorangan, termasuk posko-posko kesehatan dalam rangka hari raya dan even-even daerah.
 - (3) Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Masyarakat (BOK DAK Non Fisik), dengan indicator Terlaksananya pelayanan kesehatan pada masyarakat.
- Program Pengawasan Obat dan Makanan
Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
 - (1) Peningkatan Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya, dengan indicator Jumlah PIRT, Toko Obat dan Apotik yang diawasi dan dibina.
 - (2) Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya (DAK Non Fisik), dengan indicator Persentase Bahan Kesehatan yang diadakan.
 - Program Perbaikan Gizi masyarakat
Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
 - (1) Peningkatan Gizi Masyarakat, dengan indicator Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan.
 - Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
 - (1) Pengkajian dan Pengembangan Lingkungan Sehat, dengan indicator Jumlah pengawasan, pembinaan, Sanitasi dasar, TTU dan TPM
 - (2) Penunjang Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP), dengan indicator Jumlah Rumah Sehat yang dipantau dan dibina.
 - (3) Pengelolaan dan Pengembangan Pemeriksaan Sanitasi Dasar Masyarakat, dengan indicator Jumlah Depot yang diperiksa.
 - (4) Pelaksanaan forum Kecamatan dan Kabupaten Sehat, dengan indicator Jumlah Forum Kabupaten Sehat dan Kelompok Kerja Nagari yang dibina.



- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
 - (1) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Serta Penyakit Endemik / Epidemik, dengan indicator tercegah dan tertanggulangnya penyakit menular pada masyarakat.
 - (2) Peningkatan Imunisasi, dengan indicator Persentase Bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap.
 - (3) Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan wabah, dengan indicator surveillans epidemiologi penyakit menular & penanggulangan wabah di masyarakat.
- Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya
Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
 - (1) Pengadaan Perangkat Sistem Informasi,
 - (2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK dan Pendamping)
 - (3) Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK Penugasan)
 - (4) Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya
 - (5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (Penunjang DAK)
 - (6) Pengadaan alat Kesehatan Puskesmas (DAK)
 - (7) Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kesehatan Puskesmas
 - (8) Pengadaan Alat dan Bahan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (DAK)
 - (9) Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (Pajak Rokok)
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
 - (1) Pengendalian dan Pencegahan Penyakit tidak menular
 - (2) Pemantauan dan Penanggulangan masalah Kesehatan matra
 - (3) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
- Program Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
 - (1) Operasional Pelayanan RSUD Tapan



- Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
(1) Penyediaan Kebutuhan Pelayanan BLUD
- b. Meningkatnya Mutu pelayanan Kesehatan, dengan indicator kinerja yaitu :
Persentase Kepuasan Masyarakat, Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
 - Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
(1) Akreditasi, Sertifikasi, dan Registrasi Kesehatan (Pendamping)
(2) Akreditasi, Sertifikasi, dan Registrasi Kesehatan (DAK Non Fisik)
(3) Pengelolaan dan Pembinaan Pegawai
(4) Upaya Peningkatan Kinerja Petugas dan Institusi Kesehatan
 - Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
(1) Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
(2) Pelayanan Kesehatan (Kapitasi dan Non Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
 - Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
(1) Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
- c. Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk hidup sehat, dengan indicator :
 1. Persentase Nagari Ber PHBS
Indikator ini dicapai dengan melaksanakan program dan kegiatan :
 - Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Dengan Kegiatan :
(1) Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
(2) Pembinaan Peran Serta Masyarakat (PSM)
- d. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan, dengan indikator
 1. Nilai Evaluasi SAKIP OPD
Indikator ini dicapai dengan melaksanakan program dan kegiatan :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- **Permasalahan Dan Solusi**

1. Permasalahan

- a) Dana untuk manajemen lokus tidak ada sehingga tidak ada regulasi untuk penurunan aki akb
- b) berasal dari dana dak, sehingga tidak bisa dirubah, dimana kegiatannya banyak melakukan pertemuan dan melibatkan orang banyak
- c) mobil promkes tidak bisa di datangkan dari Negara Thailand tempat pembuatan mobil tersebut karena adanya kejadian Pandemi / Wabah Covid-19 di negara tersebut
- d) ada pembelian stik kolesterol yang tidak bisa dibeli, dikarenakan expire datenya dekat pada spek yang dipesan
- e) tidak bisa melakukan pertemuan untuk pendampingan akreditasi dan penilaian akreditasi oleh surveyor efek pandemi

2. Solusi

- a) Diberikan dana manajemen lokus, sehingga diperkuat lintas sektor
- b) adanya kebijakan tentang perubahan untuk dana dak, apabila adanya perubahan terhadap penganggaran
- c) dengan memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai tanggal 30 januari 2021 dengan konsekuensi denda 1 permil per hari.
- d) adanya kebijakan tentang perubahan untuk dana dak, apabila adanya perubahan terhadap penganggaran
- e) Menambah Mobilisasi kendaraan dinas untuk Operasional kelapangan



3. URUSAN : KESEHATAN PERANGKAT DAERAH : RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Kebijakan Strategis RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2020 bertujuan Tersedianya pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Tercukupinya sumber daya manusia yang sesuai kompetensinya, Meningkatkan pendapatan RS dengan menyediakan layanan baru dan inovasi bidang kesehatan serta Tercukupinya sarana dan prasarana yang sesuai standar RS.

Adapun Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Penugasan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 125.310.714.865,00-** dengan realisasi **Rp. 115.584.485.532,00-** dengan tingkat realisasi mencapai angka **91,36%** dengan rincian sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kesehatan	RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat/pasien bermasalah yang mendapatkan pelayanan	jumlah	25	142	550.000.000	529.270.193
				Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ Rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase pemenuhan cakupan layanan rumah sakit	persentase	100	93	18.999.444.913	17.666.727.227
				Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	Terselenggaranya pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	persentase	100	94	76.052.508.981	71.667.434.741



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Terselenggaranya pencegahan dan penanggulan penyakit menular	persentase	100	47.17	5.698.599.500	2.687.927.977

- Sasaran Strategis PK Kepala OPD

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Pelayanan yang bermutu dan Profesional kepada Masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ Rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	- % Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS Versi SNARS edisi 1.1	80%	80%	100

- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**
- a. Meningkatkan Pelayanan yang bermutu dan Profesional kepada Masyarakat, **dengan indikator kinerja yaitu:**



1. **Persentase** elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS Versi SNARS edisi 1.1 (**Target Kinerja : 80%) (Realisasi Kinerja : 80 %)**

yang meliputi penilaian akreditasi untuk versi SNARS edisi 1.1 yang terdiri dari 16 Program Kerja dengan hasil penilaian Akreditasi Bintang 4 atau akreditasi Utama dengan beberapa rekomendasi yang harus dilakukan perbaikan terhadap beberapa pokja.

Hasil Penilaian masing-masing Elemen Akreditasi SNARS edisi 1.1 Tahun 2020

No	Nama Program Kerja Akreditasi	Bobot nilai
1.	Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)	86.49%
2.	Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas (ARK)	81.31%
3.	Hak Pasien dan Keluarga (HPK)	71.26%
4.	Asesmen Pasien (AP)	84,05%
5.	Pelayanan Asuhan Pasien (PAP)	82.05%
6.	Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)	92.03%
7.	Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO)	86,18%
8.	Manajemen Komunikasi dan Edukasi (MKE)	78,26%
9.	Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)	91,25%
10.	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	79,41%
11.	Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS)	84,52%
12.	Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)	85,71%
13.	Kompetensi dan Kewenangan Staf (KKS)	83,85%
14.	Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM)	81,82%
15.	Program Nasional	84,21%
16.	Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan Rumah Sakit	88,10%



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 3 (tiga) program kerja akreditasi yang tidak mencapai angka 80%, dan bisa dilakukan remedial kembali setelah 3 (tiga) bulan dikeluarkan sertifikat akreditasi. Akan tetapi, dikarenakan adanya pandemi covid-19 kegiatan remedial tidak dapat dilakukan.

Dengan adanya 3 (tiga) Program kerja akreditasi yang tidak mencapai angka 80%, maka hasil penilaian akreditasi masuk ke kategori UTAMA dimana apabila dari 16 bab yang disurvei ada 13 bab yang mendapat nilai minimal 80% dan 3 bab lainnya tidak ada yang mendapat nilai di bawah 20%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan dan penanggulangan Masalah Kesehatan, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Pasien Miskin/ Bermasalah yang dilayani.
- Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ Rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan (DAK dan Pendamping) dengan output kegiatan ini adalah persentase pengadaan alat kesehatan , sarana, dan prasarana.
 - (2) Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Paru dengan output persentase Pembangunan Ruang rawat Paru
 - (3) Kegiatan Pengadaan Mobil Ambulance dan Peralatan dengan output persentase terlaksananya pengadaan mobil ambulan dan peralatannya
- Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Pelayanan BLUD dengan output persentase Penyediaan kebutuhan Pelayanan BLUD
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan penyediaan Kebutuhan Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Menular dengan output persentase Penyediaan Kebutuhan Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Menular.

Dari Uraian program dan kegiatan di atas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS Versi SNARS edisi 1.1.



- **PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

a. Permasalahan

- 1) Semakin bertambahnya jumlah pasien bermasalah yang membutuhkan anggaran dari tahun ke tahun
- 2) Untuk tahun 2020, yang menjadi permasalahan adalah adanya penggantian KPA sehingga proses tender dan pemesanan barang agak terlambat
- 3) Adanya refocusing anggaran (covid-19) sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan tahun 2020
- 4) anggaran perubahan yang terlambat sehingga ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan
- 5) anggaran Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular ini masuk ke anggaran perubahan. Akan tetapi karena anggaran perubahan yang terlambat sehingga ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan

b. Solusi

- 1) Menambah alokasi anggaran untuk program upaya kesehatan masyarakat
- 2) Akan lebih mempercepat proses pengadaan barang
- 3) Untuk RS tidak bisa dilakukan refocusing anggaran karena berhubungan langsung dengan pelayanan kepada pasien



4. URUSAN : PEKERJAAN UMUM
PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jumlah Belanja langsung untuk Urusan kesehatan pada tahun 2020 untuk Kegiatan Urusan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **144.106.146.277,00** dengan realisasi Rp. **132.255.886.235,00** dengan tingkat realisasi mencapai angka **91,59%** dengan rincian sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran				1.521.249.807	1.390.721.195
1				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	kebutuhan air, listrik dan jasa komunikasi (bln)	Bulan	12	12	495.050.000	456.258.825
2				Penyediaan jasa administrasi keuangan	kebutuhan jasa administrasi keuangan (bln)	Bulan	12	12	669.891.600	609.632.714
3				Penyediaan jasa kebersihan kantor	kebutuhan jasa kebersihan kantor (bln)	Bulan	12	12	151.790.451	125.789.000
4				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan alat tulis kantor (bln)	Bulan	12	12	14.866.208	14.864.200
5				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan untuk kantor (bln)	Bulan	12	12	8.908.631	8.906.000
6				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Komponen penerangan bangunan kantor (bln)	Bulan	12	12	2.433.000	2.433.000
7				Penyediaan makanan dan minuman	makan minum rapat dan tamu (bln)	Bulan	12	12	61.860.000	61.838.500
8				Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan rapat - rapat koordinasi luar daerah (bln)	Bulan	12	12	54.160.400	50.984.178
9				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Pelaksanaan rapat - rapat koordinasi dalam daerah (bln)	Bulan	12	12	31.973.700	31.342.328
10				Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan (bln)	Bulan	12	12	30.315.817	28.672.450
2				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (bln)				227.877.350	204.265.668



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
11				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	Bulan	12	12	21.256.000	21.116.150
12				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan/ operasional kendaraan dinas (bln)	Bulan	12	12	146.501.350	123.366.518
13				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Bulan	12	12	60.120.000	59.783.000
3				PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan Disiplin aparatur	Paket	1	1	37.644.000	37.644.000
14				Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan (paket)	Paket	1	1	37.644.000	37.644.000
4				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase program/ kegiatan sesuai perencanaan (%)				33.425.555	32.080.800
15				Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Monev (dokumen)	Dokumen	1	1	30.534.055	29.189.300
16				Sinkronisasi Program DAK dan APBN	Koordinasi kegiatan DAK dan APBN (bln)	Bulan	12	6	2.891.500	2.891.500
5				PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT / RUMAH SAKIT JIWA / RUMAH SAKIT PARU- PARU / RUMAH SAKIT MATA	Persentase penyelesaian relokasi RSUD					
17				Pembangunan Relokasi RSUD dr. M. Zein Painan /PIP (lanjutan 2015)	Pembangunan Relokasi RSUD (paket)	Paket	1	-	-	-
6				PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase jalan kondisi mantap (baik + sedang)				68.246.377.468	66.357.413.117
18				Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan jalan	Dokumen	8	8	611.120.021	587.597.515
19				Pembangunan/ Peningkatan Jalan	Jumlah ruas jalan yang dibangun (ruas)	Ruas	13	13	2.475.130.836	2.464.809.850
20				Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kecamatan Bayang	Jumlah ruas jalan yang dibangun	Ruas	3	3	473.485.237	473.482.610
21				Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. IV Nagari Bayang Utara	Jumlah ruas jalan yang dibangun	Ruas	1	1	1.097.101.120	1.094.662.590
22				Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kecamatan IV Jurai	Jumlah ruas jalan yang dibangun	Ruas	2	2	355.241.237	354.011.989
23				Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kecamatan Batang Kapas	Jumlah ruas jalan yang dibangun	Ruas	1	1	131.375.237	130.073.310



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
24				Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kecamatan Lengayang	Jumlah ruas jalan yang dibangun	Ruas	-	-	29.903.612	12.671.950
25				Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kecamatan Ranah Pesisir	Jumlah ruas jalan yang dibangun	Ruas	-	-	15.065.163	7.949.550
26				Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kecamatan Pancung Soal	Jumlah ruas jalan yang dibangun	Ruas	-	-	7.894.998	509.850
27				Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Jumlah ruas jalan yang dibangun	Ruas	-	-	32.233.612	16.345.000
28				Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Jumlah ruas jalan yang dibangun	Ruas	-	-	5.991.636	3.091.550
29				Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kecamatan Lunang	Jumlah ruas jalan yang dibangun	Ruas	-	-	20.621.701	6.821.200
30				Penunjang DAK Peningkatan Jalan Kabupaten	Terlaksananya Kegiatan DAK Jalan (bln)	Bulan	12	9	20.868.724	20.868.724
31				Pembangunan Jembatan Rangka	Jumlah jembatan rangka yang dibangun	Unit	1	1	3.307.250.058	3.301.435.150
32				Pembangunan Jembatan Beton	Jumlah jembatan beton yang dibangun	Unit	-	-	4.254.300	4.254.300
33				Pembangunan Jembatan Gantung	Jumlah jembatan gantung yang dibangun	Unit	-	-	2.589.050	2.589.050
34				Pengembangan Program Hibah Jalan Daerah	Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan	Ruas	10	10	27.072.225.000	26.050.191.284
35				Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Reguler)	Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan	Ruas	4	4	30.792.822.000	30.040.108.950
36				Pembangunan/ Peningkatan Jalan (Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Akibat Dampak Covid-19)	Jumlah ruas jalan yang dibangun/ ditingkatkan	Ruas	12	12	1.791.203.926	1.785.938.695
7				PROGRAM SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG	Persentase drainase kondisi baik				1.265.540.014	1.202.808.950
37				Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase/ Gorong-gorong jalan	Panjang drainase dan gorong-gorong yang dibangun dan ditingkatkan (paket)	Paket	3	3	638.415.280	608.866.800
38				Pemeliharaan Rutin Drainase/Gorong-gorong Jalan	Terlaksananya pemeliharaan drainase (bln)	Bulan	12	12	385.180.594	362.509.650
39				Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jalan	drainase yang direhabilitasi (paket)	Paket	1	1	241.944.140	231.432.500



No	Ururan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
8				PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Jalan terpelihara				7.688.341.139,56	7.357.913.024
	40			Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Jembatan yang direhab (unit)	Unit	4	4	1.903.558.194	1.681.813.297
	41			Pemeliharaan Rutin Jalan	Jalan yang dipelihara	Bulan	12	12	3.768.994.989,56	3.673.050.100
	42			Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jembatan yang dipelihara (unit)	Bulan	12	12	1.186.537.956	1.176.645.177
	43			Pemeliharaan Rutin Jalan (Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Akibat Dampak Covid-19/ Dana Insentif Daerah)	Jalan yang dipelihara	Paket	2	2	829.250.000	826.404.450
9				PROGRAM TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN					900.000.000	824.285.000
	44			Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat	Rehab jalan dalam kondisi darurat (%)	Bulan	12	12	450.000.000	374.285.000
	45			Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat	Rehab jembatan dalam kondisi darurat (%)	Bulan	12	12	450.000.000	450.000.000
10				PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATABASE JALAN DAN JEMBATAN					1.391.590.000	1.260.522.880
	46			Penyusunan Sistem Informasi/ Database Jalan dan Jembatan (DAK Reguler)	Database Jembatan (dokumen)	Dokumen	1	1	1.391.590.000	1.260.522.880
	47			Penyusunan Analisa Satuan Belanja Kebinamargaan (ASB)	Tersedianya Dokumen ASB	Dokumen	-	-	-	-
11				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	Persentase kelengkapan sarana prasarana kebinamargaan (%)				208.594.613	203.367.400
	48			Pengadaan Alat - alat berat	Jumlah Pengadaan Alat - alat berat (unit)	Unit	-	-	-	-
	49			Pengadaan Alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Jumlah pengadaan alat ukur dan bahan laboratorium (paket)	Paket	4	4	62.550.000	62.050.000
	50			Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Alat-alat berat yang direhabilitasi	Unit	2	1	16.002.400	15.660.000
	51			Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium	Tersedianya biaya perawatan peralatan (bln)	Bulan	12	4	4.000.000	770.000



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				kebinamargaan						
52				Operasional laboratorium	Operasional laboratorium (bln)	Bulan	12	12	126.042.213	124.887.400
12				PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	Cakupan Air Bersih (%) dan Cakupan Sanitasi				13.591.625.963	4.969.878.650
53				Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum	Sarana dan Prasarana air minum yang dipelihara	Bulan	12	12	38.123.660	34.326.600
54				Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Reguler)	Jumlah bangunan pengelolaan air minum	Paket	1	1	566.133.000	289.310.000
55				Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Penugasan)	Jumlah bangunan pengelolaan air minum	Paket	4	4	1.593.000.000	1.541.666.500
56				Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler)	Jumlah sarana sanitasi yang dibangun	Paket	3	3	934.181.000	808.154.000
57				Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIIG)	Jumlah sarana sanitasi yang dibangun (paket)	Paket	5	0	9.590.259.150	1.453.421.850
58				Penunjang Air Minum (DAK)	Terlaksananya Kegiatan DAK Air Minum (bln)	Bulan	12	12	62.553.253	48.419.550
59				Penunjang Sanitasi (DAK)	Terlaksananya Kegiatan DAK sanitasi (bln)	Bulan	12	12	5.312.900	5.312.900
60				Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	Perencanaan AMPL	Dokumen	2	2	600.000.000	587.204.250
61				Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Afirasi) Luncuran TA. 2019	Jumlah Pembangunan Infrastruktur Air Minum	Paket	1	1	82.208.000	82.208.000
62				Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Reguler) Luncuran TA. 2019	Jumlah Pembangunan Infrastruktur Air Minum	Paket	1	1	119.855.000	119.855.000
13				PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Wilayah Strategis (%)				3.218.596.444	3.092.747.500
63				Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Jumlah Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	Unit	11	11	3.218.596.444	3.092.747.500
14				PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	Cakupan Air Bersih (%) dan Cakupan Sanitasi				3.665.571.310	3.579.180.850
64				Pembangunan Pamsimas Reguler	Jumlah pamsimas yang terbangun (Paket)	Paket	3	3	724.500.000	724.500.000
65				Penunjang Kegiatan Pamsimas	Tersedianya dukungan kegiatan Pamsimas (bln)	Bulan	12	12	52.554.637	42.694.200



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
66				Pembangunan Pamsimas Reguler	Jumlah pamsimas yang terbangun (Paket)	Paket	3	3	724.500.000	724.500.000
15				PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Persentase Kesesuaian Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan dokumen Perencanaan Tata Ruang				101.025.000	100.590.000
67				Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Jumlah dokumen rencana detail tata ruang (RDTR)	Dokumen	1	1	101.025.000	100.590.000
16				PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang				54.983.557	54.092.500
68				Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang	Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang	Dokumen	1	1	53.331.557	52.440.500
69				Pelatihan Aparat Dalam Pemanfaatan Ruang	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Orang	-	-	913.000	913.000
70				Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang	Pelaksanaan Sosialisasi	Orang	-	-	739.000	739.000
17				PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	Persentase bangunan pemerintah yang terbangun				29.143.874.461	29.115.699.703
71				Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Daerah	Jumlah pembangunan gedung pemerintah (Unit)	Unit	3	3	11.362.648.509	11.356.827.009
72				Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Gedung kantor yang di rehab berat (unit)	Unit	1	1	201.097.336	201.095.250
73				Rencana Program dan Sinkronisasi RPI2JM- CIPTA KARYA	Dokumen RPI2JM- CIPTA KARYA (dokumen)	Dokumen	-	-	2.249.200	2.249.200
74				Penyusunan Dokumen HSBGN	Dokumen HSBGN (dokumen)	Dokumen	1	1	8.133.151	5.840.900
75				Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor	Dokumen Perencanaan	Dokumen	6	6	522.893.134	516.091.100
76				Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah	Jumlah sarana dan prasarana ibadah yang dibangun (unit)	Unit	1	1	17.038.970.631	17.025.713.744
77				Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ibadah	Jumlah sarana dan prasarana ibadah yang direhab (unit)	Unit	-	-	7.882.500	7.882.500
18				PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI	PERSENTASE PENGATURAN JASA KONSTRUKSI				7.531.500	7.531.500
78				Pengaturan dan Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi	Terlaksananya proses rekomendasi IUJK (bln)	Bulan	12	6	2.809.900	2.809.900



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
79				Pengawasan dan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Persentase pembinaan pengawasan kompetensi	Bulan	12	6	4.721.600	4.721.600
19				PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penduduk terlayani pengelolaan persampahan (%)				5.410.508.965	5.330.627.200
80				Operasioanal Tempat pembuangan Akhir	Tersedianya Operasioanal TPA (bln)	Bulan	12	12	483.235.000	482.438.000
81				Operasional Kebersihan dan persampahan	Tersedianya Operasional tenaga Kebersihan dan persampahan (bln)	Bulan	12	12	3.649.614.465	3.573.174.000
82				Pemeliharaan Rutin dan Operasional Kendaraan Kebersihan	Terpelihanya kendra kebersihan (bln)	Bulan	12	12	1.181.469.500	1.178.825.200
83				Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir	Jumlah TPA yang dipelihara	Bulan	12	12	96.190.000	96.190.000
20				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air				448.767.971	377.383.605
84				Operasional IPLT	Tersedianya operasional IPLT (bln)	Bulan	12	12	344.257.000	274.165.005
85				Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Jalan Kabupaten	Jumlah Dokumen DELH Jalan	Dokumen	-	-	-	-
86				Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Bangunan Kantor Pemerintahan	Jumlah Dokumen DELH Bangunan Kantor Pemerintahan	Dokumen	1	1	104.510.971	103.218.600
21				PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Persentase taman kota kondisi baik (%)				1.667.032.355	1.657.357.950
87				Pemeliharaan RTH	Pemeliharaan RTH (bln)	Bulan	12	12	344.842.290	343.303.400
88				Operasional Pertamanan	Pemeliharaan taman (bln)	Bulan	12	12	1.322.190.065	1.314.054.550
22				PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA						
89				Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terpenuhinya Informasi Pembangunan	Paket	-	-	-	-
23				PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Terlaksananya promosi wisata (Kegiatan)					
90				Pemeliharaan pentas dan Tenda pariwisata	Terpeliharanya pentas dan Tenda pariwisata (bln)	Bulan	12	3	650.000	650.000



- **SASARAN STRATEGIS PK KEPALA OPD TAHUN 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(7)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan Jembatan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	29,90%	29,55%	98,83%
		Program Saluran Drainase/ Gorong-gorong	2. Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi Baik	45,66%	42,00%	91,98%
		Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				
		Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan				
		Program Pembangunan Sistem Informasi/ Database Jalan dan Jembatan				
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmagaan				
2.	Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1. Persentase Penduduk Berakses Air Minum / Bersih	96,16%	95,59%	99,41%
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	2. Persentase Akses Sanitasi Layak	75,16%	75,27%	100,15%
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				



3.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	1. Persentase Dokumen dan Regulasi Tata Ruang yang Telah di Tetapkan	25,00%	12,50%	50,00%
		Program Pemanfaatan Ruang	2. Persentase Kawasan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau	66,14%	66,14%	100,00%
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				
4.	Meningkatnya Penataan Bangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah Bangunan Pelayanan Publik Berfungsi dengan Baik	20	10	50,00%
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungan				
5.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Penilaian AKIP Dinas PUTR oleh Inspektorat	A		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
		Program Pengaturan Jasa Konstruksi				
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				



- **ANALISIS KESESUAIAN ANTARA KEGIATAN DENGAN TARGET KINERJA PROGRAM YANG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA**

A. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan Jembatan

Dengan indikator kinerja yaitu :

1. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik

(target kinerja 29.90 %) dan (Realisasi Kinerja 29.55 %)

2. Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi Baik

(target kinerja 45.66 %) dan (Realisasi Kinerja 42 %)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan sebagai berikut :

a. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan
2. Pemeliharaan Rutin Jalan
3. Pemeliharaan Rutin Jembatan
4. Pemeliharaan Rutin Jalan (Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Akibat Dampak Covid-19/ Dana Insentif Daerah)

b. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Pembangunan/ Peningkatan Jalan
3. Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. Bayang
4. Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. IV Nagari Bayang Utara



5. Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. IV Jurai
6. Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. Batang Kapas
7. Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. Lengayang
8. Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. Ranah Pesisir
9. Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. Pancung Soal
10. Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. BAB Tapan
11. Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. RAH Tapan
12. Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. Lunang
13. Penunjang DAK Peningkatan Jalan
14. Pembangunan Jembatan Rangka
15. Pembangunan Jembatan Beton
16. Pembangunan Jembatan Gantung
17. Pengembangan Program Hibah Jalan Daerah
18. Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Reguler)
19. Pembangunan/ Peningkatan Jalan (Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19)

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
2. Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat
3. Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
4. Operasional laboratorium



d. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong – gorong

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan/ peningkatan saluran drainase/ gorong-gorong jalan
2. Pemeliharaan Rutin Drainase/ Gorong-gorong Jalan
3. Rehabilitasi Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Jalan

e. Program Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan (DAK Reguler)

f. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Jalan dalam Kondisi Tanggap Darurat
2. Rehabilitasi Jembatan dalam Kondisi Tanggap Darurat

B. Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Dasar

Dengan indikator kinerja yaitu :

1. Persentase Penduduk Berakses Air Minum / Bersih

(target kinerja 96.16 %) dan (Realisasi Kinerja 95.59 %)

2. Persentase Akses Sanitasi Layak

(target kinerja 75.16 %) dan (Realisasi Kinerja 75.27 %)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

dengan kegiatan sebagai berikut :



1. Rehabilitasi/ Pemeliharaan sarana dan prasarana air minum
2. Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Reguler)
3. Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Penugasan)
4. Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler)
5. Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (SAIIG)
6. Penunjang Air Minum (DAK)
7. Penunjang Sanitasi DAK
8. Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)
9. Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Afirmasi) Luncuran TA. 2019
10. Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Reguler) Luncuran TA. 2019

b. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Pamsimas Reguler
2. Penunjang Kegiatan Pamsimas
3. Pengembangan Program Hibah Air Minum

c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Operasional tempat pembuangan akhir
2. Operasional kebersihan dan persampahan
3. Pemeliharaan rutin dan Operasional kendaraan kebersihan
4. Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir



d. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Operasional IPLT
2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Bangunan Kantor Pemerintah

C. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang

Dengan indikator kinerja yaitu :

1. Persentase Dokumen dan Regulasi Tata Ruang yang ditetapkan

(target kinerja 25 %) dan (Realisasi Kinerja 12.5 %)

2. Persentase Kawasan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

(target kinerja 66.14 %) dan (Realisasi Kinerja 66.14 %)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan sebagai berikut :

a. Program Perencanaan Tata Ruang

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

b. Program Pemanfaatan Ruang

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang
2. Pelatihan Aparat dalam Pemanfaatan Ruang
3. Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

c. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

dengan kegiatan sebagai berikut :



1. Pemeliharaan RTH
2. Operasional Pertamanan

D. Meningkatnya Penataan Bangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Dengan indikator kinerja yaitu :

Jumlah Bangunan Pelayanan Publik Berfungsi dengan Baik

(target kinerja 20 unit) dan (Realisasi Kinerja 10 unit)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan sebagai berikut :

a. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Daerah
2. Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
3. Rencana Program dan Sinkronisasi RPI2JM- CIPTA KARYA
4. Penyusunan Dokumen HSBGN
5. Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor
6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah
7. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ibadah

b. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur

E. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dengan indikator kinerja yaitu :



Hasil Penilaian AKIP Dinas PUTR oleh Inspektorat

(Target kinerja : nilai A)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan makanan dan minuman
8. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
10. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor



c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
2. Sinkronisasi Program DAK dan APBN

e. Program Pengaturan Jasa Konstruksi

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengaturan dan Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi
2. Pengawasan dan Pembinaan Kompetensi dan Produktifitas Konstruksi

f. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan pentas dan Tenda pariwisata

Nb.	Permasalahan	:	1.	-
	Solusi	:	1.	-
	Tindak lanjut	:	1.	-
	Rekomendasi DPRD	:		



5. URUSAN : PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PERANGKAT DAERAH : DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jumlah Belanja langsung untuk Urusan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tahun 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **41.149.869.064,00** dengan realisasi Rp. **32.185.580.113,00** dengan tingkat realisasi mencapai angka **74,92%** dengan rincian sebagai berikut :

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pemenuhan pelayanan administrasi kantor				659.720.550	590.771.299
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan air, listrik dan jasa komunikasi	bulan	12		70.800.000	47.440.049
	a. Belanja Barang dan Jasa					70.800.000	47.440.049
	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Ketersediaan layanan administrasi keuangan	bulan	12		310.800.000	291.890.000
	a. Belanja Pegawai					309.177.500	291.890.000
	b. Belanja Barang dan Jasa					1.622.500	-
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Ketersediaan jasa kebersihan kantor	bulan	12		39.989.000	39.422.250
	a. Belanja Pegawai					24.000.000	23.960.000
	b. Belanja Barang dan Jasa					15.989.000	15.462.250
	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Ketersediaan biaya perawatan bagi peralatan kerja	bulan	12		18.900.000	18.550.000
	a. Belanja Barang dan Jasa					18.900.000	18.550.000
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ketersediaan alat tulis	bulan	12		56.268.300	55.998.250
	a. Belanja Barang dan Jasa					56.268.300	55.998.250
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan barang cetak dan penggandaan	bulan	12		25.624.000	20.577.000
	a. Belanja Barang dan Jasa					25.624.000	20.577.000
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /	Ketersediaan komponen instalasi	bulan	12		24.550.000	24.437.000



	Penerangan Bangunan Kantor	listrik/ penerangan					
	a. Belanja Barang dan Jasa					24.550.000	24.437.000
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	bulan	12		8.500.000	8.425.000
	a. Belanja Surat Kabar/Majalah					8.500.000	8.425.000
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Ketersediaan makan dan minum pegawai, rapat dan tamu	bulan	12		35.475.000	25.002.500
	a. Belanja Barang dan Jasa					35.475.000	25.002.500
10 .	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	12		24.100.000	22.435.000
	a. Belanja Barang dan Jasa					24.100.000	22.435.000
11 .	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bulan	12		38.500.000	30.380.000
	a. Belanja Barang dan Jasa					38.500.000	30.380.000
12 .	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	dokumen	2		6.214.250	6.214.250
	a Belanja Barang dan Jasa					6.214.250	6.214.250
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Ketersediaan sarana prasarana penunjang				349.595.250	345.317.683
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	bulan	12		62.002.500	61.922.500
	a. Belanja Pegawai					48.000.000	47.920.000
	b. Belanja Barang dan Jasa					14.002.500	14.002.500
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas opeasional	bulan	12		287.592.750	283.395.183
	a. Belanja Pegawai					42.000.000	42.000.000
	b. Belanja Barang dan Jasa					245.592.750	241.395.183
III.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase aparatur yang profesional (%)				13.500.000	13.500.000
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mendapat / mengikuti pendidikan	orang	3		13.500.000	13.500.000
	a Belanja Barang dan Jasa					13.500.000	13.500.000
IV.	PROGRAM SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG	Menurunnya potensi genangan air				1.698.691.840	1.669.988.500



	1. Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong saluran Pembuangan	Panjang pemeliharaan drainase	m'			169.732.940	161.868.850
	a. Belanja Pegawai					7.200.000	
	b. Belanja Barang dan Jasa					162.532.940	161.868.850
	2. Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong saluran Primer Pembuangan	Panjang pembangunan drainase	m'			1.514.157.000	1.498.417.750
	a. Belanja Pegawai					4.800.000	4.800.000
	b. Belanja Modal					1.509.357.000	1.493.617.750
	3. Penyusunan Sistem Informasi / Database Saluran Drainase / Gorong - Gorong Saluran Primer Pembuangan	Jumlah dokumen Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase	dokumen	1		9.711.900	9.701.900
	a. Belanja Pegawai					2.000.000	2.000.000
	b. Belanja Barang dan Jasa					7.711.900	7.701.900
	4. Penyusunan Sistem Informasi / Database Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Saluran Primer Pembuangan (Pemulihan ekonomi akibat covid 19)	Jumlah dokumen Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase	dokumen	1		5.090.000	-
	a. Belanja Pegawai						-
	b. Belanja Modal					5.090.000	-
V.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	Tersedianya sarana dan prasarana kebinamargaan				166.498.000	164.918.000
	1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Berat	Terpeliharanya alat berat excavator	unit	1		166.498.000	164.918.000
	a. Belanja Pegawai						-
	b. Belanja Barang dan Jasa					166.498.000	164.918.000



VI.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	Meningkatnya kinerja sistim irigasi Persentase Bantaran Sungai dan Pantai Yang Aman			29.742.309.150	21.121.218.038
	1. Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi	m'		2.232.758.910	2.175.474.910
	a. Belanja Pegawai				56.485.000	53.340.000
	b. Belanja Barang dan Jasa				2.176.273.910	2.122.134.910
	2. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Jumlah bendung yang direhabilitasi	unit		2.079.374.080	2.071.504.540
	a. Belanja Modal	Panjang Saluran irigasi yang direhabilitasi	m'		2.079.374.080	2.071.504.540
	3. Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK Penugasan)	Jumlah bendung yang direhabilitasi	unit		6.506.462.000	5.512.923.294
	a. Belanja Modal	Panjang Saluran irigasi yang direhabilitasi	m'		6.506.462.000	5.512.923.294
	4. Penyusunan Sistem Informasi / Database Pengelolaan Aset Irigasi	Jumlah dokumen Informasi / pembaruan database irigasi	dokumen		825.000	825.000
	a. Belanja Pegawai					-
	b. Belanja Barang dan Jasa				825.000	825.000
	5. Komisi Irigasi	Jumlah Rekomendasi Komisi Irigasi	buah		1.950.510	1.950.510
	a. Belanja Barang dan Jasa				1.950.510	1.950.510
	6. Operasional Irigasi	Jumlah pembayaran honor petugas Penjaga Pintu Air dan Penjaga Pintu Bendung	orang		508.000.000	508.000.000
	a. Belanja Pegawai				508.000.000	508.000.000



7.	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	Dampak luas Daerah Irigasi yang dilakukan OP	Daerah Irigasi			541.084.880	520.690.183
	a. Belanja Pegawai					7.200.000	
	b. Belanja Barang dan Jasa					533.884.880	520.690.183
8.	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) (LOAN)	Jumlah bendung yang direhabilitasi	unit			17.249.044.650	9.755.560.137
		Panjang Saluran irigasi yang direhabilitasi	m'				
	a. Belanja Pegawai					59.450.000	56.650.000
	b. Belanja Barang dan Jasa					554.275.000	192.042.498
	c. Belanja Modal					16.635.319.650	9.506.867.639
9.	Perencanaan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Jumlah dokumen perencanaan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi	dokumen			544.469.140	544.391.140
	a. Belanja Pegawai					7.200.000	7.200.000
	b. Belanja Modal					537.269.140	537.191.140
10	Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Penunjang DAK)	Ketersediaan penunjang peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi	bulan			17.800.000	17.259.320
	a. Belanja Pegawai					10.800.000	10.800.000
	b. Belanja Barang dan Jasa					7.000.000	6.459.320
11	Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan Irigasi (Pemulihan ekonomi akibat covid 19)	Jumlah bendung yang direhabilitasi	unit			50.989.980	12.639.000
	a. Belanja Modal	Panjang Saluran irigasi yang direhabilitasi	m'			50.989.980	12.639.000
12	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai (Pemulihan ekonomi akibat covid 19)	Panjang sungai yang dinormalisasi	m'			9.550.000	-
	a. Belanja Pegawai					9.550.000	-
	b. Belanja Barang dan Jasa						-



	c	Belanja Modal					-
VII.		PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA	Meningkatnya konservasi sumber daya air			345.451.230	332.520.180
	1.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Ketersediaan operasional untuk monitoring dan evaluasi	bulan		9.086.500	8.604.360
	a.	Belanja Pegawai					-
	b.	Belanja Barang dan Jasa				9.086.500	8.604.360
	2.	Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Air	Jumlah laporan pemantauan lingkungan	dokumen		28.418.880	27.153.180
	a.	Belanja Pegawai				6.000.000	6.000.000
	b.	Belanja Barang dan Jasa				22.418.880	21.153.180
	3	Penyusunan Dokumen Lingkungan	Jumlah dokumen lingkungan	dokumen		101.630.800	101.630.800
	a.	Belanja Modal				101.630.800	101.630.800
	4	Perencanaan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan embung dan bangunan penampung air lainnya	dokumen		206.315.050	195.131.840
	a.	Belanja Pegawai				16.800.000	16.800.000
	b.	Belanja Modal				189.515.050	178.331.840
VII I.		PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	Berkurangnya daya rusak air			2.082.065.488	2.023.945.050
	1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	Panjang pengamanan bantaran sungai	m'		1.738.692.400	1.692.209.140
	a.	Belanja Pegawai				26.400.000	20.400.000
	b.	Belanja Barang dan Jasa					-



	c	Belanja Modal				1.712.292.400	1.671.809.140
	2	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	Panjang pemeliharaan sungai	m'		331.716.218	330.309.040
	a.	Belanja Pegawai				1.700.000	1.400.000
	b.	Belanja Barang dan Jasa				330.016.218	328.909.040
	3	Penyusunan Sistem Informasi / Database Sungai dan Pantai	Jumlah dokumen Informasi / Pembaruan data base sungai dan pantai	dokumen		1.282.000	1.282.000
	a.	Belanja Pegawai					-
	b.	Belanja Barang dan Jasa				1.282.000	1.282.000
	4	Perencanaan Pengamanan Muara dan Pantai	Jumlah dokumen perencanaan pengamanan muara dan pantai	dokumen		144.870	144.870
	a.	Belanja Modal				144.870	144.870
	5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai (Pemulihan ekonomi akibat covid - 19)	Panjang pengamanan bantaran sungai	m'		10.230.000	-
	a.	Belanja Modal				10.230.000	-
IX.		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				14.057.643	13.386.143
	1	Pembinaan dan Pengelolaan Aset	Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan aset	bulan		14.057.643	13.386.143
	a.	Belanja Barang dan Jasa				14.057.643	13.386.143
	J U M L A H					35.071.889.151	26.275.564.889



- **Sasaran Strategis PK Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Kinerja Sistem Irigasi	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	59,00	59,03	100,05
2.	Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Air	Program Pengembangan, Pengelolaan, Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air	Persentase DAS yang dipulihkan (%)			
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Kapasitas Air yang telah ditampung (m3)	0,00	0,00	0,00
		Program Pengembangan, Pengelolaan, Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air		66,67	92,31	138,46
3.	Berkurangnya Daya Rusak Air	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase Bantaran Sungai dan Pantai yang aman (%)	1,76	1,21	68,75
		Program Pengendalian Banjir				
		Program Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Persentase Penurunan Genangan Air (%)	13,59	14,35	105,59
		Program Pengendalian Banjir				



- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.**

1. **Meningkatkan Kinerja Sistem Irigasi yaitu:**

Adanya peningkatan dalam sistem irigasi meliputi saluran bendung sehingga diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat pemenuhan kebutuhan air bagi petani untuk bercocok tanam. Program yang menunjangnya yaitu program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dengan kegiatan sebagai berikut:

- (1) Kegiatan perencanaan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi dengan output tersusunnya perencanaan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
- (2) Kegiatan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) dengan output luas daerah irigasi kondisi baik.
- (3) Kegiatan Pembaruan Database Irigasi dengan output Tersusunnya database Irigasi.
- (4) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi dengan output luas daerah irigasi kondisi baik.
- (5) Kegiatan Integrated Participatory Development and Management of irrigation Project (IPDMIP) (LOAN) dengan output luas daerah irigasi kondisi baik.
- (6) Kegiatan Operasional Irigasi dengan Output tercapainya tujuan operasional irigasi.
- (7) Kegiatan optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun dengan output jumlah DI yang mendapat operasional pemeliharaan.

2. **Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Air**

Program yang menunjangnya yaitu Program Pengembangan, Pengelolaan, Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air dengan kegiatan sebagai berikut:

- (1) Kegiatan Perencanaan Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya dengan Output tersedianya dokumen DED embung.
- (2) Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan output terlaksananya monitoring pembanguna irigasi, sungai, rawa dan embung.
- (3) Kegiatan pengawasan dan konservasi Sumber Daya Air dengan output terlaksananya pengawasan dan konservasi sumber daya air.
- (4) Kegiatan Dokumen Lingkungan dengan output tersedianya dokumen lingkungan.



3. **Berkurangnya Daya Rusak Air**

Program yang menunjangnya yaitu:

- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Perairan Lainnya dengan kegiatan pelaksanaan normalisasi saluran sungai dengan output panjang normalisasi sungai yang tertangani.
- Program Pengendalian Banjir dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai dengan output panjang bantaran dan tanggul sungai yang tertangani.
 - b. Kegiatan Pembuatan database Sungai, Pantai dan Rawa dengan output tersusunnya database sungai.
 - c. Kegiatan Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali dengan output bersih dan lancarnya sungai/kali.
- Program Saluran Drainase/Gorong-Gorong dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai dengan output panjang bantaran dan tanggul sungai yang tertangani.
 - b. Kegiatan penyusunan sistem Informasi/database saluran drainase/Gorong-Gorong saluran primer pembuangan dengan output tersedianya pembuatan database saluran drainase/gorong-gorong.
 - c. Kegiatan rehabilitasi/Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong saluran pembuangan dengan output tersedianya pembersihan dan pengerukan drainase.



6. URUSAN : PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Penugasan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 24.560.858.803,00** dengan realisasi **Rp. 20.301.378.543,00** dengan tingkat realisasi mencapai angka **80,79%** dengan rincian sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Perumahan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 2. Peraturan Bupati Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumatera Barat Tahun 2020;						
	1			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					889.869.695	796.109.886
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					88.00.000	74.337.159
				Penyediaan jasa administrasi keuangan					283.508.052	256.07.500
				Penyediaan jasa kebersihan kantor					65.318.600	65.315.300
				Penyediaan Jasa perbaikan Peralata Kerja					9.900.000	9.900.000
				Penyediaan Alat Tulis Kantor					38.271.543	38.256.700
				Penyediaan barang cetakan dan					29.760.500	26.751.750



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				penggandaan						
				Penyediaan komponen instalasi					6.543.900	6.543.700
				listrik/penerangan bangunan kantor						
				Penyediaan makanan dan minuman					8.225.000	4.844.000
				Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah					152.558.400	119.198.102
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah					39.400.000	31.424.150
				Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor					132.300.000	132.300.000
				Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan					35.183.700	30.731.525
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					161.231.140	151.968.491
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor					6.561.500	6.561.500
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor					25.000.000	24.993.750
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional					115.749.640	106.495.616
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor					13.920.000	13.917.625
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur					2.960.000	2.960.000
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya					2.960.000	2.960.000



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan					25.875.120	25.289.500
				Monitoring Evaluasi dan Pelaporan					25.139.620	24.554.000
				Sinkronisasi Program RPIJM Cipta Karya					735.500	735.500
				Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah Layak Huni	-	0.2433	0.2461	5.596.986.020	5.484.979.777
				Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dan					254.946.150	252.976.150
				Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni						
				Pengelolaan PSU Perumahan dan MBR					1.959.982.653	1.919.360.050
				Pengelolaan Pembangunan Rumah Khusus dan Rumah Susun					31.625.757	19.774.877
				Penunjang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya					202.954.450	174.866.700
				Penunjang DAK Perumahan					46.355.000	36.153.350
				Pengendalian Bidang Perumahan					12.157.060	12.157.000
				Perencanaan Bidang Perumahan					8.630.950	8.630.950
				DAK Perumahan					3.080.334.000	3.061.060.700
				Program Lingkungan sehat Perumahan					3.147.623.790	3.126.160.900
				Pengelolaan Air Limbah Setempat					3.147.623.790	3.126.160.900
				Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman					411.897.480	401.843.500



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Koordinasi Bidang Kawasan Permukiman					28.471.850	21.742.950
				Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Permukiman					190.111.850	190.111.850
				Penunjang Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman					39.356.130	36.031.050
				Penyusunan DED Kawasan Permukiman					153.957.650	153.957.650
				(3) URUSAN PEKERJAAN UMUM					5.748.938.190	5.707.427.950
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan					1.325.901.349	1.315.786.700
				Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan					1.325.901.349	1.315.786.700
				Program Saluran Drainase/Gorong-Gorong					4.215.255.561	4.185.084.600
				Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Lingkungan					4.215.255.561	4.185.084.600
				Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh					207.781.280	206.556.650
				Pembangunan Jalan Minapolitan					207.781.280	206.556.650
				(10) URUSAN PERTANAHAN	Jumlah Luas Lahan Yang Bersertifikat	%	57 %	60,873 %	5.685.483.514	1.810.540.917
				Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan					5.626.412.314	1.782.372.567



No	Ururan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Pemanfaatan Tanah						
				Fasilitasi Pengadaan Tanah					42.053.300	24.776.700
				Perencanaan Pengadaan Tanah					63.066.530	3.258.700
				Persiapan Pengadaan Tanah					106.093.752	34.544.600
				Pelaksanaan Pengadaan Tanah					5.021.738.750	1.534.562.457
				Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah					173.130.000	65.557.710
				Inventarisasi Tanah Pemerintah Daerah					44.375.000	30.115.400
				Percepatan Pelaksanaan TORA					54.290.000	12.092.900
				Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah					33.675.000	
				Sosialisasi Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum					87.989.982	77.464.100
				Program Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan					58.073.500	27.170.650
				Fasilitasi Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan					58.073.500	27.170.650
				Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan					997.700	997.700
				Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang handal					997.700	997.700
				Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni	-	96,82	96,8094	6.160.835.580	6.119.271.450



- Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2		3	4	5	6
1.	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Pengembangan Perumahan	Rasio rumah layak huni	0,2233	0,2461	110,210 %
		Lingkungan sehat perumahan				
2.	Meningkatnya kawasan permukiman layak huni dan berkelanjutan	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rasio permukiman layak huni	96,82	96,8094	99,989%
		Saluran Drainase/Gorong-Gorong				
		Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman				
3.	Terwujudnya kepastian hukum pemilikan tanah di Kab. Pesisir Selatan	Penataan Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase luas lahan yang bersertifikat	57%	60.873%	106,794%
		Penyelesaian konflik-konflik pertanahan				
		Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan				



- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

- **Meningkatkan Ketersediaan Rumah Layak Huni, dengan indikator kinerja yaitu:**

1 Rasio Rumah Layak Huni (Target Kinerja : 0.2233 (Realisasi Kinerja : 0.2461)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pengembangan Perumahan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dengan output kegiatan ini Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhab.
 - 2) Kegiatan Pengelolaan PSU Perumahan dan MBR dengan output Jumlah PSU Yang dikelola/dibangun dan Jumlah Sambungan Listrik yang dipasang untuk Masyarakat Berpenghasilan rendah.
 - 3) Kegiatan Pengelolaan Pembangunan rumah Khusus dan Rumah Susun dengan output terkelolanya rumah susun dan rumah khusus
 - 4) Kegiatan Penunjang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dengan output jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi dari dana APBN
 - 5) Kegiatan Penunjang DAK dengan Output penunjang atau operasional kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni dari dana DAK
 - 6) Kegiatan Pengendalian Bidang perumahan dengan output evaluasi dan monitoring kegiatan dibidang perumahan
 - 7) Kegiatan Perencanaan Bidang perumahan dengan ouput perencanaan dan validasi dan updating data perumahan.
 - 8) DAK Perumahan dengan output jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi dari dana DAK
- Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Setempat dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Air Limbah Setempat/Domestik yang dibangun

b. Meningkatnya Kawasan Permukiman Layak Huni dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja yaitu

1. Rasio Permukiman Layak Huni (Target Kinerja : 96,82 %) (Realisasi Kinerja : 96.8094%)



yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pembangunan Jalan dan jembatan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan dengan output kegiatan Panjang jalan lingkungan yang dibangun/ditingkatkan.
- Program Saluran Drainase/gorong gorong dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong Gorong Lingkungan dengan output kegiatan Panjang Saluran Drainase yang dibangun/ditingkatkan
- Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan kegiatan
 - a) Pembangunan Jalan Minapolitan dengan output kegiatan Panjang jalan yang dibangun
- Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dengan kegiatan :
 - a) Koordinasi Bidang Kawasan Permukiman dengan output kegiatan terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait bidang Kawasan permukiman
 - b) Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Permukiman dengan Output kegiatan Jumlah Dokumen Lingkungan yang disusun
 - c) Penunjang Pemanfaatan dan pengendalian Kawasan Permukiman dengan output kegiatan jumlah kegiatan yang dievaluasi pada bidang Kawasan permukiman.
 - d) Penyusuna DED Kawasan Permukiman dengan output kegiatan jumlah DED Kawasan Permukiman yang disusun

c. Terwujudnya kepastian hukum pemilikan tanah di Kab. Pesisir Selatan, dengan indikator kinerja yaitu

1. Persentase luas lahan yang bersertifikat (Target Kinerja : 57 %) (Realisasi Kinerja : 60,873%)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :



- Program Pentaan, Penguasaan, Pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Fasilitas Pengadaan Tanah dengan output kegiatan Jumlah Pengadaan tanah yang difasilitasi.
 - b) Perencanaan Pengadaan Tanah dengan output kegiatan jumlah pengadaan tanah yang direncanakan
 - c) Persiapan Pengadaan Tanah dengan output kegiatan jumlah pengadaan tanah yang disiapkan
 - d) Pelaksanaan Pengadaan Tanah dengan output kegiatan Jumlah Objek Pengadaan Tanah
 - e) Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah dengan objek kegiatan jumlah Tanah Hak Milik Pemda yang sudah besertifikat
 - f) Inventarisasi Tanah Pemerintah Daerah dengan Output Kegiatan jumlah Objek Tanah Pemerintah Daerah yang sudah diinventarisir
 - g) Percepatan Pelaksanaan TORA dengan Output Kegiatan Jumlah Pendampingan Tanah Objek reforma Agraria dengan BPN
 - h) Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah dengan output kegiatan jumlah objek pengadaan tanah yang diserahkan.
 - i) Sosialisasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum dengan output memberikan sosialisasi kepada organisasi perangkat daerah yang akan mengadakan kegiatan pengadaan tanah
- Program Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Fasilitas Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan dengan output kegiatan Jumlah Konflik Pertanahan yang diselesaikan
- Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang handal dengan output kegiatan Jumlah Sistem Informasi yang disusun

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

- **Permasalahan dan Solusi**

1. Permasalahan

- a) Penerima Bantuan RTLH setelah diberibantuan RTLH rumah belum ditempati penghuni
- b) Masalah Pembebasan Lahan/ganti kerugian tanah belum bisa dilaksanakan secara maksimal disebabkan pemilik lahan tidak menyetujui harga yang ditetapkan oleh Afraisal



- c) Penganggaran Kegiatan Belum difokuskan untuk penanganan Kawasan kumuh, tapi lebih untuk peningkatan kualitas Kawasan permukiman

2. Solusi

- a) Penerima bantuan membuat surat pernyataan bahwa setelah rumah direhabilitasi akan langsung ditempati
- b) Melakukan pendekatan secara intensif kepada pemilik lahan
- c) Memfokuskan anggaran untuk pelaksanaan percepatan penanganan Kawasan permukiman kumuh dan aktif melakukan koordinasi ke Provinsi dan Pusat untuk penanganan kumuh diatas 10 Ha



7. URUSAN : TRANTIBUM LINMAS
PERANGKAT DAERAH : SATPOL PP DAN DAMKAR

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada Pasal 4 yaitu menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Adapun Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Penugasan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 9.690.292.686,00-** dengan realisasi **Rp. 8.560.935.499,00-** dengan tingkat realisasi mencapai angka **81,94%** dengan rincian sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 2. Peraturan Bupati Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumatera Barat Tahun 2020;	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					416.933.977,00	399.044.010,00
				Belanja Tidak Langsung					4.211.083.313,00	4.071.022.962,00
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik					57.600.000,00	52.890.902,00
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan					89.000.000,00	89.000.000,00
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					67.662.400,00	67.366.500,00
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja					8.500.000,00	5.465.000,00
				Penyediaan Alat Tulis Kantor					71.086.577,00	70.839.875,00
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					30.375.000,00	30.289.000,00
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor					6.485.000,00	6.445.000,00
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					4.680.000,00	4.680.000,-



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Penyediaan Makanan dan Minuman					11.610.000,00	11.535.000,00
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah					39.920.000,00	35.897.733,00
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah					17.525.000,00	14.550.000,00
				Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan					12.490.000,00	7.300.000,00
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					343.056.250,00	275.230.550,00
				Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas / operasional					343.056.250,00	275.230.550,00
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					50.139.000,00	37.589.600,00
				Penertiban Pelanggaran Hukum Terhadap Ketentuan Pelanggaran Perda					50.139.000,00	37.589.600,00
				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan					582.853.080,00	403.631.100,00
				Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum					406.973.080,00	402.590.650,00
				Pembinaan dan Pembekalan Aparat linmas Nagari dan Kecamatan					175.880.000,00	1.040.450,00
				Program Pemeliharaan kantrantimas dan pencegahan tindak kriminal					1.011.069.500,00	988.768.800,00
				Pengendalian Jasa Pengamanan kantor dan Objek Vital dan Aset Negara					939.885.000,00	932.605.000,00
				Operasi Pengamanan Ivent-Ivent Tertentu					13.394.500,00	8.794.500,00



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Forum Penegakan Perda					57.790.000,00	47.369.300,00
				Program Penanganan Tanggap Darurat					2.107.375.000,00	2.100.715.177,00
				Operasional Pemadam Kebakaran					2.107.375.000,00	2.100.715.177,00
				Program Kesiapsiagaan					967.782.568,00	284.933.300,00
				Operasi Yustisi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 Pesisir Selatan (Penanganan Covid-19 dari DID Tambahan)					967.782.568,00	284.933.300,00

- Sasaran Strategis PK Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penegakan perda dan Perkada	1. Program Peningkatan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak kriminal	Presentase Penurunan gangguan trantibum	70%	92	95%
2.	Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	Program Penanganan Tanggap Darurat	Presentase Pencagaham dam penyelamatan kebakaran	65%	63%	97%
Total						90%



1. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

a. Penegakan perda dan Perkada dengan indikator adalah sebagai berikut :

1). Presentase Penurunan gangguan trantibum yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a). Program Peningkatan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penertiban Pelanggaran Hukum Terhadap Ketentuan Pelanggaran Perda
- Pengendalian Ketentraman dan ketertiban Umum
- Pembinaan dan Pembekalan Aparat linmas Nagari dan Kecamatan

b). Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pengendalian Jasa Pengamanan kantor, objek vital dan Aset Negara
- Operasional Pengamanan Ivent-ivent Tertentu
- Forum Penegakan Perda

b. Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran dengan indikator adalah sebagai berikut :

1). Presentase Pencagaham dan penyelamatan kebakaran yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a). Program Penanganam Tanggap Darurat dengan kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Operasional Pemadam Kebakaran

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan.



- PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan

- a) Kurangnya personil Satpolpp dalam pengamanan Perda dan ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak layak
- b) Keterbatasan SDM Personil Pemadam Kebakaran dan Mobil pemadam kebakaran yang tidak dapat mencukupi mengakibatkan lambatnya penanganan bahaya Kebakaran

2. Solusi

- a) Perlunya penambahan personil / anggota satpolpp
- b) Penambaha Sarana dan Prasarana untuk patroli
- c) Perlunya penambahan personil pemadam kebakaran serta mobil pemadam kebakaran disetiap kecamatan



8. URUSAN : TRANTIBUM LINMAS
PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020. Total Anggaran APBD Tahun 2020 sebesar **Rp. 4.758.567.833,00**- Capaian Realisasi sebesar **Rp. 4.603.046.296,00**- Capaian Realisasi Keuangan **97,54%** dengan 7 Progam 21 Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						2.092.943.740	2.008.790.505	
		URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI						2.256.476.048	2.182.710.574	
1	1			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.066.294.250	1.037.562.937	
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				42.000.000	35.761.643	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				237.632.640	219.791.500	
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				1.328.550	1.328.550	
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja				4.020.000	3.950.000	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor				11.073.575	11.073.575	
				Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan				16.540.225	16.537.200	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1..219.000	1..219.000	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-				1.200.000	1.200.000	



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				undangan						
				Penyediaan Makanan dan Minuman				5.020.000	4.978.500	
				Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				40.786.187	40.691.187	
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah				12.487.500	12.475.000	
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				107.952.250	85.644.250	
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional				107.952.250	85.644.250	
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN				36.919.850	36.346.500	
				Operasional dan Pemeliharaan Alat-Alat Berat.				36.919.850	36.346.500	
				PROGRAM KESIAPSIAGAAN				1.738.300	1.738.300	
				Jambore Dan Bulan Pengurangan Resiko Bencana				1.738.300	1.738.300	
				PROGRAM PENANGANAN TANGGAP DARURAT				1.470.260.263	1.440.823.250	
				Operasional SAR dan Tim Reaksi Cepat (TRC)				1.144.522.913	1.115.992.600	
				Operasional logistik dan Perlengkapan Gudang Logistik				30.535.000	30.263.150	
				Operasional Posko Piket Satgas SAR				191.950.200	191.345.000	
				Pengendalian Operasional dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten (COVID 19)				103.252.250	103.222.500	
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENANGANAN DAMPAK BENCANA				39.101.350	31.598.750	
				Inventarisasi dan identifikasi kerusakan/kerugian				27.822.047	27.745.000	
				Monitoring dan Evaluasi				11.279.303	10.992.750	



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Kebencanaan						
				PROGRAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA				63.664.050	63.633.300	
				Operasional dan Perawatan PUSDALTIN				63.664.050	63.633.300	

Nb. Permasalahan : 1. -
Solusi : 1. -
Tindak lanjut : 1. -
Rekomendasi DPRD :



9. URUSAN : SOSIAL
PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN

Pemerintah bertekad untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dengan melaksanakan berbagai program/kegiatan bidang sosial dan meningkatkan koordinasi lintas sektor serta meningkatkan kerjasama baik dengan pemerintah pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Adapun Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Penugasan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 4.561.337.035,00-** terealisasi sebesar **Rp. 4.470.339.294,00-** atau 99,13% Rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;							
				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					380.406.889	378.602.335
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					37.840.000	36.394.685
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan					72.515.700	72.515.700
			2. Peraturan Bupati Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumatera Barat Tahun 2020;	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					104.298.538	104.298.500
				Penyediaan Alat Tulis Kantor					22.730.898	22.730.750
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					14.178.249	14.178.000
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					3.499.420	3.499.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-Undang-Undangan					4.500.000	4.320.000



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Penyediaan Makanan dan Minuman					12.600.000	12.600.000
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					85.444.084	85.265.700
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah					22.800.000	22.800.000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					258.590.000	256.562.396
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional					-	-
				Pengadaan Peralatan Gedung kantor					8.300.000	8.300.000
				Pengadaan Mubiller kantor					22.000.000	22.000.000
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor					41.210.000	41.210.000
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.					177.780.000	175.752.396
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor					9.300.000	9.300.000
				Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Tercapainya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS sesuai Standar	Kelompok Penerima Manfaat	21.868	30.421	212.783.950	207.113.850
1				Penunjang Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah Sekretariat, Pendamping Kab dan Pendamping Kec.	unit	1sekr PKH, 47 pendp kec ATK 15 Kec	1sekr PKH, 47 pendp kec ATK 15 Kec	31.348.950	31.348.950
2				Pelayanan Orang Terlantar diperjalanan	Kasus orang terlantar difasilitasi	kasus	4 kasus	4 kasus	4.260.000	4.260.000
3				Pendampingan dan Pembinaan KUBE Fakir Miskin	Jumlah KUBE yang dibina	kelompok	20	20	4.064.000	4.064.000
4				Pengembangan SLRT Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah fasilitator dan supervisor SLRT yang difasilitasi	orang	91 fasilitator dan 15 supervisor	91 fasilitator dan 15 supervisor	7.075.000	7.075.000



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
5				Monitoring Evaluasi dan Kebijakan BPNT	Monitoring, Evaluasi dan Kebijakan Perberasan	kk	21.868	30.421	12.669.050	12.669.050
6				Penanganan Masalah Strategis tentang Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Persentase korban bencana yang di tanggulangi	persen	100	100	47.490.850	47.490.850
7				Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat	Jumlah Penyandang Cacat Berat yang dibina	jiwa	70	83	246.171.850	243.435.450
8				Peningkatan Kualitas LKKS Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah PSKS yang aktif	orang	80	80	52.750.200	52.750.200
9				Peningkatan Sarana dan Sarana Kepahlawanan dan keperintisan	Persentase TMP dan MPN yang dipelihara	persen	100	100	12.544.100	12.544.100
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 2. Peraturan Bupati Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumatera Barat Tahun 2020;	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	persen	55.24	55.24	187.791.515	187.708.550
10				Pembinaan Kelembagaan PUG dan Penyusunan Anggaran Responsif Gender	Jumlah Kegiatan yang menerapkan Anggaran Responsif Gender Jumlah kelembagaan PUG yang aktif	Kegiatan opd	30 30	30 30	22.837.315	22.775.800



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
11				Pemberdayaan Kelembagaan Organisasi Wanita	Jumlah organisasi wanita yang difasilitasi	organisasi	3	3	150.204.200	150.204.200
				Program Perlindungan Anak	Prediket Kabupaten Layak Anak	prediket	-	-	35.441.000	35.441.900
12				Pembinaan Nagari Layak Anak	Jumlah Nagari Layak Anak	nagari	-	-	20.691.000	20.691.000
13				Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah kasus yang difasilitasi	kasus	-	-	14.750.000	14.728.550

- Sasaran Strategis PK Kepala OPD

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Tercapainya Pelayanan Sosial bagi PMKS sesuai standar.	21.868 kk	21.868 kk	100
2	Terwujudnya Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan	Program Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan	Persentase sarana dan prasarana kepahlawanan yang dipelihara	100%	100%	100



	Kesetiakawanan Sosial					
3.	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Perlindungan Anak Program Pengembangan Data/ Informasi	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan	55.24	55.24	100

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

a. Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu:

Indikator : Tercapainya Pelayanan Sosial bagi PMKS sesuai standar. (Target Kinerja : 21.868 kk) (Realisasi Kinerja : 100 %)

Merupakan jumlah pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), terdiri dari bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai, PBI APBD, Program Keluarga Harapan, pemberian alat bantu kursi roda, pemberian bantuan korban bencana alam dan bencana sosial serta pelayanan orang terlantar. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya :
 - 2) Kegiatan Penunjang Operasional Program Keluarga Harapan (PKH).
 - 3) Pelayanan Orang Terlantar di Perjalanan
 - 4) Fasilitasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Kab. Pessel
- Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (4) Kegiatan Penanganan Masalah Strategis tentang Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
 - (5) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Kebijakan BPNT
 - (6) Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan KUBE Fakir Miskin
- Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat



- d) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Penguatan Kelembagaan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten
 - b. Terwujudnya Pemahaman Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

Indikator: Persentase sarana dan prasarana kepahlawanan yang dipelihara (target = 100%, realisasi 100%)
Merupakan jumlah Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan nasional yang dipelihara, terdiri dari dua lokasi yaitu Taman Makam Pahlawan yang berlokasi di Sago dan Makam Pahlawan Nasional yang berlokasi di Bayang dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

 - a) Program Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan dan Keperintisan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Peningkatan Sarana Prasarana Kepahlawanan dan Keperintisan
 - c. Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan

Indikator : Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan (target 55, 24; realisasi 55, 24)
Merupakan komposit keterwakilan perempuan di lembaga pemerintahan, pekerja perempuan dan sumbangan pendapatan perempuan. Indeks Pemberdayaan Gender ini di rilis oleh BPS dalam Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender.

Adapun program yang menunjang pencapaian sasaran strategis ini adalah:

 - a) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Pembinaan Kelembagaan PUG dan Penyusunan Anggaran Responsif Gender
 - (2) Pembinaan Nagari Layak Anak
- Permasalahan dan Solusi
 - a. Permasalahan
 - 1) Masih adanya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran
 - 2) Adanya kelompok KUBE yang beralih usaha
 - 3) Masih adanya data penerima yang tidak valid
 - 4) Keterbatasan logistik bantuan untuk korban bencana
 - 5) Banyaknya penyandang cacat yang membutuhkan bantuan
 - b. Solusi
 - 1) Meningkatkan keakuratan data kesejahteraan sosial secara berkala
 - 2) Pembinaan berkelanjutan terhadap kelompok KUBE



- 3) Verifikasi dan validasi data penerima
- 4) Menambah penyediaan logistik bantuan untuk korban bencana
- 5) Menambah cakupan pemberian bantuan bagi penyandang cacat

B. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN NON PELAYANAN DASAR

- 1. URUSAN : Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian**
PERANGKAT DAERAH : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

Pada tahun anggaran 2020 Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 18.106.827.080 . Berdasarkan anggaran tersebut telah disusun perjanjian kinerja untuk mencapai IKU (Indikator Kinerja) Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian. Sehubungan dengan adanya pandemi Covid 19 sebagian besar anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan difocusing untuk penanganan dampak dari covid 19 ini, termasuk anggaran Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian.

Pada awal April 2020 dilakukan refocusing anggaran sehingga alokasi anggaran untuk Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian **Rp. 9.339.590.087,00** terealisasi sebesar **Rp. 9.015.485.685,00-** atau **96,01%** dengan Rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Koperasi, UMKM	Dinas Koperindag	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	12	600.548.500	549.977.649
				1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya air dan listrik (bln)	Bulan	12	12	174.600.000	146.446.974
				2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	116.200.000	116.200.000



			2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	12	12	180.636.000	176.973.500
				4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	12	12	36.654.200	36.500.450
				5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12	21.585.100	13.973.000
				6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen, Instalasi Listrik/Penerangan	Bulan	12	12	5.564.000	5.563.000
				7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	Bulan	12	12	7.500.000	4.320.000
				8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman rapat dan tamu	Bulan	12	12	24.150.000	21.876.525
				9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terpenuhi biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat ke luar daerah	Bulan	12	12	17.609.200	15.934.200
				10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terpenuhi biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat dalam daerah	Bulan	12	12	16.050.000	12.190.000
				PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terpenuhinya sarana prasarana penunjang bagi aparatur	Bulan	12	12	132.620.000	126.136.800
				1. Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Bulan	12	12	50.000.000	49.650.000
				2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor	Bulan	12	12	72.450.000	66.583.800
				3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung Kantor	Terpeliharanya Kendaraan dinas	Bulan	12	12	10.170.000	9.903.000
				PROG. PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUANGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	Persetase peningkatan UMK	Persen	2,8	2,71	457.365.875	391.323.525



				1. Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi UMKM	jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi KUR	UMKM	50	50	39.536.625	39.536.625
				2. Fasilitas pengembangan usaha kecil menengah	Jumlah UMKM yang tersentuh sosialisasi	UMKM	0	0	471.250	471.250
				3. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (DAK)	Jumlah UMKM dan koperasi yang terbina	UMKM, Koperasi	135	135	417.358.000	351.315.650
				PROG. PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif melaksanakan RAT (%)	Persen	60	68,34	16.908.300	16.908.300
				1. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih	Koperasi	0	0	725.000	725.000
				2. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah koperasi yang dibina dan diawasi	Koperasi	7	7	16.183.300	16.183.300
				PROG. PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Koefesien variasi harga bahan kebutuhan pokok antar waktu	Persen	<9	<9	211.615.100	208.001.837
				1. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Jumlah pengawasan peredaran barang dan jasa	Kecamatan	2	2	5.026.750	5.026.750
				2. Operasionalisasi dan Perlengkapan UPTD Kemetrolagian	Dukungan biaya operasional UPTD	Bulan	12	12	203.357.950	199.744.687
				3. Pemantauan Harga dan Operasi Pasar	Jumlah lokasi pemantauan harga pasar	Kecamatan	4	4	3.230.400	3.230.400
				PROG. PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	12,5		4.253.798.050	4.153.053.900
				1. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah laporan pemantauan ketersediaan bahan pokok	Dokumen	1	1	18.907.250	18.907.250
				2. Pengamanan dan Pengelolaan Pasar	Dukungan biaya operasional pengelolaan pasar	Bulan	12	12	540.538.200	484.958.050



				3	Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah pasar kabupaten yang dibangun	Pasar	4	4	3.620.392.600	3.579.938.600
					Pembangunan Sarana Sanitasi dan Peningkatan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan (Pemulihan dampak ekonomi akibat covid 19)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pasar kabupaten yang dibangun	Pasar	1	1	24.000.000	24.000.000
				4	Peningkatan Pasar Nagari Dalam Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah pasar nagari yang dibangun / direnovasi	Pasar	1	1	49.960.000	45.250.000
					PROG. PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Persentase pertumbuhan industri	Persen			22.445.500	22.445.500
				1.	Fasilitasi bagi Industri Kecil Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	Jumlah produk bersertifikat halal, HKI yang difasilitasi	Produk	0	0	6.270.000	6.270.000
				2.	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri	Jumlah IKM yang dibina	IKM	0	0	1.565.000	1.565.000
				3.	Pembinaan dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah	jumlah IKM yang diawasi	IKM	5	5	14.610.500	14.610.500
					PROG. PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL	Jumlah sentra IKM yang berkembang	Sentra	0	0	3.825.000	3.825.000
				1.	Penumbuhan dan Penataan Sentra-sentra Industri Unggulan	Jumlah kelompok IKM yang dibina dan dilatih	Sentra	0	0	3.825.000	3.825.000
										5.699.126.325	5.471.672.511



- **Sasaran Strategis PK Kepala Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan dan Perindustrian**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya kinerja koperasi	Prog. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi sehat	5 koperasi	5 koperasi	100%
2	Meningkatnya skala usaha mikro kecil	Prog. Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	1,27%	1,27%	100%
3	Meningkatnya omset perdagangan	Prog. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase peningkatan omset perdagangan	0,00%	NA	100%
4	Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya	Prog. Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	Koefesien variasi harga barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya antar waktu	<9%	<9%	100%
5	Meningkatnya omset IKM	Prog. Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Persentase peningkatan omset IKM	1,27%	1,27%	100%
6	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja IKM	Prog. Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja IKM	1,58%	1,58%	100%
7	Meningkatkatnya akuntabilitas kinerja dinas	Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	A	A	100%
		Prog. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur				



- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program** yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
 - a. Meningkatnya kinerja koperasi yaitu:
 - Jumlah koperasi sehat (Target Kinerja : 5 koperasi) (Realisasi Kinerja : 5 koperasi)
 Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan KSP/USP Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam sedangkan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan :
 - Prog. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian dengan output kegiatan ini adalah Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti sosialisasi prinsip pemahaman perkoperasian.
 - 2) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi dengan output kegiatan ini adalah Jumlah koperasi yang menerima penghargaan koperasi berprestasi, Jumlah koperasi yang dibina dan diawasi, Jumlah RAT yang dihadiri, dan Jumlah KSP/USP-Koperasi yang dilakukan penilaian kesehatan usaha simpan pinjamnya.
 - Dari uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target kinerja indikator jumlah koperasi sehat.
 - b. Meningkatnya skala usaha mikro kecil yaitu:
 1. Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil (Target Kinerja : 1,27%) (Realisasi Kinerja : 1,27%)
 Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima ratus juta) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta). Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan :
 - Prog. Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah sebagai berikut :



- (1) Kegiatan Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah dengan output kegiatan ini adalah Jumlah UMKM yang bina, difasilitasi dan mengikuti bimtek pengembangan produk unggulan daerah.
- (2) Kegiatan Menfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi UMKM dengan output kegiatan ini adalah Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi permodalan Jumlah UMKM yang potensial yang diupload kedalam aplikasi SIKP-KUR.
- (3) Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (DAK) dengan output kegiatan ini adalah jumlah pengurus koperasi dan UMKM yang mengikuti BIMTEK.

Dari uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target kinerja indikator Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil.

c. Meningkatnya omset perdagangan yaitu:

Pada Tahun 2020 bahwa capaian kinerja untuk indikator ini tidak ditargetkan karena pandemi covid-19 sangat mempengaruhi omset perdagangan, namun dalam rangka peningkatan omset perdagangan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun Anggaran 2020 melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih tersisa berupaya melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan pusat-pusat perdagangan di Kabupaten Pesisir Selatan melalui pengembangan potensi perdagangan berupa pembangunan dan revitalisasi sarana prasarana Pasar rakyat beserta fasilitasnya. Kegiatan/Revitalisasi Pasar Rakyat yang dilakukan selama tahun 2020 adalah pembangunan Pasar Surantih, pembangunan Los Pasar Tapan dan Pembangunan Los kain Pasar Kambang.
2. Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelola pasar yang dilakukan melalui mantri pasar beserta perangkatnya. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan :
 - Prog. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan dengan output kegiatan ini adalah Jumlah kecamatan yang dilakukan pemantauan ketersediaan bahan pokok.
 - (2) Kegiatan Pengamanan dan Pengelolaan Pasar dengan output kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengamanan dan Pengelolaan Pasar.
 - (3) Kegiatan Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Pasar Kabupaten yang dibangun/revitalisasi.



Dari uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target kinerja indikator Persentase peningkatan omset perdagangan.

d. Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya

1. Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya antar waktu (Target Kinerja : <9%) (Realisasi Kinerja : <9%)

Dalam rangka menjaga stabilitas harga di Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian telah melakukan kegiatan kegiatan sebagai berikut:

- I. Pemantauan harga dalam rangka menjaga kestabilan harga di Kabupaten Pesisir Selatan.
- II. Pengawasan terhadap barang beredar untuk meningkatkan perlindungan terhadap konsumen
- III. Pemantauan terhadap ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan bahan kebutuhan penting lainnya.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan :

- Prog. Perlindungan Konsumen dan Pegamanan Perdagangan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Operasionalisasi dan Perlengkapan UPTD Kemetrolagian dengan output kegiatan ini adalah Terlaksananya persiapan pelayanan tera/tera ulang UTTP.
 - (2) Kegiatan Pemantauan Harga dan operasi pasar dengan output kegiatan ini adalah Jumlah kecamatan yang dilakukan pemantauan harga dan terlaksananya operasi pasar.
 - (3) Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa dengan output kegiatan ini adalah Jumlah kecamatan yang dilakukan pengawasan barang beredar dan pupuk bersubsidi

Dari uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target kinerja indikator Koefisien variasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang kebutuhan lainnya antar waktu.

e. Meningkatnya omset IKM

1. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam peningkatan omset IKM pada tahun 2020, antara lain :
 - ✓ Melakukan koordinasi ke IKM melalui penyuluhan mengenai keterjaminan produk, sertifikasi halal, legalisasi usaha (IUI), legalisasi produk (merek HKI), izin edar BPOM
 - ✓ Melakukan koordinasi ke IKM melalui penyuluhan mengenai diversifikasi produk pangan



- ✓ Melakukan koordinasi melalui penyuluhan ke IKM minyak atsiri dan kelompok kerajinan di Kec. Lengayang
 - ✓ Verifikasi teknis penerbitan Izin Usaha Industri
 - ✓ Keikutsertaan dalam rapat koordinasi penumbuhan IKM kerajinan se Sumatera Barat melalui Dekranasda.
- Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan :

- Prog. Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Fasilitasi bagi industri kecil menengah terhadap pemanfaatan sumber daya dengan output kegiatan ini adalah jumlah produk IKM bersertifikat.
- (2) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan IKM dengan output kegiatan ini adalah Jumlah IKM yang dibina.
- (3) Kegiatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri dengan output kegiatan ini adalah Jumlah IKM yang mengikuti bimtek.

Dari uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target kinerja indikator Persentase peningkatan omset IKM.

f. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja IKM

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan :

- Prog. Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Penumbuhan dan Penataan Sentra sentra Industri unggulan dengan output kegiatan ini adalah Jumlah IKM yang dibina dan dilatih Jumlah kelembagaan kelompok IKM yang berpotensi sentra.

Dari uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target kinerja indikator Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja IKM.

g. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan :

- Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Penyediaan Alat tulis Kantor dengan output kegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor.
- (2) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan dengan output kegiatan ini adalah tersedianya barang cetak dan penggandaan.



Dari uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target kinerja indikator Nilai Evaluasi SAKIP OPD.

- Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Kecilnya target kinerja dan realisasi kinerja dari kegiatan ini karen sebagian besar anggaran yang telah dialokasikan pada kegiatan ini dialihkan untuk penanganan covid sehingga kegiatan hanya bisa jalan sampai bulan Maret
- 2) Dst. s/d no 9.

b. Solusi

2. URUSAN : Lingkungan Hidup
PERANGKAT DAERAH : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

Adapun Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 Urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Penugasan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 3.018.469.748,00-** terealisasi sebesar **Rp. 2.895.882.655,00-** atau **94.83%** Rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					282.589.529	281.351.389
	1			Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	44.700.000	43.958.663
	2			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia	Bulan	12	12	64.553.600	64.550.000
	3		2. Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020;	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa kebersihan kantor yang tersedia	Bulan	12	12	65.980.220	65.980.000
	4			Penyediaan jasa perbaikan	Jumlah jasa perbaikan	Bulan	12	12	2.270.000	2.270.000



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				peralatan kerja	peralatan kerja yang tersedia					
5				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Bulan	12	12	22.388.960	22.387.900
6				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Bulan	12	12	6.339.680	6.337.350
7				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Bulan	12	12	3.124.000	3.115.000
8				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Bulan	12	12	4.574.000	4.554.000
9				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Bulan	12	12	8.280.000	8.262.500
10				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Bulan	12	12	45.943.776	45.585.976
11				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dihadiri	Bulan	12	12	14.435.293	14.350.000
2				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					81.750.000	81.104.663
12				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	Unit	9	9	81.750.000	81.104.663
3				Program Peningkatan Kapasitas Sarana Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sarana Aparatur	persen	100	100	5.000.000	5.000.000
13				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan formal	orang	1	1	5.000.000	5.000.000
4				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					366.559.547	319.515.097
14				Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah teknologi pengelolaan persampahan yang tersedia	Teknologi	2	2	163.500.000	163.500.000
15				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah terkelola	Ton	39.551,36	21.555,30	20.055.700	20.055.700
16				Pengelolaan Sampah Serta Sarana Prasarana Pendukung (DAK Penugasan)	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tersedia	Unit	4	0	1.009.000	1.009.000
5				Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan					366.559.547	319.515.097



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Hidup						
17				Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah sampah terkelola	Ton	39.551,36	21.555,30	854.050	854.050
18				Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi, jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	Usaha/ pengaduan	10/5	3/3	10.302.750	10.302.750
19				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah kampung iklim, jumlah sekolah adiwiyata, komunitas peduli lingkungan	Buah	1 kampung iklim, 10 sekolah, 1 komunitas	1 kampung iklim, 8 sekolah, 1 komunitas	18.423.000	18.261.000
20				Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah media lingkungan yang di pantau	Media	3	3	24.361.000	24.264.600
21				Inventarisasi dan Pembinaan Pengelolaan Limbah B3	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	Buah	3	3	961.950	961.950
22				Penyusunan Perencanaan Dokumen LH	Jumlah Laporan Analisa Data KLHS	Laporan	1	1	117.190.000	73.966.950
23				Penunjang Operasional Laboratorium	Laboratorium lingkungan yang terakreditasi	Akreditasi	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	194.466.797	190.903.797
6				Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA					49.025.050	47.797.550
24				Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Jumlah buku data dan buku analisa yang disusun	buku	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	300.000	300.000
25				Koordinasi Penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL	Jumlah pemeriksaan dan penilaian dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL	Dokumen	75	86	48.725.050	47.497.550
	JUMLAH								969.488.826	919.333.399



- **Sasaran Strategis PK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Air	- 75	- 90	- 120
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	- Indeks Kualitas Udara - Indeks Kualitas Lahan	- 81 - 75	- 91,81 - 71,78	- 113,34 - 95,70
2	Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Ketaatan terhadap PPLH (Perseorangan/ Kelompok/Badan Usaha)	72	75,8	105,27
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan				

- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kualitas Air

(Target Kinerja : 75) (Realisasi Kinerja : 90)

yang meliputi kondisi kualitas air sungai di Pesisir Selatan dengan melakukan pengujian di beberapa sungai dan dilakukan pengolahan data kualitas sungai tersebut sehingga didapatkan Indeks Kualitas Air Kabupaten Pesisir Selatan.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan berikut :

1) Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan, dengan output tersedianya data Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lingkungan;



- 2) Koordinasi Penilaian Kota Sehat dengan output terlaksananya penilaian Kota Sehat Adipura;
 - 3) Kegiatan Operasional Laboratorium dengan output tersedianya alat-alat laboratorium lingkungan;
 - 4) Inventarisasi dan Pembinaan Pengelolaan Limbah B3 dengan output rekomendasi dan berita acara pembinaan dan pengawasan Limbah B3;
 - 5) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup dengan output terlaksananya sosialisai dan pembinaan pengendalian lingkungan hidup;
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan dengan output tersedianya Solar Biodigester, Biopori dan Tong Sampah Terpilah;
 - (2) Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dengan output terlaksananya sosialisasi dan pembinaan pengelolaan persampahan;

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Indeks Kualitas Air.

2. Indeks Kualitas Udara

(Target Kinerja : 81) (Realisasi Kinerja : 91,81)

yang meliputi kualitas udara ambien di Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan dengan pengukuran kualitas udara dengan menggunakan pasive sampler di beberapa titik. Data tersebut digunakan untuk mendapatkan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Pesisir Selatan. Alat dan data Indeks Kualitas Udara tersebut didapat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan berikut :
 - (1) Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan, dengan output tersedianya data Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualtas Lingkungan;
 - (2) Koordinasi Penilaian Kota Sehat dengan output terlaksananya penilaian Kota Sehat Adipura;
 - (3) Kegiatan Operasional Laboratorium dengan output tersedianya alat-alat laboratorium lingkungan.
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan sebagai berikut :



- (1) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan dengan output tersedianya Solar Biodigester, Biopori dan Tong Sampah Terpilah;
 - (2) Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dengan output terlaksananya sosialisasi dan pembinaan pengelolaan persampahan;
- Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Indeks Kualitas Udara.

3. Indeks Kualitas Lahan

(Target Kinerja : 75) (Realisasi Kinerja : 71,78)

yaitu meliputi tutupan Vegetasi Hutan dan Tutupan Vegetasi Non Hutan. Dari data tersebut didapatkan Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk data IKL ini diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Pada Tahun 2020 tidak ada program dan kegiatan yang menunjang indikator Indeks Kualitas Lahan ini.

b. Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup, dengan indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Ketaatan terhadap PPLH (Perseorangan/ Kelompok/Badan Usaha)

(Target Kinerja : 72) (Realisasi Kinerja : 75,8)

yaitu meliputi ketaatan pemilik usaha/kegiatan terhadap Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peningkatan kualitas SDM dan kapasitas sarana prasarana PPLHD.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan berikut :
 - (1) Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan bidang Lingkungan Hidup dengan output ketaatan pemilik usaha/kegiatan terhadap dokumen izin lingkungannya.
- Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan lingkungan, dengan kegiatan berikut:
 - (1) Pengembangan data dan informasi lingkungan dengan output tersedianya buku analisa dan buku data DIKPLHD;
 - (2) Koordinasi Penyusunan AMDAL/UKL-UPL/SPPL dengan output terlaksananya pembahasan dokumen AMDAL dan UKL-UPL.

- Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan



- 1) Anggaran untuk kegiatan ini mengalami refofusing sehingga tidak bisa dilaksanakan
 - 2) Penilaian Adipura Tahun 2020 tidak dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - 3) Masih rendahnya kesadaran pemilik usaha untuk menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan sehingga ketaatan terhadap regulasi lingkungan masih rendah
 - 4) Target untuk sekolah adiwiyata tidak tercapai karena adanya wabah covid-19 yang menyebabkan PBM di sekolah diliburkan dan dilaksanakan secara daring sehingga pembinaan sekolah adiwiyata tidak optimal.
 - 5) Anggaran untuk akreditasi laboratorium mengalami refofusing, sehingga hanya dilaksanakan operasional laboratorium
 - 6) Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena mengalami refofusing
- b. Solusi
- 1) Dianggarkan untuk tahun 2021
 - 2) Pengelolaan sampah tetap dilaksanakan seoptimal mungkin
 - 3) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (PPLHD) dan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pengawasan
 - 4) Akreditasi laboratorium dianggarkan pada tahun 2021
 - 5) Dilaksanakan tahun 2021

3. URUSAN : Pemberdayaan Masyarakat
PERANGKAT DAERAH : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pencapaian indikator kinerja utama Tahun Anggaran Tahun 2020 dengan beberapa program Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Nagari, Meningkatkan Aktifitas Ekonomi Nagari, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintahan Nagari dan Menurunkan Angka Kelahiran.

Adapun Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Penugasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **11.831.081.978,00-** terealisasi sebesar **Rp. 9.531.368.180,00-** atau **73,21%** Rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut :



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 2. Peraturan Bupati Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumatera Barat Tahun 2020;	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tepenuhinya layanan administrasi perkantoran	Bulan	12	12	709.905.288	653.067.931
	1			Kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik, air dan telfon	Bulan	12	12	49.408.956	45.033.701
	2			Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional kantor	Bulan	12	12	266.649.014	238.011.263
	3			Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran honor pengelola keuangan	Bulan	12	12	130.121.200	114.521.200
	4			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya operasional untuk kebersihan kantor	Bulan	12	12	83.528.842	83.528.842
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya biaya perawatan peralatan kerja	Bulan	12	12	10.050.000	10.000.000
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Bulan	12	12	40.313.671	39.401.675
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Bulan	12	12	24.707.482	19.185.082
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan	Bulan	12	12	26.283.150	26.268.195
				Penyediaan bahan bacaan dan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan	Bulan	12	12	4.440.000	4.440.000



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				peraturan Perundang-undangan	Perundang-undangan					
				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum untuk rapat, dan tamu	Bulan	12	12	14.745.000	14.082.500
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulan	12	12	39.732.973	39.725.473
2				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Bulan	12	12	19.925.000	18.870.000
				Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya Partisipasi / Swadaya Masyarakat	Kali	1	1	9.124.250	9.124.250
	1			Pembinaan Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten	Terlaksananya Lomba Nagari	kali	1	1	9.124.250	9.124.250
2				Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Meningkatnya persentase peningkatan ekonomi masyarakat	kali	Kali		20.654.600	20.627.750
	1			Pelatihan dan pembinaan badan usaha nagari (BUMNAG, LKM)	Terlaksananya Rapat Koordinasi Bumrag dan Pembinaan Bumrag	Kali	1	1	20.654.600	20.627.750
2				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat	Kali	1	1	150.000.000	108.331.800
				Pendampingan Pelaksanaan TMMD	Terlaksananya proses perencanaan, Pelaksanaan dan	Kali	1	1	150.000.000	108.331.800



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
					Pengawasan					
				Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/Nagari	Jumlah Lembaga Mitra Nagari Yang dibina	Nagari	182 Nagari	182 Nagari	147.767.068	141.345.718
				Pembinaan Administrasi Program Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari (P3MD)	Terlaksananya proses perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan	Nagari	182 Nagari	182 Nagari	26.049.650	24.549.650
				Pemberdayaan Kelembagaan Tim Penggerak PKK Kabupaten	Lembaga PKK Kabupaten dengan jalan Pembinaan PKK Kecamatan, HKG PKK, dan UP2K	PKK	192 PKK	192 PKK	77.735.118	77.735.118
				Pemberdayaan Keberlanjutan KP-SPAMS	Jumlah KP-SPAMS yang dibina	KP-SPAMS	5 KP-SPAMS	5 KP-SPAMS	16.489.000	16.459.500
				Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/Nagari	Terlaksananya Pelatihan KAN	Kali	1 Kali	1 Kali	27.493.300	22.601.450
				Program Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Desa/Nagari	Terlaksananya Pemilihan Wali Nagari	Nagari	20 Nagari	20 Nagari	1.588.816.450	1.501.328.710
				Fasilitasi Pemekaran, Penilaian Bamus Nagari dan Wali Nagari	Didapatkan Wali Nagari Baru	Nagari	20 Nagari	20 Nagari	16.647.500	16.647.500
				Pembinaan Keuangan Pemerintahan Nagari	Terlaksananya pembinaan administrasi keuangan nagar	persen	100%	100%	40.961.600	37.830.300
				Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Nagari	Terfasilitasinya Batas Nagari (47 Nagari)	Nagari	47 Nagari	47 Nagari	3.844.700	3.844.700
				Pengawasan dan Penanganan Masalah Desa	Terlaksananya pengawasan dan penanganan masalah nagari	Nagari	30 Nagari	30 Nagari	25.005.850	21.419.650
				Premi Kesehatan Nagari	Terlaksananya pembayaran premi	Nagari	182 Nagari	182 Nagari	1.502.356.800	1.421.586..560



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
					jaminan kesehatan wali dan perangkat nagari					
				Program Pengembangan kawasan perdesaan	Terlaksananya Pembinaan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kawasan	5 Kawasan	5 Kawasan		
				Pembinaan Badan Kerjasama Antar Nagari	Terbentuknya UPK dan BKAN yang mandiri	Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15.089.200	15.062.200
				Pembinaan Potensi Kawasan Masyarakat Perdesaan/ Nagari	Terlaksananya Pembinaan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kawasan	4 Kawasan	2 Kawasan	2.812.000	2.812.000
2	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Bhakti KB Kes IBI/IDI/TNI/PKK dan Jambore	Terlaksananya Bhakti KB kes IBI/IDI/TNI/Bhayangkara/PKK dan Jambore	Orang	Jumlah peserta KB Baru MOP 75 org, MOW 25 org, IUD 25 org, Implant 300 org, Suntikan 1.000 org, Pil 400 org dan Kondom 20 org	Jumlah peserta KB Baru MOP 75 org, MOW 25 org, IUD 25 org, Implant 300 org, Suntikan 1.000 org, Pil 400 org dan Kondom 20 org	9.080.000	9.080.000
				Pembinaan Potensi Kawasan Masyarakat Perdesaan/ Nagari	Terlaksananya Pembinaan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kawasan	4 Kawasan	2 Kawasan	2.812.000	2.812.000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana	tersedianya alat alat dan operasional penunjang pelayanan KB	Balai Penyuluh KB, kampung KB dan Faskes	15 Balai Penyuluh KB, 51 kampung KB dan 79 Faskes	15 Balai Penyuluh KB, 51 kampung KB dan 79 Faskes	5.409.760.000	3.419.295.864
				Penyediaan Media Komunikasi, Informasi	Terlaksananya penyediaan Media	jenis	2 jenis KIE	2 jenis KIE	179.190.000	162.049.543



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				dan Edukasi (KIE) Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB					
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (DAK Fisik)	Tersedianya sarana prasarana pelayanan KB	persen	100%	100%	1.232.100.000	1.123.622.231
				Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)	tersedianya alat alat dan operasional penunjang pelayanan KB	Bulan	12 Bulan untuk Operasional 15 Balai penyuluh KB dan Penyuluh KB dan KKBPK	12 Bulan Operasional 15 Balai penyuluh KB dan Penyuluh KB dan KKBPK	1.605.840.000	972.627.240
				Operasional Pendistribusian Alat Kontrasepsi (DAK Non Fisik)	Tersedianya sarana prasarana pelayanan KB	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60.100.000	51.734.350
				Operasional Penggerakan Kampung KB (DAK Non Fisik)	Terlaksananya Kegiatan Operasional Penggerakan Kampung KB	Kampung KB	51 Kampung KB, 51 BKB, 51 BKR, 51 BKL dan 51 UPPKS	51 Kampung KB, 51 BKB, 51 BKR, 51 BKL dan 51 UPPKS	1.240.530.000	438.462.500
				Operasional Pembinaan Kader Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)	Terlaksananya Kegiatan Operasional Pembinaan Program KB bagi masyarakat oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD)	Nagari	182 Nagari	182 Nagari	1.092.000	670.800.000
				Membangun Jaringan Kemitraan dengan Institusi peduli Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Kemitraan dengan institusi Peduli Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan	Kelompok KB	3 Kelompok KB	3 Kelompok KB	1.157.500	1.157.500



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
					Keluarga (KKBPk)					
				Pembinaan Kampung KB	Terbinanya Institusi KKBPk	Kampung KB	50 Kampung KB	50 Kampung KB	3.234.000	3.234.000
				Pemilihan Duta Gendre	Terlaksananya Pemilihan Duta Genre	Lomba Duta Gendre	1 Kali Lomba Duta Gendre	1 Kali Lomba Duta Gendre	70.679.000	70.679.000
				Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK)	Tersusunnya Grand Design Pembangunan Kependudukan	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4.403.500	4.403.500
3	Urusan Komunikasi dan Informatika			Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Terlaksananya promosi Daerah	persen	30 %	30 %	6.000.000	6.000.000
				Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya Promosi Daerah dan Publikasi Dinas	persen	30 %	30 %	6.000.000	6.000.000

- **Sasaran Kepala OPD**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/ Nagari Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan / Nagari	Persentase Jumlah Swadaya Masyarakat	2,15 %	1,97 %	91,63%
2	Meningkatnya Aktifitas Ekonomi	Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/Nagari	Persentase Pertumbuhan Pendapatan	2,18 %	1,04 %	47,61 %



	Nagari	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan/Nagari	Masyarakat Nagari			
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan Nagari	Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/ Nagari Program Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Desa/ Nagari	Persentase Nagari yang Tingkat Kinerja Yang Baik	78,00%	75,27%	96,50 %
4	Menurunkan Angka Kelahiran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana Program Pelayanan Keluarga Berencana Program Penguatan Kelembagaan	Persentase PUS yang Ber-KB	82,00%	76,62%	93,44 %

- Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

a. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat

Persentase Jumlah Swadaya Masyarakat dengan target 2,15 % , realisasi 1,97 % dengan capaian target Kinerja 91,63%. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, perhitungan nilai swadaya masyarakat berdasarkan dana Nagari yang di berikan dan dianggarkan oleh nagari dan nilai swadaya pada saat pelaksanaan Tentara Manunggal Masuk Nagari (TMMN).

Pada tahun 2020 nilai swadaya masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan menurun baik dari segi target kinerja yang pada tahun 2019 target sebesar 5 % dengan realisasi 4,98 % sehingga persentase capaian 99.60 %, sedangkan pada tahun 2020 target 2,15 % dengan realisasi 1,97 % dengan capaian realisasi 91,63%. Penurunan nilai capaian swadaya masyarakat ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang tidak hanya menggorogoti kesehatan masyarakat namun juga menggorogoti anggaran secara nasional. Program-program yang dapat meningkatkan swadaya masyarakat yang



seharusnya dilaksanakan tidak dapat terlaksana sepenuhnya, karena refofusing anggaran yang mengakibatkan anggaran pada kegiatan-kegiatan swadaya masyarakat banyak dikurangi.

Dari data Jumlah Dana Nagari pembangunan Fisik perkecamatan adalah Rp. 46,841,737,264 dan Jumlah nilai realisasi swadaya Rp.0, sedangkan swadaya TMMD 2.980.000 adalah dan jumlah realisasi swadaya Rp 245.890.000,-

b. Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Nagari

Persentase Pertumbuhan Pendapatan Masyarakat Nagari dengan target 2,18 %, realisasi 1,04% dengan target kinerja 47,61%. Di Kabupaten Pesisir Selatan Target pendapatan PAN Nagri 3,30% dalam bentuk rupiahnya adalah Rp. 23.894.413.876, sedangkan sampai kondisi per 31 Desember terealisasi target PAN nya adalah 249.552.700 (1,04 %) dari target kinerja tercapai 51,90% . Penurunan target kinerja dan realisasi pertumbuhan pendapatan masyarakat nagari ini disebabkan Pandemi Covid -19 yang juga melanda kabupaten Pesisir selatan yang secara langsung sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tingkat capaian tersebut di dapatkan berdasarkan pengembangan dan pembinaan Kawasan nagari yang dibina 3 kawasan yaitu Kawasan Wisata di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kawasan ternak sapi tertintegrasi dengan kelapa sawit di kecamatan Sutera dan Kawasan Ternak Sapi Bali terintegrasi dengan sawit di Silaut dan di rencanakan penambahan kawasan yang pontensial 1 lagi di Kabupaten Pesisir Selatan.

Jumlah lembaga ekonomi yang ada diwilayah kabupaten pesisir selatan adalah Bumrag 68 Buah, UPK 15 Buah, Bumrag Bersama 4 Buah. Total keseluruhan lembaga ekonomi nagari di wilayah kabupaten pesisir selatan adalah 87 lembaga.

c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan Nagari

Persentase Nagari yang bekinerja dengan target 78,00 %, realisasi 75,27% dengan target kinerja 96,50%, Berdasarkan tersebut Nagari diwilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang di Target Nagari yang meningkat pelayanan pemerintahan nagari yang baik untuk tahun 2020 adalah 142 Nagari berdasarkan kriteria diatas dari 182 Nagari, yang hasil persentasenya adalah 75,27 % dari target 78,00 % dengan realisasi 96,50 %



d. Menurunkan Angka Kelahiran

Persentase PUS yang ber-KB dengan target 82,00%, realisasi 76,62% dengan target kinerja 93,44%, Berdasarkan tujuan diatas target kinerja dinas adalah 82,00%, sedangkan Jumlah Pus diwilayah kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 berjumlah 7.9676 orang dan 61.139 yang aktif ber KB sampai akhir tahun. Dengan data tersebut terealisasi target kinerja adalah 76,62 %. Dilihat dari tareget kinerja terealisasi sebesar 93,44 % hasil capaian ini sangat baik dan harus di pertahankan atau lebih di tingkatkan lagi pada tahun 2020. Capaian kinerja yang baik ini disebabkan intensitas penyuluhan dan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat Pesisir Selatan dalam pelaksanaan program KB dan memudahkan akses pelayanan kontrasepsi bagi pasangan usia subur di wilayah kabupaten Pesisir selatan.

- Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Kurang terpenuhinya peralatan pendukung kerja ASN
- 2) Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) bertunuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Nagari, akan tetapi kenyataan dilapangan banyak Bumrag yang mati suri dan tidak sesuai dengan tujuan terbentuknya Bumrag Tersebut, Untuk itu kepada saudara untuk dapat melakukan monitoring dan pembinaan
- 3) Dana desa yang sangat besar yang dikelola oleh Pemerintah Nagari dan dalam pengelolaannya di bantu oleh PD dan PLD, Namum kinerja PD dan PLD itu belum maksimal, ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah
- 4) Diharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk Dapat membantu Pemerintah Pusat Dalam Pengendalian Penduduk

b. Solusi

- 1) Di buat pengusulan tentang peralatan kerja, tetapi karena Covid-19 ter kena reconfusing anggaran
- 2) Banyaknya Bumrag yang Mati Suri
- 3) Memaksimalkan tenaga pendamping yang masih kurang dengan 1 tenaga pendamping untuk dapat mengawasi 2- 3 Nagari
- 4) Meningkatkan Penggunaan alat Kontrasepsi, Peningkatan Komunikasi informasi, dan edukasi program Bangga Kencana, Peningkatan SDM Program Kencana, Peningkatan Fungsi dan Peran Serta kegiatan kelompok remaja tentang kependudukan dan KB



4. URUSAN : Perizinan
PERANGKAT DAERAH : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan yang dilimpahkan ke DPMPTSP jumlah sebanyak 120 Jenis izin Semuanya gratis kecuali Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik dalam sisitem tersebut pelaku usaha dapat mendaftar langsung perusahaannya baik yang berbadan hukum maupun perorangan melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS).

Adapun Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 Urusan **Perizinan** yang dilaksanakan oleh **Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu** Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Penugasan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 3.221.555.898,00-** terealisasi sebesar **Rp. 3.144.771.489,00-** atau **97,59%** Rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Perizinan	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan		Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan						
				Survey Indeks Kepuasan Masyarakat					4,496,500	4,496,500
				Operasional Penyelenggara Perizinan					24,267,200	24,267,200
				Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan					11,182,500	11,182,500
				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi						
				Promosi Investasi di Dalam Negeri dan Luar Negeri					15,132,200	15,132,200
				Publikasi Perizinan, Penanaman Modal dan Peluang Investasi					7,775,950	7,775,950
				Pemutakhiran Data dan					4,948,500	4,948,500



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Informasi Perizinan						
				Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi						
				Pelayanan Penanaman Modal					13,986,350	13,986,350
				Penyusunan SOP Perizinan dan SOP PTSP sesuai Standar Nasional					4,183,400	4,183,400
				Koordinasi Pengendalian Investasi Memanfaatkan Aplikasi					3,566,500	3,566,500
				Pengawasan dan pengendalian penanaman modal					8,366,300	8,366,300
				Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran						
				Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan					13,948,100	13,805,250

- **Sasaran Strategis PK Kepala OPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. - Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	82,5	82,5



2	Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kondusif	- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi - Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi - Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan	Peningkatan jumlah investor yang berinvestasi	200.000.000.000	345,019,215,304	172,5%
	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Kepegawaian	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelaporan yang selaras dengan Renstra dan RPJM	100%	100%	100%

- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Perjanjian Kinerja DPMPPPTS Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 ditetapkan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, Rencana Kerja DPMPPPTS Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESIRIS SELATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan.	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	50%
2.	Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kondusif	Peningkatan jumlah investor yang berinvestasi	200.000.000.000	50.000.000.000
3.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Kepegawaian	Persentase Pelaporan yang selaras dengan Renstra dan RPJM	100%	100%



Program/Kegiatan	Anggaran	
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1. PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp. 588,419,154 ,-	Rp. 586,906,104 ,-
2. PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rp. 161,718,000 ,-	Rp. 163,231,050 ,-
3. PROG. PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Rp. 27,856,650 ,-	Rp. 27,856,650,-
4. PROG. PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Rp 30,102,550 ,-	Rp. 30,102,550,-
5. PROG. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN	Rp. 39,946,200 .-	Rp. 39,946,200.-
J U M L A H	Rp. 848,042,554 ,-	Rp. 848,042,554,-



Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan tujuan strategik berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran strategik yang diterapkan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tujuan :

Maka berdasarkan hal tersebut, diterapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Melakukan penyederhanaan persyaratan, transparansi biaya dan kejelasan lamanya waktu pengurusan perizinan.
3. Melaksanakan pelayanan pemberian perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi perizinan dan non perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan keamanan berkas.
5. Terciptanya iklim investasi yang sehat dan semakin meningkatnya investasi ke daerah.

b. Sasaran

Terwujudnya kelancaran administrasi dalam rangka peningkatan investasi penanaman modal baik PMDN maupun PMA, yang sasarannya adalah peningkatan pelayanan bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, maupun perubahannya No. 19 Tahun 2014, dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, serta mempromosikan kepada investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Pesisir Selatan

Nb.	Permasalahan	:	1.	-
	Solusi	:	1.	-
	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD	:	1.	-



5. URUSAN : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Melalui Peraturan Daerah dimaksud, diharapkan terjadi penguatan kelembagaan dalam bidang informatika sejalan dengan tujuan pemerintah saat ini yang mengedepankan penggunaan teknologi (elektronik) dalam menunjang kinerja pelayanan birokrasi, disamping tugas pokoknya sebagai lembaga yang menangani komunikasi.

Adapun jumlah Belanja langsung untuk Urusan Komunikasi Dan Informatika pada tahun 2020 untuk mengakomodir Urusan Komunikasi Dan Informatika dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.826.765.332 dengan realisasi Rp. 6.655.643.042 dengan tingkat realisasi mencapai angka 98,19 % dengan rincian sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;	Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa	Persentase peningkatan pelayanan dan Pengembangan Komunikasi melalui media masa	Persen	100	100	3.418.250	3.418.250	-
1				Kegiatan Perencanaan	Jumlah kegiatan perencanaan dan	Kali	1	1	3.418.250	3.418.250	



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
				dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	pengembangan kebijakan Komunikasi dan Informasi						
2				Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase Peningkatan SDM Teknologi Informasi Komunikasi	Persentase	100	0	0	0	
	2			Kegiatan Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah Peserta Pelatihan SDM di bidang TIK	orang	90	0	0	0	
3				Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Persentase publikasi dan informasi	Persentase	100	98	150.137.000	147.275.000	
	3			Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase tersebarnya informasi pembangunan daerah	Persentase	100	98	150.137.000	147.275.000	
4				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	Persentase terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi	Persentase	100	98			
	4			Kegiatan Pelayanan informasi Publik dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik	Persentase	Persentase	100	100	148.577.500	148.231.525	
	5			Kegiatan Pengelolaan	Persentase penyampaian	Persentase	100	95	261.437.500	249.231.035	



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
				Media Komunikasi Milik Pemerintah	informasi melalui media radio dan mupen						
	6			Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Jumlah Medittra dan Kelompok Informasi Masyarakat yang dibina (data)	data	1	1	13.700.000	13.647.500	
	7			Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Penanggulangan Wabah Virus Covid19	Persentase terlaksananya penyampaian informasi tentang Covid19 melalui Video Convergence	Persentase	100	77	36.445.000	28.191.560	
4				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase pengelolaan aplikasi Informatika	Persentase	100	99	2.683.290.198	2.648.202.044	
	8			Kegiatan Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smartcity	Persentase penyelenggaraan ekosistem TIK dan kerjasama smartcity	Persentase	100	99	2.683.290.198	2.648.202.044	
5	Persandian			Program Pengamanan Informasi	Persentase pengamanan informasi	Persentase	100	96	16.065.000	15.347.700	
	9			Kegiatan Pengamanan Informasi dan Sistem Elektronik	Persentase Pengamanan Informasi dan Sistem Elektronik	Persentase	100	96	16.065.000	15.347.700	
6				Program Pengembangan Data/Informasi/	Persentase Pengembangan Data/Informasi/Sta	Persentase	100	98	40.167.500	39.168.900	



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
				Statistik Daerah	tistik Daerah						
	10	Statistik		Kegiatan Penyediaan Data Statistik	Jumlah Buku Pesisir Selatan Dalam Angka	Jumlah	200	200	40.167.500	39.168.900	
7	11	Persandian		Program Pola Hubungan Komunikasi Pemerintah	Persentase Pola Hubungs	Persentase	100	100	1.519.000	1.519.000	
				Kegiatan Pengelolaan Pola Hubungan komunikasi Pemerintah	Persentase				1.519.000	1.519.000	



**ANALISA KESESUAIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Masa	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.00	3.34	111
		Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi				
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika				
2.	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Program Kerjasama Informasi dan media massa	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	15.000	15.475	103
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik				



- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

a. Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi, dengan indikator kinerja yaitu:

Indeks Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis pertama adalah dengan meningkatkan kualitas layanan teknologi informasi pemerintah yang berbasis elektronik. Dari tabel dapat dilihat bahwa target pencapaian indeks layanan pemerintah berbasis elektronik pada tahun 2020 sebesar 3.00. Sampai dengan akhir tahun realisasi mencapai 3.34 (111 %). Hal ini disebabkan oleh penerapan SPBE di Kabupaten Pesisir Selatan didukung dengan program dan kegiatan terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tahun 2020 indikator penilaian SPBE sebanyak 47 Indikator. Pencapaian indeks layanan pemerintahan berbasis elektronik didasari oleh pencapaian layanan di bidang teknologi informasi. Jangkauan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah dan ke semua lapisan masyarakat yang belum optimal. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dengan melakukan integrasi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, dan layanan manajemen kinerja yang berbasis elektronik

b. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

Indikator kinerja utama dari sasaran strategis diatas adalah Nilai Keterbukaan Informasi Publik. Pencapaian atas Nilai Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan pencapaian indikator nilai keterbukaan informasi publik yang ditetapkan oleh Komisi Keterbukaan Informasi Publik. Untuk tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pesisir Selatan menargetkan Daftar Informasi publik (DIP) sebanyak 15.000 DIP dan realisasinya sebanyak 15.475 DIP atau (103 %)



Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target Nilai Keterbukaan Informasi Publik. Kunci keberhasilan penyelenggaraan keterbukaan informasi Kabupaten Pesisir Selatan :

1. PPID Utama, PPID Pembantu dan PPID Nagari BerKOMITMEN untuk menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik yang TerKOORDINASI dan berKOLABORASI dalam sebuah alur kerja sistematis yang ditunjang dengan KOMUNIKASI yang baik antar unit kerja untuk menjaga KONSISTENSI pelaksanaan tugas dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik yang Cepat, Tepat dan Akurat (CeTAR).
2. Inovasi tiada henti untuk mewujudkan Keterbukaan informasi publik yang lebih baik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan :
 - a. Kurangnya Pemahaman ASN tentang Perda SPBE;
 - b. Kurangnya pengetahuan tentang Perda SPBE;
 - c. Kurangnya pengetahuan tentang Teknologi Informatika dan Komunikasi;
 - d. Kurangnya pengetahuan tentang Teknologi Informatika dan Komunikasi bagi ASN;
 - e. Belum terpublikasi pembangunan daerah secara maksimal;
 - f. Belum terpublikasi pembangunan daerah secara maksimal;
 - g. Banyak OPD yang belum mempergunakan sarana yang tersedia untuk penyampaian program pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD;
 - h. Konsider Pandemi Covid19 membuat pelaksanaan pendataan terkendala saat ke lapangan; dan
 - i. Tidak semua OPD melaksanakan Video Conference dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Solusi :
 - a. Melaksanakan Sosialisasi bagi ASN tentang Perda SPBE;
 - b. Melaksanakan Sosialisasi tentang Perda SPBE;



- c. Melaksanakan pelatihan tentang TIK;
- d. Melaksanakan pelatihan tentang TIK bagi ASN;
- e. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas penyampaian publikasi dan informasi pembangunan Daerah;
- f. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas penyampaian publikasi dan informasi pembangunan Daerah;
- g. Kembali menyurati dan mengingatkan OPD untuk mempergunakan sarana (radio) pemerintah dalam penyampaian program pembangunan daerah;
- h. Melaksanakan pendataan dan pembinaan secara virtual; dan
- i. Menyurati dan memberitahukan OPD untuk mempergunakan Video Converence dalam rangka pencapaian target kinerja OPD walaupun masih dalam situasi Pandemi.



6. URUSAN : PANGAN
PERANGKAT DAERAH : DINAS PANGAN

Pada Tahun 2020 Urusan Pangan diselenggarakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.731.671.901,00 dengan realisasi Rp. 2.627.148.977,00 (94.48%). Adapun realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Pangan	Dinas Pangan	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2020 Tahun Anggaran 2020	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	306.203.588	296.070.641	
1				Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Ketersediaan air, listrik dan jasa komunikasi	bulan	12	12	48.960.000	42.927.595	
2				Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Ketersediaan layanan administrasi keuangan	bulan	12	12	114.350.000	111.300.000	
3				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Ketersediaan jasa kebersihan kantor	bulan	12	12	14.877.124	13.567.000	



No	Ururan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
4				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ketersediaan alat tulis kantor	bulan	12	12	34.027.106	33.848.000	
5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	17.887.091	17.711.000	
6				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan	bulan	12	12	2.099.867	2.053.500	
7				Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Ketersediaan makan dan minum pegawai, arapt dan tamu	bulan	12	12	4.500.000	4.260.000	
8				Penyediaan Makanan dan Minuman	Ketersediaan makan dan minum pegawai, arapt dan tamu	bulan	12	12	14.685.000	14.362.150	
9				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Ketersediaan operasional untyk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	bulan	12	12	29.692.400	24.391.396	
10				Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Ketersediaan operasional untyk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bulan	12	12	25.125.000	25.115.000	
11				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketersediaan sarana dan sarana penunjang	bulan	12	12	150.103.612	144.091.582	



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
1				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	bulan	12	12	18.000.000	17.982.000	
2				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	bulan	12	12	122.203.612	118.509.582	
3				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	bulan	12	12	9.900.000	7.600.000	
I I I				Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/ Kapita/ tahun	142	148,73	55.108.800	53.880.850	
1				Penanganan Daerah Rawan Pangan	-	-	-	-	430.000	430.000	
2				Pemantauan Produksi Pangan, Jaringan Distribusi, Pasokan Pangan dan HBKN	-	-	-	-	4.550.000	4.550.000	
3				Penguatan kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat	-	-	-	-	27.690.000	27.048.350	
4				Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (Kabupaten)	-	-	-	-	13.708.800	13.102.500	



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
5				Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	-	-	-	-	540.000	540.000	
6				Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan	-	-	-	-	2.105.000	2.105.000	
7				Penyusunan Database Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-		
8				Pengembangan Usaha Pangan masyarakat (PUPM)/TTI (Toko Tani Indonesia	-	-	-	-	2.170.000	2.170.000	
9				Analisis Ketersediaan Berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)	-	-	-	-	1.940.000	1.940.000	
I V				Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Konsumsi -Energi -Protein	Kkal/ Kapita/Hari Gram/Kapita/Hari	2.200 58	2.249,66 60,29	149.955.700	130.834.050	
1				Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	-	-	-	-	5.182.250	5.182.250	
2				Penyusunan Pola Pangan Harapan	-	-	-	-	-	-	
3				Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan Melalui	-	-	-	-	375.000	375.000	



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
				Dewan ketahanan Pangan							
4				Teknologi Pengolahan Pangan Lokal	-	-	-	-	300.000	300.000	
5				Gerakan Konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)	-	-	-	-	475.000	475.000	
6				Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	-	-	-	-	28.898.450	28.898.450	
7				Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (Pemulihan ekonomi akibat Covid-19)	Jumlah KWT yang dibina	Kelompok	15 Kelompok	15 kelompok	114.725.000	95.803.350	



- **Sasaran Strategis PK Kepala OPD**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya ketersediaan pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	Tingkat Ketersediaan pangan utama (kg/kapita/tahun)	142	148,7	104,74
2	Meningkatnya penganeekaragaman konsumsi pangan	Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Konsumsi - Energi (kkal/kapita/hari) - Protein (gram/kapita/hari)	2.200 58	2.249,66 60,29	104,60 105,78
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Dinas Pangan Oleh Inspektorat	A	A	100
		Program Peningkatan Sarana dan Parasana Aparatur				

- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

a. Meningkatkan ketersediaan pangan yaitu:

1. Tingkat Ketersediaan Pangan Utama (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 104,74 %)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :



- Program Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan
 - 2) Kegiatan Pemantauan Produksi Pangan, Jaringan Distribusi, Pasokan Pangan dan HBKN
 - 3) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat berupa kegiatan pembinaan lumbung pangan masyarakat dalam rangka mendukung ketersediaan pangan tingkat nagari.
 - 4) Kegiatan Penguatan cadangan pangan pemerintah (Kabupaten) berupa penyediaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah dalam rangka penanggulangan kasus kerawanan pangan karena bencana alam.
 - 5) Pengembangan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan masyarakat (P-LDPM) berupa kegiatan dalam rangka meningkatkan kemampuan gapoktan di wilayah sentra produksi padi agar mampu membantu anggotanya dalam mendistribusi/memasarkan/mengolah hasil produksi pangannya disaat menghadapi panen raya.
 - 6) Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan. Kegiatan ini berupa pemberdayaan masyarakat dalam rangka kemandirian pangan yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat miskin melalui padat karya dan penurunan stunting di wilayah rentan rawan pangan.
 - 7) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat /TTI. Kegiatan ini berupa sarana atau wadah gapoktan/supplier/produsen pangan lainnya untuk memasarkan komoditas pangan hasil produksi pertanian khususnya beras, cabe, dan bawang yang diproduksi langsung oleh pertanian.
 - 8) Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan Analisa Neraca Bajan Makanan (NBM) berupa kegiatan yang menyajikan analisis ketersediaan pangan di tingkat daerah guna mengetahui bagaimana kondisi ketersediaan pangan di daerah tersebut.
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan. Kegiatan ini berupa pendampingan kegiatan pemberian bantuan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kegiatan pendampingan dimaksudkan untuk kelancaran kegiatan mulai dari penentuan Calon Petani Calon Lokasi sampai kepada pemantauan perkembangan kegiatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
 - (2) Penyusunan Pola Pangan Harapan. Kegiatan ini merupakan kegiatan analisa konsumsi pangan masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui apakah konsumsi masyarakat sudah memenuhi pola pangan harapan yang



mana tingkat konsumsi energy berdasarkan Angka Kecukupan Energi adalah 2.150 kkal.kapita/hari dan tingkat konsumsi Protein adalah 57 gram/kapita/hari. Sedangkan skor Pola Pangan Harapan ideal adalah 100.

- (3) Teknologi Pengolahan Pangan Lokal. Kegiatan ini merupakan wadah untuk pengembangan olahan pangan lokal pengganti beras. Kelompok pengolah pangan lokal diberikan pelatihan agar dapat mengembangkan produk pangan local sehingga dikonsumsi oleh masyarakat guna mengurangi konsumsi beras sehingga meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan
- (4) Gerakan Konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman. Kegiatan ini berupa sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat guna menyampaikan bagaimana pola konsumsi yang sehat dengan mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Dengan pengetahuan ini diharapkan kesehatan masyarakat dapat meningkat.
- (5) Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan pengambilan sampel terhadap pangan segar, jajanan anak sekolah dan pangan olahan untuk dilakukan pengujian terhadap keamanan pangan dari bahan berbahaya dan penggunaan pestisida yang melewati ambang batas.
- (6) Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (Pemulihan Ekonomi akibat Covid-19). Kegiatan ini bersumber dari Dana Insentif Daerah yang berguna untuk pemulihan ekonomi akibat covid-19. Kegiatan ini berupa penyaluran bantuan uang kepada 15 kelompok Wanita Tani yang tersebar di 15 Kecamatan yang digunakan untuk kegiatan Pekarangan Pangan Kestari berupa pemanfaatan pekarangan dengan menanam buah-buahan, sayur-sayuran di pekarangan rumah anggota kelompok guna pemenuhan kebutuhan gizi keluarga di tingkat rumah tangga.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan.

- Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan :

- a) Penyediaan Beras cadangan Pemerintah belum sesuai dengan target sebesar 186.683.



7. URUSAN : PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PERANGKAT DAERAH : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Penyusunan LKPJ Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 bertujuan agar penyelenggaraan program/kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan terukur selama tahun anggaran 2020 guna perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

Pada Tahun 2020 Perpustakaan diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.512.588.365,50 dengan realisasi Rp 13.428.086.040,00 (99.79%) dengan penjabaran sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan pelayanan administrasi kantor	Bulan	12	12	243.082.343	239.638.063	
1.				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekenng telepon, air dan listrik	Bulan	12	12	47.700.000	46.287.407	
2.				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pengelola administrasi	Bulan	12	12	68.751.675	68.751.675	
3.				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	54.000.000	54.000.000	
4.				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja	Bulan	12	12	5.000.000	4.950.000	
5.				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	Bulan	12	12	12.613.047	12.455.650	



	6.				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersediaan barang cetak dan penggandaan	Bulan	12	12	4.328.940	4.327.000	
2.	7.				Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik dan bola lampu	Bulan	12	12	5.230.000	4.145.000	
	8.				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum	Bulan	12	12	6.480.000	6.342.650	
	9.				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Biaya perjalanan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bulan	12	12	28.258.681	27.658.681	
	10.				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Biaya perjalanan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Bulan	12	12	10.720.000	10.720.000	
					Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur	Terpenuhinya sarana prasarana penunjang bagi aparatur	Bulan	12	12	135.743.900	131.897.450	
	1.				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Bulan	12	12	10.100.000	10.100.000	
	2.				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	12	125.643.900	121.797.450	
	3.				Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.	Peningkatan angka kunjungan perpustakaan umum daerah puskel, OPD, Nagari, TBM dll	Orang	20.000	9.000	10.076.476.100	10.061.297.400	
	1.				Pelayanan Perpustakaan keliling	Operasional Perpustakaan keliling	Bulan	12,00	6	51.473.100	51.473.100	



	2.			Pembangunan gedung perpustakaan umum daerah (DAK bidang Perpustakaan)	Tersedianya gedung Perpustakaan umum Daerah	Unit	1	1	9.862.197.000	9.862.196.800	
	3.			Pelayanan rumah pintar perintis painan	Operasional layanan rumah pintar perintis painan	Bulan	12	6	37.164.850	37.164.850	
	4.			Pembinaan dan fasilitas bengkel menulis	Jumlah masyarakat yang di bina	Bulan	10	10	7.641.150	7.641.150	
4.	5.			Pembangunan gedung perpustakaan umum daerah (Penunjang DAK bidang perpustakaan)	Dukungan kegiatan pembangunan gedung Perpustakaan umum daerah	Unit	1	1	118.000.000	102.821.500	
				Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.	Persentase sarpras arsip kondisi baik	LKD	10	0	36.616.480	36.603.400	
	1.			Penataan dan Pengelolaan Arsip Inaktif (Depo arsip daerah)	Pengelolaan Depo Arsip	Bulan	12	12	36.616.480	36.603.400	
5.				Program Perbaikan dan Sistem Administrasi Kearsipan.	Persentase OPD, Nagari yang mengelola arsip secara baku	OPD dan Nagari	8	5	15.175.150	15.123.650	
	1.			Pembinaan dan Monev unit kearsipan.	Jumlah OPD dan Nagari yang di bina	OPD dan Nagari	20	12	11.030.750	11.030.750	
	2.			Pembuatan regulasi daerah tentang kearsipan.	Jumlah regulasi daerah tentang kearsipan yang di berikan	Perbub	1	1	4.144.400	4.092.900	



- **Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan.**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya arsip sebagai akuntabilitas kinerja dan informasi pembangunan	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase perangkat daerah yang menyerahkan arsip permanen ke LKD	6,25 (3 PD)	4,44 (2 PD)	66,66
2	Meningkatnya indeks budaya baca masyarakat	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Indek Budaya Baca Masyarakat Bernilai Cukup(50 – 76)	18,10	7,17	39,61

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.**

a. **Meningkatnya arsip sebagai akuntabilitas kinerja dan informasi pembanguna yaitu:**

1) **Persentase perangkat daerah yang menyerahkan arsip permanen ke LKD (Target Kinerja : 100%)
(Realisasi Kinerja : 66,66 %)**

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPd



serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Output pembayaran rekening telepon, air dan listrik.
 2. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan output terlaksananya pengelola administrasi.
 3. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor dengan output jasa kebersihan kantor
 4. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dengan output terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja.
 5. Kegiatan penyediaan alat-alat tulis kantor dengan output tersedianya alat tulis kantor.
 6. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan output tersedianya barang cetakan dan penggandaan.
 7. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan output komponen instalasi listrik dan bola lampu.
 8. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman dengan output tersedianya makan dan minum.
 9. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan output biaya perjalanan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
 10. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan output biaya perjalanan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala dengan output terpeliharanya Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
 - (2) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional dengan output terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional.
- Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan pembuatan regulasi daerah tentang kearsipan dengan output jumlah regulasi daerah tentang kearsipan yang diberikan.
 - (2) Kegiatan pembinaan dan movev unit arsip dengan output jumlah OPD dan Nagari yang dibina.



- d) Program penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah.
 - (1) Kegiatan penataan dan pengelolaan arsip inaktif (depo arsip daerah) dengan output pengeloaan depo arsip.

b. Meningkatnya indeks budaya baca masyarakat yaitu:

1. Indeks Budaya Baca Masyarakat Bernilai kurang berhasil (50 – 76) (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 39,61%)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
 - (1) Kegiatan Pembangunan gedung perpustakaan umum daerah (penunjang DAK perpustakaan) dengan output tersedianya gedung perpustakaan umum daerah yang representatif.
 - (2) Kegiatan pelayanan rumah pintar perintis dengan output operasional layanan rumah pintar perintis painan.
 - (3) Kegiatan pelayanan perpustakaan keliling dengan output operasional perpustakaan keliling.
 - (4) Kegiatan pembangunan gedung perpustakaan umum daerah (DAK Perpustakaan) dengan output tersedianya gedung perpustakaan umum daerah.
 - (5) Kegiatan pembinaan dan fasilitas bengkel menulis dengan output jumlah masyarakat yang dibina.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan.

- Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan :

- a. Belum lengkapnya regulasi daerah mengenai kearsipan dan perpustakaan;
- b. Terbatasnya SDM pengelola kearsipan dan perpustakaan (belum mempunyai arsiparis dan pustakawan baik di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan maupun PD dan unit kerja lainnya);



- c. Kemajuan informasi teknologi belum di manfaatkan secara proposional untuk hal-hal yang berguna/produktif;
 - d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta pendanaan pendukung pelayanan;
 - e. Rendahnya apresiasi dan pemahaman tentang arsip dan pustaka oleh aparat pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat pada umumnya, sehingga perhatian dan kepedulian terhadap kearsipan dan perpustakaan bukan menjadi hal yang prioritas; dan
 - f. Luasnya wilayah jangkauan untuk pelayanan baik pelayanan perpustakaan keliling maupun pelayanan peningkatan.
2. Solusi
- a. Menyelenggarakan pembinaan, pengembangan infrastruktur kearsipan dan perpustakaan;
 - b. Mendorong terwujudnya SDM yang profesional dan terampil di bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - c. Mendorong terwujudnya pusat jaringan pelayanan kearsipan dan perpustakaan di Kabupaten Pesisir Selatan, secara cepat, akurat, mudah murah dan fleksibel serta mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan dan penyimpanan;
 - d. Mendorong peningkatan jumlah arsip- arsip yang bernilai guna tinggi untuk disimpan dan dipelihara di Depo arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan meningkatkan koleksi bahan pustaka baik yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pessel maupun Perpustakaan;
 - e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta standarisasi sarana prasarana kearsipan dan perpustakaan; dan
 - f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesempatan membaca dan belajar melalui pelayanan prima, baik bidang kearsipan maupun perpustakaan.



8. URUSAN : TENAGA KERJA
PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Pada Tahun 2020 Urusan Tenaga Kerja diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.914.228.660,00 dengan realisasi Rp. 6.779.978.513,00 (98.16%). Adapun realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tenaga Kerja	Dinas Nakertrans	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 2. Peraturan Bupati Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumatera Barat Tahun 2020;	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Persen	100	100	48.855.500	48.829.500	
1				Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah Terlaksananya pelayanan data ketenagakerjaan dan pelayanan	Orang/ pencari kerja	1867	1867	48.855.500	48.829.500	-



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
					Kartu Pencari Kerja						
1	Transmigrasi	Dinas Nakertrans	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 2. Peraturan Bupati Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumatera Barat Tahun 2020;	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase sarana dan prasarana pendukung di wilayah KTM dalam kondisi baik	Persen	100	100	3.451.858.750	3.389.632.850	-
	1			Fasilitas dan Dukungan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Adanya Fasilitas Dukungan KTM	Paket	2	2	128.266.750	127.626.750	-
	2			Pembangunan , peningkatan dan pemeliharaan jalan/ jembatan dikawasan transmigrasi (DAK fisik afirmasi)	Terlaksananya perencanaan pembangunan di kawasan transmigrasi	Paket	2	2	3.323.592.000	3.262.006.100	-



- **SASARAN STRATEGIS PK DISNAKERTRANS TAHUN 2020**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Disnakertrans	Program Pelayanan Administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemenuhan layanan administrasi perkantoran Pemenuhan sarana dan prasarana penunjangn kerja	A	BB	
2	Menurunnya tingkat pengangguran	Program peningkatan kesempatan kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	5,83 %	5,84 %	100,17 %
3	Meningkatnya pemenuhan hak-hak pekerja	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan aturan-aturan ketenagakerjaan	tidak	dilaksana	kan di tahun2020
4	Peningkatan kemandirian masyarakat transmigran	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Persentrase sarana dan prasarna pendukung di wulayah KTM dalam kondisi baik	65 %	65 %	100 %



- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**
 1. **Meningkatnya akuntabilitas kinerja Disnakertrans, dengan indikator kinerja pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kerja (target kinerja A, realisasi kinerja BB)**
 - a) **Persentase Ternak Unggul (Target Kinerja : 6,5%) (Realisasi Kinerja : 5,62 %)**

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

 - Program Pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, output kegiatan ini adalah telah terpenuhinya jkebutuhan terhadap telep[on, air dan listrik sebanyak 12 bulan.
 - (2) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan, output kegiatan ini tersedianya dana untuk jasa administrasi keuangan selama satu tahun
 - (3) Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor, output kegiatan ini tersedianya dana untuk jasa kebersihan kantor untuk satu tahun
 - (4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, output kegiatan ini terpenuhinya operasional administrasi kantor untuk satu tahun.
 - (5) Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan, output kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan untuk satu tahun.
 - (6) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, output kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan komponen listrik dan penerangan kantor untuk satu tahun.
 - (7) Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, output kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan informasi dan pengetahuan melalui 3 surat kabar (Singgalang, Haluan dan Pos Metro) untuk satu tahun.
 - (8) Kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman, output kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat dan makan minum tamu kantor untuk satu tahun.
 - (9) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, output kegiatan ini terlaksananya tugas-tugas rutin ke luar daerah (Propinsi Sumatera Barat) untuk satu tahun.



- (10) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, output kegiatan ini terlaksananya tugas-tugas rutin dalam daerah (15 Kecamatan) untuk satu tahun.
- (11) Kegiatan Monitoring dan evaluasi kegiatan, output kegiatan ini terlaksananya pembinaan dan monitoring kegiatan dengan menghimpun data-data perkembangan hasil dari pelaksanaan kegiatan di 15 kecamatan untuk satu tahun.
- Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur , dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor, output kegiatan ini terlaksananya pemeliharaan aset-aset bangunan kantor sehingga tercipta kenyamanan dalam bekerja,kebutuhan untuk satu tahun.
 - (2) Kegiatan pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional, output kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas sehingga tercipta kenyamanan dalam melaksanakan tugas (kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2) untuk satu tahun
- 2. **Menurunnya tingkat pengangguran, dengan indikator kinerja yaitu:**
 - a) **Jumlah pencari kerja yang ditempatkan (Target Kinerja : 5,83%) (Realisasi Kinerja : 5,84 %)**
 Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
 - a) Program peningkatan kesempatan kerja, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Penyebar luasan informasi bursa tenaga kerja, output kegiatan terlaksananya pelayanan data ketenagakerjaan dan pelayanan kartu AK.1 di Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten pesisir selatan.
- 3. **Meningkatnya pemenuhan hak-hak pekerja, dengan indikator kinerja yaitu:**
 - a) **Persentase perusahaan yang menerapkan aturan-aturan ketenagakerjaan (Untuk tahun anggaran 2020 tidak dilaksanakan).**
- 4. **Meningkatnya kemandirian masyarakat transmigran, dengan indikator kinerja yaitu:**
 - a) **Persentase sarana dan prasarana pendukung wilayah Kota Terpadu Mandiri (KTM) dengan targer kinerja 65 % dan realisasi kinerja 65 %.**
 Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
 - b) Program Pengembangan wilayah transmigrasi , dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Fasilitasi dan dukungan pengembangan kawasan transmigrasi, output kegiatan terfasilitasinya dukungan terhadap perkembangan kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM).



- (2) Kegiatan Pembangunan, peningkatan jalan dan pemeliharaan jalan/jembatan di kawasan transmigrasi (DAK Fisik Afirmasi), output kegiatan terfasilitasinya dukungan terhadap perkembangan kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM).Terwujudnya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan desa strategis talang binjai – perbatasan SP 8 Muko-muko di kawasan transmigrasi.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan.

- **Permasalahan dan Solusi**

1. Permasalahan
 - a. Pencari kerja yang terdaftar tidak melaporkan apakah sudah bekerja atau belum
2. Solusi
 - a. Disosialisasikan kepada pencari kerja terdaftar agar melaporkan apakah sudah bekerja atau belum



9. URUSAN : PERHUBUNGAN
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

Pada Tahun 2020 Urusan Perhubungan diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.973.964.656,00 dengan realisasi Rp. 12.764.344.558,00 (98.85%). Adapun realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	12	500.846.182	499.878.088	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Ketersediaan Air, listrik dan jasa komunikasi	Bulan	12	12	98.400.000	98.360.489	
				Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Ketersediaan Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	184,235,500	184.235.000	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Ketersediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	42,200.000	42.199.929	
				Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Ketersediaan biaya perawatan bagi peralatan kerja	Bulan	12	12	6,550.000	6,550.000	
			Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ketersediaan alat tulis	Bulan	12	12	21.614.457	21.606.289	



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
			2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Ketersediaan barang cetakan dan penggadaan	Bulan	12	12	19.294.774	19.249.774	
				Kegiatan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Bulan	12	12	4.837.183	4.833.639	
				Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang - undangan	Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	12	5.980.000	5.300.000	
				Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Ketersediaan makan minum pegawai, rapat dan tamu	Bulan	12	12	18.991.500	18.934.800	
				Kegiatan Rapat – rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulan	12	12	45.600.400	45.595.400	
				Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Bulan	12	12	20.375.000	20.375.000	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Pengaman Kantor	Ketersediaan Jasa pengamanan kantor	Bulan	12	12	13.000.000	13.000.000	



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
				Kegiatan Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Ketersediaan Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Bulan	12	12	19.767.868	19.637.768	
				Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase cakupan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparat	Bulan	12	12	221.775.350	949.982.705	
				Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	12	221.775.350	198.005.936	
				Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan				957.095.300	949.982.705	
				Kegiatan Pemilihan dan Pemberiaan Penghargaan Bidang perhubungan	Penghargaan Bidang perhubungan	Kegiatan	1	1	6.464.450	6.464.450	
				Kegiatan Pengawasan Dan Pengendalian LLAJ	Jumlah Pengamanan dan Pengaturan lalu lintas	Bulan	12	12	93.010.000	92.990.415	
				Kegiatan Pengawasan Dan Pengendalian Lalu Lintas	Jumlah Pengamanan dan Pengaturan lalu lintas	Bulan	12	12	65.364.100	65.325.150	



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
				Angkutan Laut							
				Kegiatan Operasional Transportasi Pelayanan Pendidikan	Jumlah Bus Sekolah Yang beroperasi	Unit	3	3	263.539.800	257.602.057	
				Kegiatan Pelayanan Terminal Dan Perparkiran	Pengelolaan Terminal dan Perparkiran	Bulan	12	12	72.904.840	72.671.800	
				Kegiatan Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah	Pemungutan Retribusi Daerah	Bulan	12	12	455.115.000	454.928.833	
				Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas					6.723.888.298	6.654.422.052	
				Kegiatan Pegadaaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Jumlah PJU	Paket	6	6	648.325.600	648.325.600	
				Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Penerangan Jalan	Terpeliharanya PJU	Bulan	12	12	5.805.652.698	5.736.458.690	
				Kegiatan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (PHJD)	Terlaksananya Forum lalu Lintas Angkutan Jalan	Kegiatan	1	1	270.000.000	269.727.762	
				Program Peningkatan	Persentase peningkatan	Bulan	12	12	314.800.100	314.760.730	



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
				Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor						
				Kegiatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Bulan	12	12	314.800.100	314.760.730	

- **Sasaran Strategis PK Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi	85	88	103,53%
2	Meningkatkannya Kesadaran Tertib Berlalu Lintas	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase Menurunnya Pelanggaran Berlalu Lintas	5%	33,73%	674,60%



		Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas				
		Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor				

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.**

1. **Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal, dengan indikator kinerja yaitu:**

a) **Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi (Target Kinerja : 85) (Realisasi Kinerja : 88)**

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi merupakan data/ informasi tentang pengukuran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Dinas Perhubungan terhadap pelayanan transportasi. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Operasional Transportasi Pelayanan Pendidikan, dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya operasional transportasi pelayanan pendidikan.
- (2) Kegiatan Pelayanan Terminal dan Perparkiran dengan output terlaksananya pelayanan terminal dan perparkiran.
- (3) Kegiatan Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah dengan output terlaksananya pemungutan pendapatan asli daerah.

2. **Meningkatnya Kesadaran Tertib Berlalu Lintas, dengan indikator kinerja yaitu:**

a) **Persentase Menurunnya Pelanggaran Berlalu Lintas (Target Kinerja : 5%) (Realisasi Kinerja : 33,73%)**



Tujuan dari penetapan indikator ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas dengan cara menurunkan angka pelanggaran berlalu lintas. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Bidang, dengan output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan pengaturan lalu lintas.
 - (2) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LLAJ dengan output terlaksananya pengawasan dan pengendalian LLAJ.
 - (3) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Laut dengan output terlaksananya pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan laut.
- Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum dengan output kegiatan ini adalah jumlah penerangan jalan umum yang terpasang.
 - (2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Penerangan Jalan Umum dengan output terlaksananya pemeliharaan penerangan jalan umum.
 - (3) Kegiatan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (PHJD) dengan output terlaksananya forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/ kota.
- Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya pengelolaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi" dan "Persentase Menurunnya Pelanggaran Berlalu Lintas".



10. URUSAN : ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pada Tahun 2020 Urusan Administrasi Kependudukan diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.161.532.427,00 dengan realisasi Rp. 7.057.287.531,00 (99.30%). Adapun realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
A.	Administrasi Kependudukan	Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	12	222.076.696	217.694.488
1.			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan jaringan komunikasi, listrik dan PDAM	bulan	12	12	71.400.000	67.859.067
2.			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jenis peralatan dan bahan kebersihan yang tersedia	bulan	12	12	21.504.600	21.496.500
3.			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	bulan	12	12	9.250.000	9.247.500
4.			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	bulan	12	12	20.984.000	20.981.700
5.			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan kantor	bulan	12	12	11.188.000	11.129.500
6.			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen penerangan gedung kantor	bulan	12	12	5.399.500	5.397.000
7.			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terbayarnya tagihan koran/majalah	bulan	12	12	6.900.000	6.560.000
8.			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat	bulan	12	12	6.422.500	6.306.300
9.			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi keluar daerah yang diikuti	bulan	12	12	43.430.096	43.287.396
10.			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dalam daerah yang diikuti	bulan	12	12	25.598.000	25.429.525
II.			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur	%	70	70	179.129.850	178.226.150



1.			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Pelayanan Yang Baru	unit	30	30	61.048.000	61.048.000
2.			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah perbaikan gedung kantor yang dilaksanakan	bulan	12	12	35.600.000	35.600.000
3.			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	bulan	12	12	82.481.850	81.578.150
III.			Program Penataan Administrasi Kependudukan	Skor Kepuasan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Skor	7	8	3.236.152.354	3.234.099.782
1.			Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	Jumlah sarana pengolahan data dalam kondisi baik	unit	15	15	32.355.800	32.355.800
				Jumlah struktur jaringan data yang baik	struktur data	30	30		
2.			Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	Jumlah data anomali yang diperbaiki	data	20.000	18.555	12.249.700	12.249.700
				Jumlah data ganda yang dihapus	data	5.000	2.683		
				Jumlah data yang dikonsolidasikan	data	680.000	489.949		
				Jumlah buku profil kependudukan yang diterbitkan	buku	0	0		
3.			Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat	Jumlah media penyebaran informasi kependudukan	media	3	3	14.117.250	14.117.250
5.			Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan e-KTP	Jumlah penerbitan KTP_el	Jiwa	35.000	69.498	14.187.824	14.187.824
6.			Penerbitan Kartu Keluarga	Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga	dokumen	52.500	58.111	16.858.500	16.858.500
7.			Pelayanan Administrasi Kependudukan di Satuan Kerja	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan di UKL	dokumen	50.000	100.002	1.239.800.680	1.238.250.716
				Jumlah perekaman KTP_el di UKL	jiwa	3.100	18.662		
8.			Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan	Jumlah laporan Perkawinan dan Perceraian yang disusun	laporan	12	12	14.939.800	14.939.800
				Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan	akta	2.500	3.094		
9			Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran	Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran	akta	8.000	16.837	13.429.300	13.429.300



10			Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	jiwa	6.000	8.617	10.110.750	10.110.750
11			Pengelolaan Arsip Administrasi Kependudukan Berbasis Digital	Jumlah arsip digital Register Akta Kelahiran	arsip	23.000	28.659	21.423.000	21.423.000
12			Pelaksanaan Pelayanan Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling	Jumlah Nagari dan Sekolah yang dikunjungi	sekolah	15	15	12.179.750	12.179.750
12.			Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK Non)	Jumlah blanko dokumen kependudukan yang dicetak	lembar	37.500	37.500	1.823.630.000	1.823.127.392
				Jumlah peserta sosialisasi kependudukan	orang	900	0		
				Jumlah Bimtek/Pelatihan yang diikuti	bimtek	4	4		
13.			Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Data Warehouse	Jenis Layanan pada Pos Layanan Khusus	pos	4	4	10.870.000	10.870.000
				Jenis Layanan Online Kependudukan	jenis layanan	4	4		
				Jumlah Peserta Sosialisasi Pemanfaatan Database Kependudukan	orang	0	0		
				Jumlah data warehouse kependudukan yang diakses lembaga pengguna	data	180.000	268.861		
IV.			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	dokumen	8	8	86.241.800	86.209.250
1.			Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang diterbitkan	dokumen	8	8	86.241.800	86.209.250



1. Sasaran Strategis PK Kepala OPD

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Tertib Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	93,70	98,59	105%
		Penataaan Administrasi Kependudukan				
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
2	Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan	Penataaan Administrasi Kependudukan	Skor Kepuasan Pengguna Database Kependudukan	9	9	100%
			Persentase Data Kependudukan Yang Diakses Pengguna	75,00	150,90	201,20%



2. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

A. Meningkatnya Tertib Kepemilikan Dokumen Kependudukan

i) Persentase Cakupan Pemilikan Dokumen Kependudukan (Target Kinerja 93,70%) (Realisasi Kinerja 98,59%)

Indikator kinerja ini memiliki kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor, dengan output kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, kegiatan ini memiliki output tersedianya peralatan pelayanan yang baru sebanyak 30 unit.
 - 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, output dari kegiatan ini adalah terpeliharanya gedung kantor selama 12 bulan.
- Program Penataan Administrasi Kependudukan
 - 1) Kegiatan Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan e_KTP, output kegiatan ini adalah terlaksananya perekaman, pencetakan dan pendistribusian KTP_el
 - 2) Kegiatan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA), output kegiatan ini adalah setiap anak usia 0-17 tahun memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)
 - 3) Kegiatan Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga, output kegiatan ini adalah semua kepala keluarga memiliki Kartu Keluarga
 - 4) Kegiatan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan cerai, kegiatan ini memiliki output Terdatanya laporan perkawinan dan perceraian serta terdatanya jumlah kematian secara akurat.



- 5) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Yang Diakses Masyarakat, output kegiatan ini adalah tersosialisasi program- program administrasi kependudukan kepada masyarakat dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan
- 6) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK Nonfisik) dengan output kegiatan tersedianya blanko dan formulir dokumen kependudukan sesuai dengan kebutuhan.
- 7) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, output kegiatan ini adalah terciptanya layanan kependudukan yang responsive kepada masyarakat.
- 8) Peningkatan Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran, output kegiatan ini adalah meningkatnya cakupan pemilikan Akta Kelahiran Penduduk.
- 9) Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Satker, kegiatan ini memiliki output terciptanya layanan yang dekat, cepat, akurat dan murah kepada masyarakat
- 10) Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling (UP3SK), memiliki output memberikan pelayanan administrasi kependudukan di nagari – nagari jauh dari Ibukota Kabupaten dan sekolah – sekolah.
- 11) Kegiatan Pengelolaan Arsip Dokumen Kependudukan Berbasis Digital, output dari kegiatan ini adalah tertatanya arsip dokumen kependudukan.

B. Meningkatkan Pemanfaatan Database Kependudukan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- i) Skor Kepuasan Pengguna Database Kependudukan. (Target Kinerja 9) (Realisasi Kinerja 9)
Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
 - a) Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan), output dari kegiatan ini adalah tersedianya database kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat, valid dan mutakhir.
 - 2) Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Data Warehouse, output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Perjanjian Kerjasama (MoU) Pemanfaatan Database Kependudukan oleh Lembaga Pengguna dan terlaksananya Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pemanfaatan database kependudukan.



11. URUSAN PILIHAN : PARIWISATA
PERANGKAT DAERAH : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pada Tahun 2020 Urusan Pilihan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.169.902.095,00 dengan realisasi Rp. 7.629.052.241,00 (90.86%). Adapun realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	1. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020;	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran				303.382.138	301.964.082	
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bulan	12 bulan	12 bulan	31.560.000	30.256.607	
				Penyediaan Administrasi Keuangan	Tertibnya administrasi keuangan	bulan	12 bulan	12 bulan	75.796.443	75.793.650	
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Kebersihan kantor	bulan	12 bulan	12 bulan	100.200.359	100.194.200	
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	bulan	12 bulan	12 bulan	6.500.000	6.500.000	
				Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	bulan	12 bulan	12 bulan	25.582.864	25.560.125	
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	bulan	12 bulan	12 bulan	14.378.400	14.372.000	



				Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instansi listrik penerangan kantor	bulan	12 bulan	12 bulan	4.314.072	4.305.000	
				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minum	bulan	12 bulan	12 bulan	12.600.000	12.597.500	
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat koordnasi dan konsultasi luar daerah	bulan	12 bulan	12 bulan	11.125.000	11.125.000	
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Operasional perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bulan	12 bulan	12 bulan	21.325.000	21.260.000	
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Ketersediaan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur				480.929.000	480.463.400	
				Pemeliharaan Rutin/Berhala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung kantor dinas	bulan	12 bulan	12 bulan	60.500.000	60.466.600	
				Pemeliharaan Rutin/Berhala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	bulan	12 bulan	12 bulan	222.969.000	222.647.800	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	paket	1 paket	1paket	197.460.000	197.349.000	
				Program Peningkatan peran serta kepemudaan	Kenaikan Peringkat Pemuda Pelopor				37.475.550	37.475.550	



				Pembentukan Paskibra	Terselenggarakan Penyeleksian paskibra	kegiatan	1 kegiatan	hanya sampai Seleksi antar sekolah	32.990.550	32.990.550	
				Penyeleksian Jambore Pemuda dan Indonesia (JPI)	Terselenggarakan penyeleksian Jambore Pemuda Indonesia (JPI)	kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	4.485.000	4.485.000	
				Program Pembinaan dan Pemasaran Olahraga	Jumlah pembinaan dan permasalahan olahraga yang dibina				93.794.450	93.746.400	
				Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Terselenggara nya kompetisi olahraga	Kompetisi Sepak Bola antar Klub Tk. Kec. Se- Kab Pessel	1 Kompetisi	hanya sampai babak semi final	56.805.200	56.805.200	
				Aktivasi dan Bantuan Club Olahraga	Jumlah aktivasi dan bantuan untuk club-club olahraga yang dilakukan	klub	15 klub	15 klub	36.989.250	36.941.200	
2.	Urusan Kepariwisata- an	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	pemasaran pariwisata semakin meningkat				85.931.650	85.931.650	
				Pelaksanaan dan keikutsertan event Kepariwisata	Jumlah event yang diikuti	kali	1 paket	1 paket	83.032.750	83.032.750	
				Tour de Singkarak	Keikutsertaan pada Tour de Singkarak	kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	2.898.900	2.898.900	



				Program pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi wisata unggulan				3.515.328.250	3.077.362.316	
				Pengelolaan Kawasan Objek Wisata	Operasional pengelolaan objek wisata Carocok Painan	bulan	2 bulan	2 bulan	89.860.000	89.860.000	
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek wisata (DAK Penugasan)	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di Kawasan Wisata Mandeh Tarusan	paket	2 paket	2 paket	2.723.155.000	2.319.600.660	
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	paket	4 paket	4 paket	503.113.250	502.185.640	
				Peningkatan Tata Kelola PHJD Bidang Pariwisata	Dukungan tata kelola PHJD bidang pariwisata	paket	1 paket	1 paket	180.000.000	156.176.016	
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek wisata (DAK Penugasan)(Penunjang)	Sarana dan Prasarana objek wisata yang dibangun	paket	0 paket	0 paket	13.000.000	5.650.000	
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata (Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19)	Sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun	paket	0 paket	0 paket	6.200.000	3.890.000	
				Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah kelompok sadar wisata yang dibina				594.639.400	548.390.720	
				Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata	Layanan tamu daerah dalam rangka promosi	bulan	12 bulan	12 bulan	18.769.400	18.769.400	



				wisata							
				Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (DAK Non Fisik)	Jumlah pelaku wisata yang dibina	pelatihan	7 pelatihan	4 pelatihan	575.870.000	529.621.320	
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah kelompok ekonomi kreatif yang berkembang				225.852.200	225.449.250	
				Pembinaan dan Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dilatih	persen	0 persen	0 persen	18.847.700	18.847.700	
				Promosi Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata (Pemulihan Ekonomi Kreatif akibat Covid-19)	Terlaksananya promosi ekonomi kreatif berbasis pariwisata	paket	3 paket	3 paket	207.004.500	206.601.550	

- **Sasaran Strategis PK Kepala OPD**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Prog. Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Wisatawan (Orang)	1.000.700	177.283	17.71%
		Prog. Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rata-Rata lama tinggal Wisatawan (Hari)	1.25	1,5	120%



2	Terwujudnya Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing	Prog. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Penghargaan Ekraf Tingkat Provinsi / Nasional	0	1	200%
3	Meningkatnya Prestasi Pemuda	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah Bidang Kepeloporan Provinsi	0	0	0%
4	Meningkatnya Pembudayaan Olahraga	Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga	Peringkat pada Pekan Olahraga Provinsi	0	0	0%

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

a. **Meningkatnya Kunjungan Wisatawan (Nusantara dan Mancanegara)**

1) **Jumlah Kunjungan Wisata**

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Kegiatan Pelaksanaan dan keikutsertaan event Pariwisata Output Kegiatan terlaksananya event pariwisata dalam daerah maupun luar daerah.
 2. Kegiatan Tour de Singkarak
 3. Output kegiatan ini terlaksananya event Tour de Singkarak (TdS) di Kabupaten Pesisir Selatan.

2) **Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan**

- a) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan kegiatan sebagai berikut :



- (1) Pengelolaan Kawasan Objek Wisata
Output Kegiatan ini terkelolanya objek wisata Carocok Painan.
 - (2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek wisata (DAK Penugasan) Output Kegiatan ini Meningkatkan sarana dan prasarana objek wisata di Kawasan mandeh.
 - (3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Output Kegiatan ini yaitu meningkatnya jumlah sarana dan prasarana wisata yang di bangun.
 - (4) Peningkatan Tata Kelola PHJD Bidang Pariwisata Output Kegiatan ini Yaitu dukungan tata Kelola PHJD bidang pariwisata.
 - (5) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata (DAK Penugasan)(penunjang) Output Kegiatan ini yaitu sarana dan prasarana objek wisata yang di bangun.
 - (6) Meningkatkan sarana dan Prasarana Pariwisata (Pemulihan Ekonomi akibat Covid-19) Output Kegiatan ini yaitu sarana dan prasarana objek wisata yang di bangun.
- b) Program Program Pengembangan Kemitraan, dengan kegiatan sebagai berikut :
- (1) Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata Output Kegiatan ini yaitu Pelayanan tamu daerah dalam rangka promosi wisata.
 - (2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (DAK Non Fisik) Output Kegiatan ini yaitu Jumlah pelaku wisata yang di bina.

b. Terwujudnya Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing

1) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

a) Pembinaan dan Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif

Output Kegiatan ini yaitu jumlah pelaku ekonomi kreatif yang di latih

b) Promosi Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata (Pemulihan Ekonomi Kreatif akibat Covid-19) Output Kegiatan ini yaitu Terlaksananya promosi ekonomi kreatif berbasis pariwisata

c. Meningkatkan Prestasi Pemuda

1) Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

a) Pembentukan Paskibra Output Kegiatan ini adalah terselenggaranya penyeleksian paskibraka



- b) Pelaksanaan Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Output Kegiatan ini yaitu terselenggaranya Jambore Pemuda Indonesia (JPI).
- d. **Meningkatnya Pembudayaan Olahraga**
 - 1) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
 - a) Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Output Kegiatan ini yaitu terselenggaranya kompetisi olahraga di daerah.
 - b) Aktivasi dan Bantuan Club Olahraga Output Kegiatan ini yaitu jumlah aktivasi dan bantuan untuk club-club olahraga yang di lakukan.

- **PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

a. **PERMASALAHAN**

- 1. Kompetisi terhenti pada babak semi final karena refocusing anggaran

b. **SOLUSI**

- 1. Telah dilaksanakan pembangunan lanjutan objek wisata Sungai Gemuruh di Kec. Koto XI Tarusan



C. URUSAN PILIHAN

1. URUSAN : PERIKANAN PERANGKAT DAERAH : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pada Tahun 2020 Urusan Perikanan diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.731.671.901,00 dengan realisasi Rp. 2.627.148.977,00 (94.48%). Adapun realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan pelayanan administrasi kantor	Bulan	12	12	444.360.519	420.463.747	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan Air, Listrik dan jasa komunikasi	Bulan	12	12	85.800.000	64.509.203	
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Ketersediaan layanan administrasi keuangan	Bulan	12	12	105.120.000	105.060.000	
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Ketersediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	68.000.000	68.000.000	



No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Ketersediaan biaya perawatan bagi peralatan kerja	Bulan	12	12	16.749.700	16.649.700	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ketersediaan alat tulis	Bulan	12	12	33.022.275	33.001.900	
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Ketersediaan barang cetak dan penggandaan	Bulan	12	12	20.853.600	20.843.000	
				Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Ketersediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	Bulan	12	12	20.000.000	19.975.000	
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	12	4.500.000	4.200.000	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Ketersediaan makan dan minum pegawai, rapat dan tamu	Bulan	12	12	14.845.000	13.295.000	
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulan	12	12	31.469.944	31.204.944	
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Bulan	12	12	44.000.000	43.725.000	



No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
				Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor yang representatif	Bulan	12	12	371.273.200	367.561.281	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Bulan	12	12	63.600.000	63.600.000	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	12	307.673.200	303.961.281	
				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai Sakip Dinas				10.877.400	10.877.400	
				Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Laporan Triwulan Hasil Pengendalian dan Monev (Dokumen)	Triwulan	4,00	0,00	7.802.900	7.802.900	
				Pengembangan dan Peningkatan Data dan Informasi	Data Base Perikanan (Dokumen)	Dokumen	1	0	3.074.500	3.074.500	
				Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	16.763	12.018,00	1.517.211.220	1.492.826.200	



No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
				Pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI) Pincuran Boga	Beroperasionalnya BBI Pincuran Boga (Bulan)	Bulan	12	12	153.850.950	147.110.150	
				Penyediaan sarana dan prasarana perikanan Budidaya Ikan (DAK)	Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (Paket)	Paket	1	1,00	745.927.020	733.116.550	
				Penunjang Kegiatan DAK Bidang Perikanan Budidaya	Terlaksananya Kegiatan DAK bidang perikanan budidaya (Bulan)	Bulan	12	12,00	14.092.000	12.053.250	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Kolam Perikanan rakyat	Tersedianya sarana dan prasarana kolam perikanan rakyat (paket)	Paket	1	-	1.817.000,00	1.817.000,00	
				Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	1. Jumlah Pembudidaya yang dilatih CPIB, dan CBIB	orang	20	-	4.163.500	4.163.500	
				Pendampingan Kegiatan Pusat dan Propinsi Bidang Perikanan Budidaya	Tertibnya administrasi Kegiatan Pusat dan Propinsi	Bulan	12	-	1.802.750	1.802.750	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Kolam Perikanan rakyat (Pemulihan Ekonomi Akibat Covid 19)	Tersedianya sarana dan prasarana kolam perikanan rakyat (paket)	Paket	1	1,00	595.558.000	592.763.000	



No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
				Pengelolaan Pabrik Pengolahan Pakan Ikan	Beroperasionalnya Pabrik Pengolah Pakan Ikan	Bulan	12	-	17.158.250	17.158.250	
				Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	44.440	35.342,7	1.928.503.030	1.872.972.309	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan skala kecil untuk nelayan (DAK)	Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan skala kecil untuk nelayan	Paket	1	1,00	1.245.217.980	1.196.462.000	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Paket	1	-	2.915.800	2.915.800	
				Pendampingan Kegiatan Pusat dan Propinsi bidang Pemberdayaan nelayan kecil	Terlaksananya pendampingan kegiatan provinsi dan pusat bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil	Bulan	12	-	7.558.250	7.558.250	
				Penunjang Kegiatan DAK Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil	Terlaksananya kegiatan DAK Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil	Bulan	12	12	24.533.000	22.656.159	
				Penguatan dan Pembinaan Kelembagaan KUB Perikanan Tangkap	1. Jumlah Kelembagaan dan Pembinaan KUB Perikanan Tangkap	KUB	10	-	7.663.750	7.663.750	



No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
				Pro Gerakan Anti Kemiskinan Nelayan (Pro Gakin)	Terlaksananya Kegiatan Pro Gerakan Anti Kemiskinan	KUB	3	-	9.589.250	9.589.250	
				Penanganan Dampak Covid 19 untuk nelayan (Pemulihan Ekonomi Akibat Covid 19)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Paket	1	1	631.025.000	626.127.100	
				Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	Terbinanya Kelompok Pengolah Pemasar (Poklahsar)	Poklahsar	48	15	241.687.600	240.916.200	
				Gerakan Masyarakat Makan Ikan (GEMARAKIN)	Masyarakat yang terlibat (orang)	Orang	150	-	16.144.600	16.144.600	
				Pendampingan Kegiatan Pusat dan Propinsi Bidang P2HP	Tertunjangnya kegiatan Propinsi (bulan)	Bulan	12	-	8.036.050	8.036.050	
				Pembinaan Kelembagaan dan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	1. Jumlah masyarakat yang mengikuti bina mutu dan diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan	orang	85	-	5.856.950	5.856.950	
				Penanganan Dampak Covid 19 untuk pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (Pemulihan Ekonomi Akibat Covid 19)	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil	Poklahsar	15	15	211.650.000	210.878.600	



- **Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya produksi perikanan	Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	16.763	12.018	71,69
		Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	44.440	35.342	79,53
2	Meningkatnya nilai tambah produk Kelautan dan Perikanan	Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	Nilai tambah produk hasil Perikanan (Rp)	71.732.746.250	131.052.950.000	182,69

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.**

1. Meningkatnya produksi perikanan, dengan indikator kinerja yaitu:

a) Jumlah Produksi Perikanan (Ton) **(Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 85,26%)**

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :



- Program Pengembangan Budidaya Perikanan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI) Pincuran Boga
 - (2) Kegiatan Pendampingan Kegiatan Pusat dan Propinsi Bidang Perikanan
 - (3) Penunjang Kegiatan DAK Bidang Perikanan Budidaya
 - (4) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
 - (5) Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Ikan (DAK)
 - (6) Pengelolaan Panrik Pengolahan Pakan Ikan
 - (7) Penyediaan Sarana dan Prasarana Kolam Perikanan Rakyat
 - (8) Penyediaan Sarana dan Prasarana Kolam Perikanan Rakyat (Pemulihan Ekonomi Akibat Covid 19)
 - Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dengan kegiatan sebagai berikut
 - (1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil untuk nelayan (DAK)
 - (2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
 - (3) Pro Gerakan Anti Kemiskinan (Pro Gakin)
 - (4) Pendampingan Kegiatan Pusat dan Propinsi Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil
 - (5) Penunjang Kegiatan DAK bidang pemberdayaan nelayan kecil
 - (6) Penguatan kelembagaan KUB Perikanan Tangkap
 - (7) Penanganan dampak covid 19 untuk nelayan (pemulihan ekonomi akibat covid 19)
2. Meningkatnya nilai tambah produk Perikanan dan Kelautan, dengan indikator kinerja yaitu:
- a) Nilai tambah produk hasil Perikanan (Rupiah) **(Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 182,69%)**
 yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
- a) Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan, dengan kegiatan sebagai berikut :
- (1) Kegiatan Gemar Makan Ikan (Gemarikan)
 - (2) Pembinaan kelembagaan dan produk hasil kelautan dan perikanan
 - (3) Pendampingan kegiatan Pusat dan propinsi bidang P2HP



- (4) Penanganan dampak covid 19 untuk pengolah dan pemasaran hasil perikanan (pemulihan ekonomi akibat covid 19)

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan.

- Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Banyaknya BMD yang dimiliki oleh Distrikhortbun untuk dipelihara/dirawat;
- b. Selain pemeliharaan Gedung/Kantor Kabupaten, DinasPerikanan;
- c. Dinas Perikanan memiliki kendaraan dinas operasional (5 unit roda 4 dan 20 unit roda 2); dan
- d. Kegiatan tidak terlaksana karena ada refocusing.

2. Solusi

- a. Perawatan secara berkala;
- b. Perlu dilakukan pemeliharaan terhadap gedung tersebut agar tidak rusak;
- c. Perlu dilakukan pemeliharaan terhadap kendaraan dinas operasional tersebut agar tidak rusak; dan
- d. tahun depan dianggarkan lagi kegiatan yang tidak terlaksana karena refocusing.



2. URUSAN : Pertanian
PERANGKAT DAERAH : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan menyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian yang dilaksanakan Selatan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Adapun Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh **Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan** Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Penugasan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 24.643.073.723,00-** terealisasi sebesar **Rp. 23.323.420.600,00-** atau **91,72%** Rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan pelayanan administrasi kantor	Bulan	12	12	605.622.762	573.662.348
1.				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan Air, Listrik dan jasa komunikasi	Bulan	12	12	106.860.000	76.388.960
2.				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Ketersediaan layanan administrasi keuangan	Bulan	12	12	187.397.430	187.394.000
3.				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Ketersediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	123.409.000	122.931.932



	4.				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Ketersediaan biaya perawatan bagi peralatan kerja	Bulan	12	12	8.047.000	7.780.000
	5.				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ketersediaan alat tulis	Bulan	12	12	44.883.861	44.706.515
	6.				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Ketersediaan barang cetak dan penggandaan	Bulan	12	12	17.447.480	17.439.700
	7.				Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Ketersediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	Bulan	12	12	3.469.800	3.464.300
	8.				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Bulan	12	12	4.680.000	4.680.000
	9.				Penyediaan Makanan dan Minuman	Ketersediaan makan dan minum pegawai, rapat dan tamu	Bulan	12	12	12.856.250	12.850.000
	10.				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulan	12	12	54.946.941	54.826.941
	11.				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Bulan	12	12	41.625.000	41.200.000
2.					Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor yang representatif	Bulan	12	12	231.115.380	225.517.665
	1.				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Bulan	12	12	57.000.000	56.984.000
	2.				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	12	174.115.380	168.533.665
3.					Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya luas tambah tanam padi sawah	Ha	3.128	3.128	2.041.300	2.041.300



	1.				Fasilitas Asuransi Usaha Tanaman Padi	Luas lahan petani yang difasilitasi	Ha	646,40	646,40	2.041.300	2.041.300
4.					Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Persentase kelompok tani yang menerapkan teknologi	%	2,14	2,14	8.449.750	8.449.750
	1.				Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah alat dan mesin pertanian yang diserahkan	Unit	-	-	7.424.750	7.424.750
	2.				Pengembangan Teknologi Budidaya Padi	Jumlah Petani yang mengikuti sekolah lapang budidaya padi organik dan SRI	orang	-	-	1.025.000	1.025.000
5.					Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Jumlah Produksi Pertanian	Ton	664.371	1.026.655,94	591.001.337	537.437.300
	1.				Pengembangan Bibit Unggul Pertanian	Tersedianya Bibit Unggul Pertanian	Kg	-	-	18.927.000	18.667.550
	2.				Pembenahan dan Pengolahan Data Statistik Pertanian	Jumlah Buku Statistik Pertanian	Buku	-	-	58.900.000	58.900.000
	3.				Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan	Tersedianya Bibit Unggul Tanaman Perkebunan	kg	-	-	2.425.000	2.425.000
	4.				Pengembangan Tanaman Hortikultura	Tersedianya Bibit Unggul Tanaman Hortikultura	Batang	-	-	3.521.000	3.521.000
	5.				Pemantauan Peredaran Pupuk dan Pestisida	Jumlah Sampel pupuk dan pestisida yang di uji	Sampel	-	-	2.385.500	2.385.500
	6.				Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan	Jumlah Kelompok penangkar yang dibina	Kelompok	-	-	5.152.700	5.152.700
	7.				Penunjang Kegiatan Provinsi dan Pusat Bidang Tanaman Pangan Hortikultura	Terfasilitasinya kegiatan pusat dan provinsi yang ada di daerah	Bulan	4	3	2.190.000	2.190.000



	8.				Sekolah Lapang Pengendalian Hama dan Penyakit/ OPT Tanaman Perkebunan	Jumlah petani yang mengikuti SL OPT	orang	-	-	10.880.000	10.880.000
	9.				Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah gerakan pengendalian hamaa dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura	Gerakan	3	3	66.685.250	66.685.300
	10.				Penunjang Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR)	Terfasilitasinya kegiatan PSR	Kegiatan	1	0,25	8.311.500	8.311.500
	11.				Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Operasional rekomendasi ruang LP2B	Bulan	3	3	3.550.000	1.025.000
	12.				Pengembangan Tanaman Hortikultura (Dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak Covid 19)	Tersedianya Bibit unggul Tanaman Hortikultura	Ha	6	6	408.073.387	357.293.750
6.					Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan	Persentase Penyuluh berprestasi	%	1	2	81.451.800	81.451.800
	1.				Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	Biaya Operasional Penyuluh Pertanian	orang	113	64	81.451.800	81.451.800
7.					Program Peningkatan Kelembagaan Petani	Persentase Poktan yang naik status	%	10.62	2	1.335.796.271	1.079.801.746
	1.				LOAN IPDMIP	Jumlah petani yang mengikuti SL Budidaya Padi	orang	1.308	336	1.275.558.000	1.024.093.275
	2.				Penunjang LOAN IPDMIP	Kegiatan LOAN IPDMIP yang difasilitasi	Kegiatan	1	1	60.238.271	55.708.471
8.					Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian	Jumlah diversifikasi hasil olahan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jenis	1	-	9.920.750	9.920.750



	1.				Pengembangan Jaringan Pemasaran Produksi Perkebunan	Rapat - rapat koordinasi dan asosiasi bidang perkebunan yang dilaksanakan	orang	-	-	3.510.500	3.510.500
	2.				Pengembangan Pasca Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah RMU dan lantai jemur yang direvitalisasi dan sarana pengolahan hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura yang disalurkan	Unit	-	-	6.410.250	6.410.250
9					Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan	Indek Pertanaman	Kali	2,14	2,14	4.483.783.238	4.047.330.550
	1				Pembangunan/ Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun (JUT,Jalan Produksi, Embung,Irigasi)	Kegiatan	19	19	3.254.068.425	3.240.795.950
	2				DAK Bidang Pertanian dan Pendamping	Jumlah embung/ dam parit saluran yang dibangun/ direhabilitasi	unit	5	5	1.071.556.000	651.557.050
	3				Penunjang DAK Bidang Pertanian	Lancarnya pelaksanaan kegiatan DAK Bidang pertanian	%	0,25	0,75	25.451.000	25.451.000
	4				Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian	Terfasilitasinya kegiatan pusat (satker 08) (kegiatan)	Kegiatan	1	1	68.218.363	65.044.800
	5				Pengembangan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian (dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak covid-19)	Jumlah Prasarana pertanian yang dibangun (JUT,Jalan Irigasi)	unit	14	14	64.489.450	64.481.750



- **Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya produksi pertanian	Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Jumlah Produksi Pertanian (Ton)	664.371	1.026.445	154,50
		Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan				
		Peningkatan Kelembagaan Petani				
		Peningkatan Kesejahteraan Petani				
		Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan				
		Penyediaan dan Pengembangan prasarana dan sarana pertanian/ perkebunan	Produktivitas (Ton/Ha)	7,85	9,38	119,49
2	Meningkatnya nilai tambah produk hasil olahan pertanian	Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian	Nilai tambah produk hasil olahan pertanian (Rp)	675.000.000	689.810.000	102,19



- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.**
 - a. Meningkatnya produksi pertanian, dengan indikator kinerja yaitu:
 1. Jumlah Produksi Pertanian (Ton) **(Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 154,50%)**
yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
 - Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan, dengan output kegiatan ini adalah tersedianya bibit perkebunan untuk petani/keompok tani;
 - (2) Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian dengan output kegiatan ini adalah tersedianya bibit tanaman pangan untuk petani/keompok tani;
 - (3) Kegiatan Pengembangan Tanaman Hortikultura dengan output kegiatan ini adalah tersedianya bibit tanaman hortikultura untuk petani/keompok tani;
 - (4) Kegiatan Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan output kegiatan ini adalah terlaksana gerakan pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura;
 - (5) Kegiatan Pembenahan dan Pengolah Data Statistik Pertanian, dengan output kegiatan ini adalah tersusunnya buku statistik pertanian;
 - (6) Kegiatan Penunjang Kegiatan Provinsi dan Pusat Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan output kegiatan ini adalah terfasilitasi dan lancarnya pelaksanaan kegiatan provinsi dan pusat di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - (7) Kegiatan Pemantauan Peredaran Pupuk dan Pestisida, dengan output kegiatan ini adalah terpantaunya peredaran pupuk dan pestisida di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - (8) Kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama dan Penyakit/OPT Tanaman Perkebunan, dengan output kegiatan adalah terlaksananya sekolah lapang pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan;



- (9) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan, dengan output kegiatan ini adalah terbinanya kelompok penangkar perkebunan;
 - (10) Kegiatan Penunjang Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR), dengan output kegiatan ini adalah terfasilitasi dan lancarnya pelaksanaan kegiatan peremajaan sawit rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - (11) Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dengan output kegiatan ini adalah terlindungnya lahan pertanian dari alih fungsi ke penggunaan selain pertanian;
 - (12) Kegiatan Pengembangan Tanaman Hortikultura (Dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak Covid 19), dengan output kegiatan ini adalah tersedianya benih tanaman hortikultura dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak covid 19.
 - Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan sebagai berikut
 - (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna, dengan output kegiatan ini adalah tersedianya alat dan mesin pertanian untuk petani/keompok tani;
 - (2) Kegiatan Pengembangan Teknologi Budidaya Padi, dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya teknologi budidaya padi dengan sistem SRI dan Organik.
 - Program Peningkatan Kelembagaan Petani, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan LOAN IPDMIP, dengan output kegiatan ini adalah tersedianya terlaksananya sekolah lapang budidaya padi dengan sistem jarwo;
 - (2) Kegiatan Penunjang LOAN IPDMIP, dengan output kegiatan ini adalah lancarnya kegiatan LOAN IPDMIP.
 - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Fasilitasi Asuransi Usaha Tani Padi, dengan output kegiatan ini adalah terfasilitasi lahan sawah petani/keompok tani untuk ikut program asuransi usaha tani padi;
 - Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian dan Perkebunan, dengan output kegiatan ini adalah terfasilitasi kegiatan penyuluh pertanian lapangan;
2. Produktivitas (Ton/Ha) **(Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 119,49%)**
 yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD



serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana dan sarana pertanian/perkebunan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian, dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi dan jalan pertanian;
 - (2) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian, dengan output kegiatan ini adalah terfasilitasi dan lancarnya pelaksanaan kegiatan satuan kerja (08) dari pusat;
 - (3) Kegiatan DAK Bidang Pertanian (DAK Penugasan), dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan embung dan dam parit saluran;
 - (4) Kegiatan Penunjang DAK Bidang Pertanian, dengan output kegiatan ini adalah lancarnya kegiatan DAK bidang pertanian (DAK penugasan);
 - (5) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian (Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Akibat Dampak Covid-19), dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pertanian dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak covid 19.

b. Meningkatnya nilai tambah produk hasil olahan pertanian, dengan indikator kinerja yaitu:

1. Nilai tambah produk hasil olahan pertanian (Rp) **(Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 102,19%)**

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Pengembangan Pasca Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan output kegiatan ini adalah tersalurnya sarana pasca panen tanaman pangan dan hortikultura;
 - (2) Kegiatan Pengembangan Jaringan Pemasaran Produksi Perkebunan, dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan jaringan pemasaran perkebunan.



Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan.

- Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Banyaknya BMD yang dimiliki oleh Distanhortbun untuk dipelihara/ dirawat
- 2) Selain pemeliharaan Gedung/Kantor Kabupaten, Distanhortbun juga mempunyai 15 unit Gedung Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang butuh pemeliharaan setiap tahunnya
- 3) Distanhortbun memiliki 101 unit kendaraan dinas operasional (3 unit roda 4 dan 98 unit roda 2)
- 4) Masih tingginya tingkat kehilangan hasil tanaman pangan akibat bencana pertanian
- 5) Masih rendahnya minat petani untuk ikut program AUDP
- 6) Masih rendah penerapan teknologi budidaya pertanian
- 7) Masih belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian
- 8) Masih tingginya tingkat pemakaian bahan-bahan kimia pada proses budidaya tanaman, sehingga akan merusak lingkungan dan kesehatan manusia
- 9) Masih rendahnya produktivitas pertanian
- 10) Masih rendahnya pemakaian benih unggul tanaman pangan ditingkat petani
- 11) Masih belum validnya data statistik pertanian
- 12) Masih rendahnya pemakaian bibit unggul tanaman perkebunan ditingkat petani
- 13) Masih rendahnya pemakaian benih unggul tanaman Hortikultura ditingkat petani
- 14) Masih ditemuinya pestisida dan pupuk yang diduga palsu beredar
- 15) Masih kurangnya petani penangkar bibit perkebunan
- 16) Semakin tingginya serangan OPT Perkebunan
- 17) Semakin tingginya serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura
- 18) Susahnya mengumpulkan data administrasi calon penerima bantuan
- 19) Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan lainnya
- 20) Masih rendahnya kesadaran petani untuk keberlanjutan kegiatan secara swadaya
- 21) Masih rendahnya penyuluh pertanian yang berprestasi
- 22) Masih rendahnya penyuluh pertanian yang berprestasi
- 23) Masih rendahnya Poktan yang naik status
- 24) Masih banyak Poktan di Daerah Irigasi yang belum ikut Sekolah Lapang Budidaya Padi
- 25) Masih rendahnya jumlah diversifikasi hasil olahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan



- 26) Masih tingginya kehilangan hasil pada tahap panen dan pasca panen
- 27) Lambatnya peningkatan IP
- 28) Banyaknya Insfrastruktur pertanian yang rusak
- 29) Stadar biaya pembangunan Embung pada DAK terlalu kecil
- 30) Tahun 2020 ini yang terlaksana baru pembuatan DED Insfrastruktur Pertanian sebanyak 14 unit

b. Solusi

- 1) Perawatan secara berkala
- 2) Perlu dilakukan pemeliharaan terhadap gedung tersebut agar tidak rusak
- 3) Perlu dilakukan pemeliharaan terhadap kendaraan dinas operasional tersebut agar tidak rusak
- 4) Peningkatan keikutsertaan petani/kelompok tani kegiatan Asuransi Usaha Tanaman Padi
- 5) Perlu ditingkatkan sosialisasi dan kesadaran petani untuk ikut program AUTP
- 6) Peningkatan penerapan teknologi budidaya pertanian
- 7) Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian
- 8) Pengurangan pemakaian bahan-bahan kimia dengan menggantikannya dengan bahan-bahan organik yang banyak terdapat dilingkungan sekitarnya dengan cara pelaksanaan sekolah lapang budidaya tanaman (SL-GAP)
- 9) Peningkatan teknologi budidaya pertanian
- 10) Peningkatan produksi benih unggul melalui pemberdayaan penangkar benih
- 11) Pengumpulan data ditingkat lapangan ditingkatkan dan juga kualitas datanya
- 12) Peningkatan produksi bibit unggul melalui pemberdayaan penangkar bibit
- 13) Peningkatan produksi bibit unggul melalui pemberdayaan penangkar bibit
- 14) Peningkatan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida
- 15) Penumbuhan petani dan kelompok penangkar bibit perkebunan
- 16) Peningkatan pengendalian OPT ditingkat lapangan baik itu gerakan pengendalian OPT maupun bantuan sarana pengendalian
- 17) Peningkatan pengendalian OPT ditingkat lapangan baik itu gerakan pengendalian OPT maupun bantuan sarana pengendalian
- 18) Peningkatan pemahaman petani/kelompok tani terhadap program PSR
- 19) Penetapan Perda LP2B secepatnya
- 20) Penyediaan sarana produksi secara swadaya darri hasil produksi pertanian
- 21) Peningkatan SDM Penyuluh melalui pendidikan dan pelatihan penyuluhan
- 22) Peningkatan SDM Penyuluh melalui pendidikan dan pelatihan penyuluhan pertanian lapangan



- 23) Peningkatan kegiatan forum komunikasi petani dan temu tani
- 24) Penambahan kelas sekolah lapang budidaya padi
- 25) Peningkatan pembinaan kelompok - kelompok pengolahan hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
- 26) Revitalisasi sarana pasca panen
- 27) Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian
- 28) Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur pertanian
- 29) Standar pembangunan embung pertanian sebaiknya disesuaikan besaran rencana pembangunannya dilapangan
- 30) Akan dianggarkan Tahun berikutnya

3. URUSAN : Peternakan PERANGKAT DAERAH : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan

Adapun Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 Urusan Peternakan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Penugasan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 6.484.028.943,00-** terealisasi sebesar **Rp. 6.326.679.610,00-** atau **98,71%** Rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan adminitrasi perkantoran	persen	12 bulan	12 bulan	438.034.042	422.175.306
				Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, SDA dan listrik	Tahun	12	12	78.648.900	70.624.645
				Kegiatan jasa administrasi keuangan	Terwujudnya pembayaran honor tenaga administrasi	Tahun	12	12	141.960.360	139.256.100
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan kantor	Tahun	12	12	32.404.758	29.790.016
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terwujudnya pemeliharaan/perbaikan peralatan kantor	Tahun	12	12	8.550.000	8.505.000



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK kantor	Tahun	12	12	59.371.634	59.371.634
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tahun	12	12	23.511.218	22.247.218
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Tahun	12	12	10.362.310	10.362.310
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya buku-buku ilmu pengetahuan praktis/pustaka	Tahun	12	12	4.570.000	3.720.000
				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum	Tahun	12	12	10.512.550	10.402.700
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tahun	12	12	30.005.000	29.758.371
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tahun	12	12	35.950.000	35.950.000
				Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	Terlaksananya operasional pelaporan	Tahun	12	12	2.187.312	2.187.312
2			2. Peraturan Bupati Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumatera Barat Tahun 2020;	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	persen	12 bulan	12 bulan	159.564.603	150.734.953
				Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Tahun	12 bulan	12 bulan	34.200.000	34.200.000
				Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	Tahun	12 bulan	12 bulan	125.364.603	116.534.953
3				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya penyusunan laporan tahunan dan statistik	persen	15 kec	15 kec	4.768.250	4.768.250
				Kegiatan Penyusunan laporan tahunan dan statistik					4.768.250	4.768.250



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
4				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	persentase penurunan angka kematian ternak	persen	0,1	0,04	109.234.250	108.314.250
				Kegiatan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak					74.935.750	74.815.750
				Pengawasan perdagangan ternak antar daerah					18.498.000	17.698.000
				Pengendalian dan pemberantasan penyakit rabies					15.800.500	15.800.500
5				Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase ternak unggul	persen	6.000 ekor	7.635 ekor	1.757.211.861	1.750.621.561
				Kegiatan Pembibitan dan perawatan ternak					130.950.000	128.984.000
				Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat					861.919.461	861.854.911
				Peningkatan mutu genetik melalui IB					143.650.000	143.171.250
				Pemberdayaan kelembagaan dan usaha peternakan					92.203.400	92.131.050
				Penunjang pengembang ternak					13.774.000	13.774.000
				Pengembangan ternak ekonomi kerakyatan (Peningkatan ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19)					514.715.000	510.706.350
6				Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Ternak	Terlaksananya even promosi olahan hasil produksi peternakan dan sosialisasi	persen	2 kali	2 kali	26.373.650	26.373.650
				Kegiatan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah					26.373.650	26.373.650
7				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan	Tersedianya sarana dan prasarana peternakan untuk kelompok	persen	0	0	5.813.750	5.813.750
				Kegiatan Pembangunan					5.813.750	5.813.750



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				sarana dan prasarana pertanian mendukung peternakan						
					TOTAL				2.501.000.406	2.468.801.720

- **Sasaran Strategis PK Kepala OPD**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Ternak	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase Ternak Unggul	6,5 %	5,62%	86,45
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan				
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan				
2	Menurunnya angka kematian ternak dan kasus zoonosis	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase penurunan angka kematian ternak	0,1 %	1,59%	158,84
			Jumlah kasus zoonosis yang dilaporkan	20 kasus	83,65%	52,18



- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**
 - a. **Meningkatnya Kualitas Ternak, dengan indikator kinerja yaitu:**
 - 1. **Persentase Ternak Unggul (Target Kinerja : 6,5%) (Realisasi Kinerja : 5,62 %)**

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

 - Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak output kegiatan ini adalah telah terlaksananya operasional pemeliharaan ternak di Pusat Perbibitan dan Pengembangan Peternakan dengan jumlah ternak saat ini 69 ekor sapi.
 - 2) Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat dengan output terdistribusikannya bibit ternak berupa belanja hibah pengadaan ternak sapi sebanyak 82 ekor terdiri dari sapi bali betina 37 ekor dan sapi pesisir betina 45 ekor yang dihibahkan kepada 7 kelompok di Kecamatan Pancung Soal, Basa Ampek Balai Tapan, Batang Kapas dan Linggo Sari Baganti.
 - 3) Kegiatan Peningkatan Mutu Genetik IB dengan output Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2020 ikut menyukseskan Program Nasional SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri) dengan target 7.617 akseptor IB reguler, bunting 5.345 ekor dan kelahiran 4.276 ekor.
 - 4) Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan dan Usaha Peternakan dengan output ternak sapi/kerbau yang masuk asuransi tahun 2020 sebanyak 2.254 ekor dengan capaian fisik 139,38% untuk pemanfaatan klaim AUTS/K sebanyak 56 ekor ternak masyarakat yang telah diajukan klaimnya dan disetujui pembayarannya sebesar Rp. 517.500.000,00. Realisasi KUR Peternakan sebesar Rp. 25.336.000.000 dengan sekitar 191 nasabah.
 - 5) Kegiatan Penunjang Pengembangan Ternak dengan output terlaksananya jumlah peternak yang difasilitasi AUTS/K dengan melakukan sosialisasi dan pemasangan eartag yang bertujuan untuk memfasilitasi penguatan dan perlindungan modal usaha ternak dan untuk memberikan identitas ternak yang sudah diasuransikan, kegiatan ini dilakukan di 15 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 6) Kegiatan Pengembangan Ternak Ekonomi Kerakyatan (Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Terdampak Covid19) dengan output terealiasinya bantuan hibah kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 berupa bantuan ternak bibit ayam kampung unggul dan bibit ternak itik. Bibit ayam kampung unggul didistribusikan



kepada 31 kelompok sebanyak 12.400 ekor, obat-obatan 31 paket, pakan starter sebanyak 2.480 Kg dan pakan grower sebanyak 1.850 Kg pendistribusiannya tersebar di Kecamatan Bayang, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Pancung Soal, Air Pura dan Ranah Ampek Hulu Tapan. Untuk Bibit Ternak Itik didistribusikan kepada 28 kelompok sebanyak 10.150 ekor, obat-obatan 28 paket, pakan starter 2000 Kg, pakan grower 2.300 Kg dialokasikan dikecamatan Bayang, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Ranah Pesisir, Lengayang, Pancung Soal, Air Pura, Basa Ampek Balai Tapan dan Ranah Ampek Hulu Tapan.

- Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah output kegiatan ini terlaksananya pengelolaan dan pengawasan kegiatan pasar ternak dan fasilitasi pengurusan PIRT bagi UPH Peternakan, terlaksananya promosi produk pengolahan hasil peternakan (telur asin).
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (3) Kegiatan Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian mendukung Peternakan dengan output adanya sosialisasi dalam pengolahan pakan alternatif untuk ternak, meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan pupuk organik, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian, mengidentifikasi sarana prasarana peternakan yang dibutuhkan oleh peternak.

b. **Menurunnya angka kematian Ternak dan kasus zoonosis, dengan indikator kinerja yaitu:**

1. **Persentase penurunan angka kematian ternak (Target Kinerja : 0,1%) (Realisasi Kinerja : 1,59 %)**
2. **Jumlah kasus zoonosis yang dilaporkan (Target Kinerja : 20 kasus), (Realisasi Kinerja : 83,65%)**

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak output kegiatan ini adalah Pelayanan Kesehatan Hewan berpusat di 6 Puskesmas sebanyak 4.059 ekor, Vaksinasi Rabies dengan target 1.500 dosis/ekor di 15 kecamatan terealisasi sebanyak 1.195 dosis/ekor (79,66%), untuk vaksinasi SE (Septicchaemia Epizootica) ditargetkan sebanyak 1.250 dosis, terealisasi sebanyak 782 dosis (62,56%).
 - (2) Kegiatan Pengawasan perdagangan ternak antar daerah dengan output pengujian terhadap produk hewan dan hasil produk asal hewan yang dijual pedagang yaitu berupa daging, telur dan bakso sebanyak 34 sampel di beberapa kecamatan, didapat hasil pemeriksaan telur itik dan telur ayam ras negatif terhadap bakteri



salmonella sp, Uji residu antibiotik 6 sampel daging di Kecamatan Ranah Pesisir tercemar residu Tetrasiklin melalui Tetracycline Biossay, negatif untuk residu antibiotik aminoglikosida, penisilin, tilosin dan sulfadiazin. Uji boraks pada sampel bakso dan Uji Caliform pada telur dan pada daging ayam dinyatakan negatif.

- (3) Kegiatan Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Rabies, output kegiatan ini pada tahun 2020 kasus gigitan anjing terjadi sebanyak 122 dan kucing sebanyak 12 kasus dengan total 134 kasus dan telah dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan dengan rincian bebas observasi 5 kasus dan hasil laboratorium positif 0 kasus.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan

- **Permasalahan dan Solusi**

a. Permasalahan

1. Masih terbatasnya aparatur (SDM)
2. terbatasnya sarana dan prasarana kerja (laptop dan printer)
3. keterbatasan kapasitas SDM (jumlah dan keilmuan) sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya pelaporan secara tepat waktu
4. masih terbatasnya tingkat pengetahuan masyarakat, keterbatasan petugas medis, paramedis veteriner dan petugas cekpoint
5. Permasalahan terletak kepada keterbatasan tenaga (SDM) di lapangan, dimana masih banyak pelayanan ternak yang tidak terpenuhi
6. ternak dan hasil produksi ternak Kabupaten Pesisir Selatan masih kalah bersaing dibandingkan dengan daerah lain
7. Masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana peternakan untuk peternak

b. Solusi

1. Adanya penambahan beban tugas
2. mengoptimalkan sarana yang ada dan mengajukan pengadaan dan perbaikan sarana kerja
3. memberikan pelatihan dasar teknis administrasi dalam penyusunan laporan kinerja dan keuangan
4. mengoptimalkan petugas yang ada dan memberikan penyuluhan serta sosialisasi tentang penyakit ternak
5. petugas inseminator lebih berhati-hati dalam melakukan proses inseminasi dll
6. meningkatkan produksi dan produktivitas ternak
7. peningkatan SDM kelompok dalam pengolahan pupuk organik



D. URUSAN PENUNJANG

1. URUSAN PENUNJANG: KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada Tahun 2020 Urusan Kepegawaian diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.412.379.507,00 dengan realisasi Rp. 5.263.078.322,00 (98.82%). Adapun realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	URUSAN PEMERINTAH	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	Ket.
1.	PENUNJANG URUSAN	BKPSDM	Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Layanan Administrasi Perkantoran				415.142.996	407.552.638	
			Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa telpon, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	72.600.000	66.018.047	
			Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya pembayaran/honorarium tenaga administrasi keuangan BKPSDM	bulan	12	12	70.574.800	70.274.800	
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya petugas kebersihan kantor	bulan	12	12	28.522.640	28.509.800	



NO	URUSAN PEMERINTAH	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	Ket.
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk operasional BKPSDM	bulan	12	12	43.927.440	43.713.500	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan BKPSDM	bulan	12	12	15.394.150	15.385.600	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor BKPSDM	bulan	12	12	4.745.120	4.744.545	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan (koran) dan peraturan perundang-	bulan	12	12	1.800.000	1.625.000	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman BKPSDM	bulan	12	12	13.750.000	13.745.000	
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan instansi terkait	bulan	12	12	136.336.346	136.306.346	
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi kedalam daerah dengan instansi terkait	bulan	12	12	12.950.000	12.780.000	
				Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Operasional perencanaan dan pelaporan	bulan	12	12	14.542.500	14.450.000	
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Tersedianya Layanan Sarpras bagi Aparatur				90.728.150	90.044.950	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor	jenis	1	0	-	-	



NO	URUSAN PEMERINTAH	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	Ket.
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang dipelihara secara	bulan	12	12	85.054.100	84.374.950	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	bulan	12	12	5.674.050	5.670.000	
				PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Tersebar nya Data dan Informasi				4.180.000	4.180.000	
				Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Tersebar nya informasi pembangunan	bulan	12	12	4.180.000	4.180.000	
				PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan sesuai jenjang				72.317.000	72.167.000	
				Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Jumlah PNS yang mengikuti PIM III	orang	2	2	67.117.000	66.967.000	
				Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dasar (Latsar)	orang	0	0	5.200.000	5.200.000	
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi				2.845.000	2.845.000	
				Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan/Bimtek	Jumlah pegawai ASN yang mengikuti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimtek	orang	30	0	2.845.000	2.845.000	
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Tersedianya ASN yang profesional				666.325.145	660.019.407	



NO	URUSAN PEMERINTAH	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	Ket.
				Formasi dan Seleksi ASN	Jumlah pelamar yang mengikuti seleksi dan diterima menjadi CPNS dan jumlah formasi yang diusulkan	orang	200 orang dan 250 orang	142 dan 300	471.282.000	469.558.467	
				Pemberian Bantuan dan Pengelolaan Administrasi Ijin/Tugas Belajar	Jumlah PNS yang akan mendapatkan bantuan dan jumlah rekomendasi yang diterbitkan	orang	0 dan 206 orang	179	6.575.000	6.575.000	
				Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP)	Jumlah sidang yang dilakukan oleh tim Majelis Pertimbangan Pegawai	kali	8	5	10.676.550	10.676.500	
				Pengelolaan Karpeg, Karis/Karsu	Jumlah berkas PNS yang diproses usulan karpeg, karis/karsu	berkas	250	224	18.789.000	17.764.000	
				Pengelolaan Administrasi Mutasi Pegawai	Jumlah PNS yang melakukan pindah dan mutasi jabatan fungsional	orang	500	428	6.928.200	6.928.200	
				Pengelolaan Administrasi Pensiun Pegawai	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usula BUP, janda/duda APS dan MPP	orang	285	288	20.195.000	20.195.000	
				Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Pemakaian Gelar PNS	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan kenaikan pangkat dan pemakaian gelar	berkas	1600	1579	46.997.500	43.493.945	
				Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian	Tersusunnya tata naskah kepegawaian	berkas	2700	2700	45.900.000	45.900.000	



NO	URUSAN PEMERINTAH	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	Ket.
				Pengambilan Sumpah PNS dan Pelantikan Jabatan	Jumlah diadakan acara pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan	kali	1	2	4.214.750	4.214.750	
				Pembekalan Pasangan Pra Nikah ASN	Jumlah pasangan PNS yang akan dibekali	pasangan	40	42	1.755.000	1.755.000	
				Pengembangan dan Pengelolaan SIMPEG dan SAPK	Jumlah data PNS yang dientry dalam jaringan database	data	4000	4000	9.403.600	9.350.000	
				Pemeriksaan Kasus PNS, Masalah Perceraian dan Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah PNS yang melanggar disiplin dan masalah perceraian yang diberikan rekomendasi	orang	40	45	5.147.200	5.147.200	
				Pemetaan Potensi ASN	Jumlah peserta yang mengikuti pemetaan potensi	orang	225	0	1.550.000	1.550.000	
				Penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan ASN	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan dan	orang	50	0	16.911.345	16.911.345	

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Tingkat kepuasan pelayanan kepegawaian	65	98,69	151,83
			Tingkat kepuasan pelayanan pensiun	65	101,6	156,31
			Tingkat kepuasan pelayanan karis/karsu dan karpeg	65	94,53	145,46



			Tingkat kepuasan pelayanan satya lencana karya satya	50	Tidak dilaksanakan	Tidak dapat diukur
			tingkat kepuasan pelayanan tata naskah kepegawaian	50	50	100
			tingkat kepuasan pelayanan SIMPEG dan SAPK	80	100	125
2	Meningkatnya manajemen sistem karir ASN berdasarkan Merit System	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	persentase jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi	65	85,4	131,38
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM	Program Administrasi Perkantoran	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM	A	A	100
TOTAL						113,75

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian, dengan indikator kinerja yaitu:

1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Kepangkatan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis pertama adalah dengan meningkatkan kepuasan pelayanan kepada Aparatur Sipil Negara. Dari tabel dapat dilihat bahwa target pelayanan kepangkatan pada tahun 2020 sebesar 65 %. Sampai dengan akhir tahun realisasi mencapai 98,69 %. Hal ini disebabkan oleh berkas kenaikan pangkat yang diolah pada sub bidang kepangkatan PNS pada Tahun 2020 sebanyak 1600 berkas, namun hanya bisa dilayani dan diproses secara tepat waktu untuk diterbitkan SK Kenaikan Pangkat sebanyak 1579 berkas. Sehingga capaian untuk tingkat kepuasan pelayanan kepangkatan sebesar 151,83 % dengan predikat sangat baik.



Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Pemakaian Gelar PNS, dengan output adalah SK Kenaikan Pangkat.

2. Tingkat Kepuasan Pelayanan Pensiun

Indikator kinerja kedua yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis pertama adalah dengan meningkatkan kepuasan pelayanan pensiun kepada Aparatur Sipil Negara. Dari tabel dapat dilihat bahwa target pelayanan pensiun pada tahun 2020 sebesar 65 %. Hal ini disebabkan oleh berkas pensiun yang direncanakan oleh sub bidang pemberhentian PNS pada Tahun 2020 sebanyak 285 berkas, namun bisa dilayani dan diproses secara tepat waktu untuk dikeluarkan SK Pensiun sebanyak 288 berkas. Sampai dengan akhir tahun realisasi mencapai 101,6 %. Capaian untuk tingkat kepuasan pelayanan kepangkatan sebesar 156, 31 % dengan predikat sangat baik.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan kegiatan Pengelolaan Administrasi Pensiun Pegawai, dengan output adalah SK Pensiun, SK Masa Persiapan Pensiun (MPP)

3. Tingkat Kepuasan Pelayanan Karpeg, Karis dan Karsu

Indikator kinerja ketiga yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis pertama adalah dengan meningkatkan kepuasan pelayanan penerbitan karpeg, karis dan karsu kepada Aparatur Sipil Negara. Dari tabel dapat dilihat bahwa target pelayanan karpeg, karis dan karsu pada tahun 2020 sebesar 65 %. Hal ini disebabkan oleh berkas karis/karsu dan karpeg yang direncanakan oleh sub bidang promosi dan kesejahteraan pegawai pada Tahun 2020 sebanyak 250 berkas, namun bisa dilayani dan diproses secara tepat waktu untuk diterbitkan karis/karsu dan karpeg sebanyak 224 berkas. Sampai dengan akhir tahun realisasi mencapai 94,55 %. Capaian untuk tingkat kepuasan pelayanan kepangkatan sebesar 145,46 % dengan predikat sangat baik.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan kegiatan Pengelolaan Karpeg, Karis/Karsu, dengan output adalah kartu pegawai, kartu suami, dan kartu istri.

4. Tingkat Kepuasan Pelayanan Satya Lencana Karya Satya

Indikator kinerja keempat yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis pertama adalah dengan meningkatkan kepuasan pelayanan penerbitan Satya Lencana Karya Satya kepada Aparatur Sipil Negara. Untuk kegiatan ini,



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan tidak dapat melaksanakannya karena terjadi refofusing anggaran. Dimana belanja perjalanan dinas untuk melakukan pengurusan Satya Lencana Karya Satya ke Kementerian Dalam Negeri sudah tidak dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga capaian untuk kegiatan ini tidak dapat diukur.

5. Tingkat Kepuasan Pelayanan Tata Naskah Kepegawaian

Indikator kinerja kelima yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis pertama adalah dengan meningkatkan kepuasan pelayanan Tata Naskah Kepegawaian kepada Aparatur Sipil Negara. Dari tabel dapat dilihat bahwa target pelayanan Tata Naskah Kepegawaian pada tahun 2020 sebesar 50 %. Hal ini disebabkan oleh berkas untuk penyusunan tata naskah kepegawaian yang direncanakan pada Tahun 2020 sebanyak 2700 berkas, namun bisa dilayani dan diproses secara tepat waktu sebanyak 2700 berkas. Sampai dengan akhir tahun realisasi mencapai 50 %. Capaian untuk tingkat kepuasan pelayanan kepangkatan sebesar 100 % dengan predikat sangat baik.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan kegiatan Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian, dengan output adalah tertatanya dokumen kepegawaian dengan baik

6. Tingkat Kepuasan Pelayanan SIMPEG dan SAPK

Indikator kinerja keenam yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis pertama adalah dengan meningkatkan kepuasan pelayanan Sistem Informasi Kepegawaian dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian kepada Aparatur Sipil Negara. Dari tabel dapat dilihat bahwa target pelayanan Sistem Informasi Kepegawaian dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian pada tahun 2020 sebesar 80 %. Hal ini disebabkan oleh data yang harus diupdate pada Tahun 2020 sebanyak 4000 data, dan bisa dilayani dan dilakukan update data secara tepat waktu sebanyak 4000 data. Sampai dengan akhir tahun realisasi mencapai 100 %. Capaian untuk tingkat kepuasan pelayanan kepangkatan sebesar 125 % dengan predikat sangat baik.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dan SAPK dengan output adalah terupdate data kepegawaian secara tepat dan benar

b. Meningkatkan manajemen sistem karir ASN berdasarkan merit system



Indikator kinerja utama dari sasaran strategis diatas adalah persentase jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi. Cara perhitungan dari indikator tersebut adalah dengan membandingkan jumlah jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi dengan jumlah semua jabatan. Jumlah jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 585 orang. Sedangkan jumlah seluruh jabatan sebanyak 685. Realisasi kinerja untuk sasaran strategis ini sebesar 99,26 % dari target awal sebesar 65 %. Sehingga capaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2020 sebesar 152,7 %.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan program sebagai berikut:

1. Pendidikan Kedinasan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme dengan ouput adalah Sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat III
 - b. Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS dengan output sertifikat diklat Pelatihan dasar (Latsar)
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan/Bimtek, dengan output sertifikat
3. Pembinaan dan Pengembangan aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Formasi dan Seleksi ASN, dengan output pelamar umum yang lulus seleksi dan menjadi CPNS
 - b. Pemberian bantuan dan pengelolaan administrasi ijin/tugas belajar dengan output adalah rekomendasi ijin dan tugas belajar
 - c. Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) dengan ouptput jumlah sidang MPP
 - d. Penyelenggaraan Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN, dengan output adalah nilai hasil penilaian dan evaluasi PNS
 - e. Pengelolaan Administrasi Mutasi Pegawai, dengan output adalah SK mutasi PNS
 - f. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan, dengan output adalah berita acara sumpah dan pelantikan jabatan
 - g. Pembekalan pasangan pra nikah ASN, dengan output adalah rekomendasi pelaksanaan pernikahan
 - h. Pemeriksaan kasus, masalah perceraian dan pembinaan disiplin dengan output adalah SK penjatuan hukuman disiplin
 - i. Pemetaan potensi dengan output adalah nilai hasil pemetaan potensi
 - j. Penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan ASN, dengan output adalah sertifikat diklat/sosialisasi
- c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDSM
Pada tahun 2019, dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan menargetkan nilai AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan



nilai A. Realisasi yang diperoleh oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan target yaitu A. Sehingga capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 100 %.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan Program sebagai berikut:

1. Program Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - h. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
 - j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
 - k. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - c. Pemeliharaan Rutin /Berkala peralatan Gedung Kantor



2. URUSAN : KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH : BADAN PENDAPATAN

Pada Tahun 2020 Urusan Keuangan diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.785.805.872,00 dengan realisasi Rp. 3.688.818.204,00 (98.03%). Adapun realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Keuangan	Badan Pendapatan		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	95	Rp.488.972.877,00	Rp.470.521.144,00	
1				Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Ketersediaan Air, listrik dan jasa komunikasi	Bulan	12		Rp.60.000.000,00	Rp.53.501.099,00	
2				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Ketersediaan layanan administrasi keuangan	Bulan	12		Rp.140.054.400,00	Rp.132.605.000,00	
3				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Ketersediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	12		Rp.38.089.745,00	Rp.38.086.000,00	
4				Penyediaan Alat Tulis kantor	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	12		Rp.46.81.860,00	Rp.46.078.273,00	
5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12		Rp.12.022.096,00	Rp.12.014.800,00	
6				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Ketersediaan Komponen Instalasi	Bulan	12		Rp.5.235.391,00	Rp.5.228.520,00	



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
				Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan						
7				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Bulan	12		Rp.3.120.000,00	Rp.3.120.000,00	
8				Penyediaan Makanan dan Minuman	Ketersediaan Makan dan Minum Pegawai, Rapat, dan Tamu	Bulan	12		Rp.50.443.800,00	Rp.50.324.400,00	
9				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Ketersediaan Operasional untuk Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bulan	12		Rp.75.416.000,00	Rp.71.215.735,00	
10				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Ketersediaan Operasional untuk Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	Bulan	12		Rp.34.020.000,00	Rp.33.987.550,00	
11				Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersedia	Dokumen	5 dokumen		Rp.24.489.585,00	Rp.24.359.767,00	
II				Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan Prasarana penunjang bagi Aparatur				Rp.150.938.715,00	Rp.148.579.855,00	
1				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor dibeli	unit	5	—	Rp.0,00	Rp.0,00	



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
	2			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Bulan	12	100%	Rp.21.000.000,00	Rp.21.000.000,00	
	3			Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional	Bulan	12		Rp.109.294.635,00	Rp.107.416.850,00	
	4			Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor	Bulan	12		Rp.20.644.080,00	Rp.20.163.005,00	
II				Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang profesional				Rp.0,00	Rp.0,00	
I	1			Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bimtek	orang	3	0	Rp.0,00	Rp.0,00	
IV				Program Kerjasama Informasi dan Media Masa	Persentase program pembangunan yang dipublikasikan				Rp.4.250.000,00	Rp.3.950.000,00	
	1			Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Kerjasama Informasi dan Media Masa	Bulan	12		Rp.4.250.000,00	Rp.3.950.000,00	
V				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi PAD				Rp.670.005.882,00	Rp.665.216.410,00	
	1			Pengadaan barang Kuasi	Barang Kuasi	paket	1		Rp.35.963.557,00	Rp.34.159.100,00	
	2			Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak	Operasional Pelayanan	Wajib	54.995 SPPT PBB-P2,22		Rp.46.953.	Rp.46.910.60	



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
				Daerah Wilayah I	Pemungutan Pajak Daerah Wilayah I	pajak	hotel,60 rumah makan,air bawah tanah,2 sarang wallet,mineral bukan logam,reklamasi dan BPHTB		038,00	0,00	
3				Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah II	Operasional Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah II	Wajib pajak	67.601 SPPT PBB-P2,22 hotel,20 rumah makan,air bawah tanah,10 sarang wallet,mineral bukan logam,reklamasi dan BPHTB		Rp.43.550.000,00	Rp.42.269.650,00	
4				Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah III	Operasional Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah III	Wajib pajak	30.353 SPPT PBB-P2,10 hotel, 24 rumah makan,air bawah tanah,13 sarang wallet,mineral bukan logam,reklamasi dan BPHTB		Rp.47.326.000,00	Rp.47.087.900,00	
5				Penyusunan Laporan PAD	Tersusunnya Laporan PAD	Buku laporan	1		Rp.3.314.000,00	Rp.3.314.000,00	
6				Verifikasi dan Penetapan Pajak	Berita Acara Verifikasi dan	berkas	800 berkas BPHTB, 100		Rp.35.675.	Rp.35.672.15	



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
				Daerah	Surat ketetapan pajak daerah		SKP reklame		227,00	0,00	
7				Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah	Dokumen Rekonsiliasi PAD	Bulan	12		Rp.23.475.000,00	Rp.22.480.600,00	
8				Monitoring dan Evaluasi PAD	Laporan Monev PAD	laporan	27		Rp.39.668.800,00	Rp.39.261.650,00	
9				Pendataan dan Validasi Pajak Daerah	Database PAD	Bulan	12		Rp.19.000.750,00	Rp.19.000.750,00	
10				Pembinaan Pelaksana Pemungut PBB-P2	Jumlah aparat/masyarakat yang tersentuh pembinaan	orang	197		Rp.2.876.000,00	Rp.2.876.000,00	
11				Penyelenggaraan Penerimaan PAD berbasis Elektronik	Operasional Pelayanan PAD berbasis Elektronik	jenis	10		Rp.136.381.900,00	Rp.136.376.900,00	
12				Cetak Massal dan Pengadaan Bahan-bahan Dokumen PBB-P2	Tersedianya dokumen Pendukung PBB-P2	paket	1		Rp.235.821.610,00	Rp.235.807.110,00	



- **Sasaran Strategis PK Kepala BADAN PENDAPATAN**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Penerimaan PAD	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan PAD	10%	8,7%	87,06%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pemungutan pajak daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Hasil Survey kepuasan masyarakat	2	2	100%
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
		Program Pengembangan Data/Informasi				
3	Efisiensi pengelolaan pendapatan PAD	Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio biaya terhadap pendapatan pajak daerah	11%	0,01	8,81%

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Meningkatnya Penerimaan PAD, dengan indikator kinerja yaitu:**

1) **Persentase Peningkatan PAD (Target Kinerja : 10%) (Realisasi Kinerja : 8,7 %)**



yang meliputi Pencapaian Target PAD sesuai dengan target PAD yang telah disepakati. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Kegiatan Pengadaan Barang Kuasi.
 2. Kegiatan Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah I.
 3. Kegiatan Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah II.
 4. Kegiatan Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah III.
 5. Kegiatan Pendataan dan Validasi Pajak Daerah.
 6. Kegiatan Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah.
 7. Kegiatan Penyelenggaraan Penerimaan PAD Berbasis Elektronik.
 8. Kegiatan Cetak Massal dan Pengadaan Bahan-bahan Dokumen PBB-P2.
- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah, dengan indikator kinerja yaitu:**
 - 1) **Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Target Kinerja:2), (Realisasi Kinerja : 100%)**

yang meliputi Pencapaian Target PAD sesuai dengan target PAD yang telah disepakati. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
 4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.
 5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 6. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 7. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 8. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.
 9. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah.
 10. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.



11. Kegiatan Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan.
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan sebagai berikut:
 1. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
 2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
 3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional.
 4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
 1. Kegiatan Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Program Pengembangan Data/Informasi.
 1. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan.
- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Efisiensi Pengelolaan Pendapatan PAD, dengan indikator kinerja yaitu:**
- 1) **Rasio Biaya terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Target Kinerja : 11%) (Realisasi Kinerja : 8,81%)**
 - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 1. Kegiatan Penyusunan Laporan PAD.
 2. Kegiatan Pembinaan Pelaksana Pemungut PBB-P2.
 3. Kegiatan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah.
 4. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PAD.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan.



- **PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

1. **PERMASALAHAN**

- a. Kegiatan ini akan digunakan untuk pembelian mesin cash register yang akan diletakkan di beberapa Rumah Makan untuk menggenjot Pendapatan Daerah, tetapi kegiatan ini terjadi refocusing anggaran sehingga kegiatan ini belum terlaksana
- b. terjadinya refocusing anggaran sehingga kegiatan ini tidak dapat terlaksana. yang mana kegiatan ini untuk pembinaan kepada Pelayanan pajak agar kegiatan Pelayanan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat
- c. Terjadi refofusing anggaran sehingga kegiatan ini tidak jalan sesuai yang diharapkan
- d. terjadinya refocusing anggaran sehingga kegiatan ini tidak dapat terlaksana. yang mana kegiatan ini untuk pembinaan kepada pemungut pajak dan kolektor agar kegiatan pemungutan dapat terlaksana dengan baik dan capaian Pajak Daerah dapat tercapai

2. **SOLUSI**

- a. Untuk menggenjot Pendapatan Daerah agar kegiatan ini dapat dimunculkan kembali, agar tidak terjadi kebocoran Pajak Daerah terutama Pajak Rumah makan
- b. Semoga Pandemi Covid-19 berakhir dan kegiatan ini dapat dilaksanakan kembali
- c. Kedepannya kegiatan ini harus muncul.



3. URUSAN PENUNJANG : PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pada Tahun 2020 Perencanaan diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.811.796.680,00 dengan realisasi Rp. 5.428.726.223,00 (89.29%). Adapun realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penunjang Urusan	Bapedalitbang		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	bulan	12	12	790.126.247	701.996.934
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terbayarnya honorarium pramu kantor	bulan	12	12	65.000.000	41.000.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Rekening Listrik, Air dan Telepon	bulan	12	12	91.200.000	66.618994
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pembayaran Honor Pengelola Keuangan	bulan	12	12	76.749.400	76.749.00
				Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Operasional untuk Kebersihan Kantor	bulan	12	12	80.878.450	80.825.000
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Biaya Perawatan dan Peralatan Kerja	bulan	12	12	2.200.000	22.187.000



No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	bulan	12	12	125.676.758	125.650.300
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12	12	36.350.000	36.132.500
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	bulan	12	12	21.938.799	21.926.300
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12	12.000.000	9.000.000
				Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Harian, Rapat dan Tamu	bulan	12	12	15.625.000	14.797.750
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas untuk Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	bulan	12	12	101.386.840	90.960.590
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas untuk Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	bulan	12	12	29.646.000	14.916.200
				Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terbayarnya honorarium penjaga kantor	bulan	12	12	92.920.000	92.370.000



No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan (Renja, RKA, LAKIP lap bulanan, Renstra	bulan	12	12	18.555.000	9.122.300
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					397,051,000	392,261,110
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya proyektor, mesin pengahncur, mouebiler, dan peralatan rumah tangga lainnya	tahun	1	1	57,550,000	57,056,999
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya asset tetap Bapedalitbang	bulan	12	12	184,531,000	184,369,198
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	bulan	12	12	154,970,000	150,834,913
				Program Pengembangan data/informasi					9,919,250	4,622,300
				Forum Data Kabupaten Pesisir Selatan	Tersusunnya buku data pembangunan daerah	%	95	95	9,919,250	4,622,300
				Program Kerjasama Pembangunan					40,431,375	31,938,750



No	Ururan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Koordinasi Spasial, Kerjasama Wilayah dan Perbatasan	Terlaksananya koordinasi spasialkerjasama wilayah	%	90	90	40,431,375	31,938,750
				Program perencanaan pembangunan daerah					347,894,000	310,839,105
				Penyusunan Rancangan RKPD	Dokumen RKPD 2021 dan Perubahan RKPD 2020	%	100	100	31,532,500	30,152,850
				Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terlaksananya Forum perangkat daerah dan musrenbang RKPD	kec	15	15	36,320,860	35,895,860
				Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Laporan Monev pelaksanaan keg DAK dan TP ta 2020	%	95	95	43,612,640	42,488,840
				Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA RAPBD serta Perubahan PPAS Kabupaten Pesisir Selatan	Kesepakatan KUPA 2020	%	100	100	48,850,000	38,884,675
				Penyusunan Perjanjian Kinerja	Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	dok	2	2	17,735,000	12,305,000
				Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Daerah	Terlaksananya dan terealisasinya rapat rapat	bulan	12	12	6,512,500	6,168,400



No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					koordinasi penyusunan perencanaan dan anggaran					
				Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Berjalannya aplikasi e-planning	bulan	12	12	61,100,000	59,505,950
				Fasilitasi dan Sinkronisasi RPJM Nagari	Terlaksananya fasilitasi dan sinkronisasi RPJM Nagari	%	100	100	1,600,00	1,600,00
				Studi Pendahuluan Rancangan Teknokratik RPJMD Kab. Pessel 2021-2025	Jumlah Dokumen RPJMD Teknokratik	dok	1	1	103,630,500	83,837,530
				Program perencanaan pembangunan ekonomi					152,393,850	140,752,005
				Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	%	100	100	3,535,850	3,535,850
				Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase capaian kinerja pembangunan	%	100	100	88,023,000	79,629,155
				Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Ekonomi Daerah	Tersusunnya dokumen roadmap perekonomian kab pessel 2021-2026	%	100	100	60,835,000	57,587,000



No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya					69,696,000	60,457,300
				Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Terlaksananya koordinasi dan monitoring kegiatan lingkup bidang sosial budaya	%	100	100	42,615,000	34,245,800
				Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Tersedianya dokumen strategi penanggulangan kemiskinan	PD	15	15	27,081,000	26,211,500
				Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam					403,870,245	330,892,334
				Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah	Jumlah PD lingkup Subbid perencanaan infrastruktur wilayah	tahun	1	1	70,325,000	65,083,050
				Koordinasi Program IPDMIP Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah dokumen yang disusun	tahun	1	1	216,659,295	172,537,295
				Koordinasi Perencanaan SDA dan LH	Terfasilitasinya OPD lingkup subbid PPSDALH	bulan	12	12	4,185,950	4,185,950
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah dokumen perencanaan strategi sanitasi kabupaten (SSK) yang disusun	tahun	1	1	200,000	200,000



No	Ururan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Tata kelola Program Hibah Jalan Daerah	Terfasilitasinya program hibah jalan daerah KSPN mandeh	tahun	1	1	112,500,000	88,886,039
	Ururan Penelitian dan Pengembangan			Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah					38,625,000	34,767,300
				Perumusan dan Penajaman Sistem Inovasi Daerah	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi	%	55	55	38,625,000	34,767,300
				Program Penelitian, Pengembangan, dan Pemanfaatan SDM dan Iptek Daerah					3,770,380	3,770,380
				Koordinasi Kelitbangan	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan/ jumlah kerjasama penelitian terkait prioritas daerah	%	75	75	3,770,380	3,770,380



- **Sasaran Strategis PK Kepala Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan pembangunan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra dan Renja	90	90	100
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				
		Program Perencanaan Sosial Budaya				
		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam				
2	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Berbasis Spasial yang Berkualitas	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase Perencanaan Berbasis Spasial	35	36.67	105
		Program Pengembangan Data dan Informasi				
3	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan	Program Penelitian, pengembangan dan Pemanfaatan SDM	Persentase kebijakan pembangunan yang	90	90	100



	sesuai dengan kebutuhan Pembangunan	dan IPTEK daerah	searah dengan sasaran RPJMD			
		Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah				
		Program Peningkatan Kelembagaan dan Sumber Daya Kelitbangan				
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapedalitbang	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Hasil Penilaian AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat	A	A	100
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Meningkatkan Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan dengan indikator kinerja yaitu:**

a. **Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra dan Renja PD (Target Kinerja : 90%) (Realisasi Kinerja : 90 %)**

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD, dengan output kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen RKPD.
 2. Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dengan output terlaksananya Musrenbang RKPD.
 3. Kegiatan Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS RAPBD serta Perubahan PPAS Kab. Pesisir Selatan Tersusunnya KUA PPAS RAPBD Serta Perubahannya.



4. Kegiatan Fasilitas dan Sinkronisasi RPJM Nagari dengan output Terlaksananya fasilitas dan sinkronisasi RPJM Nagari dan RPJM Kabupaten.
 5. Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan output Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Partisipatif, transparan dan akuntabel melalui sistem informasi perencanaan
 6. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan penganggaran daerah dengan output Terlaksananya rapat dan pertemuan penyusunan perencanaan anggaran.
 7. Kegiatan Monev, pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah RKPD dengan output Laporan triwulan evaluasi RKPD.
 8. Kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja dengan output Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 9. Kegiatan Studi Pendahuluan Rancangan Teknokratik RPJMD Kab Pessel 2021- 2026 dengan output Jumlah dokumen RPJMD Teknokratik.
- Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Pedesaan dengan output kegiatan ini adalah Terwujudnya Akselerasi pembangunan di kawasan Pedesaan.
 - (2) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang ekonomi dengan output Terkoordinasikannya perencanaan pembangunan lingkup ekonomi.
 - (3) Kegiatan Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah dengan output tersusunnya dokumen Roadmap perekonomian kabupaten Pessel 2021- 2026.
 - Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dengan output Dokumen laporan pencapaian penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) tahun 2020
 - (2) Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dengan output persentase perencanaan pembangunan sosial budaya yang terkoordinasikan
 - Program Perencanaan pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang prasarana wilayah dengan output Terkoordinasikannya perencanaan kegiatan OPD lingkup sub bidang perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah



- (2) Kegiatan Koordinasi IPDMIP dengan output terkoordinir dan terfasilitasinya program IPDMIP di Kabupaten Pesisir Selatan
- (3) Koordinasi Perencanaan SDA dan Lingkungan Hidup dengan output terlaksananya koordinasi, fasilitasi perencanaan kegiatan OPD sub bidang pangan, SDA dan LH
- (4) Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah dengan output jumlah dokumen perencanaan strategis sanitasi kabupaten (SSK) yang disusun
- (5) Kegiatan tata kelola program hibah jalan dengan output Terfasilitasinya program hibah jalan daerah di KSPN Mandeh

b. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Berbasis Spasial yang berkualitas dengan indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Perencanaan berbasis Spasial (Target Kinerja : 35%) (Realisasi Kinerja : 36.67 %)

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan persentase perencanaan pembangunan berbasis spasial yang ada pada setiap OPD dibagi dengan total perencanaan pembangunan dengan sumber datanya adalah renja masing masing OPD yang mempunyai data spasial. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Kerjasama Pembangunan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Koordinasi Spasial, kerjasama wilayah dan perbatasan dengan output kegiatan ini adalah Terbentuknya tim jaringan informasi spasial, terjalinnnya kerjasama dengan BIG dan LAPAN, terlaksananya koordinasi dalam rangka pengesahan revisi RTRW Kab Pessel 2010-2030, Peta tematik dan Peta Sebaran pembangunan.
- Program Pengembangan data dan Informasi, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (2) Kegiatan Forum data Kabupaten Pesisir Selatan dengan output Terbentuknya tim forum data kab Pessel, Terselenggranya Forum data Kab Pessel, Tersediannya data pembangunan daerah dan aplikasi SIPD dan SP2D



2. Terwujudnya kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dengan indikator kinerja yaitu:

a. Persentase Kebijakan Pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD (Target Kinerja : 90%) (Realisasi Kinerja : 90 %)

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan Persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD dengan sumber data diperoleh dari RPJMD. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penelitian, Pengembangan, dan Pemanfaatan dan IPTEK Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan koordinasi Kelitbang dengan output Terwujudnya Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam penerapan kebijakan pembangunan daerah.
- Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Perumusan dan penajaman sistem inovasi Daerah dengan output Jumlah dokumen rencana aksi daerah

b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapedalitbang dengan indikator kinerja yaitu:

1. Hasil penilaian AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat (Target Kinerja : A) (Realisasi Kinerja : A)

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat yang dalam proses evaluasi akuntabilitas kinerja menggunakan teknik "*criteria referenced survey*" dengan cara menilai secara keseluruhan dengan criteria evaluasi dari masing- masing komponen yang telah ditetapkan. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Penyediaan Jasa kebersihan kantor dengan output Terwujudnya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman.
 - (2) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat dengan output Terbayarnya honorarium pramu kantor.
 - (3) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan Listrik dengan output Pembayaran rekening listrik dan internet



- (4) Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi keuangan dengan output Terbayarkannya honorarium pelaksana fungsi pengelola keuangan
 - (5) Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dengan output Tersedianya biaya service dan suku cadang perbaikan peralatan
 - (6) Kegiatan penyediaan alat tulis kantor dengan output Tersedianya alat tulis kantor
 - (7) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan output Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
 - (8) Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor dengan output Tersedianya komponen Instalasi Listrik
 - (9) Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan dengan output Tersedianya langganan media masa
 - (10) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman dengan output Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu
 - (11) Kegiatan Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan output Terlaksananya pembayaran biaya perjalanan dinas akomodasi aparatur
 - (12) Kegiatan penyediaan jasa pengaman kantor dengan output Terciptanya lingkungan kantor yang aman dan nyaman
 - (13) Kegiatan Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan output Terbayarkannya perjalanan dinas aparatur dalam kabupaten
 - (14) Kegiatan Penunjang Operasional dan Pelaporan dengan output Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan lingkup Bapedalitbang.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut :
- (1) Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dengan output Terpeliharanya asset tetap Bapedalitbang
 - (2) Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional dengan output kegiatan Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara



- (3) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantor dengan output Tersedianya Infokus, mobile dan peralatan rumah tangga bagi aparatur

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator dari 4 sasaran kepala Bapedalitbang Tahun 2020.

4. URUSAN : KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pada Tahun 2020 Urusan Keuangan diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.811.796.680,00 dengan realisasi Rp. 5.428.726.223,00 (89.29%). Adapun realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Keuangan	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2019; 2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 tahun 2019 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 3. Peraturan Bupati	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Dokumen APBD dan P-APBD tepat waktu 2. Persentase perangkat daerah yang tertib penatausahaan barang miik daerah 3. Persentase penyelesaian administrasi keuangan sesuai SOP	Persen	100	100	808.233.271	783.456.593	



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
			Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tanggal 27 November Tahun 2020								
	1			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Tersusunnya buku Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Pesisir Selatan	buku	75	75	146.196.157	144.790.850	
	2			Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah tersusunnya Dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan	Buku	75	75	151.355.326	148.535.563	
	3			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kab.Pesisir Selatan TA.2020	buku	50	50	104.714.378	101.528.350	



No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
	4			Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya buku Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan TA.2020	buku	50	50	216.784.295	216.182.200	
	5			Penyusunan DPA SKPD	Tersusunnya buku Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Pesisir Selatan TA.202	buku	50	50	95.705.062	89.705.200	
	6			Penyusunan DPA Perubahan	Tersusunnya DPA Perubahan OPD	buku	540	540	51.758.337	43.034.880	
	7			Pedoman Penyusunan RKA	Tersusunnya buku standar biaya (pedoman penyusunan RKA) dan terselenggaranya sosialisasi pedoman penyusunan RKA	buku	540	540	41.719.716	39.679.550	
2	Penunjang Urusan			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	Persen	100	100	86.727.436	84.372.300	
	1			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai SAP	Laporan	7	7	86.727.436	84.372.300	
3	Inspektorat			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan	Tingkat Pencapaian WTP	Persen	100	100	57.163.487	54.953.300	



No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
				Kebijakan KDH							
1				Penanganan Kasus dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	Penyelesaian Kasus Ganti Rugi sesuai LHP BPK	Persen	100	100	57.163.487	54.953.300	
4	Keuangan			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Dokumen APBD dan P-APBD tepat waktu 2. Persentase perangkat daerah yang tertib penatausahaan barang miik daerah 3. Persentase penyelesaian administrasi keuangan sesuai SOP	Persen	100	100	1.495.724.256	1.412.167.940	
1				Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah	Dokumen	1	1	81.457.678	78.329.600	
2				Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Periodik dan Pembinaan Laporan Keuangan SKPD	PPK SKPD mampu menyusun laporan keuangan SKPD sesuai	OPD	45	45	199.544.733	176.928.950	
3				Penunjang Bendahara Umum Daerah	Terlaksananya Penataan Administrasi keuangan Daerah	Bulan	12	12	795.284.342	751.823.586	
4				Pengelolaan Dana Transfer	Terlaksananya Pengelolaan Dana Transfer sesuai Peraturan	bulan	12	12	15.003.992	13.641.027	



No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
5				Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	1	105.003.992	103.686.100	
6				Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah	Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah	Bulan	12	12	43.419.399	42.032.477	
7				Penunjang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya pengelolaan Keuangan Daerah dengan Aplikasi SIPKD	Bulan	12	12	165.538.920	158.746.700	
8				Tata Kelola Program Hibah Jalan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan program Hibah Jalan Daerah	Persen	100	100	90.000.000	86.979.500	
5	Penunjang Urusan			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Persen	100	100	536.717.900	536.717.900	
1				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional	Unit	4	4	536.717.900	536.717.900	
6	Keuangan			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Dokumen APBD dan P-APBD tepat waktu 2. Persentase perangkat daerah yang tertib penatausahaan barang milik daerah 3. Persentase penyelesaian administrasi keuangan sesuai SOP	Persen	100	100	398.140.012	386.673.461	



No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
	1			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Tersusunnya Laporan BMD	Buku	1058	1058	133.262.609	128.750.285	
	2			Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan	Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Buku	90	90	22.217.190	20.633.113	
	3			Penghapusan Barang-barang Inventaris	Jumlah Tersusunnya Laporan Penghapusan Barang Barang inventariis	SKPD	45	45	31.872.500	28.776.750	
	4			Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tersedianya data Barang Milik Daerah yang benar dan akurat	SKPD	45	45	210.787.713	208.513.313	
7	Penunjang Urusan			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan	Persen	100	100	792.361.344	760.719.027	
	1			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Tagihan Rekening Listrik, Air dan Telp	Bulan	12	12	89.400.000	81.355.246	
	2			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya Honorarium PNS dan NON PNS	Bulan	12	12	187.990.065	174.820.000	
	3			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	12	12	183.650.000	180.696.000	
	4			Penyediaan Alat tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bulan	12	12	26.303.527	26.002.602	
	5			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12	16.527.100	15.985.200	
	6			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Bulan	12	12	10.780.000	10.779.672	



No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
7				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	12	12	8.500.000	7.950.000	
8				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan Minum Rapat Tamu dan Pegawai	Bulan	12	12	47.850.000	47.832.950	
9				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Bulan	12	12	176.235.695	171.958.694	
10				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Bulan	12	12	18.100.000	17.072.000	
11				Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Tersusunnya Perencanaan dan Peanggaran Lingkup BPKD	Bulan	12	12	27.024.957	26.266.663	
8	Penunjang Urusan			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan	Persen	100	100	493.384.000	483.331.046	
1				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Bulan	12	12	276.920.000	271.342.890	
2				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Bulan	12	12	207.189.000	202.827.156	
3				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Bulan	12	12	9.275.000	9.161.000	



- PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. PERMASALAHAN

- a. Perubahan regulasi yang sering dalam waktunya berdekatan
- b. Aplikasi yang digunakan baru dan kurangnya Sosialisasi terhadap Pemda Kabupaten
- c. Tidak terlaksananya Sosialisasi Pedoman Penyusunan RKA karna adanya Sosial Distancing
- d. Keterlambatan OPD menyampaikan Laporan Keuangan Akhrit Tahun
- e. Pengelola Keuangan pada OPD belum memahami cara menggunakan aplikasi SIPKD untuk menyusun Laporan Keuangan (neraca, LO, LPE)
- f. Pihak yang harus menyelesaikan tuntutan ganti rugi belum menyelesaikan temuannya
- g. Keterlambatan OPD menyampaikan Dokumen Laporan Keuangan untuk Rekonsiliasi Keuangan
- h. Pandemi covid19 menyebabkan Rekonsiliasi Keuangan harus dilakukan secara online
- i. Pelaksanaan Rekonsiliasi PD dating tidak sesuai jadwal yang di tetapkan
- j. Cetak buku tidak sesuai perencanaan karena Rekofushing
- k. Usulan dari OPD banyak tidak lengkap dan tidak berdasarkan KIB
- l. Data di KIB tidak akurat
- m. Usulan BMD yang dihapus, yang berada di OPD bersangkutan banyak yang tidak ditemukan fisiknya
- n. Pelaksanaan Inventarisasi direncanakan bulan maret, terkendala karna kondisi pandemic sehingga Pengecekan BMD ke lapnagan tidak terlaksana dengan optimal

2. SOLUSI

- a. Melakukan Koordinasi bersama TAPD dan Provinsi
- b. Mempelajari secara otodidak dan bertahap
- c. Melakukan Koordinasi bersama TAPD dan Provinsi
- d. Mempelajari secara otodidak dan bertahap
- e. Membuat surat edaran
- f. PPKD akan memberikan sanksi keras kepada OPD yang terlambat menyampaikan laporan keuangan OPD
- g. Melakukan Bimtek Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Keuangan
- h. TPKND akan lebih maksimal untuk menyelesaikan temuan pemeriksaan BPK
- i. PPKD akan lebih tegas memberikan sanksi kepada OPD yang terlambat menyampaikan Laporan



- j. Mengoptimalkan Rekonsiliasi Keuangan secara online
- k. Memberikan Sanksi/ Konsekuensi bagi OPD yang tidak melaksanakan Rekon sesuai jadwal yang ditetapkan
- l. Tidak terlaksananya cetak buku
- m. Agar dapat diperbaiki untuk di cek dengan KIB OPD yang bersangkutan
- n. OPD yang bersangkutan agar dapat memvalidkan data KIB nya
- o. OPD yang bersangkutan diminta untuk menyelesaikan kembali keberadaan barang nya
- p. Pendistribusian kerja ke OPD Terkait untuk lebih di maksimalkan

5. URUSAN PENDUKUNG : INSPEKTORAT
PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

Pada Tahun 2020 Urusan Inspektorat diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.016.241.884,00 dengan realisasi Rp. 6.841.181.952,00 (99.30%). Adapun realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Urusan Peme-rinta-han	PD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penunjang Urusan	Inspektorat Daerah	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :	Terlaksana-nya Pelayanan Adminsitasi Perkantoran	bulan	12	12	365.787.349	360.618.482
			2. Peraturan Bupati Pesisir	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Rekening Listrik, Air dan Telepon	bulan	12	12	36.000.000	31.216.625



No	Urusan Peme-rinta-han	PD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
			Selatan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2020.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pembayaran Honor Pengelola Keuangan	bulan	12	12	83.840.000	83.840.000
				Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Operasional untuk Kebersihan Kantor	bulan	12	12	60.862.292	60.861.800
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Biaya Perawatan dan Peralatan Kerja	bulan	12	12	4.620.000	4.620.000
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	bulan	12	12	33.282.108	33.282.108
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12	12	11.447.332	11.447.332
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	bulan	12	12	8.581.521	8.581.521



No	Urusan Peme-rinta-han	PD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12	4.500.000	4.320.000
				Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Harian, Rapat dan Tamu	bulan	12	12	19.820.000	19.705.000
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas untuk Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	bulan	12	12	80.854.096	80.764.096
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas untuk Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	bulan	12	12	21.980.000	21.980.000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					136.857.300	136.196.200
				<u>Kegiatan :</u>						



No	Urusan Peme-rinta-han	PD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	bulan	12	12	136.857.300	136.196.200
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah	Terlaksananya Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah				1.212.011.934	1.205.745.973
				<u>Kegiatan :</u>						
				Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Meningkatnya Hasil Pengawasan yang Berkualitas	Obrik	105	105	503.346.411	502.211.611
				Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Hasil Pengawasan yang Berkualitas	Kasus	19	19	412.676.382	407.957.771
				Reviu Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Meningkatnya Hasil Pengawasan yang Berkualitas	Reviu	4	4	25.491.142	25.083.642



No	Urusan Peme-rinta-han	PD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Meningkatnya Hasil Pengawasan yang Berkualitas	Evaluasi	1	1	21.257.702	21.257.702
				Inventarisasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Meningkatnya Hasil Pengawasan yang Berkualitas	Temuan	300	300	249.240.297	249.235.247
				Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Terlaksananya Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan				18.700.000	18.700.000
				<u>Kegiatan :</u>						
				Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya Kapabilitas APIP	orang	3	3	18.700.000	18.700.000
									1.733.356.583	1.721.260.655



- **Sasaran Strategis PK Kepala OPD**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	- Opini BPK	WTP	WTP	100
		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur pengawasan	- Nilai Rata-rata Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten	B	CC	88,62
			- Rata-rata Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	BB	BB	100
2	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.**
- a. **Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan, dengan indikator kinerja yaitu:**
 - 1) **Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 100 %)**
yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
 - **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH,** dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala dengan output kegiatan ini adalah peningkatan pengawasan internal, pengendalian serta akuntabilitas kinerja Pemerintahan.
 2. Kegiatan Penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan output kegiatan ini adalah Peningkatan Penanganan Kasus di Lingkungan Pemerintah.
 3. Kegiatan Reviu Dokumen Perencanaan dan Pelaporan dengan output kegiatan ini adalah Persentase OPD yang memiliki Laporan Keuangan yang bernilai baik (RKA, LKPD, PPRG dan LPPD).
 4. Kegiatan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan dengan output kegiatan ini adalah persentase OPD yang memiliki Perencanaan dan Laporan Keuangan yang bernilai baik (LKj-IP).
 5. Kegiatan Inventarisasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dengan output kegiatan ini adalah Persentase temuan pengawasan yang diinventarisir.
 - Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur pengawasan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan output kegiatan ini adalah Jumlah APIP yang mengikuti Diklat Teknis dan Substansi pengawasan.
 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :



1. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan output kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor.
2. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan output kegiatan ini adalah tersedianya makanan dan minuman.
3. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan output kegiatan ini adalah tersedianya biaya perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
4. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dengan output kegiatan ini adalah Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi dalam daerah..



E. URUSAN PENDUKUNG

1. URUSAN : PENDUKUNG PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH

No	Ururan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ururan Pendukung	Sekretariat Daerah	1. Peraturan Bupati Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumatera Barat Tahun 2020;	1. Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Aparatur	"B"	B	B	B	123.440.990	121.903.240
				Penyusunan LAKIP Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan Lkj tepat waktu	45 PD	45 PD	45 PD	30.964.815	30.084.080
				Monev e-SAKIP Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Laporan monev Kinerja Perangkat daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	20.661.995	20.548.860
				Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Jumlah dokumen LPPD	1 dok	1 dok	1 dok	54.499.720	54.004.550
				Koordinasi Penyusunan Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah Dokumen LKPJ	1 dok	1 dok	1 dok	17.314.460	17.265.750
				2. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Peringkat 5	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	-



				Peningkatan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Road Map RB Pesisir Selatan, terlaksananya Survei Internal dan Indeks RB Pesisir Selatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	-
						12 bulan	12 bulan	12 bulan		
				3. Pelayanan Administrasi Perkantor		12 bulan	12 bulan	12 bulan	4.091.840.752	4.047.702.099
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya layanan surat menyurat / pramu kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	69.209.451,00	67.682.700,00
				Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon	12 bulan	12 bulan	12 bulan	861.180.000	861.063.860,00
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya biaya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	35.780.000,00	35.180.000,00
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran honor pengelola keuangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	124.454.510,00	118.259.670,00
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya operasional untuk kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	411.477.000,00	410.976.996,00
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya biaya perawatan peralatan kerja	12 bulan	12 bulan	12 bulan	46.900.000,00	46.569.000,00
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	35.771.831,00	35.766.500,00
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	24.959.610,00	23.390.000,00



				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	20.530.500,00	14.530.000,00
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 orang	12 orang	12 orang	43.453.973,00	43.266.966,00
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.396.435.160,00	1.392.039.550,00
				Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	277.316.327,00	274.629.477,00
				Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Terlaksananya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	32.955.000,00	27.122.700,00
				Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS	Jumlah tenaga kerja kontrak yang dibayarkan	12 orang	12 orang	12 orang	148.500.000,00	148.500.000,00
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah Dinas (KDH)	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah Dinas (KDH)	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	79.948.750,00	79.900.000,00
				Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (KDH)	Tersedianya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (KDH)	78/	78/	78/	435.800.000,00	422.518.000,00
				Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Baik	Baik	Baik	47.168.640,50	46.306.680,00
						2 inovasi	2 inovasi	2 inovasi		
				4. Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan	100%	15 buku	15 buku	15 buku	75.404.045	75.136.300



				Keuangan Daerah						
				Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah Dokumen Aset/barang daerah lingkup Setda	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	75.404.045	75.136.300
			5.	Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	85 (Baik)				56.554.200	55.618.300
				Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah PD pelayanan publik yang disurvey	15 OPD	15 OPD	15 OPD	9.056.400	9.056.400
				Peningkatan Manajemen Pelayanan Publik	Jumlah laporan pelayanan publik	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	47.497.800	46.561.900
			6.	Penataan Kelembagaan dan Ketatausahaan Pemda					41.955.400	40.609.620
				Penataan dan Penguatan Kelembagaan	Laporan Forum Kelembagaan	45 Laporan	45 Laporan	45 Laporan	30.699.900	29.354.120
				Penataan Jabatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen standar kompetensi jabatan	45 Laporan	45 Laporan	45 Laporan	11.255.500	11.255.500
			7.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					9.616.747	9.616.000
				Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian yang difasilitasi	100%	100%	100%	9.616.747,00	9.616.000,00
			8.	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	100%				236.700.853	230.867.450



				Fasilitas Lelang dan Klarifikasi PBJ	Jumlah Fasilitas dan Klarifikasi Lelang	175 paket	175 paket	175 paket	68.836.953	68.807.400
				Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen evaluasi, pelaporan dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	19.701.127	19.499.550
				Fasilitasi Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Jumlah badan/lembaga yang difasilitasi dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik				84.565.700	84.526.100
				Pembinaan dan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peserta pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	15 orang	15 orang	15 orang	18.597.073	18.589.600
				Fasilitasi Lelang dan Klasifikasi PBJ Untuk PHJD	Jumlah Fasilitas dan Klarifikasi Lelang	1 paket	1 paket	1 paket	45.000.000	39.444.800
				9. Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan	100%				103.445.260	99.346.940
				Publikasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Lembaran daerah yang dipublikasi	270 buku	270 buku	270 buku	27.188.850	26.998.800
				Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Jumlah Peraturan Bupati yang difasilitasi	50 dokumen	50 dokumen	50 dokumen	50.900.830	50.432.340



				Validasi Keputusan Bupati dan Evaluasi/klarifikasi Peraturan Nagari	Jumlah Keputusan Bupati yang divalidasi	550 dokumen	550 dokumen	550 dokumen	14.712.450	14.083.000
				Fasilitasi Pelaksanaan dan Pelaporan RANHAM	Jumlah Laporan RanHam	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10.643.130	7.832.800
			10.	Advokasi Pemerintah Daerah					68.557.561	55.194.840
				Penyelesaian Sengketa Hukum	Jumlah perkara hukum yang diselesaikan	10 kasus	10 kasus	10 kasus	68.557.561	55.194.840
			11.	Kerjasama Informasi dengan Media Massa					770.131.539	670.416.250
				Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah kerja sama dengan Media Massa	27 Media Massa	27 Media Massa	27 Media Massa	435.893.842	387.524.750
				Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kegiatan pemerintah daerah	2500 lembar Cetak Foto, 100 video, 80 spanduk	2500 lembar Cetak Foto, 100 video, 80 spanduk	2500 lembar Cetak Foto, 100 video, 80 spanduk	137.621.353	94.206.850
				Publikasi dan Promosi daerah	Jumlah publikasi dan promosi daerah	50 kali	50 kali	50 kali	196.616.344	188.684.650
			12.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					4.425.756.106	4.344.321.550
				Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	100%	100%	100%	492.034.450,00	479.502.900,00



				Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	100%	100%	100%	4.500.000,00	4.500.000,00
				Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	100%	100%	100%	138.086.872,00	133.850.000,00
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	100%	100%	100%	770.025.000,00	766.648.870,00
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	514.000.000,00	504.500.000,00
				Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	289.620.000,00	285.470.000,00
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	707.168.184,00	704.848.309,00
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.194.196.600,00	1.151.641.971,00
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terpeliharanya perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	316.125.000,00	313.359.500,00
				13. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah		12 bulan	12 bulan	12 bulan	9.796.400	9.796.400
				Pendataan dan Penataan dokumen/Arsip Daerah (Unit Arsip ke Depo Arsip Daerah)	Jumlah arsip Lingkup Setda yang ditata	2500 berkas	2500 berkas	2500 berkas	9.796.400	9.796.400
				14. Peningkatan Disiplin Aparatur (KDH)					226.775.000	226.254.560



				Pengadaan Pakaian Dinas dan Hari-hari Tertentu Beserta Kelengkapannya (KDH)	Terlaksananya pakaian dinas beserta perlengkapan (KDH)	65 stel	65 stel	65 stel	226.775.000	226.254.560
			15.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					-	-
				Penilaian Kompetensi Camat dan Perangkatnya	Jumlah Camat terbaik	3 Camat Terbaik	3 Camat Terbaik	3 Camat Terbaik	-	-
			16.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH					207.436.150	200.937.230
				Pengendalian dan Koordinasi Program Pembangunan Daerah	Jumlah rapat evaluasi dan monitoring program pembangunan daerah yang dilaksanakan	4 kali	4 kali	4 kali	44.295.950	40.821.170
				Penyusunan harga satuan pokok Kegiatan	Jumlah dokumen HSPK yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	31.636.280	30.318.960
				Pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah	Jumlah dokumen laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	28.751.312	28.186.300
				Penyusunan Prosedur Kegiatan	Jumlah dokumen prosedur kegiatan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	20.913.208	19.771.400
				Pemantapan dan Optimalisasi fungsi Staf ahli	Jumlah Rekomendasi Staf Ahli Bupati	24 rekomendasi	24 rekomendasi	24 rekomendasi	20.506.900	20.506.900



				Optimalisasi Fungsi Koordinasi Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum	Jumlah Koordinasi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	21.275.300	21.275.300
				Optimalisasi Fungsi Koordinasi Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra	Jumlah Koordinasi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	22.769.450	22.769.450
				Optimalisasi Fungsi Koordinasi Bidang Umum, Organisasi dan Keuangan	Jumlah Koordinasi Asisten Bidang Administrasi Umum	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	17.287.750	17.287.750
			17.	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah					192.118.200	184.160.150
				Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Kerja Pejabat Negara yang difasilitasi	80 kali	80 kali	80 kali	159.538.800	151.580.750
				Pengembangan pelayanan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan Kesehatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang dilakukan				-	-
				Peningkatan Etos kerja Keprotokolan	Jumlah Pelaksanaan Keprotokolan	80 kali	80 kali	80 kali	32.579.400	32.579.400
			18.	Program Pemantapan Otonomi Daerah	3 MoU	1 kali	1 kali	1 kali	41.565.770	41.462.130



				Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitasi Rakor Gubernur dengan Kabupaten Kota	4 kali	4 kali	4 kali	2.544.800	2.544.800
				Fasilitas Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Mou dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antar daerah	1 MoU	1 MoU	1 MoU	6.662.460	6.662.460
				Fasilitas Penegasan Batas Daerah dan Kecamatan	Jumlah fasilitasi penetapan dan penegasan batas nagari	40 Nagari	40 Nagari	40 Nagari	8.635.150	8.635.150
				Fasilitas Kerjasama Rantau	Jumlah fasilitasi nagari binaan perantau tingkat Kabupaten	3 Nagari	3 Nagari	3 Nagari	4.925.950	4.925.950
				Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan	Jumlah Rakor kecamatan yang dihadiri	15 kali	15 kali	15 kali	8.563.450	8.563.450
				Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah rapat koordinasi camat dan wali nagari	2 kali	2 kali	2 kali	8.517.460	8.413.820
				Penamaan Rupa Bumi dan Unsur Alami	Laporan nama rupa bumi dan unsur buatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.716.500	1.716.500
				19. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Alam		12 Kali	12 Kali	12 Kali	17.430.300	17.430.300
				Monitoring dan Evaluasi SDA	Tersedianya data perkembangan dan Potensi SDA di Kab. Pesisir Selatan				17.430.300	17.430.300
				20. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					7.322.480	7.322.480



				Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tata Niaga Bahan Bakar Bersubsidi	Jumlah pangkalan LPJ 3 Kg/Gas dan BBM yang dimonev	60 pkn	60 pkn	60 pkn	7.322.480	7.322.480
			21.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		4 Kali	4 Kali	4 Kali	18.875.584	17.875.584
				Forum Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah	Jumlah Rapat TPID yang dilaksanakan	2 kali	2 kali	2 kali	11.017.732	10.017.732
				Monitoring dan Evaluasi Pembinaan BUMD, Koperasi, UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Lembaga Keuangan dan BUMD yang dimonitoring dan dievaluasi				7.857.852	7.857.852
			22.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan					8.143.632	5.762.732
				Pengawasan pupuk Bersubsidi dan pestisida	Jumlah kios pupuk bersubsidi dan pestisida yang diawasi	115 Kios	115 Kios	115 Kios	8.143.632	5.762.732
			23.	Program perencanaan pembangunan ekonomi					62.124.962	62.033.283
				Koordinasi Peningkatan Ekonomi Pesisir Selatan	Jumlah rapat koordinasi peningkatan ekonomi Pesisir Selatan				62.124.962	62.033.283
			24.	Program pendidikan politik masyarakat					203.690.160	191.734.757
				Monitoring, Evaluasi Keberadaan Ormas/LSM sesuai Undang-	Jumlah Ormas yang mendapat pembinaan	40 ormas	40 ormas	40 ormas	30.957.601	28.796.307



				Undang Keormasan						
				Sosialisasi Undang-undang dan Peraturan Bidang Politik	Jumlah Sosialisasi UU dan Peraturan Bidang Politik yang dilaksanakan	15 kali	15 kali	15 kali	-	-
				Verifikasi Administrasi bantuan Keuangan Kepada Partai	Jumlah Parpol yang mengajukan bantuan keuangan yang diverifikasi	15 Parpol	15 Parpol	15 Parpol	12.935.018	8.867.250
				Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	Jumlah Pemantauan, Pelaporan, dan Perkembangan Politik di Daerah	12 kali	12 kali	12 kali	159.797.541	154.071.200
				25. Program peningkatan keamanan dan Kenyamanan lingkungan					141.226.360	136.117.901
				Peningkatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah aliran kepercayaan yang diawasi	5 Aliran	5 Aliran	5 Aliran	15.141.480,00	13.265.520,00
				Operasionalisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Jumlah konflik sosial yang difasilitasi	21 rekomendasi	21 rekomendasi	21 rekomendasi	44.380.544,00	42.270.258,00
				Forum Koordinasi Pimpinan daerah (Forkopimda)	Jumlah rekomendasi koordinasi Pimpinan Daerah	4 rekomendasi	4 rekomendasi	4 rekomendasi	81.704.336,00	80.582.123,00
				26. Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal					32.283.701	29.313.100



				Koordinasi dan Konsultasi pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah rapat koordinasi pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	35 kali	35 kali	35 kali	32.283.701,00	29.313.100,00
				Operasionalisasi Unit bantuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah kasus pungutan liar yang ditangani	3 kasus	3 kasus	3 kasus	-	-
				27. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan					3.375.700	3.375.700
				Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah rapat koordinasi tim kewaspadaan dini daerah	4 kali	4 kali	4 kali	3.375.700,00	3.375.700,00
				28. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan					69.475.000	67.718.840
				Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar lainnya	Jumlah pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional dan hari besar lainnya	22 kali	22 kali	22 kali	69.475.000	67.718.840
				29. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)					96.603.142	93.764.950
				Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	Jumlah sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika	30 sekolah	30 sekolah	30 sekolah	96.603.142,00	93.764.950,00
				30. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	100%				4.083.660	4.083.660



				Monitoring dan Evaluasi Unit Kesehatan Sekolah (UKS)	Jumlah UKS yang dibina				4.083.660,00	4.083.660,00
				31. program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga					4.149.228	4.142.700
				Pemasyarakatan Olahraga Aparatur	Jumlah kegiatan olahraga aparatur yang dilaksanakan	24 kali	24 kali	24 kali	4.149.228	4.142.700
				32. Peningkatan IMTAQ					1.115.740.638	886.611.772
				Peningkatan IMTAQ bagi ASN di Lingkungan Pemda Kab. Pesisir Selatan dan Penyelenggara n Hari Besar Islam	Jumlah ceramah agama yang dilaksanakan	24 kali	24 kali	24 kali	665.478.927	524.704.130
				Safari Keagamaan Pemerintah Daerah	Jumlah safari Pemerintah daerah yang dilakukan	60 kali	60 kali	60 kali	211.300.000	208.610.000
				Fasilitasi Penyelenggara n MTQ	Jumlah cabang MTQ yang diikuti	10 cabang	10 cabang	10 cabang	2.257.852	2.257.852
				Fasilitasi Pelayanan Jema'ah Haji Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Tenaga Pendamping Haji Daerah (TPHD)	1 orang	1 orang	1 orang		-
				Pembinaan Didikan Shubuh Tergiat	Jumlah Lembaga Didikan subuh yang dikunjungi	15 kali	15 kali	15 kali	5.606.000	5.606.000
				Koordinasi dan Konsultasi Kesejahteraan Rakyat dan Urusan Keagamaan	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Kesejahteraan Rakyat dan Urusan Keagamaan yang	12 kali	12 kali	12 kali	140.715.419	123.609.920



					dilaksanakan					
				Verifikasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah proposal Hibah bansos mesjid yang diverifikasi	150 Proposal	150 Proposal	150 Proposal	15.565.334	5.192.870
				Pembinaan Pondok Pesantren, MDTA, dan Pondok Alquran	Jumlah Pondok Pesantren, MDTA, dan Pondok Alquran yang dibina	15 unit	15 unit	15 unit	74.817.106	16.631.000
									12.465.619.520	11.940.630.818

2. URUSAN : PENDUKUNG
PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD



F. URUSAN KEWILAYAHAN

1. URUSAN : KEWILAYAHAN PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

Kecamatan Koto XI Tarusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Umum	Kecamatan Koto XI Tarusan	3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 4. Peraturan Bupati Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumatera Barat Tahun 2020;	1.Program Pelayanan Adm.Perkantoran 1.Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.Penyediaan jasa Komunikasi ,sumber daya Air dan Listrik 3.Penyediaan jasa administrasi Keuangan 4.Penyediaan jasa Kebersihan kantor 5.Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.Penyediaan brg cetakan dan Penggandaan 7.Penyediaan komponen Instansi listrik /penerangan Bangunan Ktr	Ketersediaan Pelayanan Adm. Perkantoran Terlaksananya pembayaran Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pembayaran Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Terlaksananya pembayaran honor dan operasional Pengelolaan keuangan Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan ktr Tersedianya alat tulis Kantor Tersediannya brg cetakan dan Penggandaan dokumen. Tersediannya komponen Instalasi listrik /penerangan bangunan	bln Bln sda sda sda bln bln bln	100 sda 100 100 100 100 100 100	98.54 99.99 100 100 99.99 100 99.96 99.96 99.89	176.618.180 10.997.000 460.000 3.362.500 32.384.800 14.346.500. 18.668.980 20.675.400 7.003.000	174.041.580 10.996.000 460.000 3.362.500 32.380.500. 14.346.5001 18.661.600 20.667.400 6.995.000



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				8.Penyediaan bhn Bacaan dan Perundang-undangan	Tersedianya bhn bacaan dan peraturan per undang-undangan	bln	100	100	4.500.000	4.500.000
				9.Penyediaan Makan dan minuman	Tersediannya makan dan minum rapat	bln	100	99.97	28.380.000	28.372.500
				10.Rpt-rpt koord.dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksannya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	bln	100	98.04	1.912.500	1.875.000
				11.Rpt-rpt koord. dan konsultasi dalam daerah	Terlaksannya koordinasi dan konsultasi ke dlm daerah.	bln	100	99.63	29.840.000	29.950.000
				2.Program peningkatan sarana dan Prasarana	Ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur.					
				1.Pemeliharaan /rutin berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gdg Kantor.	bln	100	100	2.956.150.	2.956.150
				2.Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas.	Bln	100	99.65	24.335.000.	24.250.500
				3.Pemeliharaan rutin /berkala Peralatan Gdg kantor.	Terpeliharanya peralatan gdg kantor.	Bln	100	98.03	3.050.000	2.990.000.
				3.Program pengembangan lingkungan Sehat	Tercapainya pengembangan lingkungan yg sehat.					
				1.Fasilitasi dan pembinaan Lingkungan Sehat	Terlaksananya pembinaan lingkungan sehat	Bln	100	100	460.000	460.000
				4.Program pemberdayaan lembaga sosial masyarakat nag.	Persentase lembaga sosial yg aktif					
				1.Fasilitasi dan pembinaan lembaga sosial dan ekonomi Masyarakat.	Terciptanya pembinaan lembaga sosial yg aktif	Bln.	100	100	3.362.500	3.362.500



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				5.Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase permasalahan trantibun yg ditindak lanjuti.					
				1.Fasilitasi penyelesaian permasalahan	Jumlah penyelesaian permasalahan trantibun yg ditindak lanjuti	Bln	100	100	10.957.500	10.957.500
				6.Program Pengembangan Kawasan Pedesaan	Persentase pengembangan kawasan pedesaan					
				1.Pembinaan potensi Kawasan masyarakat Pedesaan/Nagari	Terlaksananya pembinaan potensi kawasan Masy. Desa	Bln	100	100	1.530.000	1.530.000
				7.Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan	Jumlah Rekomendasi yg di keluarkan					
				1.Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan.	Bln	100	100	960.000	960.000
				8.Program kerja sama Pembangunan	Jumlah dokumentasi kerja sama yg disusun					
				1.Koord. spasial kerja sama wilayah dan perbatasan	Terlaksananya koordinator antar perbatasan wilayah	Bln	100	100	2.235.000	2.235.000
				9.Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan keg.musrembang Nag.yg diferifikasi sesuai dgn program prioritas					
				1.Penyelenggaraan Musrembang RKPD	Jumlah musrembang rkpd yg dilaksanakan di Kec.					
				10.Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	Persentase tata kelola keuangan Nagari yg Baik	Bln	100	100	5.605.000	5.605.000
				1.Fasilitasi ,monitoring dan evaluasi pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan nagari	Tersedianya operasional pembinaan pemerintahan Nagari	Bln	100	100	6.930.000	6.930.000



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				11. Program Pengembangan pemasaran Pariwisata	Persentase pengembangan kawasan pariwisata					
				1. Pelaksanaan dan keikutsertaan Even ke Pariwisata	Terlaksananya keikutsertaan Even ke pariwisata	Persen	100	100	1.000.000	1.000.000

2. URUSAN : KEWILAYAHAN PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BAYANG

Kecamatan Bayang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yang difasilitasi	85 %	85 %	85%	Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang perizinan	0	0	0
						Program Pembangunan wawasan kebangsaan	0	0	0
						Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	10.550.000	10.532.500	99,83 %
						Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/Nagari	26.064.250	26.064.250	100 %
						Program Pengembangan lingkungan sehat	4.812`500	4.812`5000	100 %0
						Program Peningkatan IMTAQ	29.137.500	29.137.500	100 %
						Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.575.000	4.575.000	100 %
2	Peningkatan Nilai LAKIP	Target Nilai LAKIP OPD	BB	BB	BB	Pelayanan Administrasi Perkantoran	263.842.520	263.775.392	99,97 %



						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	33.633.500	33.633.500	100 %
3	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari yang pengelolaan keuangan dan pemerintahan yang tertib	17 Nagari	17 Nagari	17 Nagari	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa/Nagari	2.447.500	2.447.500	100 %
Jumlah							375.044.770	374.960.142	99,97

- **Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Camat Bayang**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu	100%	100	100
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				
		Program pengembangan lingkungan sehat				
		Program pelayanan administrasi perkantoran				
2	Meningkatkan Nilai	Program peningkatan	Peningkatan Nilai	B	B	100



	LAKIP	sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan IMTAQ Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	LAKIP Kecamatan			
3	Meningkatkan kualitas Pemerintahan nagari	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Nagari Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/ nagari Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pemantapan Otonomi Daerah	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan keuangan Nagari yang baik	17 nagari	17 nagari	100



- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

a. Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat, dengan indikator kinerja yaitu:

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 100 %)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN dengan output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan public, hal ini dapat dilihat dari jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan.
- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Fasilitasi penyelesaian permasalahan trantibum dengan output kegiatan ini adalah meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan hal ini dapat dilihat dari jumlah permasalahan di bidang trantibum yang dapat difasilitasi dan diselesaikan.
- Program pengembangan lingkungan sehat dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Fasilitasi dan Pembinaan Lingkungan Sehat dengan output kegiatan ini adalah terciptanya lingkungan Kecamatan Bayang yang sehat dan asri, hal ini dapat dilihat peringkat hasil penilaian Lingkungan Kecamatan Sehat.
 - 2) Monitoring dan Evaluasi Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dengan output kegiatan ini adalah terciptanya lingkungan Kecamatan Bayang yang sehat dan asri, hal ini dapat dilihat dari jumlah UKS Sekolah yang dibina dan peringkat hasil penilaian UKS.
- Program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik dengan output kegiatan ini adalah tersedianya sumber daya air dan listrik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan administrasi kantor.
 - 2) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan output kegiatan ini adalah tersedianya jasa administrasi keuangan untuk menunjang pengelola keuangan kantor.



- 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan output kegiatan ini adalah tersedianya jasa kebersihan kantor untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan administrasi kantor.
- 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan output kegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan administrasi kantor.
- 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan output kegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan administrasi kantor.
- 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan output kegiatan ini adalah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan administrasi kantor.
- 7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dengan output kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan dan peraturan kantor untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan administrasi kantor.
- 8) Penyediaan Makanan dan Minuman dengan output kegiatan ini adalah tersedianya makanan dan minuman untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan administrasi kantor.
- 9) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan output kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan administrasi kantor.
- 10) Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan dengan output kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan penunjang operasional perencanaan dan pelaporan kantor untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan administrasi kantor.

2. Meningkatkan Nilai LAKIP (Target Kinerja : B) (Realisasi Kinerja : 100 %)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan output kegiatan ini adalah terpeliharanya gedung kantor sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas kantor.



- 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan output kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas kantor.
 - 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan output kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan gedung kantor sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas kantor.
- Program Peningkatan IMTAQ dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan IMTAQ Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Penyelenggaraan Hari Besar Islam dengan output kegiatan ini adalah meningkatnya IMTAQ ASN dan terlaksananya peringatan Hari Besar Islam.
 - 2) Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan MTQ yang diikuti.
 - 3) Pembinaan Didikan Subuh Tergiat dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan didikan subuh tergiat.
 - Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional dengan output kegiatan ini adalah terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan dan terlaksananya kegiatan peringatan Hari Besar Nasional.

3. Meningkatkan kualitas Pemerintahan nagari (Target Kinerja : 17 Nagari) (Realisasi Kinerja : 100 %)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Nagari dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan Nagari dengan output kegiatan ini adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan dan nagari yang baik.
- Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/ nagari dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan Nagari dengan output kegiatan ini adalah erlaksananya pembinaan terhadap TP-PKK Nagari hal ini dapat dilihat dari meningkatnya perananan PKK dalam pembangunan.
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :



- 1) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan Nagari dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya pelaksanaan musrenbang RKPD yang baik dan tersedianya hasil Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Tahun 2020.
- Program Pemantapan Otonomi Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan dengan output kegiatan ini terwujudnya keamanan dan kenyamanan kewilayahan melalui kegiatan koordinasi dan pembinaan kewilayahan.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan.

3. URUSAN : KEWILAYAHAN PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
1	Kewilayahan	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Peraturan Bupati No. 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	bulan	12	12	197.969.325	197.052.453	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening listrik	bulan	12	12	10.560.000	9.823.053	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelolaan keuangan	bulan	12	12	38.974.400	38.974.400	



				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor	bulan	12	12	55.538.085	55.428.000	
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya Perbaikan Alat kerja	bulan	12	12	3.350.000	3.350.000	
				Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	bulan	12	12	18.702.252	18.680.000	
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	16.719.000	16.719.000	
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan	bulan	12	12	5.670.588	5.623.000	
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12	4.340.000	4.340.000	
				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat	bulan	12	12	21.685.000	21.685.000	
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi keluar daerah	bulan	12	12	2.350.000	2.350.000	
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi kedalam daerah	bulan	12	12	20.080.000	20.080.000	



2				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur	bulan	12	12	77.707.950	77.707.950	
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Knator	Terlaksananya Penambahan Aset Daerah	bulan	12	12	30.400.000	30.400.000	
				pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	bulan	12	12	47.307.950	47.307.950	
3				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT/NAGARI	Persentase lembaga sosial masyarakat yang aktif				26.895.000	26.895.000	
				Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat	Persentase lembaga sosial dan ekonomi masyarakat yang aktif	bulan	12	12	26.895.000	26.895.000	
5				PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase usulan program/kegiatan yang tertampung pada RPJMD				10.550.000	10.550.000	
				Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Musrenbang RKPD yang diselenggarakan di tingkat kecamatan	kali	1	1	10.550.000	10.550.000	
8				PROGRAM PENINGKATAN IMTAQ	Persentase pelaksanaan MTQ				7.000.000	7.000.000	
				Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ	Terlaksananya penyelenggaraan MTQ	bulan	12	12	7.000.000	7.000.000	



- PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. PERMASALAHAN

- a) 1. Minimnya ketersediaan anggaran di beberapa Program dan kegiatan
- b) Minimnya Anggaran untuk pembinaan Pemerintahan Nagari.
- c) Kualitas SDM belum maksimal dalam melaksanakan tugas sesuai Tupoksi.
- d) Pelayanan Dasar belum teraksana secara Optimal karena masyarakat tidak memahami prosedur.
- e) Kurang Sarana dan Prasarana untuk Operasional.

2. Solusi

- a) menambah anggaran yang dirasa perlu di beberapa program dan kegiatan pada tahun 2021
- b) menambah anggaran pada kegiatan pembinaan Pemerintahan Nagari
- c) Meningkatkan kualitas kinerja personil dalam melaksanakan Tupoksi nya
- d) Meningkatkan pemberian pelayanan Dasar terhadap masyarakat
- e) Menambah Mobilisasi kendaraan dinas untuk Operasional kelapangan

4. URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN IV JURAI

5. URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BATANG KAPAS

Kecamatan Batang Kapas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Umum	Kecamatan Batang Kapas	5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 6. Peraturan Bupati Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumatera Barat Tahun 2020;	I. Program Pelayanan Adm. Perkantoran	Ketersediaan Pelayanan Adm. Perkantoran	bln	100	76,86	178.537.500	137.215.417
				1. Penyediaan jasa Komunikasi ,sumber daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bln	sda	75,82	12.710.000	9.636.617
				2. Penyediaan jasa administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran honor dan operasional Pengelolaan keuangan	sda	100	73	52.575.000	38.335.500
				3. Penyediaan jasa Kebersihan kantor	Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan ktr	sda	Sda	100	14.435.500	14.435.500
				4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis Kantor	bln	100	98,47	18.367.000	18.086.500
				5. Penyediaan brg cetakan dan Penggandaan	Tersedianya brg cetakan dan Penggandaan dokumen.	bln	100	95,43	6.183.800	6.480.000
				6. Penyediaan komponen Instansi listrik /penerangan Bangunan Ktr	Tersedianya komponen Instalasi listrik /penerangan bangunan	bln	100	99,91	2.170.000	2.168.000
				7. Penyediaan bhn Bacaan dan Perundang-undangan	Tersedianya bhn bacaan dan peraturan per undang-undangan	bln	100	98,61	3.550.000	3.600.000
				8. Penyediaan Makan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat	bln	100	69,62	21.725.000	15.125.000
				9. Rpt-rpt koord. dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksannya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	bln	100	29,47	4.750.000	1.400.000
				10. Rpt-rpt koord. dan konsultasi dalam daerah	Terlaksannya koordinasi dan konsultasi ke dlm daerah.	bln	100	66,81	34.425.000	23.000.000



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				11. Penunjang operasional Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Terlaksananya operasional perencanaan dan pelaporan SKPD	bln	100	98.04	7.300.000	5.294.500
				2.Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur.		100	97,20	122.950.700	126.498.000
				1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	12.550.000	bln	100	100	12.550.000	12.550.000
				2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersediannya peralatan gedung kantor	Bln	100	100	15.750.000	15.750.000.
				3..Pemeliharaan /rutin berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gdg Kantor.	Bln	100	97,08	49.900.000	51.400.000
				4.Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas.	Bln	100	95,91	40.569.700	42.298.000
				5.Pemeliharaan rutin /berkala Peralatan Gdg kantor.	Terpeliharanya peralatan gdg kantor.	Bln.	100	98.03	4.500.000	4.181.000.
				3.Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Tercapainya perlindungan dan konservasi sumber daya alam		100	100	3.000.000	3.000.000
				1.Pembinaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau.	Terlaksananya pembinaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau	Bln	100	100	3.000.000	3.000.000
				4.Program pemberdayaan lembaga sosial masyarakat/ nag	Persentase lembaga sosial yg aktif		100	100	3.397.500	3.397.500
				1.Fasilitasi dan pembinaan lembaga sosial dan ekonomi Masyarakat.	Terciptanya pembinaan lembaga sosial yg aktif	Bln	100	100	3.397.500	3.397.500



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				5.Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase permasalahan trantibun yg ditindak lanjuti.		100	23,93	10.000.000	2.392.500
				1.Fasilitasi penyelesaian permasalahan	Jumlah penyelesaian permasalahan trantibun yg ditindak lanjuti	Bln	100	23.93	2.392.500	10.000.000
				6.Program Perencanaan pembangunan Daerah	Persentase usulan keg.musrembang Nag.yg diferifikasi sesuai dgn program prioritas		100	100	6.325.000	6.325.000
				1.Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah musrembang RKPD yg dilaksanakan di Kecamatan	Bln	100	100	6.325.000	6.325.000
				7.Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	Persentase tata kelola keuangan Nagari yg Baik		100	100	4.612.500	4.612.500
				1.Fasilitasi ,monitoring dan evaluasi pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan nagari	Tersedianya operasional pembinaan pemerintahan Nagari		100	100	4.612.500	4.612.500
				8.Program Peningkatan IMTAQ	Persentase peningkatan IMTAQ		100	100	2.215.000	2.215.000
				1.Fasilitasi dan Pembinaan Agama	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan agama	Bln	100	100	2.215.000	2.215.000



6. URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SUTERA

Kecamatan Sutera dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Camat Sutera		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	12	241.208.700	237.539.319
1				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan Air, Listrik dan Jasa Komunikasi	Bulan	12	12	8.400,00	5,647.319
2				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	44.000.000	43.985.500
3				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Ketersediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	12	12	62.670.000	62.670.000
4				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ketersediaan Alat Tulis	Bulan	12	12	19.718.300	19.625.500
5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Bulan	12	12	11.391.400	11.377.000
6				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Bulan	12	12	1.928.000	1.914.000
7				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bulan	12	12	480.000	480.000
8				Penyediaan Makanan dan Minuman	Ketersediaan Makan dan Minum Pegawai, Rapat dan Tamu	Bulan	12	12	39.930.000	39.930.000



	9				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Ketersediaan Operasional untuk rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulan	12	12	1.200.000	425.000
	10				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Ketersediaan operasional untuk rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Bulan	12	12	46.120.000	46.120.000
2	1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi sarana dan prasarana aparatur	Bulan	12	12	52.950.000	52.381.500
	2				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	Bulan	12	12	2.400.000	2.400.000
	3				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Bulan	12	12	3.000.000	3.000.000
					Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Bulan	12	12	47.550.000	46.981.500
3	1	Program Pengembangan Lingkungan Sehat			Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Presentase nagari ODF (Open Defecation Free)	Persen	75,27	0	0	0
					Fasilitasi dan Pembinaan Lingkungan Sehat	Jumlah nagari yang difasilitasi dalam pembinaan lingkungan sehat	Persen	75,27	0	0	0
4	1	Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/Nagari			Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/Nagari	Presentase PKK nagari yang aktif	Nagari	12	12	16.362.500	16.362.500
					Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat	Jumlah PKK nagari yang di bina	Nagari	12	12	16.362.500	16.362.500
5		Program perencanaan pembangunan daerah			Program perencanaan pembangunan daerah	Presentase perencanaan daerah yang selaras	Persen	100	100	12.700.000	12.700.000



	1				Penyelegaraan Musrenbang RKPD	Jumlah usulan program atau kegiatan pada musrenbang nagari sesuai dengan prioritas	Persen	100	100	12.700.000	12.700.000
6	1	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa/Nagari			Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa/Nagari Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan Nagari	Presentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan nagari Tertibnya administrasi dan tata kelola keuangan nagari	Persen Persen	90 90	100 100	5.087.500 5.087.500	5.087.500 5.087.500
7	1	Program pementapan Otonomi Daerah			Program pementapan Otonomi Daerah Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan	Presentase tahapan penegasan batas wilayah administratif pemerintah Terkoordinasikannya kegiatan di kecamatan dengan baik	Persen Persen	50 50	0 0	0 0	0 0
8	1 2	Program Peningkatan IMTAQ			Program Peningkatan IMTAQ Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan	Presentase kepuasan terhadap pelayanan jemaah haji oleh pemerintah daerah Jumlah MTQ yang diikuti Jumlah lembaga didikan subuh yang diikuti	Besar Kali Kali	100 1 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
9		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase penyelesaian kasus pemakaian narkoba tingkat siswa dan aparat	Persen	85	0	0	0



	1			Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah pelaksanaan peringatan hari besar nasional	Kali	1	0	0	0
--	---	--	--	--	---	------	---	---	---	---

- **Sasaran Strategis PK Kepala OPD Kantor Camat Sutera Tahun 2020.**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Sutera	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Sutera	A	-	-
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan	95%	85%	97%
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat				
		Program Peningkatan Kebersamaan Masyarakat Pedesaan				
		Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/Nagari				



		Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan				
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah				
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari				
		Program Peningkatan IMTAQ				
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				
		Program Pendidikan Politik Masyarakat				
3	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	Jumlah Nagari berkinerja baik	12 Nagari	12 Nagari	100

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Camat Sutera Tahun 2020.**

1. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Sutera, dengan indikator kinerja yaitu:

a) Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Sutera

(Target Kinerja : A) (Realisasi Kinerja : -)

Salah satu indikator kinerja adalah Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Sutera Tahun 2020. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :



- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik, dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran rekening listrik.
 - (2) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan output Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelolaan keuangan.
 - (3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan output Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor.
 - (4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan output Tersedianya alat tulis kantor.
 - (5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan dengan output Tersedianya barang cetak dan penggandaan.
 - (6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor dengan output Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan.
 - (7) Kegiatan Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan output Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.
 - (8) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan output Tersedianya makan minum rapat dan Tersedianya makan minum tamu.
 - (9) Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah dengan output Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah.
 - (10) Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dengan output Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah.
 - (11) Kegiatan Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan dengan output Dokumen perencanaan dan pelaporan yang dihasilkan.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas output kegiatan ini adalah Terpeliharanya rumah dinas.
 - (2) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan output Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor.



- (3) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan output Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional.
- (4) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan otutput Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Sutura.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan dengan indikator kinerja yaitu:

a) Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai dengan standar pelayanan.

(Target Kinerja : 95%) (Realisasi Kinerja : 85%)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN dengan output Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan.
- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum dengan output Jumlah penyelesaian permasalahan trantibum yang difasilitasi.
- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional, dengan output Jumlah pelaksanaan PHBN.
- Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/ Nagari, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat, dengan output Jumlah PKK Nagari yang dibina.
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dengan output Jumlah Musrenbang RKPD yang diselenggarakan di tingkat kecamatan.
- Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Fasilitasi capaian penerimaan PBB-P2 dengan output Persentase penerimaan PBB terhadap target.
- Program Peningkatan IMTAQ, dengan kegiatan sebagai berikut:



- (1) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan, dengan output Jumlah Lembaga Didikan subuh yang dikunjungi.
- Program Pembangunan Wilayah Kecamatan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Pembinaan produk unggul nagari dan pemberdayaan masyarakat dengan output Jumlah produk unggulan yang dibina.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai dengan standar pelayanan.

3. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dengan indikator kinerja yaitu:

a) Jumlah Nagari berkinerja baik.

(Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 100%)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Pemerintah Nagari dengan output Jumlah pengelolaan keuangan dan pemerintahan nagari yang baik.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Jumlah Nagari berkinerja baik.



7. URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LENGAYANG

Kecamatan Lengayang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perbaikan pada kinerja ASN yang berada Di wilayah kerja Kecamatan Lengayang	Nilai Lakip Kecamatan Lengayang	BB(75)	97%	80%	Pelayanan administrasi perkantoran	152.797.500	145.044.707	95%
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	98.371.000	97.285.000	99%
2	Meningkatkan Mutu Pelayanan pada Masyarakat Tiap-tiap Kepala Seksi.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pablik	80	75%	80%	Program Peningkatan Pelayanan Bidang Perizinan.	0	0	0%
						Program perencanaan Pembangunan Daerah.	14.150.000	14.150.000	100%
						Program Peningkatan Keberdayan Masyarakat Pedesaan.	0	0	0%
						Program Pengembangan Lingkungan Sehat.	6.187.500	6.187.500	100%
3	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Aparatur Pemerinthan Nagari dalam Administrasi Pengelolaan Keuangan nagari	Jumlah Nagari yang Menyelesaikan Admisnisrasi Keuangan Nagari dengan tertib dan Benar dan tepat Waktu.	80	100%	80%	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	2.750.000	2.750.000	100%
4	Meningkatkan Fasilitas kegiatan Keagamaan	Mesjid yang memiliki TPQ aktif	80	75	94%	Program peningkatan IMTAQ	57.325.000	57.325.000	100%
5	Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Memiliki Nilai Budaya dan Agma.	Pembinaan kelembagaan KAN	80%	50%	63%	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	0	0	0%
						Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat dan Nagari.	33.287.500	32.802.500	99%
						Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	7.487.500	7.487.500	100%



- **Sasaran Strategis PK Kepala OPD**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Pelayanan PATEN	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan	Persentase rekomendasi perizinan dan non perizinan yang difasilitasi	85 %	85 %	100
2	Peningkatan Nilai LAKIP Kantor Camat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai LAKIP Kantor Camat	BB	BB	100
3.	Terlaksananya Pembinaan Pemerintahan Nagari	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	Jumlah Nagari yang Dibina	9 Nagari	9 Nagari	100
4.	Meningkatna kehidupan Masyarakat yang memiliki Nilai Budaya dan Agama.	Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat Nagari.	Pembinaan kelembagaan KAN	9 NAGARI.	9 NAGARI .	100

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Peningkatan Pelayanan PATEN, dengan indikator kinerja yaitu:**



a) **Persentase rekomendasi perizinan dan non perizinan yang difasilitasi (Target Kinerja : 85 %) (Realisasi Kinerja : 85 %)**

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan, dengan kegiatan sebagai berikut :

(1) Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan output fasilitasi rekomendasi perizinan dan non perizinan di kantor Kecamatan .

b) **Peningkatan Nilai LAKIP Kecamatan, dengan indikator kinerja yaitu:**

Nilai LAKIP Kecamatan (Target Kinerja : BB (Realisasi Kinerja : BB)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :

(1) Kegiatan penunjang operasional perencanaan dan pelaporan dengan output pencapaian seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan serta kelengkapan data pendukung terhadap laporan yang dihasilkan .

c) **Peningkatan kualitas Pemerintahan Nagari, dengan indikator kinerja yaitu:**

Jumlah Nagari yang dibina (Target Kinerja : 10 Nagari (Realisasi Kinerja : 10 Nagari)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa/Nagari, dengan kegiatan sebagai berikut :



- (2) Kegiatan Fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan Pemerintahan Nagari dengan output memfasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan fisik nagari, tata kelola keuangan dan pemerintahan Nagari.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan.

d) **Peningkatannya kehidupan masyarakat yang memiliki Nilai Budaya dan Agama , dengan indikator kinerja yaitu:**

Jumlah Kelembagaan KAN yang di bina : 9 Nagari (Realisasi Kinerja : 9 Nagari)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat Nagari sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat Sosial dan Budaya/KAN dengan output memfasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Pembinaan Kelembagaan KAN di Setiap Nagari.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan.



8. URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN RANAH PESISIR

Kecamatan Ranah Pesisir dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Perbaikan pada kinerja ASN yang berada Di wilayah kerja Kecamatan Ranah Pesisir	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Layanan Administrasi perkantoran	Bulan	12	12	165.815.309	164.682.689	99,5	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	ketersediaan air, listrik dan jasa komunikasi	Bulan	12	12	22.200.000	21.092.380	100	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	ketersediaan layanan administrasi keuangan	Bulan	12	12	37,618,246	37,618,246	100	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	ketersediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	16,573,209	16,573,209	100	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	ketersediaan alat tulis	Bulan	12	12	28,064,824	28,064,824	100	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan barang cetak dan penggandaan	Bulan	12	12	11,543,666	11,543,666	100	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Bulan	12	12	5,227,864	5,227,864	100	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	ketersediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Bulan	12	12	3.600.000	3.600.000	100	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	ketersediaan makan dan minum pegawai,	Bulan	12	12	27.537.500	27.537.500	100	



No	Sasaran	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Ket.
			rapat dan tamu							
		Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulan	12	12	325.000	325.000	100	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Bulan	12	12	13.125.000	13.125.000	100	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kerja	Persen	100	100	121.945.908	121.945.908	100	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor dibeli	Persen	100	100	15.000.000	15.000.000	100	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	terpeliharanya gedung kantor	Persen	100	100	34.988.756	34.988.756	100	
		Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	terpeliharanya kendaraan dinas camat ranah pesisir	Persen	100	100	70.217.152	70.217.152	100	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor	Persen	100	100	1.740.000	1.740.000	100	
	Meningkatkan Mutu Pelayanan pada Masyarakat Tiap-tiap Kepala Seksi.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Nagari yang menerapkan lingkungan sehat	Persen	0	0	0	0	0	
		Fasilitasi dan Pembinaan Lingkungan Sehat	terwujudnya fasilitasi pembinaan lingkungan sehat	Persen	0	0	0	0	0	



No	Sasaran	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Ket.
		Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/Nagari		Persen	100	100	49.611.278	49.611.278	100	
		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat	tercapainya fasilitas dan pembinaan lembaga sosial ekonomi masyarakat	Persen	100	100	34.511.278	34.511.278	100	
		Memasyarakatkan Olahraga di Desa/Nagari	terwujudnya masyarakat yang sehat	Persen	100	100	15.100.000	15.100.000	100	
		Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan/ kegiatan Musrenbang Nagari yang diverifikasi sesuai dengan program prioritas	Persen	100	100	3.506.000	3.506.000	100	
		Penyelegaraan Musrenbang RKPD	terwujudnya penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Persen	100	100	3.506.000	3.506.000	100	
	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Aparatur Pemerintahan Nagari dalam Adminirasi Pengelolaan Keuangan nagari	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa/Nagari	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Nagari	Persen	100	100	825.000	825.000	100	
		Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan Nagari	tertib administrasi keuangan nagari	Persen	100	100	825.000	825.000	100	
		Program pementapan Otonomi Daerah	Persentase tahapan penegasan	Persen	0	0	0	0	0	



No	Sasaran	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Ket.
			batas wilayah administratif pemerintahan							
		Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan	terwujudnya koordinasi muspika dan pembinaan kewilayahan	Persen	0	0	0	0	0	
	Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Memiliki Nilai Budaya dan Agama.	Program Peningkatan IMTAQ		Persen	0	0	0	0	0	
		Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ	keikutsertaan dalam Penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan	Persen	0	0	0	0	0	
		Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan	jumlah peringatan hari besar islam yang difasilitasi	Persen	0	0	0	0	0	
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase penyelesaian kasus pemakai narkoba tingkat siswa dan aparatur	Persen	0	0	0	0	0	
		Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	jumlah pelaksanaan PHBN	Persen	0	0	0	0	0	



- Sasaran Strategis PK Camat Ranah Pesisir

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Terlaksananya masyarakat yang sadar akan olahraga	Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/Nagari	- Terwujudnya masyarakat yang sehat	100	0	0
2	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan NAgari	Program Fasilitasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	Jumlah Nagari yang dibina	100	100	100
3	Terwujudnya fasilitas dan pembinaan lembaga social dan ekonomi masyarakat	Pemberdayaan Lembaga social masyarakat /nagari	Jumlah nagari yang difasilitasi dalam pembinaan PKK	100	0	0

- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

1. Terlaksananya masyarakat yang sadar akan olahraga yaitu:

a) Terwujudnya masyarakat yang sehat (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 0 %)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/Nagari sebagai berikut :



- (1) Kegiatan memasyarakatkan olahraga nagari, kegiatan ini diselenggarakan pada acara Gerakan Masyarakat Sehat (Germas).
- (2) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat, kegiatan ini adalah Pembinaan PKK Nagari.
- Program Fasilitasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan pemerintahan Nagari kegiatan ini adalah Evaluasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Balanja Nagari dan serta Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan nagari.

9. URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Kecamatan Linggo Sari Baganti dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

No		Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Kewilayahan	Kec. Linggo Sari Baganti		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	Bulan	12	98,83	154.169.351	152.362.400	
	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ketersediaan Air, Listrik dan jasa komunikasi	Bulan	12	96,20	5.408.000	5.202.750	
	07				Penyediaan jasa administrasi keuangan	ketersediaan layanan administrasi keuangan	Bulan	12	100	40.868.100	40.868.100	
	08				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Ketersediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	100	10.653.000	10.653.000	
	10				Penyediaan alat tulis kantor	ketersediaan alat tulis	Bulan	12	100	23.999.390	23.999.300	
	11				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Ketersediaan barang cetak dan penggandaan	Bulan	12	99,52	8.729.861	8.687.750	



	12				Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Ketersediaan komponen instalansi listrik/ penerangan	Bulan	12	99,67	2.146.000	2.139.000	
	15				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Bulan	12	96,44	4.500.000	4.340.000	
	17				Penyediaan makanan dan minuman	Ketersediaan makan dan minum pegawai, rapat dan tamu	Bulan	12	99,99	23.485.000	23.482.500	
	18				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulan	12	84,71	9.090.000	7.700.000	
	19				Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Bulan	12	100	25.290.000	25.290.000	
02		Kewilayahan	Kec. Linggo Sari Baganti		PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kertersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	79,64	162.405.000	161.929.200	
	09				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah Peralatan gedung kantor di beli	Paket	4	100	56.200.000	56.200.000	
	21				Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas	Bulan	12	100	9.000.000	9.000.000	
	22				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Bulan	12	100	14.400.000	14.400.000	
	24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Bulan	12	98,21	26.505.000	26.031.700	
	28				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor	Bulan	12	100	56.300.000	56.297.500	
21		Kesehatan	Kec. Linggo Sari Baganti		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Nagari dan Sekolah Yang Menerapkan Lingkungan Sehat	Persen	100	100	6.625.500	6.625.500	
	05				Fasilitasi dan Pembinaan Lingkungan Sehat	Jumlah nagari dan sekolah yang difasilitasi dalam	Kali	3	100	6.625.500	6.625.500	



						pembinaan lingkungan sehat						
15		Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Kec. Linggo Sari Baganti		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase permasalahan trantibun yang ditindaklanjuti	kasus	8	100	17.465.000	17.465.000	
	07				Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibun	Jumlah penyelesaian permasalahan trantibun yang difasilitasi	kasus	8	100	17.465.000	17.465.000	
20		Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Linggo Sari Baganti		Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/Nagari	Persentase produk unggulan yang difasilitasi dalam produksi dan pemasaran	Kelompok	5	100	7.347.500	7.347.500	
	01				Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat	Persentase produk unggulan yang difasilitasi dalam produksi dan pemasaran	produk	12	100	7.347.500	7.347.500	
15		Pariwisata	Kec. Linggo Sari Baganti		PROG. PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Persentase keikutsertaan nagari mempromosikan produk unggulan	kali	1	100	720.000	720.000	
	09				Pelaksanaan dan Keikutsertaan Event Kepariwisata	Jumlah Produk Yang dipasarkan	produk	10	100	720.000	720.000	
21		Perencanaan	Kec. Linggo Sari Baganti		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan program/kegiatan musrenbang nagari yang diverifikasi sesuai dengan program prioritas	Persen	15	100	10.987.600	10.987.600	
	09				1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah usulan program kegiatan pada musrenbang nagari sesuai dengan prioritas	Usulan	21	100	10.987.600	10.987.600	
15		Kuangan	Kec. Linggo Sari Baganti		PROG. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD	Persen	100	100	1.475.000	1.475.000	
	20				Fasilitasi Capaian Penerimaan PBB-P2	Persentase penerimaan PBB	Persen	100	100	1.475.000	1.475.000	



						terhadap target						
17		Keuangan	Kec. Linggo Sari Baganti		Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	Persentase Tata Kelola Keuangan Nagari Yang Baik	Persen	100	100	2.197.500	2.197.500	
	04				Fasilitasi, Monitoring dan evaluasi pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan nagari	Jumlah pengelolaan keuangan dan pemerintahan nagari yang baik	Nagari	16	100	2.197.500	2.197.500	
21		Sekretariat Daerah	Kec. Linggo Sari Baganti		Peningkatan Imtaq	Persentase ASN dan Sekolah yang mengikuti PHBI, Peringkat MTQ Pesisir Selatan, Persentase Lembaga Didikan Subuh Yang Dikunjungi dan Persentase kunjungan tim silaturahmi Pemda	Persen	100	100	3.210.000	3.210.000	
	09				Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan	Persentase Kegiatan Pembinaan keagamaan yang terfasilitasi	Persen	100	100	3.210.000	3.210.000	



- **Sasaran Strategis PK Kepala OPD Kantor Camat Linggo Sari Baganti Tahun 2020.**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Linggo Sari Baganti	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Linggo Sari Baganti	A	-	-
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan	90%	100%	92%
		Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/ Nagari				
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
		Program Peningkatan IMTAQ				
3	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	Jumlah Nagari berkinerja baik	16 Nagari	16 Nagari	100



- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Camat Linggo Sari Baganti Tahun 2020.**

1. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Linggo Sari Baganti, dengan indikator kinerja yaitu:

a) Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Linggo Sari Baganti

(Target Kinerja : A) (Realisasi Kinerja : -)

Salah satu indikator kinerja adalah Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Linggo Sari Baganti Tahun 2020. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik, dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran rekening listrik.
 - (2) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan output Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelolaan keuangan.
 - (3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan output Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor.
 - (4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan output Tersedianya alat tulis kantor.
 - (5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan dengan output Tersedianya barang cetak dan penggandaan.
 - (6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor dengan output Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan.
 - (7) Kegiatan Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan output Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.
 - (8) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan output Tersedianya makan minum rapat dan Tersedianya makan minum tamu.
 - (9) Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah dengan output Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah.
 - (10) Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dengan output Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :



- (1) Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor dengan output Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor.
- (2) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas dengan output Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas.
- (3) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan output Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor.
- (4) Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional dengan output Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional.
- (5) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan output Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Linggo Sari Baganti.

2. **Meningkatnya kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan dengan indikator kinerja yaitu:**

a) **Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai dengan standar pelayanan. (Target Kinerja : 90%) (Realisasi Kinerja : 92%)**

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum dengan output Jumlah penyelesaian permasalahan trantibum yang difasilitasi.
- Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/ Nagari, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat, dengan output Jumlah PKK Nagari yang dibina.
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dengan output Jumlah Musrenbang RKPD yang diselenggarakan di tingkat kecamatan.
- Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Fasilitasi capaian penerimaan PBB-P2 dengan output Persentase penerimaan PBB terhadap target.
- Program Peningkatan IMTAQ, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan, dengan output Jumlah Lembaga Didikan subuh yang dikunjungi.



Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai dengan standar pelayanan.

3. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dengan indikator kinerja yaitu:

a) Jumlah Nagari berkinerja baik. (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 100%)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari, dengan kegiatan sebagai berikut :
(2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Pemerintah Nagari dengan output Jumlah pengelolaan keuangan dan pemerintahan nagari yang baik.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Jumlah Nagari berkinerja baik.

**10. URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN AIRPURA**

Kecamatan Airpura dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

N o	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kewilayahan	Kec. Airpura		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	Bulan	12	98,93	138.616.713	138.524.270
1.				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ketersediaan Air, Listrik dan jasa komunikasi	Bulan	12	99.88	7.200.000	7.191.120



1.	2				Penyediaan jasa administrasi keuangan	ketersediaan layanan administrasi keuangan	Bulan	12	100	36.183.800	36.183.800
1.	3				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Ketersediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	100	15.722.200	15.722.200
1.	4				Penyediaan alat tulis kantor	ketersediaan alat tulis	Bulan	12	99.95	16.781.463	16.754.000
1.	5				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Ketersediaan barang cetak dan penggandaan	Bulan	12	100	3.888.000	3.888.000
1.	6				Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Bulan	12	100	1.625.000	1.625.000
1.	7				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	100	1.800.000	1.800.000
1.	8				Penyediaan makanan dan minuman	Ketersediaan makan dan minum pegawai, rapat dan tamu	Bulan	12	99.83	11.780.000	11.760.000
1.	9				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Ketersediaan operasional untuk rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulan	12	100	550.000	550.000
1.	10				Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Ketersediaan operasional untuk rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Bulan	12	99.98	38.140.000	38.125.000



	1. 11				Penunjang operasional	Ketersediaannya Penunjang	Bulan	12	99.21	5.064.400	5024.300
					perencanaan dan pelaporan	operasional perencanaan dan pelaporan					
2		Kewilayahan	Kec. Airpura		Prog. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Kertersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	99.73	128.495.909	128.154.200
	2. 1				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah Peralatan gedung kantor di beli	Unit	1	100	6.000.000	6.000.000
	2. 2				Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas	Bulan	12	99.99	11.292.914	11.292.000
	2. 3				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Bulan	12	99.98	54.321.995	54.312.000
	2. 4				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Bulan	12	99.35	51.181.000	50.850.200
	2. 5				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor	Bulan	12	100	3.700.000	3.700.000
3		Kesehatan	Kec. Airpura		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Nagari dan Sekolah Yang Menerapkan Lingkungan Sehat	Persen	100	0	0	0
	3. 1				Fasilitasi dan Pembinaan Lingkungan Sehat	Jumlah nagari dan sekolah yang difasilitasi dalam pembinaan lingkungan sehat	Nagari	10	0	0	0



4		Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Kec. Airpura		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase permasalahan trantibun yang ditindaklanjuti	kasus	10	99.42	10.000.000	9.941.500
	4.1				Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibun	Jumlah penyelesaian permasalahan trantibun yang difasilitasi	kasus	10	99.42	10.000.000	9.941.500
5		Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Airpura		Program Peberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/ Nagari	Persentase fasilitasi dan pembinaan lembaga nagari	persen	10	100	10.070.000	10.060.000
	5.1				Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat	Persentase pembinaan tim penggerak PKK Nari	Tim	10	100	1.840.000	1.840.000
	5.2				Memasyarakatkan olah raga di desa/ Nagari	Persentase pembinaan tim olah raga se-kecamatan	Tim	1	99.88	8.230.000	8.220.000
6		Perencanaan	Kec. Airpura		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan program/kegiatan musrenbang nagari yang diverifikasi sesuai dengan program prioritas	Persen	10	100	11.315.000	11.315.000
	6.1				Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah usulan program kegiatan pada musrenbang nagari sesuai dengan prioritas	Usulan	21	100	11.315.000	11.315.000

7		Kuangan	Kec. Airpura		Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/ Nagari	Persentase Tata Kelola Keuangan Nagari Yang Baik	Persen	100	99.60	3.780.000	3.765.000
	7. 1				Fasilitasi, Monitoring dan evaluasi pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan nagari	Jumlah pengelolaan keuangan dan pemerintahan nagari yang baik	Nagari	10	99.60	3.780.000	3.765.000
8		Sekretariat Daerah	Kec. Airpura		Program Pemantapan Otonomi Daerah	Persentase fasilitas dan pembinaan kewilayahan	Persen	100	99.60	3.780.000	3.765.000
	8. 1				Fasilitasi, dan pembinaan masyarakat Nagari	Jumlah ormas dan kelompok masyarakat dilakukan pembinaan dan difasilitasi	Nagari	10	99.60	3.780.000	3.765.000
9		Sekretariat Daerah	Kec. Airpura		Peningkatan Intaq	Persentase ASN dan Sekolah yang mengikuti PHBI, Peringkat MTQ Pesisir Selatan, Persentase Lembaga Didikan Subuh Yang Dikunjungi dan Persentase kunjungan tim silaturahmi Pemda	Persen	100	-	0	0



	9. 1				Peningkatan Imtaq bagi ASN di lingkup Kab. Pesisir Selatan	Persentase ASN dan Sekolah yang mengikuti PHBI, Peringkat MTQ Pesisir Selatan	Persen	100	-	0	0
	9. 2				Fasilitasi penyelenggaraan MTQ	Persentase ASN dan Sekolah yang mengikuti PHBI, Peringkat MTQ Pesisir Selatan	Persen	100	-	0	0
10	9. 3	Sekretariat Daerah	Kec. Airpura		Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan	Persentase Kegiatan Pembinaan keagamaan yang terfasilitasi	Persen	100	-	0	0
					Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Fersentase sekolah dinas dan instansi yang mengikuti uapacara peringatan hari besar nasional	Persen	10	-	0	0
	10. .1				Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Fersentase sekolah dan masyarakat yang mengikuti uapacara peringatan hari HUT RI	Persen	10	-	0	0



- **Sasaran Strategis PK Kepala OPD**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pelayanan PATEN	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Bidang Perizinan dan Non Perizinan	100	100	100
2	Peningkatan Nilai LAKIP Kantor Camat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai LAKIP Kantor Camat	BB	BB+	90
3	Terlaksananya Pembinaan Pemerintahan Nagari	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	Melaksanakan pembinaan keuangan nagari	10 Nagari	10 Nagari	90



- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

1. **Meningkatnya Pelayanan PATEN, dengan indikator kinerja yaitu:**

a) **Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi kantor (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 100 %)**

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan output kegiatan ini adalah tersedianya ketersediaan Air, Listrik dan Jasa Komunikasi (bln).
- (2) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan output kegiatan ini adalah ketersediaan layanan administrasi keuangan (bln)
- (3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan output terkelolanya Ketersediaan jasa kebersihan kantor (bln).
- (4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan output kegiatan ini adalah ketersediaan alat tulis (bln)
- (5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan output kegiatan ini adalah Ketersediaan barang cetak dan penggandaan (bln)
- (6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan output kegiatan ini adalah Ketersediaan komponen instalasi listrik/ penerangan (bln)
- (7) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan output ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (bln).
- (8) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan output kegiatan ini adalah Ketersediaan makan dan minum pegawai, rapat dan tamu (bln)
- (9) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan output kegiatan ini adalah Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (bln)



- (10) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dengan output kegiatan ini adalah Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (bln)
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan dengan output kegiatan ini adalah Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang tersedia.
 - Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pemerintahan Nagari dengan output Persentase tata kelola keuangan dan Pemerintahan nagari yang baik, Jumlah nagari yang dibina dan dfasilitasi dalam Pengeloaan Keuangan Pemerintahan Nagari

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan.



10. URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PANCUNG SOAL

Kecamatan Pancung Soal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

No		Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Kewilayahan	Kantor Camat Pancung Soal	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 2. Peraturan Bupati Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumatera Barat Tahun 2020;	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	persen	100	87,60	213.780.801	131.515.703
	1				Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik	bulan	12	12	6.000.000	5.218.287
					Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran honorarium pengelolaan keuangan serta dokumen yang dihasilkan	bulan	12	12	38.400.000	36.900.000



					Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pembayaran tenaga kebersihan dan pramu kantor	bulan	12	12	12.207.000	12.207.000
					Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK	bulan	12	12	13.980.513	13.980.513
					Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	10.559.140	10.535.850
					Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan	bulan	12	12	1.500.000	1.500.000
					Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	bulan	12	12	3.710.000	3.480.000
					Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu	bulan	12	12	15.528.450	15.516.050
					Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	bulan	12	12	1.150.000	1.150.000
					Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas Koordinasi dan	bulan	12	12	21.920.000	21.914.750
						Konsultasi dalam daerah					



					Kegiatan Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang dihasilkan	dokumen	7	7	6.160.000	6.134.350
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase cakupan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparat	persen	100	98,65	162.169.000	140.926.327
					Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Realisasi Honorarium Non PNS dan Pengadaan Dekorasi Gedung Kantor.	bulan Paket	12 1	12 1	36.500.000	36.500.000
					Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	unit	1 unit Komputer PC, 2 unit Printer, 1 unit AC, 5 unit lemari Arsip, 5 unit Filling Kabinet	1 unit Komputer PC, 2 unit Printer, 1 unit AC, 5 unit lemari Arsip, 5 unit Filling Kabinet	44.272.727	44.272.727
					Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya rumah dinas	bulan	12	12	602.600	602.400
					Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	bulan	12	12	9.750.000	9.750.000
					Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional kantor	bulan	12	12	48.801.000	49.712.000



					Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	bulan	12	12	1.000.000	1.000.000
					Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan	Persentase perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	persen	-	-	0	0
	1				Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan PATEN	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan dilaksanakan	Rekomendasi	-	-	1.375.000	1.345.000
					Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Kasus yang ditangani/fasilitasi	persen	100	99	10.640.000	10.622.200
					Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Trantibum	Penyelesaian permasalahan trantibum yang difasilitasi	kasus	1	1	10.640.000	10.622.200
					Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase ASN, Sekolah, ABRI, Ormas yang mengikuti HUT RI	persen	-	-	0	0
					Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Terlaksananya PHBN	kali	-	-	0	0
						Persentase nagari yang menyalurkan bantuan pangan non tunai tepat sasaran	Nagari	10	10	300.000	315.000



					Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Kebijakan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)	Laporan hasil monitoring secara berkala	nagari	10	10	300.000	315.000
					Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomim Masyarakat/ Nagari	Persentase lembaga sosial masyarakat yang aktif	persen	100	100	9.060.610	9.025.100
					Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat	Jumlah PKK Nagari yang dibina	nagari	10	10	9.060.610	9.025.100
					Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Nagari yang menyelenggarakan pengembangan lingkungan sehat	persen	100	100	0	0
					Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong di Wialyah Kecamatan	Jumlah nagari yang menyelenggarakan kegiatan bulan bakti gotong royong	nagari	-	-	0	0
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan program/kegiatan yang tertampung pada RPJMD	persen	100	100	3.843.476	3.843.476



					Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang SKPD	Jumlah Musrenbang RKPD yang Diselenggarakan di tingkat kecamatan	kali	1	1	3.843.476	3.843.476
					Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase peningkatan PAD	persen	70	70	115.000	115.000
					Kegiatan Fasilitasi Capaian Penerimaan PBB-P2	Persentase penerimaan PBB terhadap target	Persen	70	70	115.000	115.000
					Program Peningkatan IMTAQ	Persentase kunjungan tim silaturahmi Pemda,	Persen	100	100	0	0
						Peringkat MTQ Pesisir Selatan					
					Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan	Jumlah MTQ yang diikuti, Jumlah kunjungan safari ramadhan ke nagari	Kali	0	0	0	0
					Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase kelompok masyarakat yang dibina	Persen	-	-	0	0
					Kegiatan Pembinaan Produk Unggul Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat	Produk unggulan yang dibina	nagari	-	-	0	0



					Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	Persentase tata kelola keuangan Nagari yang baik	persen	100	100	2.137.500	2.117.000
					Kegiatan Pembinaan Produk Unggul Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengelolaan keuangan dan pemerintahan nagari yang baik	nagari	10	10	2.137.500	2.117.000
					Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pusat dan Daerah	persen	100	100	2.110.000	2.104.300
					Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pusat dan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pusat dan Daerah	Persen	100	100	2.110.000	2.104.300

- Sasaran Strategis PK Kepala OPD Kantor Camat Pancung Soal Tahun 2020.

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan	95%	89%	97%
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				



		Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/ Nagari				
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah				
		Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				
		Program Peningkatan IMTAQ				
		Program Pembangunan Wilayah Kecamatan				
2	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Pancung Soal	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Pancung Soal	A	-	-
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
3	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	Jumlah Nagari berkinerja baik	10 Nagari	10 Nagari	100
4	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap budaya lokal	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Fasilitasi penyelenggaraan pagelaran seni dan event-event kebudayaan lokal	1 Kegiatan	-	-



- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Camat Pancung Soal Tahun 2020.**

1. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Pancung Soal, dengan indikator kinerja yaitu:

a) Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Pancung Soal

(Target Kinerja : A) (Realisasi Kinerja : -)

Salah satu indikator kinerja adalah Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Pancung Soal Tahun 2020. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik, dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran rekening listrik.
- (2) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan output Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelolaan keuangan.
- (3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan output Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor.
- (4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan output Tersedianya alat tulis kantor.
- (5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan dengan output Tersedianya barang cetak dan penggandaan.
- (6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor dengan output Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan.
- (7) Kegiatan Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan output Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.
- (8) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan output Tersedianya makan minum rapat dan Tersedianya makan minum tamu.
- (9) Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah dengan output Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah.
- (10) Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dengan output Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah.



- (11) Kegiatan Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan dengan output Dokumen perencanaan dan pelaporan yang dihasilkan.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan output kegiatan ini adalah Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor.
 - (2) Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor dengan output Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor.
 - (3) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas dengan output Terpeliharanya rumah dinas.
 - (4) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan output Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor.
 - (5) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan output Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional.
 - (6) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan otutput Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Pancung Soal.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan dengan indikator kinerja yaitu:

a) Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai dengan standar pelayanan.

(Target Kinerja : 95%) (Realisasi Kinerja : 89%)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN dengan output Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan.
- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum dengan output Jumlah penyelesaian permasalahan trantibum yang difasilitasi.
- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan sebagai berikut:



- (1) Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional, dengan output Jumlah pelaksanaan PHBN.
- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Monitoring , Evaluasi dan Kebijakan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dengan output Jumlah nagari yang menyalurkan bantuan pangan non tunai tepat sasaran.
- Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/ Nagari, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat, dengan output Jumlah PKK Nagari yang dibina.
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dengan output Jumlah Musrenbang RKPD yang diselenggarakan di tingkat kecamatan.
- Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Fasilitasi capaian penerimaan PBB-P2 dengan output Persentase penerimaan PBB terhadap target.
- Program Peningkatan IMTAQ, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan, dengan output Jumlah Lembaga Didikan subuh yang dikunjungi.
- Program Pembangunan Wilayah Kecamatan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Pembinaan produk unggul nagari dan pemberdayaan masyarakat dengan output Jumlah produk unggulan yang dibina.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai dengan standar pelayanan.

3. **Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dengan indikator kinerja yaitu:**

a) **Jumlah Nagari berkinerja baik.**

(Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 100%)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Pemerintah Nagari dengan output Jumlah pengelolaan keuangan dan pemerintahan nagari yang baik.



Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Jumlah Nagari berkinerja baik.

4. **Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap budaya lokal dengan indikator kinerja yaitu:**

a) **Fasilitasi penyelenggaraan pagelaran seni dan event-event kebudayaan lokal.**

(Target Kinerja : 1 Kegiatan) (Realisasi Kinerja : -)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari, dengan kegiatan sebagai berikut:

(1) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

12. URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yang difasilitasi	85 %	85 %	85%	Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang perizinan	0	0	0
						Program Pembangunan wawasan kebangsaan	0	0	0
						Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	11.850.000	11.365.000	95,91 %
						Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/Nagari	9.762.500	9.762,500	100 %
						Program Pengembangan lingkungan sehat	0	0	0
						Program Peningkatan IMTAQ	1.375.000	1.375.000	100 %



						Program Perencanaan Pembangunan Daerah	6.790.000	6.790.000	100 %
2	Peningkatan Nilai LAKIP	Target Nilai LAKIP OPD	BB	BB	BB	Pelayanan Administrasi Perkantoran	212.208.750	210.660.186	99,27 %
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	68.690.350	68.468.550	99,68 %
3	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari yang pengelolaan keuangan dan pemerintahan yang tertib	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa/Nagari	3.022.500	3.022.500	100 %
Jumlah							313.699.100	311.443.736	99,28

- **Sasaran Strategis PK Kepala OPD**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Pelayanan PATEN	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan	Persentase rekomendasi perizinan dan non perizinan yang difasilitasi	85 %	85 %	100
2	Peningkatan Nilai LAKIP Kantor Camat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai LAKIP Kantor Camat	BB	BB	100
3.	Terlaksananya Pembinaan Pemerintahan Nagari	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	Jumlah Nagari yang Dibina	10 Nagari	10 Nagari	100



- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**
 - a. **Peningkatan Pelayanan PATEN, dengan indikator kinerja yaitu:**
 - 1) **Persentase rekomendasi perizinan dan non perizinan yang difasilitasi (Target Kinerja : 85 %) (Realisasi Kinerja : 85 %)**

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

 - Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1. Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan output fasilitasi rekomendasi perizinan dan non perizinan di kantor Kecamatan .
 - b. **Peningkatan Nilai LAKIP Kecamatan, dengan indikator kinerja yaitu:**
 - 1) **Nilai LAKIP Kecamatan (Target Kinerja : BB (Realisasi Kinerja : BB)**

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1. Kegiatan penunjang operasional perencanaan dan pelaporan dengan output pencapaian seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan serta kelengkapan data pendukung terhadap laporan yang dihasilkan .
 - c. **Peningkatan kualitas Pemerintahan Nagari, dengan indikator kinerja yaitu:**
 - 1) **Jumlah Nagari yang dibina (Target Kinerja : 10 Nagari (Realisasi Kinerja : 10 Nagari)**

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :



- Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa/Nagari, dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Kegiatan Fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan Pemerintahan Nagari dengan output memfasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan fisik nagari, tata kelola keuangan dan pemerintahan Nagari.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan.

13. URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANAAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kewilayahan	CAMAT Ranah Ampek Hulu Tapan	Perda Kab. Pessel No 6 Tahun 2019 tentang APBD Kab. Pessel T.A 2020; Perbup Kab. Pessel No 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kab. Pessel T.A 2020	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Layanan Administrasi perkantoran	Bulan	12 bula	12 bulan	165.641.071	-

2	Kewilayahan	CAMAT Ranah Ampek Hulu Tapan	Perda Kab. Pessel No 6 Tahun 2019 tentang APBD Kab. Pessel T.A 2020; Perbup Kab. Pessel No 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kab. Pessel T.A 2020	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur	Bulan	12 bula	12 bulan	73.200.000	-
3	Kewilayahan	CAMAT Ranah Ampek Hulu Tapan	Perda Kab. Pessel No 6 Tahun 2019 tentang APBD Kab. Pessel T.A 2020; Perbup Kab. Pessel No 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kab. Pessel T.A 2020	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya a Peringatan Hari Besar Nasional	Kali	1 Kali	0 Kali	0-	-
4	Kewilayahan	CAMAT Ranah Ampek Hulu Tapan	Perda Kab. Pessel No 6 Tahun 2019 tentang APBD Kab. Pessel T.A 2020; Perbup Kab. Pessel No 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kab. Pessel T.A 2020	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Tersedianya biaya Penyuluhan PEKAT	Kali	1 Kali	0 Kali	0-	-
5	Kewilayahan	CAMAT Ranah Ampek Hulu Tapan	Perda Kab. Pessel No 6 Tahun 2019 tentang APBD Kab. Pessel T.A 2020; Perbup Kab. Pessel No 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kab. Pessel T.A 2020	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Tersedianya biaya Pengembangan Lingkungan Sehat	Kali	1 Kali	0 Kali	0-	-
6	Kewilayahan	CAMAT Ranah Ampek Hulu Tapan	Perda Kab. Pessel No 6 Tahun 2019 tentang APBD Kab. Pessel T.A 2020; Perbup Kab. Pessel No 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kab. Pessel T.A 2020	Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat	Tersedianya biaya Pemberdayaa n Lembaga Sosial Masyarakat/ Nagari	Bulan	12 bula	12 bulan	24.745.000-	-



7	Kewilayahan	CAMAT Ranah Ampek Hulu Tapan	Perda Kab. Pessel No 6 Tahun 2019 tentang APBD Kab. Pessel T.A 2020; Perbup Kab. Pessel No 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kab. Pessel T.A 2020	Program Peningkatan IMTAQ	Tersedianya biaya Peningkatan IMTAQ	Bulan	12 bula	12 bulan	6.745.000	-
8	Kewilayahan	CAMAT Ranah Ampek Hulu Tapan	Perda Kab. Pessel No 6 Tahun 2019 tentang APBD Kab. Pessel T.A 2020; Perbup Kab. Pessel No 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kab. Pessel T.A 2020	Program Pelayanan Publik Bidang Perizinan	Tersedianya biaya Pelayanan Publik Bidang Perizinan	Bulan	12 bula	0 bulan	0	-
9	Kewilayahan	CAMAT Ranah Ampek Hulu Tapan	Perda Kab. Pessel No 6 Tahun 2019 tentang APBD Kab. Pessel T.A 2020; Perbup Kab. Pessel No 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kab. Pessel T.A 2020	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya biaya Perencanaan Pembangunan Daerah	Kali	2 Kali	2 Kali	8.714.350	-
10	Kewilayahan	CAMAT Ranah Ampek Hulu Tapan	Perda Kab. Pessel No 6 Tahun 2019 tentang APBD Kab. Pessel T.A 2020; Perbup Kab. Pessel No 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kab. Pessel T.A 2020	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan Nagari	Tersedianya biaya Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan Nagari	Bulan	12 bula	12 bulan	3.100.000	-



- **Sasaran Strategis PK Kepala OPD**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan	85%	85%	85%
2	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	Jumlah Nagari berkinerja baik	10	10	10
3	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai evaluasi LAKIP	BB	BB	BB
		Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/nagari				
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah				
		Program Peningkatan Pembrantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)				
		Program Peningkatan IMTAQ				
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat				



- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.**
 - a. **Meningkatkan kualitas pelayanan publik (PATEN) di tingkat kecamatan yaitu:**
Persentase Jumlah Rekomendasi Perizinan yang diterbitkan (Target Kinerja: 85% dari 50 rekomendasi pertahun anggaran) (Realisasi Kinerja : 85%)
 yang meliputi rekomendasi Perizinan yang diterbitkan seperti rekomendasi IMB, Izin Usaha, Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan:
 - a) Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan (PATEN), dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN Output kegiatan ini adalah diterbitkannya rekomendasi perizinan masyarakat kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.
 - b. **Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yaitu:**
Jumlah Nagari Berkinerja Baik (Targer Kinerja: 10 Nagari dari 10 Nagari. Realisasi Kinerja 10 Nagari).
 Yang meliputi pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa/ Nagari seperti pembinaan pembuatan APB Nagari dan APB Nagari Perubahan. Pencapaian target kinerja dan indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan:
 - Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa/ Nagari, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - Fasilitasi, Monitoring & Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan Nagari
 - c. **Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan, yaitu:**
Peningkatan Nilai Evaluasi LAKIP (Target Kinerja: BB dari Nilai Tahun 2019 B. Realisasi Kinerja Nilai LAKIP BB).
 Pencapaian Target Kinerja dan Indikator Kinerja tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan:
 - a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
 9. Penyediaan Makanan dan Minuman
 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas
 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
 4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional
 - Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT), dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Penyuluhan Pencegahan Peredaran Penggunaan Minuman Keras, Narkoba dan Penyakit Masyarakat
 - Program Pengembangan Lingkungan Sehat, dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Fasilitasi dan Pembinaan Lingkungan Sehat
 - Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat Nagari, dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat
 - Program Peningkatan IMTAQ, dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. FASILITASI Penyelenggaraan MTQ
 2. Fasilitasi DAN Pembinaan Keagamaan
 - Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Penyelenggaraan Musrenbang SKPD



- **PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

1. PERMASALAHAN

- a. RKA Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp.20.875.00, namun pada awal bulan Maret Tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 sehingga terjadi pemangkasan anggaran pada DPA Kantor Camat menjadikan pos anggaran pada program ini menjadi nol rupiah (Rp.0) dan menyebabkan program ini tidak dapat dilaksanakan.
- b. RKA Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp.4.970.000,namun pada awal bulan Maret Tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 sehingga terjadi pemangkasan anggaran pada DPA Kantor Camat menjadikan pos anggaran pada program ini menjadi nol rupiah (Rp.0) dan menyebabkan program ini tidak dapat dilaksanakan.
- c. RKA Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp.8.315.000,namun pada awal bulan Maret Tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 sehingga terjadi pemangkasan anggaran pada DPA Kantor Camat menjadikan pos anggaran pada program ini menjadi nol rupiah (Rp.0) dan menyebabkan program ini tidak dapat dilaksanakan.
- d. RKA Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000, namun pada awal bulan Maret Tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 sehingga terjadi pemangkasan anggaran pada DPA Kantor Camat menjadikan pos anggaran pada program ini menjadi nol rupiah (Rp.0) dan menyebabkan program ini tidak dapat dilaksanakan.

2. SOLUSI

- a. meniadakan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional pada Tahun 2020
- b. meniadakan kegiatan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat pada Tahun 2020
- c. meniadakan kegiatan Pengembangan Lingkungan Sehat pada Tahun 2020
- d. meniadakan kegiatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan pada Tahun 2020



14. URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LUNANG

Kecamatan Lunang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	Kewilayahan	Kecamatan Lunang	Peraturan Bupati No. 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	bulan	12	12	195.972.347	195.819.529
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening listrik	bulan	12	12	5.600.000	5.532.229
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelolaan keuangan	bulan	12	12	30.837.000	30.837.000
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor	bulan	12	12	28.656.051	28.654.000
				Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	bulan	12	12	19.439.248	19.438.500
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	9.636.600	9.633.700
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan	bulan	12	12	1.248.448	1.240.000
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12	600.000	600.000
				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat	bulan	12	12	26.400.000	26.399.100
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi keluar daerah	bulan	12	12	11.200.000	11.200.000
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi kedalam daerah	bulan	12	12	54.805.000	54.805.000
				Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang dihasilkan	dokumen	6	6	7.550.000	7.480.000
2				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur	bulan	12	12	80.775.876	80.148.200



				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	bulan	12	12	15.000.000	15.000.000
				pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	bulan	12	12	63.875.876	63.248.200
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor	bulan	12	12	1.900.000	1.900.000
3				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT/NAGARI	Persentase lembaga sosial masyarakat yang aktif	persen	100	100	19.095.000	19.095.000
				Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat	Persentase lembaga sosial dan ekonomi masyarakat yang aktif	persen	100	100	19.095.000	19.095.000
4				PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	bulan	12	12	0	0
				Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN	terselenggaraya pelayanan PATEN	bulan	12	12	0	0
5				PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase usulan program/kegiatan yang tertampung pada RPJMD	persen	100	100	6.945.000	6.945.000
				Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Musrenbang RKPD yang diselenggarakan di tingkat kecamatan	kali	1	1	6.945.000	6.945.000
6				PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA/NAGARI	Persentase Nagari tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan	nagari	10	10	450.000	450.000
				Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang dibina	nagari	10	10	450.000	450.000
7				PROGRAM PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH	persentase penyelenggaraan otonomi daerah	persen	100	100	29.030.000	28.988.350
				Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan	rapat-raat koordinasi muspika	bulan	12	12	29.030.000	28.988.350
8				PROGRAM PENINGKATAN IMTAQ	Persentase pelaksanaan MTQ	persen	100	100	2.320.500	2.320.500
				Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ	Terlaksananya penyelenggaraan MTQ	bulan	12	12	2.320.500	2.320.500
9				PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Persentase ASN, Sekolah, ABRI, Ormas yang mengikuti HUT RI	persen	100	100	0	0
				Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	jumlah pelaksanaan PHBN	kali	1	1	0	0



- Sasaran Strategis PK Kepala OPD Kantor Camat Lunang Tahun 2020.

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Lunang	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Nilai evaluasi LKj Kantor Camat Lunang	BB	BB	100 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan Pemantapan Otonomi Daerah Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/ Nagari Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan IMTAQ	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu ecamatan sesuai dengan standar pelayanan	85%	0	0%
3	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Nagari yang baik	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	Jumlah Nagari berkinerja baik	10 Nagari	10 Nagari	100 %



- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Camat Lunang Tahun 2020.**

1. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Lunang, dengan indikator kinerja yaitu:

**a) Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Lunang
(Target Kinerja : BB) (Realisasi Kinerja : BB)**

Salah satu indikator kinerja adalah Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Lunang Tahun 2020. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik, dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran rekening listrik.
 - (2) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan output Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelolaan keuangan.
 - (3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan output Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor.
 - (4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan output Tersedianya alat tulis kantor.
 - (5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan dengan output Tersedianya barang cetak dan penggandaan.
 - (6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor dengan output Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan.
 - (7) Kegiatan Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan output Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.
 - (8) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan output Tersedianya makan minum rapat dan Tersedianya makan minum tamu.
 - (9) Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah dengan output Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah.
 - (10) Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dengan output Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah.



- (11) Kegiatan Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan dengan output Dokumen perencanaan dan pelaporan yang dihasilkan.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan output Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor.
 - (2) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan output Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional.
 - (3) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan output Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Lunang.

2. **Meningkatnya kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan dengan indikator kinerja yaitu:**

a) **Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai dengan standar pelayanan.**

(Target Kinerja : 85%) (Realisasi Kinerja : -%)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN dengan output Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan.
- Program Pemantapan Otonomi Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (2) Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan dengan output Jumlah Persentase tahapan penegasan batas wilayah administratif.
- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (3) Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional, dengan output Jumlah pelaksanaan PHBN.
- Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/ Nagari, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (4) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat, dengan output Jumlah PKK Nagari yang dibina.
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:



- (5) Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, dengan output Jumlah usulan/Program yang tertampung dalam RPJMD.
- Program Peningkatan IMTAQ, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (6) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan, dengan output Jumlah Lembaga Didikan subuh yang dikunjungi.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai dengan standar pelayanan.

3. **Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Nagari Yang Baik dengan indikator kinerja yaitu:**

a) **Jumlah Nagari berkinerja baik.**

(Target Kinerja : 10 Nagari) (Realisasi Kinerja : 10 Nagari)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Pemerintah Nagari dengan output Jumlah pengelolaan keuangan dan pemerintahan nagari yang baik.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Jumlah Nagari berkinerja baik.

- **PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

a. **PERMASALAHAN**

1. Minimnya ketersediaan anggaran di beberapa kegiatan seperti anggaran Perjalanan Dinas.
2. Minimnya Anggaran untuk pembinaan Pemerintahan Nagari.
3. Kualitas SDM belum maksimal dalam melaksanakan tugas sesuai Tupoksi.
4. Pelayanan Dasar belum teraksana secara Optimal karena masyarakat tidak memahami prosedur.

b. **SOLUSI**

1. menambah anggaran yang dirasa perlu di beberapa program dan kegiatan pada tahun 2021
2. Menambah anggaran pada kegiatan pembinaan Pemerintahan Nagari
3. Meningkatkan kualitas kinerja personil dalam melaksanakan Tupoksinya
3. Meningkatkan pemberian pelayanan Dasar terhadap masyarakat



15. URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SILAUT

Kecamatan Silaut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kewilayahan	Kantor Camat Silaut	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 2. Peraturan Bupati Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumatera Barat Tahun 2020;	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	persen	100	97,60	229.679.550	224.183.550	
	1			Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik	bulan	12	12	3.720.000	3.535.000	
				Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran honorarium pengelolaan keuangan serta dokumen yang	bulan	12	12	62.904.000	62.904.000	



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
					dihasilkan						
				Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pembayaran tenaga kebersihan dan pramu kantor	bulan	12	12	53.185.200	53.185.200	
				Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK	bulan	12	12	17.504.450	17.463.450	
				Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	9.014.900	9.014.900	
				Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan	bulan	12	12	1.053.500	1.053.500	
				Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	bulan	12	12	1.500.000	1.500.000	
				Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu	bulan	12	12	12.127.500	12.127.500	
				Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	bulan	12	12	11.050.000	6.950.000	
				Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	bulan	12	12	57.620.000	56.450.000	



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
				Kegiatan Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang dihasilkan	dokumen	7	7	0	0	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase cakupan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur	persen	100	98,65	99.370.000	98.037.600	
				Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan teralis dan dekorasi	unit	7 unit	7 unit	9.300.000	9.300.000	
				Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	unit	2 unit	2 unit	3.000.000	3.000.000	
				Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan rumah dinas	bulan	12	12	10.000.000	10.000.000	
				Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional kantor	bulan	12	12	76.220.000	74.887.600	
				Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	bulan	12	12	850.000	850.000	
				Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan	Persentase perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	persen	-	-	0	0	
1				Kegiatan Fasilitasi	Jumlah rekomendasi yang	Rekomend	-	-	0	0	



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
				Penyelenggaraan PATEN	dikeluarkan dilaksanakan	asi					
				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Kasus yang ditangani/fasilitasi	persen	100	68,75	10.000.000	6.875.000	
				Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum	Penyelesaian permasalahan trantibum yang difasilitasi	kasus	1	1	10.000.000	6.875.000	
				Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase ASN, Sekolah, ABRI, Ormas yang mengikuti HUT RI	persen	-	-	0	0	
				Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Terlaksananya PHBN	kali	-	-	0	0	
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase nagari yang menyalurkan bantuan pangan non tunai tepat sasaran	persen	-	-	0	0	
				Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Kebijakan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)	Laporan hasil monitoring secara berkala	nagari	-	-	0	0	
				Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomim Masyarakat/ Nagari	Persentase lembaga sosial masyarakat yang aktif	persen	100	100	6.732.250	6.732.250	



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
				Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat	Jumlah PKK Nagari yang dibina	nagari	10	10	6.732.250	6.732.250	
				Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Kawasan strategis yang dibangun	persen	-	-	0	0	
				Kegiatan Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah nagari yang difasilitasi dalam pembangunan kawasan perdesaan berbasis peternakan, Jumlah nagari yang difasilitasi dalam pembangunan kawasan perhutanan sosial	nagari	-	-	0	0	
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan program/kegiatan yang tertampung pada RPJMD	persen	100	100	5.245.000	5.245.000	
				Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang SKPD	Jumlah Musrenbang RKPD yang diselenggarakan di tingkat kecamatan	kali	1	1	5.245.000	5.245.000	
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase peningkatan PAD	persen	70	70	80.000	80.000	



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
				Kegiatan Fasilitas Capaian Penerimaan PBB-P2	Persentase penerimaan PBB terhadap target	persen	70	70	80.000	80.000	
				Program Peningkatan IMTAQ	Persentase kunjungan tim silaturahmi Pemda, Peringkat MTQ Pesisir Selatan	persen	100	100	3.337.000	3.337.000	
				Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Keagamaan	Jumlah MTQ yang diikuti, Jumlah kunjungan safari ramadhan ke nagari	kali	1	1	3.337..000	3.337..000	
				Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase kelompok masyarakat yang dibina	persen	-	-	0	0	
				Kegiatan Pembinaan Produk Unggul Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat	Produk unggulan yang dibina	nagari	-	-	0	0	
				Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	Persentase tata kelola keuangan Nagari yang baik	persen	100	100	1.117.250	1.117.250	
				Kegiatan Pembinaan Produk Unggul Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengelolaan keuangan dan pemerintahan nagari yang baik	nagari	10	10	1.117.250	1.117.250	



- **Sasaran Strategis PK Kepala OPD Kantor Camat Silaut Tahun 2020.**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Silaut	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Silaut	A	-	-
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu ecamatan sesuai dengan standar pelayanan	82%	80%	97%
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				
		Program Pelayanan dan Rehabilitai Kesejahteraan Sosial				



		Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/ Nagari				
		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh				
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah				
		Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				
		Program Peningkatan IMTAQ				
		Program Pembangunan Wilayah Kecamatan				
3	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	Jumlah Nagari berkinerja baik	10 Nagari	10 Nagari	100

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Camat Silaut Tahun 2020.**

1. **Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Silaut, dengan indikator kinerja yaitu:**

a) **Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Silaut**

(Target Kinerja : A) (Realisasi Kinerja : -)

Salah satu indikator kinerja adalah Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Silaut Tahun 2020. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :



- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik, dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran rekening listrik.
 - (2) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan output Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelolaan keuangan.
 - (3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan output Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor.
 - (4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan output Tersedianya alat tulis kantor.
 - (5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan dengan output Tersedianya barang cetak dan penggandaan.
 - (6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor dengan output Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan.
 - (7) Kegiatan Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan output Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.
 - (8) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan output Tersedianya makan minum rapat dan Tersedianya makan minum tamu.
 - (9) Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah dengan output Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah.
 - (10) Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dengan output Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah.
 - (11) Kegiatan Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan dengan output Dokumen perencanaan dan pelaporan yang dihasilkan.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan output kegiatan ini adalah Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor.
 - (2) Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor dengan output Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor.
 - (3) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan output Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor.



- (4) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan output Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional.
- (5) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan output Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Silaut

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan dengan indikator kinerja yaitu:

a) Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai dengan standar pelayanan.

(Target Kinerja : 82%) (Realisasi Kinerja : 80%)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN dengan output Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan.
- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum dengan output Jumlah penyelesaian permasalahan trantibum yang difasilitasi.
- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional, dengan output Jumlah pelaksanaan PHBN.
- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Monitoring , Evaluasi dan Kebijakan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dengan output Jumlah nagari yang menyalurkan bantuan pangan non tunai tepat sasaran.
- Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/ Nagari, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat, dengan output Jumlah PKK Nagari yang dibina.
- Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh, dengan kegiatan sebagai berikut:



- (1) Kegiatan Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan output Jumlah nagari yang difasilitasi dalam pembangunan kawasan perhutanan sosial dan pembangunan kawasan perdesaan berbasis peternakan.
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dengan output Jumlah Musrenbang RKPD yang diselenggarakan di tingkat kecamatan.
- Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Fasilitasi capaian penerimaan PBB-P2 dengan output Persentase penerimaan PBB terhadap target.
- Program Peningkatan IMTAQ, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan, dengan output Jumlah Lembaga Didikan subuh yang dikunjungi.
- Program Pembangunan Wilayah Kecamatan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Pembinaan produk unggul nagari dan pemberdayaan masyarakat dengan output Jumlah produk unggulan yang dibina.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai dengan standar pelayanan.

3. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dengan indikator kinerja yaitu:

a) Jumlah Nagari berkinerja baik.

(Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 100%)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Pemerintah Nagari dengan output Jumlah pengelolaan keuangan dan pemerintahan nagari yang baik.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Jumlah Nagari berkinerja baik.





3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Tabel 3.2
Kebijakan Strategis Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Pengawasan Teknis Pertambangan Mineral Non Logam di Kabupaten Pesisir Selatan	Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor 660/105/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 20 Januari 2020.	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pertambangan mineral non logam pada Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Pesisir Selatan.
2.	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni	Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni.
3.	Meningkatnya kawasan permukiman layak huni dan berkelanjutan	Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Strategi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Landasan, arah dan prioritas kegiatan untuk percepatan penanganan perumahan dan permukiman pembangunan dalam rangka perencanaan anggaran kegiatan dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
4.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	1. Penguatan peran struktur sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang patuh terhadap hukum sehingga terwujudnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sehingga tercapainya penegakan peraturan daerah yang adil dan tepat sasaran
5.	Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan	Tersedianya pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat



		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ; - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); dan - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/93 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Optimal.	
6.	Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur rumah sakit	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);	Tercukupinya sumber daya manusia yang sesuai kompetensinya
7.	Meningkatkan kemandirian keuangan RS	- Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, tambahan	Meningkatkan pendapatan RS dengan menyediakan layanan baru dan inovasi bidang kesehatan



		Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4502; - Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; - Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.	
8.	Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit	Tercukupinya sarana dan prasarana yang sesuai standar RS
9.	Peningkatan pemberian bantuan kepada fakir miskin		Rendahnya cakupan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin
10.	Penganggaran biaya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan		Rendahnya pemahaman nilai kepahlawanan dan keperintisan pada generasi muda
11.	Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang		Rendahnya pemahaman pengarusutamaan gender dilingkungan Pemerintah Daerah
12.	Perlindungan Perempuan dan anak, serta pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten Layak Anak.		Cenderung meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
13.	Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi,	Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan	Landasan, arah dan prioritas pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan



	UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	tahunan daerah yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
14.	Meningkatkan status Nagari berdasarkan Profil Nagari	Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	Terlaksananya regulasi pengelolaan pemerintahan Nagari, pemberdayaan kelembagaan Nagari dalam meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat Nagari
15.	Terwujudnya Keluarga Berencana yang lestari	Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	Terlaksananya peningkatan pemakaian pasangan usia subur dalam menggunakan kontrasepsi jangka panjang dan jangka pendek
16.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan untuk menarik Investor di Kab. Pesisir Selatan	Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal.	Kemudahan dan pelayanan prima dalam berinvestasi
17.	Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian	Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian	Landasan, arah, pedoman dan prioritas pembangunan pertanian ditingkat Kecamatan baik itu SDM maupun SDA pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat tani Kabupaten Pesisir Selatan.
18.	Terwujudnya e government menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan E Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel (e-government).
19.	Mendukung pencapaian swasembada beras, jagung kedelai dan peningkatan produksi daging	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	-
20.	Kebijakan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah nagari serta	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	Melakukan pengadaan beras cadangan pangan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebesar 186.683 kg



	peningkatan volume stock cadangan pangan masyarakat		
21.	Kebijakan pemberdayaan masyarakat rawan pangan pada nagari rawan pangan	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	-
22.	Penguatan lembaga usaha pangan dalam peningkatan akses pangan masyarakat dan stabilitas harga pangan	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	Penguatan lembaga usaha pangan masyarakat melalui anggaran yang bersumber dari APBN melalui penguatan modal PUPM dan pengembangan Toko Tani Indonesia melalui penyaluran beras kepada masyarakat di bawah harga pasar.
23.	Peningkatan penyebaran informasi harga pangan bagi produsen dan konsumen secara berkala dan kontiniu	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	Menunjuk petugas pemantau harga di setiap Kecamatan dan satu petugas Tingkat Kabupaten
24.	Pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga dan peningkatan gizi masyarakat	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	Dalam rangka pemulihan ekonomi akibat Covid-19, Dinas Pangan melakukan pembinaan terhadap 15 Kelompok Wanita Tani yang tersebar di 15 Kecamatan. Kelompok tersebut merupakan kelompok yang mendapat bantuan sebesar Rp40.000.000,- per kelompok berupa uang yang diserahkan kepada masyarakat. Anggaran tersebut diberikan bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan.
25.	Kebijakan pembinaan dan pemantauan secara berkala kondisi keamanan pangan segar dan olahan pada nagari-nagari dan pasar-pasar kecamatan	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	Pembinaan dan pemantauan dilakukan selama 3 bulan, setelah itu dilakukan <i>refocusing</i> terhadap anggaran sehingga tidak mencapai target sampai ke nagari-nagari
26.	Peningkatan produk olahan pangan khas kabupaten Pesisir	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	Pembinaan tidak dapat dilakukan terhadap kelompok



	Selatan dalam mendukung peningkatan pariwisata daerah		pengolahan pangan lokal karena anggaran tidak tersedia
27.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja disnakertrans		1. meningkatnys layanan umum Disnakertrans
28.	Menurunnya tingkat pengangguran		2. Peningkatan jumlah pelatihan dengan dengan jumlah tenaga kerja sesuai dengan pasar kerja 3. Peningkatan skill instruktur yang bersertifikasi 4. Penyediaan jumlah alat- alat untuk pelatihan dalam kondisi baik 5. Renovasi ruang pelatihan menjadi ruang yang representatif
29.	Peningkatan kemandirian masyarakat transmigran		6. Pembangunan jumlah infrastruktur jalan dan jembatan 7. Perberdayaan jumlah infrastruktur yang difungsikan 8. Pelaksananan pendampingan kepada lembaga ekonomi masyarakat 9. Peningkatan luas jangkauan akses IT di kawasan transmigrasi 10. Terlaksananya penyaluran bantuan kepada lembaga ekonomi. 11. Terlaksananya kemudahan akses perbankan kepada lembaga ekonomi masyarakat
30.	Penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah	Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020	Landasan, arah dan prioritas pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.



31	Peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.	Mengidentifikasi, menilai dan memantau secara efektif dan efisien dalam rangka pengendalian segala bentuk risiko
32.	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)	Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.	Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal dapat ditindak lanjuti secara efektif, efisien dan akuntabel.
33.	Penetapan Objek Pemeriksaan, Jadwal dan besaran anggaran Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/504/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2020	Pedoman Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugas pengawasan.
34.	Pengoptimalan pengelolaan risiko pada tingkat Pemerintah Daerah	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700:513/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 11 September 2020 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.	Terkoordinirnya pengelolaan risiko Pemda.
35.	Penyusunan rencana pembangunan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900/024/Kpts/DKPS-PS/2020 Tentang Penetapan Revisi Indikator Kinerja Utama	Landasan, arah dan prioritas pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan dinas yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.



		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	
36.	Memberikan pelayanan yang optimal dalam Bidang Administrasi Kependudukan dengan membentuk Unit Kerja Layanan (UKL) di seluruh Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan 3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Pembentukan Unit Kerja Layanan (UKL) di seluruh kecamatan pada wilayah Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk : 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja personil dalam melayani masyarakat 2. Melaksanakan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat (terjangkau, mudah, tepat, cepat dan akuntabel)
37.	Penyusunan rencana pembangunan tahunan Kecamatan	Keputusan Camat tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2020	Landasan, arah dan prioritas pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan kecamatan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
38.	Penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah	Perda nomor 12 tahun 2009 tentang Pembentukan Kawasan KTM Lunang Silaut	Fasilitasi dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan kawasan KTM Lunang Silaut khususnya dikecamatan Silaut.
39.	Pengembangan kawasan perdesaan terintegrasi perkebunan	Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan	Untuk lebih memfokuskan pengembangan ternak dengan memanfaatkan potensi lahan



	kelapa sawit dengan peternakan sawit.	berbasi Integrasi Perkebunan Sawit dengan Ternak Sapi bali di Kecamatan Silaut Tahun 2017-2022	perkebunan sawit sebagai produk unggulan Kecamatan.
40.	Pengembangan kawasan perhutanan sosial	Permen LHK Nomor P.49/MENLHK/2017 Tahun 2017 tentang Pola Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat pinggir kawasan hutan untuk bisa memanfaatkan kawasan hutan tersebut dalam peningkatan ekonomi kesejahteraan masyarakat.



3.3 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2020

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1	Agar jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran BOS SD dan SMP, sehingga penggunaannya tepat sasaran untuk menunjang proses belajar mengajar sekolah.	Dalam rangka pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Dana BOS SD dan SMP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan telah mengingatkan Kepala Sekolah untuk merancang dan menyusun RKJM (Rencana Kerja Jangka Menengah) Sekolah. RKJM yang di susun oleh pihak sekolah tadi dijadikan acuan atau pedoman pihak sekolah untuk membuat RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) dalam jangka waktu 1 tahun. Jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selalu mensosialisasikan kepada kepala sekolah bagaimana pemanfaatan dana BOS agar tepat sasaran untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Kepala sekolah dalam penggunaan anggaran berpedoman pada Juknis BOS yang dikeluarkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terbit tiap tahunnya terakhir Permendikbud No. 08 tahun 2020. Selanjutnya selama tahun berjalan juga dilakukan pendampingan oleh pengawas di sekolah binaannya masing-masing dalam rangka memenuhi kelengkapan dan ketersediaan penunjang proses belajar mengajar di sekolah dalam satu tahun. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga membentuk tim rekon dana BOS untuk melakukan rekon tentang penggunaan, pemanfaatan, dan pelaporan dana BOS yang dipusatkan di masing-masing kecamatan. Rekon ini pun	Pengawasan terhadap penggunaan anggaran BOS SD dan SMP.



*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan
Tahun 2020*

		bertujuan agar Dana BOS tersebut dapat dimanfaatkan dan dipergunakan untuk menunjang proses belajar di sekolah. Sekaitan pemanfaatan dana BOS tahun 2020 dengan terjadinya Pandemi COVID-19 memang terjadi realokasi anggaran untuk mendukung kesiapan satuan pendidikan memutus mata rantai COVID-19 dalam rangka penyediaan infrastruktur protokol kesehatan standar COVID-19 di sekolah. Kedepannya pengawasan terhadap penggunaan anggaran BOS SD dan SMP sistem pengawasan dan pelaporan akan ditingkatkan dengan memanfaatkan TI yang mengutamakan ketepatan, kecepatan dan akuntabel.	
2	Agar dilakukan evaluasi SOTK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kasi Kebudayaan, jabatan ada tetapi kegiatan/anggaran tidak ada.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mengusulkan anggaran melalui Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 Sebesar Rp 2.086.000.000 namun karena keterbatasan Anggaran usulan tersebut belum dapat terakomodir. Pada Perubahan Anggaran 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berusaha untuk mengusulkan lagi anggaran tersebut namun masih belum terakomodir. Untuk tahun 2021 kegiatan pada Bidang Kebudayaan sudah teranggarkan sebesar Rp.1.152.157.922.	Evaluasi SOTK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kasi Kebudayaan
3	Mutasi dan rotasi adalah salah satu yang wajar untuk penyegaran terhadap guru-guru yang sudah puluhan tahun berada di sekolah yang sama. Disarankan agar bagi guru-guru yang sudah bertugas selama 10 (sepuluh) tahun di tempat yang sama hendaknya dilakukan rotasi dan mutasi.	Berdasarkan Permendikbud nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Tenknis Pelayanan Pendidikan pasal 6 ayat 2 "Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang harus dilayani oleh tenaga pendidik dengan jumlah memadai tetapi kondisi saat ini dari 384 sekolah dasar negeri yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan	Rotasi dan mutasi guru



		mempunyai rombongan belajar anak yang berusia 7 s/d 12 tahun sebanyak 2826 rombel itu berarti kebutuhan guru kelas PNS Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 2826 orang sedangkan guru kelas PNS yang tersedia saat ini sudah termasuk CPNS tahun 2018 sebanyak 1749 orang, berdasarkan data kebutuhan guru diatas maka kekurangan guru kelas PNS kita adalah 1077 orang yang kita isi dengan guru kelas kontrak sebanyak 755 orang dengan gaji Rp.750.000. Dengan melihat kondisi diatas mutasi bagi guru-guru kita yang sudah lama mengabdikan (sudah 10 tahun) pada suatu sekolah mutlak kita lakukan sesuai dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang Beban Kerja Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan guru pasal 4 ayat 3 " Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam Tatap Muka per minggu dan paling banyak 40 (empat puluh) jam Tatap Muka per minggu namun masih terkendala dengan kekurangan guru bagi sekolah yang ditinggalkan.	
4	Reward bagi guru dan pengawas yang prestasi penting untuk meningkatkan semangat kerja tetapi disarankan agar reward yang diberikan tidak membutuhkan biaya yang cukup besar tetapi reward yang diberikan mempunyai kesan dan berarti bagi mereka. Dan rekrutmen bagi guru dan pengawas yang mendapatkan reward penilaian kalau perlu melibatkan pihak ketiga (LPMP dan Perguruan	Dalam penilaian pengawas, kepala sekolah, dan guru berprestasi tahun 2017, 2018, 2019 kita sudah melibatkan institusi UNP dan penilaian pengawas, kepala sekolah, dan guru berprestasi tingkat nasional dengan system yang sudah terukur dan teruji ditingkat nasional yang menghasilkan pengawas, kepala sekolah, dan guru berprestasi ditingkat kabupaten Pesisir Selatan dan kita berikan reward sebagai perangsang kinerja mereka namun kita akui bahwa pemberian reward yang besar tersebut belum memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan mutu	Reward bagi guru dan pengawas yang prestasi



*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan
Tahun 2020*

	Tinggi) sehingga kita betul-betul mendapatkan orang-orang yang punya kompetensi dan profesional dibidangnya masing-masing dan menjadi suri tauladan dilingkungan dimana mereka berada dan bagi yang prestasi merupakan salah satu pertimbangan untuk karir mereka yang lebih baik. Selanjutnya juga perlu dilakukan pelatihan dalam meningkatkan profesionalitas guru dan pengawas sekolah.	Pendidikan di kabupaten Pesisir Selatan hal ini disebabkan oleh tidak begitu tertariknya guru guru kita dalam berkopetisi dalam pengembangan karir sedangkan pelatihan profesional guru terus kita lakukan setiap tahun dan pada tahun anggaran 2020 kita tidak mendapatkan anggaran untuk penilaian pengawas, kepala sekolah, dan guru berprestasi	
5	Untuk menunjang mutu pendidikan agar program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dari tahun ke tahun jangan dalam bentuk copy paste atau monoton. Dengan perkembangan teknologi saat ini sudah saatnya jajaran dinas pendidikan merupakan urusan wajib disamping alokasi anggaran dari tahun ke tahun cukup besar untuk pendidikan. Dan kedepan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus melakukan pemetaan terhadap mutu pendidikan baik akademik maupun non akademik yang terukur di setiap kecamatan.	Dalam menyikapi perkembangan saat ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan telah berusaha memanfaatkan kemajuan teknologi dalam beberapa aspek, diantaranya dalam pelaksanaan lomba-lomba. Ketiadaan anggaran untuk kegiatan lomba-lomba pada tahun 2020 akibat tersedotnya dana APBD untuk penanganan <i>covid-19</i>, namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tetap memotivasi sekolah dalam mengembangkan potensi siswa maupun guru dalam berbagai perlombaan, seperti pada lomba Olimpiade Pahlawan Sains Indonesia (OPSI) Tahun 2020 yang dilaksanakan secara daring atau online. Hasilnya, beberapa orang siswa dan guru dari UPT SMPN 1 Painan dan SMP lainnya berhasil memperoleh penghargaan di Tingkat Nasional. Pada kegiatan lain, dalam proses penerimaan peserta didik baru tahun 2020, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga telah mulai memanfaatkan kemajuan teknologi dengan melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam jaringan terutama pada jenjang	Pemetaan terhadap mutu pendidikan baik akademik maupun non akademik



		SMP. Pelaksanaan PPDB dalam jaringan ini menjadi penting dilakukan karena selain meminimalisir persoalan distribusi peserta didik di lapangan, juga menjadi satu tuntutan situasi akibat <i>covid-19</i>. Dengan adanya PPDB dalam jaringan dapat mencegah penyebaran wabah <i>covid-19</i> karena tidak menimbulkan kerumunan dan dapat mengurangi kontak fisik dengan banyak orang. Selama masa pandemic covid-19 tahun 2020, proses belajar mengajar di sekolah dilaksanakan secara daring dan luring. Proses pembelajaran secara daring dengan memanfaatkan aplikasi google classroom dan Whatshap Group. Masing-masing aplikasi tsb memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga sebahagian guru telah mengkombinasikan penggunaan kedua aplikasi tersebut dalam pembelajaran daring. Selama pembelajaran daring dan luring berlangsung guru-guru di sekolah juga telah membuat bahan ajar yang berbasis kertas dan berbasis IT seperti video pembelajaran, untuk memenuhi tuntutan kurikulum.	
6	Sekolah di lokasi pariwisata mandeh membutuhkan sarana transportasi bus sekolah untuk guru dan murid yang berdomisili di luar mandeh.	Berdasarkan tinjauan lapangan dan kondisi Riil selama ini dengan keluarnya Mandeh dan sekitarnya dari daerah terisolir, maka akses jalan darat yang sudah bagus memang membutuhkan transpor darat, hal ini disebabkan antara lain: 1. Jarak antara Simpang Cerocock -Mandeh dengan lokasi SMP 9 Sungai Nyalo) tidak memungkinkan di lakukan peserta didik dan Pendidik untuk menggunakan Transportasi roda 2 melihat medan dan topografi jalan yang menanjak dan menurun.	Sarana transportasi bus sekolah untuk guru dan murid yang berdomisili di luar mandeh



*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan
Tahun 2020*

		2. Tidak ada akses mobil angkutan umum yang melayani Rute Simpang Cerocok -Mandeh – Sungai Nyalo . 3. Beban operasional dengan jalan Laut penuh risiko dan sering Badai serta perawatan kendaraan Air yang cukup besar di bandingkan dengan Jalan darat. Khusus Kapo -Kapo – Sungai Nyalo yang tak mungkin Transportasi Darat tetap harus menggunakan Jalan Laut.(Kapal Motor)	
7	Pengawas sekolah SD dan SMP salah satu ujung tombak dari Dinas Pendidikan karena mereka yang lebih mengetahui kemampuan dan kompetensi baik guru maupun kepala sekolah dan termasuk proses belajar dan mengajar di sekolah. Dan diharapkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat mempertimbangkan setiap laporan dan masukan yang disampaikan pengawas sekolah. Selama ini kami melihat bahwa laporan dan masukan dari pengawas sekolah tidak digubris, sehingga melemahkan motivasi bagi pengawas sekolah itu sendiri.	Sesuai dengan Tupoksi Pengawas yang menjadi Ujung Tombak dalam garda terdepan melihat dan mengevaluasi PBM di lapangan, kami memandang dengan komposisi 11 Orang Pengawas SMP dengan 77 SMP dan 50 orang Pengawas SD dengan 388 UPT SDN Negeri dan 12 SD swasta maka memang kurang terayomi semua laporan sekolah, tetapi Insya Allah karena ada Laporan berkala yang di sampaikan berjenjang dari Pengawas (khusus SD) ke Kordikwil tiap kecamatan tiap bulan dapat juga laporan yang akurat walau dengan keterbatasan anggaran tidak semua dapat di akomodir sesuai dengan permintaan, sementara Pengawas SMP ada pertemuan apel tiap Minggu sekali tiap Jumat di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang dalam gerak cepat informasi melalui grub WA dapat mengupdate informasi dari Pengawas di lapangan. Kami berharap dengan komposisi Jumlah Pengawas sekarang kiranya DPRD dapat lebih memperhatikan kesejahteraan di lapangan, baik dalam dana maupun Kendaraan penunjang operasional di lapangan.	Laporan dan masukan dari pengawas sekolah
DINAS PUTR			



No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar menyediakan ruangan khusus dan Mess untuk pimpinan dan anggota DPRD di Kantor Pelayanan Pemda di Tapan selain ruangan khusus untuk bupati dan wakil bupati sehingga pelayanan masyarakat bisa lebih optimal.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menyediakan 6 (enam) ruangan mess yang dapat digunakan di Kantor Pelayanan Pemda di Tapan, tetapi untuk ruangan khusus untuk pimpinan dan anggota DPRD belum dapat terlaksana. Kegiatan ini dianggarkan pada Program Penataan Bangunan dan Lingkungan, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Daerah (bagian dari kegiatan ini) sebesar Rp. 9.358.106.400,- (kegiatan lanjutan tahun 2019)	Pelayanan Masyarakat
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disarankan agar melakukan pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap tahapan-tahapan pekerjaan, dan kualitas pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Masjid Terapung sehingga hasilnya tidak asal jadi dan diharapkan selesai tepat waktu.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap tahapan-tahapan pekerjaan dan kualitas pekerjaan pada pembangunan Masjid Terapung. Kegiatan pengawasan ini dianggarkan pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah (bagian dari kegiatan ini) sebesar Rp. 16.995.170.631,- (kegiatan lanjutan tahun 2019 termasuk pembangunan dan pengawasan)	Sarana dan Prasarana Ibadah
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disarankan untuk melakukan pelebaran jalan menuju Jembatan Rangka Baja Binjai di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum dapat melakukan pelebaran jalan menuju Jembatan Rangka Baja Binjai karena belum terlaksananya pembebasan lahan untuk pelebaran jalan menuju Jembatan Rangka Binjai di Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan.	



4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disarankan untuk memasang bronjong pada Jembatan Beton Siguntur tahun 2019 sehingga jembatan tersebut tahan lama.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah memasang bronjong pada Jembatan Beton Siguntur pada tahun anggaran 2020 melalui Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan, Kegiatan Rehabilitasi Jembatan dalam Kondisi Tanggap Darurat (bagian dari kegiatan ini) sebesar Rp. 450.000.000,-	
---	---	---	--

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	Disampaikan kepada saudara Bupati Pesisir Selatan untuk dapat membuat irigasi persawahan di Bandar Rawang Anakan Batang Kapas		1. Irigasi Bandar Rawang Anakan di Kecamatan Batang Kapas termasuk dalam areal Daerah Irigasi Jalamu (kewenangan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat / menunggu ditetapkan), memiliki masalah pada saluran buang yang apabila debit air cukup besar dari hulu, saluran buang yang ada tidak cukup menampung dan mengaliri air sampai ke pembuangan. Untuk itu perlu dilakukan pelebaran



*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan
Tahun 2020*

			saluran buang (galian tanah) yang tentu saja membutuhkan peran serta masyarakat sekitar saluran buang dalam pembebasan lahan / tanah. Pekerjaan ini akan dianggarkan pada tahun 2020 pada APBD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan.
	1. Fraksi PAN juga meminta saudara Bupati juga memprioritaskan peningkatan dan pembangunan drainase di Kampung Balah Rambahan Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti. Karena setiap hari hujan agak lebat, kampung tersebut selalu dilanda banjir yang berakibat terganggunya aktivitas masyarakat dan menimbulkan kerugian materi yang tidak sedikit. 2. Guna mencegah dan meminimalisir	Kegiatan 'Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Saluran Primer Pembuangan Pekerjaan Pembangunan Drainase Balah Rambahan Nagari Punggasan Rp.141.152.000,00	1. Untuk pembangunan drainase di Kampung Balah Rambahan Punggasan di Kecamatan Linggo Sari Baganti dianggarkan pada APBD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air tahun 2020. 2. Sumur resapan atau Ecodrain tidak sesuai dengan kondisi topografi Kabupaten Pesisir Selatan yang mayoritas ibukota



	potensi banjir di kawasan permukiman dan kota – kota ibukota kabupaten dan kecamatan, Fraksi PAN meminta saudara Bupati membuat regulasi supaya setiap ada pembangunan bangunan diwajibkan membuat sumur resapan atau lebih dikenal dengan Ecodrain. 3. Di kesempatan ini Fraksi PAN juga meminta saudara Bupati memprioritaskan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Saluran Pembuangan di areal persawahan di Labuah Gajah Nagari Sungai Tunu dan Padang Buluah Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir. 4. Saudara Bupati juga diharapkan melakukan kajian pembangunan bendung dan jaringan irigasi baru untuk persawahan di Sungai Liku Nagari Sungai Liku Pelangai dan Padang Laban Nagari Pasia		Kabupaten dan Kecamatannya berada pada dataran rendah, untuk mengurangi resiko banjir yang diperlukan adalah sebagai berikut : a. Adanya Master Plan Drainase Perkotaan yang jelas tentang sirkulasi jalur drainase, besaran penampang drainase serta pembuangannya ke sungai atau ke laut. b. Pembangunan Drainase yang berkelanjutan dan tuntas. c. Peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan drainase dengan tidak membuang sampah dan ikut membersihkan drainase yang di sekitar rumah. d. Peran aktif masyarakat tentang perlunya daerah resapan pada halaman rumah dengan tidak menutupi semua
--	---	--	---



	Pelangai di Kecamatan Ranah Pesisir. 5. Perlunya dilakukan Normalisasi Batang Lengayang di kawasan Jembatan Pasar Gompong Kambang Barat. 6. Normalisasi Batang Lakitan terutama Muara Lakitan, dimana yang menjadi persoalannya adalah kawasan tersebut merupakan kawasan permukiman masyarakat yang nantinya akan berimbas kepada masyarakat itu sendiri. 7. Pengerukan dan perluasan ujung Muara Surantih, karena adanya masukan dari masyarakat yang disebabkan tidak bisa masuknya kapal nelayan ke sungai melalui pintu muara dan apabila musim badai terpaksa para nelayan memarkir kapalnya di atas tebing pantai. 8. Selain itu juga abrasi pantai yang terjadi di sekitar pantai Surantih dan ini perlu solusinya		lahan dengan melakukan perkerasan seperti cor. 3. Untuk Pembangunan Jaringan Irigasi dan Saluran Pembuangan di areal persawahan di Labuah Gajah Nagari Sungai Tunu dan Padang Buluah Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir, yang termasuk areal Daerah Irigasi Aia Tambang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan saat ini sedang diupayakan untuk menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang diinterkoneksi dengan Daerah Irigasi Koto Salapan yang sampai saat ini pembebasan lahan masih belum tuntas.
--	---	--	---



*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan
Tahun 2020*

	kedepan oleh Pemerintah Daerah.		4. Untuk kajian pembangunan bendung dan jaringan irigasi baru untuk persawahan di Sungai Liku Nagari Sungai Liku Pelangai dan Padang Laban Nagari Pasia Pelangai di Kecamatan Ranah Pesisir perlu dilakukan pembuatan DED yang akan dianggarkan pada APBD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air tahun 2020. 5. Untuk Normalisasi Batang Lengayang di kawasan Jembatan Pasar Gompong Kambang Barat sudah dianggarkan pada APBD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air tahun 2020. 6. Untuk Normalisasi Sungai Batang Lakitan terutama Muara Lakitan akan
--	------------------------------------	--	---



*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan
Tahun 2020*

			dilakukan kajian lapangan dan pengusulan proposal kepada Pemerintah Pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera V, karena menyangkut pekerjaan pengamanan muara yang membutuhkan biaya yang besar. 7. Untuk pengerukan dan perluasan ujung Muara Surantih, sudah dilakukan secara swakelola oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air pada Bulan Agustus 2019. Tetapi pekerjaan tersebut belum maksimal karena untuk Muara Surantih diperlukan kontruksi penambahan panjang jetty. Kelanjutan pekerjaan ini sudah diusulkan ke Pemerintah Propinsi Sumatera Barat melalui Dinas
--	--	--	--



*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan
Tahun 2020*

			Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sumatera Barat. 8. Untuk abrasi pantai yang terjadi di sekitar pantai Surantih, saat ini sedang dilaksanakan Pengamanan Pantai Ampiang Parak dan dilanjutkan pada tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera V.
	1. Pemberian batu jeti di seluruh pantai yang rawan abrasi. 2. Peningkatan Irigasi pertanian Durian Taba Nagari Kubang Koto Berapak Kecamatan Bayang 3. Peningkatan irigasi – irigasi di seluruh Kabupaten Pesisir Selatan, untuk pengembangan pertanian. 4. Pengeringan rawa di Tanah Bakali dan Inderapura Timur untuk pertanian. 5. Pengeringan rawa dan normalisasi Sungai Durian Nagari Bukit Buai.	Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pekerjaan Normalisasi Sungai Batang Sei Durian Rp. 141.839.000,00	1. Untuk pemberian batu jeti di seluruh pantai yang rawan abrasi, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air telah melakukan kajian dan mendata semua pantai yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan terutama yang rawan terkena abrasi. Dalam hal pembangunan infrastruktur pengamanan



*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan
Tahun 2020*

			pantai dibutuhkan biaya yang sangat besar oleh sebab itu Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terus berusaha menyampaikan usulan dan proposal penanganan abrasi pantai ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. 2. Untuk peningkatan Irigasi pertanian Durian Taba Nagari Kubang Koto Berapak Kecamatan Bayang akan dianggarkan pada APBD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air tahun 2020. 3. Untuk peningkatan irigasi – irigasi di seluruh Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten
--	--	--	--



*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan
Tahun 2020*

			Pesisir Selatan melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air berusaha melaksanakan secara maksimal baik melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ditambah dengan adanya Dana Loan melalui Kegiatan Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP). Selain itu Pemerintah juga berusaha meningkatkan areal irigasi sehingga irigasi yang semulanya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten (areal di bawah 1.000 Ha) bisa menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi (areal 1.000 sampai 3.000 Ha) atau
--	--	--	---



*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan
Tahun 2020*

			menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (areal diatas 3.000 Ha). 4. Untuk Pengeringan rawa di Tanah Bakali dan Inderapura Timur untuk pertanian akan dianggarkan pada APBD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air tahun 2020 5. Untuk Pengeringan rawa dan normalisasi Sungai Durian Nagari Bukit Buai akan dianggarkan pada APBD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air tahun 2020
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			
No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di tahun 2019 dalam Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Sebanyak 408 Unit kami apresiasi cukup baik dan agar lebih ditingkatkan	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan akan selalu meningkatkan kinerja dan kualitas dari Pelaksanaan Rehab Rumah Tidak Layak Huni, dan akan terus melakukan Sosialisasi agar	Penerima Bantuan RTLH harus tepat sasaran dan setelah Bantuan diterima agar dimanfaatkan sebagaimana mestinya



	lagi. Namun ada Beberapa Rumah Tidak Layak Huni tersebut belum ditempati oleh penghuninya. Kami sarankan agar Dinas Menindaklanjuti hal tersebut.	penerima bantuan menempati Rumah tersebut.	
2	Diharapkan pada pemerintah untuk dapat memberikan kepastian hukum terhadap tanah masyarakat, terutama pada tanah – tanah yang rawan konflik, Tanah lahan pertanian dan lahan Perkebunan Rakyat	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengupayakan tanah – tanah milik pemerintah daerah yang rawan konflik untuk dibuatkan sertifikat atas nama Tanah Milik Pemerintah Daerah dan dipasang plang Merk.	Percepatan pengurusan dan pengadaan sertifikat tanah pemda
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran agar ditingkatkan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) dalam rangka meningkatkan rasa aman ditengah-tengah masyarakat.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah melaksanakan Perda Nomor 1 Tahun 2016, tetapi belum merata disetiap Kecamatan dikarenakan keterbatasan Personil dan Anggaran. Kegiatan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk melaksanakan penegakan Perda tersebut dengan Pagu Anggaran Rp. 406.973.000,-	Kepatuhan masyarakat terhadap perda Nomor 1 tahun 2016
2.	Pesisir Selatan dari segi geografis memanjang dari utara ke selatan lebih kurang 285 KM, sehingga dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan masyarakat menjadi tantangan bagi pemerintah. Namun demikian karena pemerintah ada karena	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah melaksanakan patroli rutin, tetapi belum terakomodir semua kecamatan, dikarenakan keterbatasan personil dan armada serta keterbatasan anggaran yang ada.	Agar berkurangnya pelanggaran masyarakat terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2016, maka dilakukan patroli



	masyarakat, maka wajib hukumnya pemerintah menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dengan hal tersebut dengan ini kami sarankan kepada perangkat daerah dalam hal ini Satpolpp untuk dapat melakukan patrol keseluruhan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tidak hanya di pusat kabupaten saja. Dalam rangka menunjang kegiatan tersebut kami minta pada pemerintah untuk dapat memenuhi sarana dan prasarana seperti kendaraan dan biaya operasional		
3.	Dalam hal pelayanan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana kebakaran dengan ini kami sarankan kepada pemerintah untuk dapat menambah Pos Pemadam Kebakaran dan melengkapi kebutuhan kendaraan pemadam kebakaran, sehingga apabila terjadi kebakaran petugas akan nyaman dalam menjalankan tugasnya. Dari tinjauan kami kelapangan masih ditemukan kendaraan pemadam kebakaran tidak layak jalan (sirine dan lampu mati, kain kopleng tidak laying, lampu sorot tidak ada dll) dan kendaraan yang tidak layak beroperasi	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, memiliki sarana dan prasarana pemadam kebakaran 5 unit, yaitu 2 unit di kabupaten (Posko Painan, 1 unit di Lengayang, 1 unit di Balaiselasa dan 1 unit lagi di Tapan), dengan fasilitas yang kurang memadai, satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah beberapa kali meminta untuk penambahan armada Pemadam Kebakaran tetapi belum membuahkan hasil, kami tidak bosan-bosannya memohon untuk penambahan armada tersebut, anggaran kegiatan yang ada hanya untuk operasional pemadam kebakaran serta uang honorer satgas pemadam kebakaran	Pelayanan/ bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah kebakaran



	(selang bocor, tidak ada baju pengaman) selain dari hal tersebut pemerintah tidak memperhatikan keamanan dan kenyamanan posko dari pada pemadam kebakaran. Disarankan juga kepada pemerintah untuk dapat memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran.		
RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN			
No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	Minimnya potensi pendapatan daerah, maka RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dengan status BLUD, asset yang ada murni asset daerah. Bagaimana RSUD juga dapat menambah pendapatan atau PAD bagi Pemerintah Daerah.	- RSUD Dr. Muhammad Zein Painan akan membuka pelayanan ruangan khusus paru (<i>respiratory center</i>) tahun 2021 - Membuka poliklinik eksekutif (poli sore) - Menambah ruangan VIP menjadi 14 ruangan - Membuka ruangan perawatan kelas terpadu - KSO gas medis dengan puskesmas yang ada di Kab. Pesisir Selatan	
2	Dewan Pengawas belum bekerja secara optimal dan jangan ada kesan hanya memenuhi SOTK dan regulasi dan insentif	- Telah dilakukan rapat rutin bulanan Dewas tahun 2020 - Punya grup WA khusus sebagai sarana komunikasi - Kunjungan lapangan - Mengeluarkan rekomendasi terkait hal-hal tertentu	
3	Kebijakan memotong dan merumahkan tenaga kontrak dan honorer	Hal ini disebabkan karena terjadi penurunan pendapatan otomatis semua kegiatan/belanja dilakukan efisiensi termasuk gaji Non ASN dialihkan kepada penanganan Covid-19 dan pembayaran obat, BMHP dan Gas Medis.	



DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	Pembangunan Pasar yang sudah ada agar segera dimanfaatkan sehingga mampu mendongkrak perekonomian masyarakat	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pesisir Selatan telah mengupayakan relokasi beberapa pasar yang telah dibangun pada tahun-tahun sebelumnya, namun masih ada pasar yang sudah dibangun baik melalui anggaran APBN Maupun APBD yang belum dimanfaatkan, dalam menyikapi hal ini kami sudah menyusun <i>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dengan Anggaran Sebesar Rp. 595.024.830,-</i>	Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk pembayaran Honorarium Pengelola Pasar Kabupaten dan pembinaan, Penataan dan pengawasan Pedagang di Pasar Rakyat / masalah yang diselesaikan adalah : 1. Pasar Rakyat Punggasan (menunggu akta hibah dari Kemeterian Perdagangan RI) 2. Pasar Rakyat Lakitan (menunggu proses akta hibah selesai dari Kemeterian Perdagangan RI) 3. Pasar Rakyat Mandeh (belum dilengkapinya sarana dan prasarana pasar termasuk didalamnya lahan parkir, drainase keliling Pasar, fasilitas umum lainnya) 4. Pasar Rakyat Kambang yang dibangun dengan APBN-TP (penataan dan penempatan pedagang yang



*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan
Tahun 2020*

			berada di pelataran agar dapat masuk ke bangunan yang baru dengan permintaan pedagang untuk membuka dinding bagian samping diganti dengan fooldinggate agar pengunjung dapat melihat langsung kedalam bangunan tersebut 5. Pasar Muaro Sakai (dalam tahap penyelesaian dan mediasi antara pemilik tanah pasar lama muaro sakai untuk dapat direlokasi kembali ke Pasar Muaro Sakai yang ada di Tluk Ampalu, namun sebelumnya pasar ini telah beroperasi selama 6 kali hari pasar. 6. Pasar Lunang (Bangunan yang ada saat sekarang ini belum dapat menampung semua pedagang yang ada pada pasar pagi lunang sehingga belum dapat
--	--	--	---



			dioperasionalkan saat ini.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	Harus dioptimalkan pengawasan terhadap pabrik pengolahan kelapa sawit yang masih sering membuang limbah sehingga menimbulkan dampak pencemaran lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup meningkatkan pengawasan terhadap pemegang izin lingkungan terutama pabrik pengolahan kelapa sawit. Kegiatan ini dianggarkan pada Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup. Dengan Anggaran : Rp 10.302.750,-	Pembinaan dan pengawasan izin lingkungan
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1.	Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) bertunuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Nagari, akan tetapi kenyataan dilapangan banyak Bumrag yang mati suri dan tidak sesuai dengan tujuan terbentuknya Bumrag Tersebut, Untuk itu kepada saudara untuk dapat melakukan monitoring dan pembinaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melaksanakan monitoring dan pembinaan pada Bumrag yang mati suri dan bermasalah dan juga telah di lakukan mediasi terhadap bumrag tersebut	Terhadap Bumrag yang mati suri telah dilakukan mediasi dan hasil mediasinya adalah kepada Bumrag yang bermasalah danb mati suri tersebut untuk dapat mengem,bangkan usahanya
2	Dana desa yang sangat besar yang dikelola oleh Pemerintah Nagari dan dalam pengelolaannya di bantu oleh PD dan PLD, Namum kinerja PD dan PLD itu belum maksimal,	Dalam Pendampingan Nagari oleh PD, PLD di Nagari bukan tidak maksimal, melainkan tenaga pendamping yang tidak mendampingi 182 Nagari dimana petugas pendamping yang ada hanya 65 orang, jadi mereka	Memaksimalkan masing masing pendamping untuk dapat mendampingi 2 sampai dengan 3 Nagari untuk satu



	ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah	mendampingi 1 orang 2 sampai 3 Nagari.	orang petugas Pendamping
3	Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk dapat membantu Pemerintah Pusat dalam pengendalian Penduduk		

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Penjelasan agar memudahkan seluruh perizinan UMKM dan pelaku wisata agar pariwisata kabupaten pesisir selatan biar semakin berkembang	Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan yang dilimpahkan ke DPMPTSP jumlah sebanyak 120 Jenis izin Semuanya gratis kecuali Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sebagaimana telah kita ketahui bersama, dimana sejak ditetapkan kawasan Mandeh sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan hasil Kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tahun 2017 yang lalu serta menjadi salah satu kunjungan peserta Forum Investasi (Regional Investment Forum / Rif) yang mana telah banyak calon investor yang



*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan
Tahun 2020*

			melirik, berminat dan mengurus permohonan izin usaha dan berinvestasi di kawasan mandeh baik yang bersifat UMKM, Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), baik secara perorangan maupun secara Badan Usaha / Perusahaan, yang bergerak di sektor UMKM dan Pariwisata seperti : Pendirian penginapan / Villa/ Home Stay dan Kuliner. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik dalam sistem tersebut pelaku usaha dapat mendaftar langsung perusahaannya baik yang berbadan hukum maupun perorangan melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS), dengan Website: OSS.go.id.
--	--	--	--



DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan perlunya budidaya ternak sapi pesisir yang merupakan identitas daerah yang selama ini tidak menjadi prioritas Kegiatan ini dianggarkan pada Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Kegiatan Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat dengan pagu anggaran Rp. 861.919.461 terealisasi Rp. 861.854.911 (99,99%), untuk sapi pesisir sebesar Rp. 384.750.000.	Pendistribusian ternak kepada masyarakat khusus sapi pesisir pada 3 kelompok tani dan dilakukan pendampingan teknis tentang good farming practice pemeliharaan sapi pesisir secara intensif untuk budi daya.
DINAS PANGAN			
No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	Kebiasaan masyarakat kita setelah selesai panen, hasil panen dijual kepada pedagang. Dari pantauan kami pedagang yang mengumpulkan hasil petani/ pekebun tersebut berasal dari luar Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu disarankan kepada Dinas Ketahanan Pangan, untuk mengupayakan hasil produksi di Kabupaten Pesisir	Terima kasih kepada yang terhormat Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan yang telah memberikan saran dan masukan kepada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, dapat kami sampaikan bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pemerintah menjamin terwujudnya kecukupan pangan untuk mencapai ketahanan pangan sampai perorangan. Pembangunan ketahanan pangan	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUMP) dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang dikelola oleh Gapoktan-Gapoktan yang tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan.



	Selatan tidak pergi keluar Pesisir Selatan.	menjadi tanggung jawab kita bersama dengan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Ketahanan pangan ditandai tersedianya pangan yang cukup untuk dikonsumsi masyarakat antar daerah dan antar waktu. Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan difasilitasi oleh Dana APBN berupa Bantuan Pemerintah (Banper) dalam rangka Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat untuk memenuhi ketersediaan pangan. Untuk memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan dikembangkan melalui kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dari Tahap Pengembangan menjadi Mandiri. LPM berfungsi untuk mengelola stock gabah/padi pada saat musim panen raya/paceklik, antisipasi gejolak harga pangan, bencana alam, dan atau bencana sosial serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kegiatan LPM tersebut difokuskan untuk pengisian LPM untuk stock Cadangan Pangan Masyarakat, stock tersebut didapat dari Pengadaan Gabah/padi yang dibeli dari masyarakat/ petani di Kabupaten Pesisir Selatan. Pada Tahun Anggaran 2020 melalui dana	
--	--	---	--



		APBN, Kabupaten Pesisir Selatan dialokasikan sebanyak 4 (empat) Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yakni : 1) Kelompok Lumbung Pangan Mekar Jaya Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang; 2) Kelompok Lumbung Pangan Pematang Lesung Nagari Tluk Kualo Kecamatan Airpura; 3) Kelompok Lumbung Pangan Setangkai Padi Nagari Bukit Buai Kecamatan BAB. Tapan; dan 4) Kelompok Lumbung Pangan Suka Makmur Nagari Lunang Dua Kecamatan Lunang. Bantuan pemerintah tersebut sebanyak Rp.40.000.000,-/kelompok yang digunakan untuk pembelian gabah masyarakat/petani, tetapi belum semua kecamatan terfasilitasi. Kedepannya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui APBD akan mengupayakan semua Lumbung Pangan bekerjasama dengan Nagari melalui Badan Usaha Milik Nagari (BumNag). Kelompok tersebut akan bekerjasama dengan BumNag dalam mengelola pengadaan/ pembelian gabah/padi masyarakat/petani dan Nagari bisa mengalokasikan anggaran untuk pengadaan/pembelian gabah petani dan disimpan sebagai stock	
--	--	--	--



		di Lumbung Pangan yang pada suatu saat bisa digunakan untuk membantu masyarakat dalam menangani kerawanan dan kerentanan pangan ditingkat nagari. Gabah/padi masyarakat /petani bisa langsung dibeli oleh kelompok melalui BumNag dan diharapkan tidak keluar dari Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pengadaan/pembelian gabah/padi petani dilapangan yang diharapkan akan mampu membendung agar gabah tidak keluar ke daerah lain, melalui kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUMP) dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang dikelola oleh Gapoktan-Gapoktan yang tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan.	
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			
No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1.	Bidang Perpustakaan Untuk SDM masyarakat masyarakat Pesisir Selatan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Pesir Selatan selain mewujudkan masyarakat yang mandiri, unggul,	Kami sangat mengapresiasi apa yang telah disampaikan Bapak/Ibuk Dewan yang terhormat, dan ini akan menjadi perhatian kami dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk kedepannya	



	agamis dan sejatera disarankan perlu dikembangkan minat dan budaya baca masyarakat melalui perpustakaan baik Perpustakaan Daerah, sekolah, nagari dan pojok baca Kantor dan mengaktifkan kelompok literasi masyarakat di erbagai bidang kehidupan.		
2.	Bidang Kearsipan Disarankan kepada Pemerintah Daerah peduli akan pentingnya arsip sebagai pertanggungjawaban yang sah dari pelaksanaan oleh setiap perangkat Daerah, Kecamatan dan nagari, pada akhirnya masing-masing Perangkat Daerah dan nagari mempunyai arsip sesuai dengan standar Kearsipan	Kami mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi sekali apa yang telah disampaikan Bapak/Ibuk Dewan yang terhormat, dan ini akan menjadi perhatian kami dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan bagaimana kedepannya Perangkat Daerah dan Nagari akan mempunyai arsip sesuai dengan standar Kearsipan	

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1.	Perlunya Pembinaan Terhadap Budidaya Ikan Air Tawar dan Bagi Nelayan Tangkap Sehingga tidak Menyalahi Aturan Yang Berlaku	Telah dilakukan pembinaan terhadap pembudidaya ikan air tawar dan juga nelayan tangkap tentang peraturan berkaitan dengan pembudidaya ikan dan larangan tentang pemakaian alat tangkap dan pemakaian bahan peledak /putas.	-



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	Seiring dengan adanya investasi yang masuk ke Pesisir Selatan agar dilakukan evaluasi dan pengawasan terhadap tenaga kerja asing	Pada tahun 2020 tidak ada anggaran kegiatan untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap tenaga kerja asing karena anggaran di refofusing untuk penanganan pandemic covid-19. Sementara pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing kewenangan berada di provinsi. Kabupaten hanya melakukan pembinaan dan monitoring.	Kabupaten hanya melakukan monitoring dan evaluasi dengan program/ kegiatan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja diperusahaan dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan
2	Agar Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap karyawan yang sudah habis masa kerja pada PKS Incasi dan perusahaan lainnya untuk mendapatkan hak-haknya atau buatkan regulasi daerah ketenagakerjaan	Pada tahun 2020 tidak ada program/ kegiatan untuk melakukan pengawasan terhadap karyawan yang telah habis masa kerja pada PKS Incasi dan perusahaan lainnya. Namun ketika ada permasalahan, tetap ditindak lanjuti dengan menggunakan dana rutin dinas	Program/ kegiatan ini adalah perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pada tahun 2020 kegiatan ini tidak ada.
DINAS PERHUBUNGAN			
No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	Belum Meratanya Jaringan Listrik Yang Bisa Diakses Bagi Seluruh Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan	Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa mengenai pengadaan jaringan listrik di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan adalah kewenangan PT. PLN (Persero) yang dalam hal ini dilakukan oleh Kantor PT. PLN	Pemerataan Jaringan Listrik bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.



*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan
Tahun 2020*

		(Persero) ULP Painan. Sedangkan yang menjadi tugas pokok dan kewenangan Dinas Perhubungan adalah Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) apabila jaringan listrik telah terpasang diruas jalan tersebut. Namun usulan ini akan kami sampaikan kepada pihak PLN melalui dinas terkait.	
--	--	--	--

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	Pada beberapa OPD Terdapat proses pembayaran pekerjaan yang tertunda akibat dari kesalahan pihak penyedia, sehingga terjadi pembayaran denda dan realisasi keuangan yang diundur dan diluncurkan pada tahun berikutnya. Untuk hal ini kami berharap agar Pemerintah lebih jeli dalam memilih dan menentukan penyedia jasa agar tidak menjadi persoalan dikemudian hari	Penentuan Penyedia Jasa merupakan wewenang dari SKPD dan melalui mekanisme ULP	

INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1.	Untuk menciptakan pemerintah yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean goverment), fungsi dan peran Inspektorat sangatlah dominan. Untuk itu kami sarankan	Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Inspektorat terdiri dari berbagai bidang ilmu, tidak hanya terfokus pada satu ilmu Teknik saja. Apabila dalam pengawasan/pemeriksaan membutuhkan keahlian yang tidak dimiliki oleh APIP Inspektorat,	Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, membuat usulan ke BKPSDM atas kebutuhan Tenaga Teknik (Sarjana), Formasi Penerimaan CPNSD



*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan
Tahun 2020*

	kepada kepada Pemerintah agar dapat menempatkan pegawai pada Inspektorat orang-orang yang telah mempunyai pengalaman sesuai dengan bidang pengawasannya. Yang terjadi sekarang pengawasan dibidang konstruksi diawasi oleh pegawai yang tidak mempunyai background teknik. Berkaca kita kepada Kabupaten Bogor, dimana pegawai ruang lingkup Inspektorat dilakukan seleksi yang sangat ketat sesuai dengan kebutuhan bidang pengawasannya, dan terhadap pegawai selalu diberikan peluang untuk dapat meningkatkan SDM.	maka dapat digunakan tenaga ahli dari luar instansi. Sebagai informasi, APIP Inspektorat memiliki 4(empat) orang Sarjana Teknik S-1. Sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019, untuk kegiatan non pengawasan, APIP Inspektorat membutuhkan pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP. 120 jam/tahun berarti antara 2 s.d. 3 kali diklat/tahun per APIP. Anggaran yang tersedia dari tahun ke tahun hanya mengakomodir kebutuhan 1 (satu) kali diklat untuk 10 s.d. 15 orang/tahun, sedangkan jumlah APIP Inspektorat tahun ini sebanyak 50 (lima puluh) orang. Jadi masih kekurangan biaya diklat untuk 35 (tiga puluh lima) orang APIP. Berdasarkan Hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia, dengan Laporan Hasil Reviu (LHR) Nomor LHR-494/D3.04/2/2019 tanggal 9 Desember 2019 yang menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan telah berada pada Level 3 untuk semua elemen penilaian. Sebagai tambahan informasi, Inspektorat kabupaten maupun kota pada Provinsi Sumatera Barat yang telah berada pada Level 3 baru 3 (tiga) Inspektorat yaitu Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.	Tahun 2019 dan Tahun 2021.
2.	Mengingat salah satu fungsi dari Inspektorat	Inspektorat fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan	Membina APIP sehingga terdapat



*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan
Tahun 2020*

	adalah unsur pembinaan, maka kami sarankan kepada Pemerintah/Inspektorat jangan memberikan kesan seolah-olah Inspektorat sebagai aparat penegak hukum.	atas pelaksanaan pemerintah daerah, baik itu melalui Audit, Reviu, Evaluasi dan Monitoring dan Pemantauan. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, Inspektorat selalu mengutamakan aspek pembinaan, baik itu dalam aspek aparatur, aset/barang, maupun aspek keuangan. Laporan yang diterbitkan oleh Auditor baik itu oleh Auditor Internal seperti Inspektorat, BPKP dan Irjen dari kementerian, serta dari Auditor Eksternal seperti BPK harus ditindaklanjuti oleh auditan (objek pemeriksaan) dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu selama 2 x 30 hari. Apabila objek pemeriksaan dalam jangka waktu tersebut tidak menindaklanjuti laporan, menurut aturannya hal ini sudah bisa dilimpahkan kepada Aparat Penegak Hukum. Namun hal ini tidak pernah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, mengingat fungsi pembinaan dari Inspektorat tersebut.	peningkatan kompetensi APIP dengan harapan semakin berkurangnya temuan dan berkurangnya objek pemeriksaan (obrik) yang berhadapan dengan hukum.
3.	Dikarenakan cakupan pemeriksaan cukup banyak dan luas maka dengan ini kami sarankan kepada Pemerintah untuk dapat menambahkan personal dan anggaran.	<u>Personal :</u> Berdasarkan surat BPKP RI Noor S-439/K/JF/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Rekomendasi Kebutuhan JFA pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, Inspektorat membutuhkan auditor sebanyak 67 (enam puluh tujuh) yang terdiri dari : • Auditor Utama sebanyak 2 (dua) orang. • Auditor Madya sebanyak 5 (lima) orang. • Auditor Muda sebanyak 15 (lima belas) orang. • Auditor Pertama sebanyak 45 (empat puluh lima) orang. Sedangkan auditor yang tersedia saat ini baru berjumlah 16 (enam belas) orang, jadi masih terdapat kekurangan auditor sejumlah 51 (lima puluh satu) orang.	<u>Personal :</u> Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, dengan mengusulkan Formasi CPNSD tahun 2019 dan 2021 sesuai dengan kebutuhan.



	Sementara untuk Fungsional P2UPD Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan membutuhkan APIP sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang yang terdiri dari: • P2UPD Madya sebanyak 3 (tiga) orang. • P2UPD Muda sebanyak 9 (sembilan) orang. • dan P2UPD Pertama sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang. Sedangkan P2UPD yang tersedia saat ini hanya 6 (enam) orang, jadi masih terdapat kekurangan P2UPD sejumlah 33 (tiga puluh tiga) orang lagi. Anggaran : Menurut Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, menyatakan bahwa bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang APBD-nya diatas Rp1.000.000.000.000,00 (Satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) anggaran pengawasannya sekurang-kurangnya 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Sedangkan untuk tahun 2020 ini, APBD Kabupaten Pesisir Selatan sejumlah Rp1.593.358.855.542,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh tiga milyar, tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah). Anggaran Inspektorat sebesar Rp2.390.424.244,00 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah). Ini setara dengan 0,15% dari Total APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Ini masih jauh dari yang diamanatkan oleh Permendagri No	Anggaran : Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat Rencana Kerja Tahun 2020 menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019.
--	--	--



		33 Tahun 2019 yang sebesar 0,75%.	
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di minta untuk memperluas cakupan dalam pelayanan administrasi kependudukan terutama dalam penerbitan KTP elektronik dan Kartu Keluarga serta update data kependudukan.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil langsung menindaklanjuti Rekomendasi dari DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dengan meluncurkan inovasi Salam Sapa ke Pintu Rumah yaitu singkatan dari Sistem Adminitrasi Pelayanan Masyarakat Sampai ke Pintu – Pintu Rumah. Perangkat/Petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan langsung mendata penduduk yang belum memiliki KTP elektronik, dan Kartu Keluarga. Setelah itu mencetak dokumen tersebut dan mengantarkannya langsung ke rumah – rumah masyarakat. Kegiatan ini dianggarkan pada Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Satker dengan besar anggaran Rp. 1.247.005.500,- (Satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ribu lima ratus rupiah)	Cakupan Kepemilikan KTP elektronik, Kartu Keluarga dan Updating data kependudukan
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA			
No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	Rumah makan dan restoran dikawasan wisata agar membuat daftar harga yang bisa diketahui secara langsung oleh pengunjung agar ada transparansi dan menghindari keraguan pengunjung dari penipuan harga.	Setiap Rumah makan yang berada di lokasi objek wisata telah disurati agar menyediakan daftar harga makanan sehingga pengunjung menjadi tau dan bisa memperkirakan budgetnya	Tersedianya daftar harga makanan di setiap rumah makan dikawasan objek wisata Kabupaten Pesisir Selatan.



2.	Dana Pemeliharaan tempat wisata agar ditingkatkan, contoh dalam tinjauan lapangan Komisi IV ke Mandeh ditemukan objek wisata yang tidak terawat dengan baik. Mushalla di sungai gemuruh yang tidak ada petugas kebersihan, tangga besi tempat cliff jumping di sironjong ketek sudah berkarat, sampah-sampah disepanjang jalan Mandeh yang berserakan.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga telah menganggarkan biaya pemeliharaan objek wisata pada program Pengembangan Destinasi Pariwisata. Pada kegiatan Pengelolaan Kawasan Objek Wisata. Dengan anggaran sebesar : Rp. Sudah ditambahkan petugas pada objek wisata Sungai Gemuruh.	Terpelihara/terawat nya objek wisata dikabupaten Pesisir Selatan
3.	Rest area yang berada di Sungai gemuruh Mandeh bangunannya sudah cukup baik tetapi tidak terawat maka perlu menjadi perhatian OPD terkait. Sehingga bangunan tersebut tidak sia-sia.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga telah menambahkan petugas pada objek wisata Sungai Gemuruh.	Terawatnya bangunan yang berada di rest area Sungai gemuruh Mandeh.

KECAMATAN SUTERA

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	Perlu kiranya meningkatkan kapasitas SDM aparatur kecamatan yang pada gilirannya akan didapatkan aparatur yang profesional dalam memberikana pelayanan kepada masyarakat.	Kecamatan Ranah Pesisir telah melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur. Kegiatan ini dianggarkan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp.52.950.000	Aparatur yang profesional
2	Anggaran kecamatan masih kurang, kami sarankan tahun depan ditambah sehingga tugas sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan social kemasyarakatan	Kecamatan Sutera telah melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah nagari. Kegiatan ini anggarakan pada Program Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan	Pembinaan Perangkat Nagari



*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan
Tahun 2020*

	bisa berjalan maksimal dalam pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari	Keuangan Desa/Nagari sebesar Rp.5.087.500	
3	Banyak rumah masyarakat baik yang lama atau yang baru belum mempunyai IMB. Disarankan IMB diperdesaan didelegasikan oleh Bupati kepada camat, tentunya dengan melatih kasi Ekobang yang ada di Kecamatan	Kegiatan pelayanan IMB di Kecamatan Sutera dilaksanakan oleh Kasi Pelayanan dengan Program Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN dengan anggaran sebesar Rp. 0	Pelayanan Permohonan IMB
4	Nagari merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fakta dilapangan, bila terjadi pergantian wali nagari maka perangkat nagari juga diganti oleh walinagari yang baru. Padahal untuk menjadi aparatur pemerintahan nagari yang handal memerlukan proses pembinaan dana yang besar. Untuk itu agar hal ini menjadi perhatian secara serius dan sungguh-sungguh.	Kecamatan Sutera dalam kegiatan Rakor Wali Nagari, telah dilaksanakan pembinaan dan penjelasan terhadap wali nagari. Kegiatan ini dianggarkan pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.12.700.000	
5	Masih banyak ditemukan pemerintahan nagari dalam menyusun APB Nagari tidak sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang ada, untuk itu diminta perangkat daerah terkait untuk dapat melakukan pembinaan	Kecamatan Sutera telah membentuk Tim Evaluasi dan Monitoring tentang APBNagari yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Ranah Pesisir. Kegiatan ini dianggarkan pada Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari sebesar Rp.5.087.500	Tersusunnya APBNagari
KECAMATAN RANAH PESISIR			



No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	Perlu kiranya meningkatkan kapasitas SDM aparatur kecamatan yang pada gilirannya akan didapatkan aparatur yang professional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.	Kecamatan Ranah Pesisir telah melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur. Kegiatan ini dianggarkan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp.240.466.326	Aparatur yang profesional
2	Anggaran kecamatan masih kurang, kami sarankan tahun depan ditambah sehingga tugas sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan social kemasyarakatan bisa berjalan maksimal dalam pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari	Kecamatan Ranah Pesisir telah melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah nagari. Kegiatan ini dianggarkan pada Program Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari sebesar Rp.17.880.000	Pembinaan Perangkat Nagari
3	Banyak rumah masyarakat baik yang lama atau yang baru belum mempunyai IMB. Disarankan IMB diperdesaan didelegasikan oleh Bupati kepada camat, tentunya dengan melatih kasi Ekobang yang ada di Kecamatan	Kegiatan pelayanan IMB di Kecamatan Ranah Pesisir dilaksanakan oleh Kasi Pelayanan dengan Program Fasilitas Penyelenggaraan PATEN dengan anggaran sebesar Rp. 13.000.000	Pelayanan Permohonan IMB
4	Nagari merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fakta dilapangan, bila terjadi pergantian wali nagari maka perangkat nagari juga diganti oleh walinagari yang baru. Padahal untuk menjadi aparatur pemerintahan nagari yang handal memerlukan proses	Kecamatan Ranah Pesisir dalam kegiatan Rakor Wali Nagari, telah dilaksanakan pembinaan dan penjelasan terhadap wali nagari. Kegiatan ini dianggarkan pada Program Pemantapan Otonomi Daerah dengan anggaran sebesar Rp.6.000.000	



	pembinaan dana yang besar. Untuk itu agar hal ini menjadi perhatian secara serius dan sungguh-sungguh.		
5	Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan tingkat nagari masih banyak ditemukan konflik antara wali nagari dengan bamus, untuk itu kami minta pada dinas pemberdayaan nagari agar membuat regulasi yang jelas serta pembinaan terhadap lembaga tersebut.		
6	Masih banyak ditemukan pemerintahan nagari dalam menyusun APB Nagari tidak sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang ada, untuk itu diminta perangkat daerah terkait untuk dapat melakukan pembinaan	Kecamatan ranah pesisir telah membentuk Tim Evaluasi dan Monitoring tentang APBNagari yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Ranah Pesisir. Kegiatan ini dianggarkan pada Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari sebesar Rp.17.880.000	Tersusunnya APBNagari
KECAMATAN PANCUNG SOAL			
No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	Perlu kiranya meningkatkan kapasitas SDM apaatur kecamatan yang pada gilirannya akan didapatkan aparatur yang profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Harapan seperti itu namun belum bisa dilaksanakan karena terbatasnya anggaran	



*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan
Tahun 2020*

2	Anggaran Kecamatan masih kurang, kami sarankan tahun depan agar ditambah sehingga tugas sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan bisa berjalan maksimal dalam pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Nagari.	Pengejuan porporasi penganggaran kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian alokasi pendanaan kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, namun belum terlaksana	
3	Banyak rumah masyarakat baik yang lama atau yang baru belum mempunyai IMB. Kami sarankan IMB di perdesaan di delegasikan oleh Bupati kepada Camat, tentunya dengan melatih Kasi. Pemberdayaan yang ada di Kecamatan.	Harapan seperti itu kami sudah coba usulkan namun belum ada tindak lanjut.	Adanya peningkatan kepaahaman masyarakat terhadap pengurusan IMB rumah bangunan sederhana
4	Nagari merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintah. Fakta dilapangan, bila terjadi pergantian wali nagari maka perangkat nagari juga diganti oleh walinagari yang baru. Padahal untuk menjadi aparatur pemerintahan nagari yang handal memerlukan proses	Dalam hal perangkat kita sudah menyesuaikan dengan peraturan yang ada dimana dalam setiap pengangkatan dan pemberhentian perangkat harus mendapat rekomendasi Camat sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari pada pasal 53 ayat 1 dan kami telah melaksanakan hal tersebut.	Terwujudnya pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari sesuai dengan peraturan yang ada



	pembinaan dan dana yang besar. Untuk itu kami minta agar hal ini menjadi perhatian secara serius dan sungguh-sungguh.		
5	Masih banyak ditemukan pemerintah nagari dalam menyusun APB nagari tidak sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang ada. Untuk itu diminta perangkat daerah terkait untuk dapat melakukan pembinaan.	Untuk Kecamatan Pancung Soal sudah disesuaikan dengan peraturan yang ada, dengan cara penelaahan yang komprehensif oleh tim evaluasi APB Nagari tingkat Kecamatan	

KECAMATAN SILAUT

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1.	Perlu kiranya meningkatkan kapasitas SDM apaatur kecamatan yang pada gilirannya akan didapatkan aparatur yang profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.	Harapan seperti itu namun belum bisa dilaksanakan karena terbatasnya anggaran	-
2.	Anggaran Kecamatan masih kurang, kami sarankan tahun depan agar ditambah sehingga tugas sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan bisa berjalan maksimal dalam pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Nagari.	Pengajuan porporsi penganggaran kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian alokasi pendanaan kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, namun belum terlaksana.	-



*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan
Tahun 2020*

3.	Banyak rumah masyarakat baik yang lama atau yang baru belum mempunyai IMB. Kami sarankan IMB di perdesaan di delegasikan oleh Bupati kepada Camat, tentunya dengan melatih Kasi. Ekobang yang ada di Kecamatan.	Harapan seperti itu kami sudah coba usulkan namun belum ada tindak lanjut.	Adanya peningkatan kepaahaman masyarakat terhadap pengurusan IMB rumah bangunan sederhana
4.	Nagari merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintah. Fakta dilapangan, bila terjadi pergantian wali nagari maka perangkat nagari juga diganti oleh walinagari yang baru. Padahal untuk menjadi aparatur pemerintahan nagari yang handal memerlukan proses pembinaan dan dana yang besar. Untuk itu kami minta agar hal ini menjadi perhatian secara serius dan sungguh-sungguh.	Dalam hal perangkat kita sudah menyesuaikan dengan peraturan yang ada dimana dalam setiap pengangkatan dan pemberhentian perangkat harus mendapat rekomendasi Camat sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari pada pasal 53 ayat 1 dan kami telah melaksanakan hal tersebut.	Terwujudnya pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari sesuai dengan peraturan yang ada.
5.	Masih banyak ditemukan pemerintah nagari dalam menyusun APB nagari tidak sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang ada. Untuk itu diminta perangkat daerah terkait untuk dapat melakukan pembinaan.	Untuk Kecamatan Silaut sudah disesuaikan dengan peraturan yang ada, dengan cara penelaahan yang komprehensif oleh tim evaluasi APB Nagari tingkat Kecamatan.	-



BAB 4

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

LKPj

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Bupati Pesisir Selatan
Tahun 2020



BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

A. Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi:

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dasar hukum pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian adalah Peraturan Menteri Perdagangan Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan yang didanai melalui dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Pelaksanaan tugas pembantuan pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Pesisir Selatan TA 2020 dilaksanakan dalam bentuk program PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lakitan.
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Adapun target pelaksanaan tugas pembantuan adalah terlaksananya pembangunan Pasar Rakyat Lakitan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.570.425.462 (86%) dari nilai anggaran dengan realisasi fisik 100%.

Tabel 4.1

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

NO .	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Kementerian Perdagangan RI	Peraturan Menteri Perdagangan Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020	1. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri 2. Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Dan Kapasitas Logistik 3. Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lakitan	Kecamatan Lengayang I	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	Rp.3.000.000.0 00	Rp. 2.570.425.462	86 %	1 Unit Pasar Lakitan





B. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2020 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.010.930.000,00 dengan realisasi Rp. 1.972.981.000,00 (98,11%)

1. Target Kinerja

- a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
 - tersedianya benih padi inbrida seluas 1944 Ha
 - tersedianya benih jagung seluas 1925 Ha
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
 - terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi tersier seluas 600 Ha
 - terlaksananya pembangunan irigasi perpompaan besar wilayah barat sebanyak 3 unit
 - Fasiltasi pembiayaan pertanian
 - 1) Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP) selama 1 tahun
 - 2) Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS) selama 1 tahun

2. Realisasi

- a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
 - tersalurnya benih padi inbrida sebanyak 48.600 Kg pada kelompok tani se Kab. Pessel
 - tersalurnya benih jagung sebanyak 28.875 Kg pada kelompok tani se Kab. Pessel
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
 - terehabnya jaringan irigasi tersier seluas 600 Ha di Kab. Pessel
 - terbangunnya irigasi perpompaan besar wilayah barat sebanyak 3 unit di Kab. Pessel
 - Fasiltasi pembiayaan pertanian
 - 1) Terfasilitasinya kegiatan Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP) selama 1 tahun
 - 2) Terfasilitasinya kegiatan Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS) selama 1 tahun

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan Provinsi, dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Provinsi Tahun 2020

NO	BIDANG URUS	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM	KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Bidang Pertanian	Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan No: 218/HK.310/12/2019 Tentang: Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan TA. 2020	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Pesisir Selatan	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	717.380.000	682.016.000	95,07	1. 48.600 Kg benih padi inbrida 2. 28.875 Kg benih jagung
2.	Bidang Pertanian	1. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No: 40/Kpts/RC.210/B/12/2019 Tentang: Petunjuk Teknis Pengembangan Irigasi Perpompaaan TA. 2020 2. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No: 42/Kpts/RC.210/B/12/2019 Tentang: Petunjuk	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Pesisir Selatan	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	1.293.550.000	1.290.965.000	99,80	3 Unit 600 Ha



		Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi TA. 2020							
		3. Keputusan Menteri Pertanian RI No: 02/Kpts/SR.230/B/01/2020 Tentang Pedoman Premi Bantuan Asuransi Usahatani Padi							Terfasilitasi selama 1 tahun
		4. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No: 40/Kpts/RC.210/B/12/2019 Tentang: Petunjuk Teknis Pengembangan Irigasi Perpompaan TA. 2020 Kegiatan Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS) TA. 2020							Terfasilitasi selama 1 tahun
		Total				2.010.930.000	1.972.981.000		

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan 2020





3. Permasalahan dan Kendala

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020, dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

- a) Seringnya dilakukan revisi DIPA dan POK sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah dibuat; dan
- b) Standar biaya yang terdapat dalam POK tidak relevan dengan standar harga barang di Pesisir Selatan khususnya dan Sumatera Barat umumnya, seperti harga benih padi yang hanya Rp.10.000,00 per kg sedangkan harga benih di Sumatera Barat antara Rp.11.500,00 s/d 12.500,00 per kg.

4. Saran dan Tindak Lanjut

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- a) Jika revisi DIPA dan POK telah disahkan, sesegera mungkin didistribusikan ke Kabupaten/Kota; dan
- b) Disarankan kepada Kementerian Pertanian untuk menetapkan harga benih sesuai dengan harga di Sumatera Barat.



BAB 5

PENUTUP

LKPj

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Bupati Pesisir Selatan
Tahun 2020



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD. DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan demikian maka Kepala Daerah dan DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan daerah, sedangkan DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah maka Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.

Secara ringkas, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan akhir tahun anggaran 2020, berupaya mendeskripsikan manajemen pembangunan kabupaten yang dikelola, dimulai dari penetapan rencana, implementasi, pengawasan dan pengendalian, sampai pada capaian output, hasil, manfaat dan dampak penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam satu tahun terakhir yakni tahun 2020.

Tentunya apa yang telah dicapai maupun belum tercapai di tahun 2020 menjadi catatan dan catatan agar yang menjadi target dan sasaran pembangunan dapat terus ditingkatkan lebih baik lagi. Evaluasi menjadi kunci utama yang dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan di masa mendatang. Memang tak dapat dipungkiri, dengan keterbatasan sumber daya yang ada, belum seluruh harapan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat dapat diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten pesisir Selatan terus mengharapkan dukungan, dorongan dan doa restu dari segenap komponen untuk terus memberikan energi positif demi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan sehingga pembangunan yang dicapai sesuai dengan yang kita cita-citakan bersama.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tahun 2020 dapat berjalan baik dan lancar walaupun terdapat beberapa permasalahan



seperti Pandemi Covid-19. Hal ini tentunya tidak terlepas dari izin dan ridho Allah SWT serta dukungan yang diberikan semua pihak, khususnya DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, jajaran Forkopimda, Ormas, lembaga profesi, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, insan pers, dan seluruh lapisan masyarakat Pesisir Selatan. Untuk itu, rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT dan ucapan terima kasih pada seluruh elemen-elemen Kabupaten.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 ini disusun dan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sebagai gambaran tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan. Semoga LKPJ Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 ini dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Aamiin Ya Rabbal Alamin

Terima kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatulallah Wabarakatuh



PUNCAK PAKTI
mandor

**BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

tapem@pesisirselatankab.go.id